



LAPORAN KINERJA | 2017

INSTANSI PEMERINTAH |



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banjar Tahun 2017 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

LKjIP Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen laporan yang menggambarkan capaian yang diperoleh dalam menjalankan program kegiatan pokok sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan dan telah ditetapkan melalui dokumen RPJMD 2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

Sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar telah menjalankan serangkaian program dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan pada tingkat regional dan nasional secara keseluruhan.

LKjIP Kabupaten Banjar Tahun 2017 ini merupakan laporan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Terdapat berbagai kemajuan yang telah dicapai sebagai hasil dari proses pembangunan yang telah dilaksanakan, namun juga tidak seluruh harapan yang diinginkan melalui target pembangunan daerah dapat dicapai.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banjar agar lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini akan menjadi masukan penilaian kinerja pembangunan Kabupaten Banjar bagi Pemerintah di tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Martapura, Maret 2018

Bupati Banjar,

H. KHALILURRAHMAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Aspek Strategis Kabupaten Banjar, Permasalahan Utama yang dihadapi dan Prioritas Daerah Kabupaten Banjar	3
1.4.1. Kondisi Geografis Daerah	3
1.4.2. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banjar	9
1.4.3. Rencana Strategis	13
1.4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banjar.....	18
1.4.5. Masalah Utama yang dihadapi Kabupaten Banjar.....	25
1.4.6. Prioritas Pembangunan Tahun 2017	30
1.5. Sistematisasi Penyusunan LkjlP Kabupaten Banjar	33
BAB 2	35
PERENCANAAN KINERJA	35
2.1. Perjanjian Kinerja Pembangunan Tahun 2017	35
2.2. Rencana Anggaran Masing-masing Sasaran Tahun 2017.....	41
BAB 3	45
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR	45
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2017	46
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	52
3.2.1. Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama.....	52
3.2.2. Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Quran Peserta Didik	62
3.2.3. Berkurangnya Pelanggaran Perda Kearifan Lokal.....	65
3.2.4. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah.....	67
3.2.5. Meningkatnya Budaya Baca Pelajar Dan Masyarakat.....	84



3.2.6.	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Seni Dan Budaya	87
3.2.7.	Menurunnya Kematian Ibu Melahirkan Dan Kematian Bayi	91
3.2.8.	Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk Dan Gizi Kurang	103
3.2.9.	Terkendalnya Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	106
3.2.10.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Di RSUD.....	110
3.2.11.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	113
3.2.12.	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial	118
3.2.13.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	121
3.2.14.	Meningkatnya Mitigasi Bencana	125
3.2.15.	Meningkatnya Kualitas Organisasi Kepemudaan dan Jiwa Kewirausahaan Pemuda.....	131
3.2.16.	Meningkatnya Perilaku Berolah Raga Di Masyarakat.....	135
3.2.17.	Meningkatnya Produksi Dan Produktifitas Pertanian Dan Perikanan	138
3.2.18.	Meningkatnya Kualitas Hasil Industri Pengolahan Perkebunan Dan Perikanan.....	157
3.2.19.	Meningkatnya Ketersediaan Dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	163
3.2.20.	Meningkatnya Investasi Daerah	172
3.2.21.	Meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah.....	174
3.2.22.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	179
3.2.23.	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Masyarakat.....	189
3.2.24.	Mengembangkan Kepariwisata Daerah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	205
3.2.25.	Meningkatnya Perencanaan, Kesesuaian Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	212
3.2.26.	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Yang Berkualitas Dan Terintegrasi	215
3.2.27.	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi Dan Informatika	221
3.2.28.	Meningkatnya Infrastuktur Perhubungan	224



3.2.29. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Permukiman Dan Perumahan Yang Layak	230
3.2.30. Meningkatnya Pengelolaan Air Minum Secara Optimal.....	234
3.2.31. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Profesional Dan Handal	237
3.2.32. Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas	253
3.2.33. Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efesien dan Efektif.....	301
3.2.34. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	308
3.3. Realisasi Anggaran	315
BAB 4	327
PENUTUP	327
LAMPIRAN	332



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan	4
Tabel 1. 2. Penduduk Kabupaten Banjar Per Kecamatan Tahun 2012-2016	6
Tabel 1. 3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar, Tahun 2016	7
Tabel 1. 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Dinas/Instansi dan Jenis Kelamin.....	12
Tabel 1. 5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan dan Jenis Jabatan.....	13
Tabel 1. 6. Misi, Tujuan dan Sasaran	16
Tabel 1. 7. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar	18
Tabel 1. 8. Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2017.....	31
Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Kabupaten Banjar Tahun 2017	35
Tabel 2. 2. Rencana Anggaran Per Sasaran Tahun 2017	41
Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja	46
Tabel 3. 2. Pencapaian IKU Bupati Tahun 2017	46
Tabel 3. 3. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	53
Tabel 3. 4. Capaian Indikator Penurunan Jumlah Kasus Kriminal Tahun 2017.....	57
Tabel 3. 5. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Dana BAZ yang tersalurkan Tahun 2017	58
Tabel 3. 6. Penerimaan BAZ Tahun 2017	59
Tabel 3. 7. Penyaluran BAZ.....	60
Tabel 3. 8. Realisasi dan Capaian Sasaran Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an Peserta Didik	62
Tabel 3. 9. Realisasi dan Capaian Sasaran Berkurangnya Pelanggaran PERDA Kearifan Lokal.....	65
Tabel 3. 10. Tingkat penyelesaian kasus pelanggaran perda berkearifan lokal.....	66
Tabel 3. 11. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Angka Patisipasi Sekolah	68
Tabel 3. 12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Realisasi APM SD/MI/SDLB antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten	69
Tabel 3. 13. Perbandingan realisasi dan capaian realisasi APM SMP/MTs/SMPLB antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten	70



Tabel 3. 14. Perbandingan realisasi dan capaian APK SD/MI/SDLB antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten	71
Tabel 3. 15. Perbandingan realisasi dan capaian APK SMP/MTs/SMPLB antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten	72
Tabel 3. 16. Perbandingan realisasi dan capaian angka partisipasi kasar PAUD antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten	80
Tabel 3. 17. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat Kab. Banjar Tahun 2017	85
Tabel 3. 18. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	88
Tabel 3. 19. Tugas dan Jenis Layanan Satgas Desa	92
Tabel 3. 20. Realisasi dan Capaian Sasaran Menurunnya Kematian Ibu Melahirkan dan Kematian Bayi	93
Tabel 3. 21. Jumlah Kelahiran Hidup dan Kasus Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2011-2017	95
Tabel 3. 22. Jumlah Kelahiran Hidup dan Kasus Kematian Bayi	97
Tabel 3. 23. Perbandingan data angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten	99
Tabel 3. 24. Realisasi dan Capaian Sasaran Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	103
Tabel 3. 25. Perbandingan Realisasi Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Terhadap Provinsi	104
Tabel 3. 26. Realisasi dan Capaian terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular	107
Tabel 3. 27. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan di RSUD	110
Tabel 3. 28. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	113
Tabel 3. 29. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial	118
Tabel 3. 30. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	121
Tabel 3. 31. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana	125
Tabel 3. 32. Bencana yang Terjadi di Tahun 2017	126
Tabel 3. 33. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas Organisasi Kepemudaan dan Jiwa Kewirausahaan Pemuda	132
Tabel 3. 34. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	135
Tabel 3. 35. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan	138



Tabel 3. 36. Realisasi Indikator Produksi Padi Sawah Tahun 2013 s/d 2017	140
Tabel 3. 37. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan Kab. Banjar Tahun 2017.	157
Tabel 3. 38. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan pola Konsumsi Pangan Masyarakat.....	163
Tabel 3. 39. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah	172
Tabel 3. 40. Realisasi Dan Capaian Sasaran Meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah Tahun 2017	175
Tabel 3. 41. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017.	179
Tabel 3. 42. Perbandingan Capaian Kinerja Sampah Terolah Dengan Target RPJMD	180
Tabel 3. 43. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Dengan Target RPJMD	183
Tabel 3. 44. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Masyarakat Tahun 2017	189
Tabel 3. 45. Ekspor Karet Kabupaten Banjar Tahun 2012 - 2016	198
Tabel 3. 46. Realisasi dan Capaian Sasaran Mengembangkan Kepariwisata Daerah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2017	206
Tabel 3. 47. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Perencanaan, Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Banjar Tahun 2017	213
Tabel 3. 48. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi Kabupaten Banjar Tahun 2017	216
Tabel 3. 49. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar Tahun 2017.....	222
Tabel 3. 50. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2017.....	224
Tabel 3. 51. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perumahan yang layak Kabupaten Banjar Tahun 2017	231
Tabel 3. 52. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Air Minum Secara Optimal Kabupaten Banjar Tahun 2017.....	234
Tabel 3. 53. Rencana dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Profesional Dan Handal Tahun 2017	238



Tabel 3. 54. Realisasi Dan Capaian Sasaran Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas Tahun 2017	253
Tabel 3. 55. Daftar SKPD yang arsipnya sudah didata dan ditata tahun 2016 - 2017	270
Tabel 3. 56. Daftar Kasus yang terjadi dan terselesaikan pada Tahun 2017	287
Tabel 3. 57. Capaian dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efisien dan Efektif	301
Tabel 3. 58. Laporan SPM Kab.Banjar Tahun 2017	302
Tabel 3. 59. Perangkat Daerah berdasarkan Analisi Beban Kerja	305
Tabel 3. 60. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kab. Banjar Tahun 2017	309
Tabel 3. 61. Rekapitulasi Presentase Kenaikan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2016 dan 2017	312
Tabel 3. 62. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	316
Tabel 3. 63. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	324



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Piramida Penduduk Kabupaten Banjar, Tahun 2016	8
Gambar 3. 1. Tingkat Capaian IKU Tahun 2017	52
Gambar 3. 2. AKI Kabupaten Banjar Tahun 2012-2017	94
Gambar 3. 3. Kegiatan Penyuluhan di Kelas Ibu Hamil Oleh Bidan Desa	98
Gambar 3. 4. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Tingkat Kecamatan.....	101
Gambar 3. 5. Acara Sosialisasi Satgas Desa	104
Gambar 3. 6. Pelayanan di Posbindu PTM.....	108
Gambar 3. 7.	115
Gambar 3. 8. Kegiatan Bedah Rumah	121
Gambar 3. 9. Kegiatan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	121
Gambar 3. 10. Koordinasi dan Kerjasama dengan Pihak Lapas Anak	123
Gambar 3. 11. Komitmen SKPD Terkait Dalam Pembentukan Forum Anak.....	124
Gambar 3. 12. Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan.....	133
Gambar 3. 13. Pendidikan dan Pelatihan Dasar kepemimpinan	133
Gambar 3. 14. Lapangan Olahraga di Desa	136
Gambar 3. 15. Lapangan Olahraga di Desa	137
Gambar 3. 16. Event Gowes Pesona Nusantara Etape Martapura	137
Gambar 3. 17. Pengolahan Hasil Perkebunan	158
Gambar 3. 18. Bimbingan Teknis karet Sit Asap	159
Gambar 3. 19. Tempat Penampungan Hasil Bokar Bantuan dari APBD Provinsi	161
Gambar 3. 20. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD.....	192
Gambar 3. 21. Rapat Tim monitoring, evaluasi dan kredit program	193
Gambar 3. 22. Kegiatan memfasilitasi kemitraan usaha bagi UMKM	195
Gambar 3. 23. Monitoring Bokor – SIR	199
Gambar 3. 24. Bimtek Mutu Bahan Olah Karet	199
Gambar 3. 25. Perjadin Bimtek Mutu Olahan Karet	200
Gambar 3. 26. Konsultasi teknis peningkatan peluang pasar karet	200
Gambar 3. 27. Pelatihan Evaluasi Perkembangan Desa.....	203
Gambar 3. 28. Penilaian lomba desa sehat tahun 2017	203
Gambar 3. 29. Pameran Pembangunan tahun 2017	204
Gambar 3. 30. Pemasangan Baliho Promosi Wisata	208
Gambar 3. 31. Sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat	209
Gambar 3. 32. Pendataan Pariwisata di Kabupaten Banjar	210

Gambar 3. 33. Pameran Batam Investment, Tourism and Trade Expo 2017	211
Gambar 3. 34. Pameran Festival Budaya pasar Terapung	211
Gambar 3. 35. Peningkatan Ruas Jalan : Kampung Melayu - Benua Anyar.....	218
Gambar 3. 36. Peningkatan Ruas Jalan : Bumi Rata - Sei. Raya	218
Gambar 3. 37. Rekonstruksi Jembatan Kampung Melayu Tengah Kecamatan Martapura Timur	220
Gambar 3. 38. Pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.....	223
Gambar 3. 39. Tempat Antrian Mobil Terminal Martapura	226
Gambar 3. 40. Tempat Antrian Mobil Terminal Martapura	226
Gambar 3. 41. Tambat Kapal Kec. Aranio Desa Tiwingan Lama	227
Gambar 3. 42. Tambat Kapal kecamatan Sungai Tabuk	227
Gambar 3. 43. Tambat Kapal Depan Kantor Camat Aluh-Aluh	228
Gambar 3. 44. Alat Uji Timbangan Mobil	229
Gambar 3. 45. Alat Uji Rem.....	230
Gambar 3. 46. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	232
Gambar 3. 47. Pembangunan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK) Perumahan (Progress 0 %)	233
Gambar 3. 48. Pembangunan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK) Perumahan (Progress 100 %)	233
Gambar 3. 49. Pengembangan Jaringan SPAM Desa Babirik Kec.Beruntung Baru.....	236
Gambar 3. 50. Pengembangan jaringan SPAM Desa Jati Negara Kec. Pengaron (Bangunan Pembawa Air Bersih)	236
Gambar 3. 51. Pembinaan Ke Kecamatan.....	240
Gambar 3. 52. Sosialisasi dan Bedah Kasus	242
Gambar 3. 53. Kegiatan Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan	244
Gambar 3. 54. Kegiatan Talent Pool bagi ASN lingkup Kabupaten Banjar.....	244
Gambar 3. 55. Diklat PIM II	247
Gambar 3. 56. Diklat Camat Pola 300 JP 2017 di Bandung	247
Gambar 3. 57. Diklat Prajabatan golongan II Tahun 2017	248
Gambar 3. 58. Penyerahan Bantuan Tunjangan Belajar.....	249
Gambar 3. 59. Kegiatan Bimtek/Workshop Analisis Kebutuhan Diklat.....	249
Gambar 3. 60. Kegiatan Seminar Analisis Kebutuhan Diklat.....	250
Gambar 3. 61. Pelayanan Keliling Akta Kelahiran	265
Gambar 3. 62. Sosialisasi Pencatatan Sipil	265
Gambar 3. 63. Proses Perekaman Langsung ke Beberapa Kecamatan dan Rumah Sakit di Kab. Banjar	267



Gambar 3. 64. Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Pendataan Dan Penataan Arsip Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar	271
Gambar 3. 65. Penduplikasian Dokumen/Arsip berkaitan dengan Penelitian Arkeologi di Kabupaten Banjar Balai Arkeologi Banjarmasin wilayah kerja Kalimantan, di Banjarbaru	272
Gambar 3. 66. Penduplikasian Dokumen/Arsip Kabupaten Banjar yang ada di Kecamatan Beruntung Baru	273
Gambar 3. 67. Sosialisasi Tentang Kearsipan.....	273



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Teknis penyusunan pelaporan kinerja diatur lebih lanjut melalui permenpan nomor 53 tahun 2014.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir..

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran yang juga merupakan indikator kinerja utama kabupaten, dalam tataran pelaksanaannya indikator tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing SKPD sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi yang diemban.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Banjar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Laporan LKjIP tahun 2017 yang disusun saat ini merupakan laporan pelaksanaan tahun ke dua dari periode RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021, nantinya akan digambarkan sejauh mana pencapaian indikator-indikator dari sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banjar, dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja kabupaten Banjar dalam mencapai tujuan dan sasaran

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banjar adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
 5. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 05);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);

1.4. Aspek Strategis Kabupaten Banjar, Permasalahan Utama yang dihadapi dan Prioritas Daerah Kabupaten Banjar

1.4.1. Kondisi Geografis Daerah

1.4.1.1. Letak Wilayah

Secara astronomi, Kabupaten Banjar terletak antara $2^{\circ} 49' 55''$ - $3^{\circ} 43' 38''$ pada garis Lintang Selatan dan $114^{\circ} 30' 20''$ hingga $115^{\circ} 35' 37''$ pada Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Banjar berada pada posisi yang strategis, yaitu berada di perlintasan antara kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Secara administratif, Kabupaten Banjar berbatasan dengan :

- a. Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah Utara,
- b. Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah Timur,
- c. Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di sebelah Selatan, dan;
- d. Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah Barat.

1.4.1.2. Luas Wilayah

Kabupaten Banjar memiliki luas sebesar 4.668,50 Km² yang merupakan daerah dengan wilayah terluas ke empat setelah Kabupaten Kotabaru, Banjar dan Tabalong dan dengan jumlah



kecamatan (19 kecamatan) serta desa/kelurahan terbanyak (277 desa dan 13 kelurahan). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (24,98 %) dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Martapura Timur, yaitu 29,99 Km² (0,64 %). Lebih rinci luas kecamatan di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1. Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
1.	Aluh-Aluh	82,48	1,77
2.	Beruntung Baru	61,42	1,32
3.	Gambut	129,30	2,77
4.	Kertak Hanyar	45,83	0,98
5.	Sungai Tabuk	147,30	3,16
6.	Martapura	42,03	0,90
7.	Martapura Timur	29,99	0,64
8.	Martapura Barat	149,38	3,20
9.	Astambul	216,50	4,64
10.	Karang Intan	215,35	4,61
11.	Aranio	1.166,35	24,98
12.	Sungai Pinang	458,65	9,82
13.	Paramasan	560,85	12,01
14.	Pengaron	433,25	9,28
15.	Sambung Makmur	134,65	2,88
16.	Mataraman	148,40	3,18
17.	Simpang Empat	243,34	5,21
18.	Telaga Bauntung	158,00	3,38
19.	Aluh-Aluh	82,48	1,77
	Jumlah	4.668,50	100,00

Sumber : Statistik Pembangunan kabupaten Banjar 2015

1.4.1.3. Topografi

Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62%) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93 persen bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir. Sisanya 5,39 persen bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, pasir berdebu. Kedalaman tanah yang efektif bagi akar untuk leluasa mengambil air bagi tumbuhnya tanaman, di wilayah ini pada umumnya (66,45%) lebih dari 90 cm, sementara kedalaman 60-90 cm meliputi 18,72 persen, dan 30-60 hanya 14,83 persen.

Menurut peta tanah eksplorasi tahun 1981 skala 1:1.000.000 dari Lembaga Penelitian Bogor di wilayah dijumpai tanah; Tanah organosol, gleihumus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran yang meliputi 28,57 persen dari luas wilayah. Tanah Aluvial dengan bahan induk lahan aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72 persen. Tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29 persen. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi intrusi meliputi 24,84 persen. Tanah kompleks podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57 persen.

Seperti halnya daerah lain yang termasuk dalam wilayah Indonesia, maka di Kabupaten Banjar juga hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik setelah melewati beberapa lautan, dan pada bulan bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober - November.

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Banjar tahun 2016 berkisar antara 22,60C – 34,90C, dengan suhu tertinggi 35,80C terjadi di bulan Januari 2016 dan suhu terendah 21,80C terjadi pada bulan Juli 2016. Sebagai daerah tropis, kelembaban udara di Kabupaten Banjar relatif tinggi dengan rata-rata 86 persen (berkisar 79% sampai 92%). Kelembaban maksimum terjadi pada Bulan Februari, sedangkan kelembaban minimum terjadi di Bulan Agustus.

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan selama tahun 2016 tercatat mencapai 228,10 mm, dengan jumlah terendah terjadi pada bulan Agustus (94,8 mm) dan tertinggi pada bulan Neovember (458,6 mm). Sedangkan jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember yaitu sebanyak 23 hari.



1.4.1.4. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil sensus penduduk SP2010 pada tahun 2010 penduduk Kabupaten Banjar mencapai 506.839 jiwa, meningkat sebanyak 94.901 jiwa atau 23,04 persen dibanding tahun 2000 yang hanya 411.938 jiwa. Jumlah tersebut akan terus meningkat berdasarkan penghitungan angka proyeksi periode tahun 2010-2016, jumlah penduduk Kabupaten Banjar akan meningkat sebesar 56.223 jiwa atau 11,09 persen menjadi 563.062 jiwa di tahun 2016

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar selama dua periode Sensus Penduduk tahun 2000-2010 adalah mencapai 2,11 persen per tahun, namun kemudian pada periode tahun 2010-2016 laju pertumbuhan penduduknya diperkirakan hanya tumbuh 1,8 persen per tahun.

Pada tingkat kecamatan, laju pertumbuhan penduduk periode sensus penduduk tahun 2000-2010 sangat bervariasi dimana enam kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya relatif tinggi melebihi pertumbuhan Kabupaten adalah Kecamatan Kertak Hanyar, Martapura, Gambut, Sungai Tabuk, Sambung Makmur dan Paramasan yang masing-masing mencapai 4,04 persen, 3,76 persen, 2,89 persen, 2,7 persen, 2,68 persen dan 2,65 persen per tahun. Sedangkan empat kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya rendah (dibawah satu persen) adalah Beruntung Baru, Astambul, Aluh-Aluh dan Telaga Bauntung masing hanya mencapai 0,11 persen, 0,42 persen, 0,68 persen dan 0,84 persen.

Tabel 1. 2. Penduduk Kabupaten Banjar Per Kecamatan Tahun 2012-2016

Kecamatan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aluh-Aluh	28.026,00	28.507,00	28.984,00	29.464,00	29.917,00
Beruntung Baru	13.577,00	13.782,00	13.985,00	14.185,00	14.375,00
Gambut	37.386,00	38.054,00	38.731,00	39.414,00	40.076,00
Kertak Hanyar	40.648,00	41.447,00	42.237,00	43.022,00	43.770,00
Tatah Makmur	11.445,00	11.646,00	11.847,00	12.052,00	12.248,00
Sungai Tabuk	58.609,00	59.540,00	60.455,00	61.358,00	62.208,00
Martapura	105.420,00	107.480,00	109.565,00	111.692,00	113.762,00
Martapura Timur	30.014,00	30.449,00	30.879,00	31.307,00	31.713,00

Kecamatan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Martapura Barat	17.507,00	17.732,00	17.952,00	18.170,00	18.373,00
Astambul	34.122,00	34.618,00	35.088,00	35.534,00	35.940,00
Karang Intan	32.021,00	32.530,00	33.028,00	33.516,00	33.972,00
Aranio	8.554,00	8.727,00	8.899,00	9.074,00	9.241,00
Sungai Pinang	15.348,00	15.638,00	15.923,00	16.206,00	16.473,00
Paramasan	4.591,00	4.722,00	4.859,00	5.001,00	5.145,00
Pengaron	16.543,00	16.788,00	17.023,00	17.251,00	17.463,00
Sambung Makmur	11.786,00	12.048,00	12.308,00	12.567,00	12.819,00
Mataraman	24.399,00	24.739,00	25.071,00	25.397,00	25.700,00
Simpang Empat	33.961,00	34.596,00	35.221,00	35.839,00	36.424,00
Telaga Bauntung	3.236,00	3.289,00	3.342,00	3.394,00	3.443,00
JUMLAH	527.200,00	536.330,00	545.397,00	554.443,00	563.062,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Banjar pada tahun 2016 mencapai 121 jiwa per Km², sedangkan di tingkat kecamatan, yang paling tinggi ada di Kecamatan Martapura sebesar 2.707 jiwa per Km², disusul Martapura Timur 1.057 jiwa per Km² dan Kertak Hanyar yang mencapai 955 jiwa per Km². Tingginya tingkat area pusat ibu kota dan menjadi bisnis roda perekonomian. Adapun wilayah kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Telaga Bauntung yang mencapai 22 jiwa per Km², Kecamatan Paramasan 9 jiwa per Km² dan Kecamatan Aranio yang hanya 8 orang per Km².

Tabel 1. 3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar, Tahun 2016

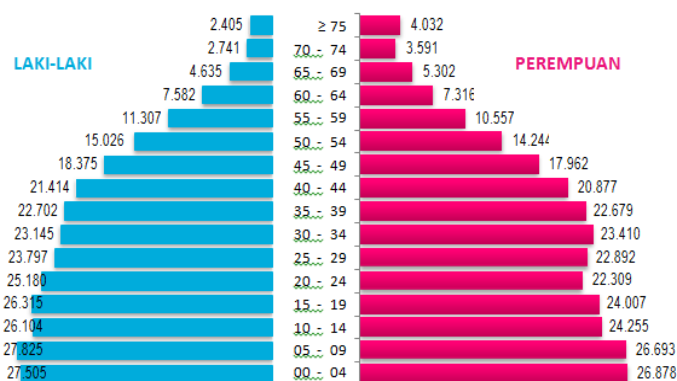
Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Aluh-Aluh	82,48	29.917	363
Beruntung Baru	61,42	14.375	234
Gambut	129,3	40.076	310
Kertak Hanyar	45,83	43.770	955
Tatah Makmur	35,47	12.248	345
Sungai Tabuk	147,3	62.208	422
Martapura	42,03	113.762	2.707
Martapura Timur	29,99	31.713	1.057
Martapura Barat	149,38	18.373	123

Kecamatan	Luas (km2)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
Astambul	216,5	35.940	166
Karang Intan	215,35	33.972	158
Aranio	1.166,35	9.241	8
Sungai Pinang	458,65	16.473	36
Paramasan	560,85	5.145	9
Pengaron	433,25	17.463	40
Sambung Makmur	134,65	12.819	95
Mataraman	148,4	25.700	173
Simpang Empat	453,3	36.424	80
Telaga Bauntung	158	3.443	22
JUMLAH	4668,5	563.062	121

Salah satu penyebab belum meratanya penyebaran penduduk di Kabupaten Banjar dilatarbelakangi oleh letak geografis yang cukup sulit di beberapa daerah, misalnya dikecamatan aranio, kecamatan telaga bauntung dan kecamatan paramasan, dengan medan yang cukup sulit, transportasi yang sulit dan fasilitas yang kurang memadai menyebabkan penduduk sulit berkembang dan sebagian memilih migrasi keluar untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Berdasarkan hasil proyeksi SP2010, dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Banjar pada tahun 2016 berbentuk piramida yang mengecil ke atas, artinya secara struktur umur penduduk di Kabupaten Banjar sudah cukup baik karena jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan non produktif, hal ini merupakan aset besar dalam pembangunan jika mampu dibina dengan baik.

Gambar 1. 1. Piramida Penduduk Kabupaten Banjar, Tahun 2016



Sumber: BPS Kab Banjar, Proyeksi SP2010



Hal yang cukup menarik dari komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tabel diatas adalah di rentang usia 0-64 tahun yang merupakan usia muda sampai dengan usia produktif nampak bahwa penduduk laki-laki mempunyai jumlah yang lebih besar dibanding perempuan (kecuali pada kelompok umur 30-34 tahun). Namun pada kelompok umur tua 64 tahun ke atas terlihat bahwa semakin bertambahnya umur semakin didominasi oleh penduduk perempuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perempuan lebih dapat bertahan hidup hingga usia tua dibanding laki-laki.

1.4.2. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banjar

1.4.2.1. Kewenangan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Kabupaten Banjar merupakan salah satu dari pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat. kewenangan Kabupaten Banjar sebagai daerah otonom mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, system administrasi negeara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan tersebut terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 6 urusan pilihan. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Urusan Wajib pelayanan dasar terdiri :
 1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 6. Sosial



- b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari :
 - 1. Tenaga Kerja
 - 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
 - 3. Pangan
 - 4. Pertanahan
 - 5. Lingkungan Hidup
 - 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 9. Perhubungan
 - 10. Komunikasi & Informatika
 - 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - 12. Penanaman Modal
 - 13. Kepemudaan dan Olah Raga
 - 14. Statistik
 - 15. Persandian
 - 16. Kebudayaan
 - 17. Perpustakaan
 - 18. Kearsipan

- c. Urusan Pilihan terdiri dari :
 - 1. Perikanan
 - 2. Pariwisata
 - 3. Pertanian
 - 4. Perdagangan
 - 5. Perindustrian;
 - 6. Transmigrasi

1.4.2.2. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Banjar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Banjar yang lebih sejahtera. Visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 adalah Kabupaten Banjar yang berbudaya, religius, mandiri dan berdaya saing tahun 2025. Sedangkan visi Bupati Banjar Tahun 2016 -2021 adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah.



1.4.2.3. Struktur Organisasi

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai turunan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berdampak pada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyusun perangkat daerah baru sesuai hasil pemetaan urusan konkuren dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Menyikapi hal tersebut Pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Perangkat Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekterariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas perumahan dan Pemukiman
8. Dinas Pertanahan
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
20. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22. Dinas Pemuda dan Olah Raga
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Dinas Perikanan

25. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
26. Dinas Peternakan dan Perkebunan
27. Satuan Polisi Pamong Praja
28. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan sumber Daya Manusia
29. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
30. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
31. Badan Pendapatan Daerah
32. Kecamatan Sebanyak 20 Buah
33. Staf Ahli Sebanyak 3 Bidang
34. Tugas pembantuan yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar yang menjadi Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4.2.4. Kondisi Pemerintahan

Kabupaten Banjar merupakan satu dari tiga belas kabupaten/kota di provinsi Kalimantan selatan, dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 1959, pada periode 2016-2021 ini kabupaten Banjar di pimpin oleh Bupati KH. Khalilurrahman didampingi wakil bupati H. Saidi Mansyur.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi bupati tersebut, pemerintah kabupaten banjar didukung oleh aparatur pemerintah dengan jumlah 7.006 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.120 dan perempuan sebanyak 3.886 orang Pegawai tersebut tersebar di perangkat daerah, dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel 1. 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Dinas/Instansi dan Jenis Kelamin

Dinas/Instansi Pemerintah		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sekretariat Daerah	77	57	134
2.	Sekretariat DPRD Kab. Banjar	23	17	40
3.	Dinas-Dinas Daerah	600	423	1023
4.	Lembaga Teknis Daerah	406	412	818
5.	Pemerintah Kecamatan	283	61	344
6.	Pemerintah Kelurahan	55	66	121
7.	UPT Pendidikan/ Cabang Dinas Pendidikan	95	56	151

Dinas/Instansi Pemerintah		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
8.	UPT Dinas Kesehatan	179	425	604
9.	Puskesmas Desa/ Pembantu	0	3	3
10.	Pendidikan TK/SD/MI	520	674	1194
11.	SMP/SLTP/MTS	302	529	831
12.	Unit Kerja Lain*	580	1163	1743
Jumlah		3120	3886	7006

Keterangan: * termasuk yang belum dialokasikan ke dinas/instansi

** tidak termasuk PNS pada SMA sederajat

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar

Dari Jumlah pegawai tersebut bila dilihat dari golongan kepangkatan, maka dapat diketahui jumlah terbanyak ada pada golongan III disusul golongan IV khususnya golongan IVa yang berasal dari fungsional tertentu, sebagaimana berikut :

Tabel 1. 5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan dan Jenis Jabatan

Golongan Kepangkatan	Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah
I/A (Juru Muda)	-	-	5	5
I/B (Juru Muda Tingkat I)	-	-	16	16
I/C (Juru)	-	1	55	56
I/D (Juru Tingkat I)	-	-	21	21
Golongan I/ Range I	-	1	97	98
II/A (Pengatur Muda)	-	144	109	253
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	-	113	135	248
II/C (Pengatur)	-	212	281	493
II/D (Pengatur Tingkat I)	-	258	82	340
Golongan II/ Range II	-	727	607	1.334
III/A (Penata Muda)	8	879	179	1.068
III/B (Penata Muda Tingkat I)	57	548	319	924
III/C (Penata)	169	399	111	679
III/D (Penata Tingkat I)	394	490	90	974
Golongan III/ Range III	628	2.316	699	3.645
IV/A (Pembina)	158	1.426	21	1.605
IV /B (Pembina Tingkat I)	67	108	5	180
IV /C (Pembina Utama Muda)	32	3	1	36
IV /D (Pembina Utama Madya)	1	-	-	1
Golongan IV/ Range IV	258	1.537	27	1.882
Jumlah/ Total	886	4.581	1.430	6.899

1.4.3. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat beberapa unsur yang dilakukan penilaian diantaranya adalah perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan



lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah akan lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Unsur perencanaan pada LKjIP Kabupaten Banjar mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengag Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021. RPJMD dokumen merupakan perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun sekali yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalambentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran

1. Visi dan Misi Bupati Kabupaten Banjar

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 ditetapkan Visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah".

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efesiensi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, ditetapkan misi Kabupaten Banjar, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Adapun misi Kabupaten Banjar untuk periode 2016-2021 yaitu adalah :

Misi 1 "Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama". Misi ini merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Misi 2 "Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial". Misi ini tentang Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama, meningkatnya minat baca masyarakat,



peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Misi 3 “Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan”. Misi ini tentang Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sector perikanan, mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industry hilir, agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik

Misi 4 “Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah”. Misi ini merupakan upaya Pemerintah dalam Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

Misi 5 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah”. Misi ini tentang bagaimana upaya pemerintah dalam Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dari kelima misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dimana setiap tujuan dan sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya. Untuk mengimplementasikan keseluruhan misi tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada. Tujuan dan sasaran strategis dari kelima misi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 6. Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama
		Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik
		Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan social	Meningkatkan angka partisipasi sekolah	Meningkatnya angka partisipasi sekolah
	Meningkatkan budaya baca dan apresiasi terhadap seni dan budaya	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat
		Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi
		Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang
		Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular
		Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD
	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Misi	Tujuan	Sasaran
		Meningkatnya mitigasi bencana
	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda
		Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan	Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan
	Meningkatkan kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan
	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat
	Meningkatkan investasi dan kerjasama swasta dan antar daerah.	Meningkatnya investasi daerah
		Meningkatkan kinerja perusahaan daerah
	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan
Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah	Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat	Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat
		Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
		Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi
		Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;
	Meningkatnya infrastuktur perhubungan	

Misi	Tujuan	Sasaran
		Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak; Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1.4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banjar

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah, Secara khusus IKU ditetapkan dengan SK Bupati Banjar Nomor 188.45/359/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banjar Nomor 603 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1. 7. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	Persentase Kawasan santri yang diberdayakan	Persen
		Penurunan Jumlah kasus criminal	Kasus
		Jumlah dana BAZ yang tersalurkan	Rp

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al- Quran peserta didik	Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al-Qur'an	Persen
3	Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda yang bernuansa kearifan lokal	Kasus
4	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)	
		APM SD / MI / SDLB	Persen
		APM SMP / MTs / SMPLB	Persen
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		APK SD / MI / SDLB	Persen
		APK SMP / MTs / SMPLB	Persen
		Angka Putus Sekolah (APtS)	
		APtS SD / MI / SDLB	Persen
		APtS SMP / MTs / SMPLB	Persen
		Angka rata-rata lama sekolah	Tahun
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen
	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah	Persen
6	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	Persen
		Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bernuansa religi	Keg
7	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 kh
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	1.000 kh
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Persen
		Angka laju pertumbuhan penduduk	Persen

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
8	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	Persen
9	Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular	Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	Persen
10	Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen
11	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka	Persen
12	Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	Persen
13	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen
		Persentase Kelurahan Layak anak	Persen
14	Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	Persen
		Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	Persen
15	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	Persen
16	Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga.	Persen

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
17	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	Produksi komoditas prioritas padi sawah	Ton
		Produksi komoditas prioritas padi lading	Ton
		Produksi karet	ton
		Produktifitas komoditas prioritas padi sawah	Kw/Ha
		Produktifitas komoditas prioritas padi ladang	Kw/ha
		Produktifitas karet	Kg/Ha
		Persentase Kelompok tani madya	persen
		Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi	persen
		Populasi sapi	(ekor)
		Jumlah produksi ikan budidaya	ton
		Jumlah produksi ikan tangkap	ton
		Jumlah konsumsi ikan	kg/kapita
18	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	persen
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton
19	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Ketersediaan Energi	K.kal/kap/hr
		Ketersediaan Protein	Gr/kap/hr
		Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	Skor
20	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi (Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN)	persen
21	Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	Opini akuntan publik	Opini
22	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentasi sampah yang terolah di TPA	persen
		Rasio luasan RTH Publik sebesar 20 persen dari luas kawasan perkotaan	persen

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
		Kualitas air	Tercemar/ tidak tercemar
		Kualitas udara	Tercemar/ tidak tercemar
23	Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	Persentase koperasi aktif.	persen
		Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	persen
		Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat dikawasan transmigrasi	Persen
		Jumlah nilai ekspor karet.	USD
		Persentase Desa Berkembang	Persen
24	Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan wisatawan local	orang
		Peningkatan wisatawan mancanegara	orang
25	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	persen
26	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	persen
		Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	persen
27	Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;	Persentase pengujian kendaraan bermotor	persen
28	Meningkatnya infrastuktur perhubungan	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	persen
		Cakupan layanan internet dan telepon seluler	persen

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
29	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;	Cakupan rumah layak huni	persen
30	Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;	Cakupan air minum	persen
31	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Rata-rata nilai prestasi kerja SKPD	persen
		Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	persen
		Persentase Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	persen
		Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	persen
		Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	persen
32	Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	persen
		Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	persen
		Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	persen
		Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	persen
		Persentase pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD	persen

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
		Persentase cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran	persen
		Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	persen
		Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	persen
		Tingkat Maturitas SPIP	Level
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level
		Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	persen
		Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	persen
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi	persen
		Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	Opini BPK
		Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah	persen
		Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	persen
		Prosentasi Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	persen
		Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	persen
		Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demontrasi/ jumlah gejolak masyarakat	persen

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
		Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	persen
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	persen
		Persentase peraturan yang dibuat	persen
		Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	persen
		Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	persen
33	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Persentase SPM yang terpenuhi	persen
		Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	persen
		Persentase kelengkapan administrasi desa	persen
34	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti	persen
		Indeks Kepuasan masyarakat	Angka
		Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	persen

1.4.5. Masalah Utama yang dihadapi Kabupaten Banjar

Permasalahan Utama pembangunan di Kabupaten Banjar yang teridentifikasi dalam setiap urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Rendahnya Angka Partisipasi Murni, baik pada tingkat SD maupun SMP

- b. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar, baik pada tingkat SD maupun SMP
 - c. Tingginya Angka Putus Sekolah
 - d. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah
2. Urusan Kesehatan , Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Rendahnya PHBS masyarakat
 - b. Rendahnya angka harapan hidup
 - c. Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan
3. Urusan Pekerjaan Umum, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Luasnya wilayah yang ditangani di Kabupaten Banjar
 - b. Masih adanya Kecamatan yang belum terhubung dengan Ibukota Kabupaten
4. Urusan Perumahan, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Minimnya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
 - b. Minimnya penyediaan utilitas lingkungan pemukiman
 - c. Cakupan ketersediaan air minum yang masih
5. Urusan Penataan Ruang, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi pemanfaatan tata ruang.
 - b. Rendahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Tata Ruang, tata bangunan dan lingkungan.
 - c. Kurangnya penegakan hukum bagi pelanggaran tata ruang.
6. Urusan Perencanaan Pembangunan, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Belum terintegrasinya proses perencanaan dengan proses penganggaran
 - b. Masih kurangnya koordinasi SKPD terkait di dalam proses perencanaan
 - c. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat Kabupaten maupun masing-masing SKPD
7. Urusan Perhubungan, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus uji laik jalan kendaraan (KIR)
 - b. Kurangnya pemanfaatan terminal untuk distribusi barang dan orang
8. Urusan Lingkungan Hidup, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan hidup, terlihat banyaknya masyarakat yang berada di sekitar sungai yang membuang sampah dan material

- serta BAB di sungai, begitu juga dengan lingkungan yang masih banyak terlihat kurang terawat dan tertata dengan baik
- b. Pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan masih lemah.
 - c. Masih adanya aktifitas masyarakat yang mengakibatkan pencemaran air.
 - d. Belum tepenuhinya persyaratan ideal Ruang Terbuka Hijau
9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Permasalahan yang dihadapi :
- a. Kurangnya kesadaran orang tua dalam pembuatan akta kelahiran
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan KTP atau KIA
10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Permasalahan yang dihadapi Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk berbasis gender, eksploitasi dan diskriminasi
11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Permasalahan yang dihadapi :
- a. Masih tingginya pernikahan dini
12. Urusan Sosial, Permasalahan yang dihadapi :
- a. Program dan kegiatan masih belum bisa mengcover seluruh masalah-masalah sosial yang terjadi.
 - b. Update data PMKS belum maksimal
13. Urusan Tenaga Kerja, Permasalahan yang dihadapi :
- a. Tingginya jumlah pekerja yang bekerja dibawah jam normal (< 35 jam/minggu)
 - b. Tingginya jumlah pekerja dengan keahlian dan tingkat pendidikan yang rendah
14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Permasalahan yang dihadapi :
- a. Belum optimalnya peran kelembagaan gerakan koperasi
 - b. Koperasi yang dapat melaksanakan RAT masih dibawah 70%
 - c. Rendahnya penguasaan manajemen dan teknologi informasi bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM
 - d. Minimnya akses dan fasilitas permodalan bagi koperasi dan pelaku UMKM
 - e. Masih kurangnya peran koperasi dalam mendukung pengembangan dan penguatan UMKM



- f. Belum optimalnya peran koperasi di Pesantren dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Pesantren
15. Urusan Penanaman Modal, Permasalahan yang dihadapi Rendahnya daya serap tenaga kerja dari investasi
16. Urusan Kebudayaan, Permasalahan yang dihadapi adalah Kurangnya event budaya yang mengarah pada industri pariwisata
17. Urusan Pemuda dan Olah raga, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Rendahnya kelompok pemuda yang mendapatkan bimbingan tentang manajemen kewirausahaan
 - b. Kerjasama pelaksanaan event olahraga dengan pihak ketiga belum maksimal
18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Masih adanya gejolak yang sering timbul di masyarakat, akibat informasi yang kurang jelas yang dapat memicu timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
 - b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap deteksi bencana sejak dini
19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Permasalahan yang dihadapi:
 - a. Belum diterapkannya tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja PNS.
 - b. Masih adanya unit organisasi yang belum memahami tugas dan fungsinya
 - c. Belum efektifnya pelaksanaan unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi
 - d. Rendahnya penyusunan laporan pencapaian SPM oleh SKPD
 - e. Rendahnya penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat oleh SKPD yang melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat
 - f. Belum optimalnya peran UPZ dalam pengumpulan dan penyaluran zakat
20. Urusan Ketahanan Pangan, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Keamanan pangan belum menjadi fokus / perhatian utama di masyarakat, utamanya pelaku usaha produk-produk pangan



- b. Belum maksimalnya upaya menuju kemandirian pangan daerah
21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Rendahnya Desa di Kabupaten Banjar yang masuk kategori Desa Berkembang
 - b. Belum maksimalnya peran Pemerintahan desa/Kelurahan dalam fungsi pelayanan publik, regulasi dan pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Rendahnya kemampuan Aparatur Desa dalam mengelola keuangan Desa
22. Urusan Statistik, permasalahan yang dihadapi adalah Rendahnya kesadaran SKPD untuk memperbaharui data yang menjadi tanggungjawabnya
23. Urusan kearsipan, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Kurangnya tenaga/staf yang mampu mengolah arsip
 - b. Belum adanya pejabat Arsiparis
24. Urusan Komunikasi dan Informatika, Permasalahan yang dihadapi:
 - a. Kurangnya Kesadaran diri masyarakat akan pentingnya penataan frekuensi radio.
 - b. Keterbatasan sumber daya manusia dibidang Teknologi dan Informasi yang mendukung pelaksanaan E-Government pada Pemerintah Kabupaten Banjar, baik dalam kualitas SDM maupun kuantitas yang menangani permasalahan IT.
 - c. Kurangnya sarana prasarana Teknologi Informasi sehingga kinerja penyebaran informasi kurang maksimal.
25. Urusan Pertanian, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Menurunnya kualitas intensifikasi pertanian
 - b. Kurang optimalnya peran penyuluh/pendamping pertanian
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan akses pasar dan permodalan
 - d. Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian
 - e. Belum imbangnya tambahan biaya usaha tani dengan harga yang diterima petani, sehingga menyebabkan Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah
 - f. Terbatasnya modal, rendahnya penguasaan teknologi dan informasi pasar, lemahnya kelembagaan petani menyebabkan daya saing rendah



- g. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, sempitnya luas areal kepemilikan petani dan menurunnya kesuburan tanah
 - h. Belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen serta pengolahan hasil panen menjadi produk olahan
 - i. Kurang sinergisnya
 - j. program/kegiatan pembangunan pertanian dengan kegiatan pembangunan lainnya
26. Urusan Pariwisata, permasalahan yang dihadapi :
- a. Akses menuju lokasi wisata belum tersedia dengan baik
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata
 - c. Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataan
 - d. Rendahnya SDM pelaku pariwisata dan masyarakat sekitar obyek wisata
 - e. Belum maksimalnya promosi dan pemanfaatan destinasi wisata
 - f. Belum maksimalnya upaya integrasi kegiatan antar destinasi wisata dalam daerah dan kerjasama luar daerah
27. Urusan Pariwisata, permasalahan yang dihadapi :
- a. Kurangnya pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum bagi para pelanggar aturan
 - b. Belum optimalnya kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap dan budidaya
28. Urusan Pariwisata, permasalahan yang dihadapi Pameran yang telah diikuti kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal menjadi sarana promosi baik produk unggulan maupun potensi Kabupaten Banjar secara keseluruhan.
29. Urusan Transmigrasi, permasalahan yang dihadapi adalah Kurangnya PSU di lokasi transmigrasi

1.4.6. Prioritas Pembangunan Tahun 2017

Untuk mengantisipasi permasalahan diatas pada RKPd Kabupaten Banjar Tahun 2017 menetapkan 8 prioritas pembangunan dan terdiri dari 34 sasaran pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. 8. Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2017

Prioritas	Sasaran
1. Percepatan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia dan Kualitas Keagamaan	1. Meningkatnya angka partisipasi sekolah 2. Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat 3. Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya 4. Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi 5. Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang 6. Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular 7. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama 8. Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik 9. Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal
2. Penguatan Modal Sosial dan Budaya	10. Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial 11. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 12. Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda 13. Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat
3. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Jaminan Sosial	14. Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD 15. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
4. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan dan Perdesaan	16. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan

Prioritas	Sasaran
	17. Meningkatkan kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan 18. Meningkatkan ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat
5. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	19. Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat 20. Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah 21. Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi 22. Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak; 23. Meningkatkan pengelolaan air minum secara optimal; 24. Meningkatkan perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; 25. Meningkatkan investasi daerah
6. Percepatan Pembangunan Desa dan Kecamatan	26. Meningkatkan cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika; 27. Meningkatkan infrastruktur perhubungan
7. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penanganan Lingkungan Hidup	28. Meningkatkan kualitas lingkungan 29. Meningkatkan mitigasi bencana
8. Pemantapan Kinerja Pemerintahan Daerah	30. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal



Prioritas	Sasaran
	31. Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas 32. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif 33. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 34. Meningkatkan kinerja perusahaan daerah

Masing-masing sasaran tersebut didukung oleh sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD (56 SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yakni sebanyak 262 program dan 1.223 kegiatan. dari sejumlah program tersebut dapat diklasifikasikan program prioritas ada sebanyak 166 program dan non prioritas ada sebanyak 96 program. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2017 mengalami pengurangan hal ini disebabkan penataan organisasi perangkat daerah dan penyesuaian kewenangan yang diserahkan ke daerah.

1.5. Sistematika Penyusunan LkjIP Kabupaten Banjar

Sistematika Penyusunan LKjIP Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut ini:

- ❖ Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Aspek Strategis Kabupaten Banjar dan Permasalahan Utama yang dihadapi Kabupaten Banjar, Prioritas Daerah dan Sistematika Penulisan LKjIP.
- ❖ Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2017.
- ❖ Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Capaian Kinerja Bappeda Banjar dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2017.
- ❖ Bab IV Penutup berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2017 dan Langkah-



langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2017.

❖ Lampiran :

- Penetapan Kinerja (PK) (Murni dan Perubahan) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2017
- Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banjar
- Target Kinerja RKPD (Murni dan Perubahan) Kabupaten Banjar Tahun 2017.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini mengindikasikan tingkat keberhasilan pencapaian dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

2.1. Perjanjian Kinerja Pembangunan Tahun 2017

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Perjanjian Kinerja merupakan target yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2017 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2017. Kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar selama tahun 2017 dikaitkan dengan tujuan dan sasaran strategis, serta program pembangunan, disajikan dalam Perjanjian Kinerja setiap SKPD Tahun 2017 sebagaimana berikut:

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Kabupaten Banjar Tahun 2017

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2017
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	Persentase Kawasan Santri Yang Diberdayakan	Persen	20
		Penurunan Jumlah Kasus Kriminal	Kasus	580
		Jumlah Dana Badan Amil Zakat yang tersalurkan	Rp	24.000.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2017
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik	Persentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Qur'an	Persen	92,00
3	Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal	Penurunan Jumlah Pelanggaran PERDA yang bernuansa kearifan lokal	Kasus	12
4	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI /SDLB	Persen	96,09
		APM SMP/ MTs/SMPLB	Persen	63,46
		Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD/MI /SDLB	Persen	120,25
		APK SMP/ MTs/SMPLB	Persen	89,63
		Angka Putus Sekolah (Apts) APtS SD/MI /SDLB	Persen	0,27
		APtS SMP/ MTs/SMPLB	Persen	0,90
		Angka rata- rata lama sekolah	Tahun	7,03
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	65,66	
5	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah	Persen	3,40
6	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	Persen	80
		Jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi	Keg	7
7	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kh	187,9
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	1.000 Kh	13
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Persen	42
		Angka laju pertumbuhan penduduk	Persen	2,06
8	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	Persen	27,76
9	Terkendalnya faktor risiko penyakit tidak menular	Persentase pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	Persen	>15
10	Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	595
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	75
11	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka	Persen	2,55

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2017
12	Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	Persen	70
13	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	70
		persentasi kelurahan layak anak	Persen	7.7
14	Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	Persen	0,05
		Persentase Kejadian Bencana yg tertanggulangi	Persen	100
15	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	Persentasi Pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	Persen	0,60
16	Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas olahraga	Persen	56,86
17	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	Produksi komoditas prioritas padi sawah (ton)	Ton	242.752
		Produksi komoditas prioritas padi ladang (ton)	Ton	28.047
		Produksi karet (ton)	Ton	19160,99
		Produktifitas komoditas prioritas padi sawah kw/ha	Kw/Ha	43
		Produktifitas komoditas prioritas padi ladang kw/ha	Kw/Ha	30
		Produktifitas karet (kg/ha)	Kg/Ha	1163
		Persentase Kelompok tani madya (%)	Persen	3,03
		Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi (%)	Persen	80
		Populasi sapi (ekor)	(Ekor)	16.950
		Jumlah produksi ikan budidaya (ton)	Ton	50.000
		Jumlah produksi ikan tangkap (ton)	Ton	8.228
		Jumlah konsumsi ikan kg/kapita	Kg/Kapita	51
18	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	Persen	30
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Ton	710
19	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Ketersediaan Energi	K.Kal/Kap/Hr	3.610
		Ketersediaan Protein	Gr/Kap/Hr	101
		Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	Skor	90

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2017
20	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi (Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN)	Persen	84
21	Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	Opini Akuntan Publik	Opini	WTP
22	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Sampah Yang Terolah Di TPA	Persen	100
		Rasio Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen Dari Luas Kawasan Perkotaan.	Persen	1,59
		Indeks Kualitas Air	Indeks	33
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	83
23	Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	Persentase koperasi aktif	Persen	63,5
		Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Persen	0,75
		Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi	Persen	20
		Jumlah nilai ekspor karet	Rupiah	504.447.929,32
		Persentase desa berkembang	Persen	37,18
24	Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan wisatawan lokal	Orang	1.919.428
		Peningkatan wisatawan mancanegara	Orang	5
25	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persen	55
26	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	68,69
		Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	88,37
27	Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;	Cakupan Layanan internet dan telepon seluler	Persen	71
28	Meningkatnya infrastuktur perhubungan	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	Persen	100
		Persentase pengujian kendaraan bermotor	Persen	81,25
29	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;	Cakupan rumah layak huni	Persen	96,52
30	Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;	Cakupan air minum	Persen	61,03

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2017
31	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Rata - Rata Nilai Prestasi Kerja SKPD	Persen	100
		Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	Persen	0,12
		Persentase penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	Persen	100
		Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	Persen	100
		Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan	Persen	100
		Persentase Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	Persen	42,24
32	Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	Persen	75
		Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	Persen	100
		Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	Persen	40
		Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	Persen	40
		Persentase pengguna Website Domain dan Sub Domain SKPD	Persen	72,73
		Persentase Cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran	Persen	62
		Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	Persen	95
		Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	Persen	42,86
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	1
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3
		Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	Persen	80
		Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	60,61
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi	Persen	100



No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2017
		Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	Opini BPK	WTP
		Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah	Persen	98
		Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	Persen	39,70
		Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah	Persen	88.36
		Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	Persen	97,28
		Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gejolak masyarakat	Persen	100
		Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	Persen	100
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	Persen	100
		Persentase peraturan yang dibuat	Persen	70
		Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	Persen	85
		Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	Persen	33,15
33	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Persentase SPM yang terpenuhi	Persen	85
		Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	Persen	50
		Persentase Kelengkapan Administrasi Desa	Persen	42,24
34	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan public yang telah ditindaklanjuti	Persen	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,7
		Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Persen	20

2.2. Rencana Anggaran Masing-masing Sasaran Tahun 2017

Sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 berikut dimuat pagu anggaran yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai seluruh sasaran strategis yang telah direncanakan.

Tabel 2. 2. Rencana Anggaran Per Sasaran Tahun 2017

No.	Sasaran	Anggaran Per Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Anggaran
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	955.798.603,00	Persentase Kawasan santri yang diberdayakan	
			Penurunan Jumlah kasus kriminal	715.798.603
			Jumlah dana BAZ yang tersalurkan	240.000.000
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik	7.450.812.300,00	Persentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al-Qur'an	7.450.812.300
3	Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal	91.200.000,00	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda yang bernuansa kearifan lokal	91.200.000,00
4	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	94.656.852.326,00	Angka Partisipasi Murni (APM)	90.423.603.250
			APM SD / MI / SDLB	
			APM SMP / MTs / SMPLB	
			Angka Partisipasi Kasar (APK)	
			APK SD / MI / SDLB	
			APK SMP / MTs / SMPLB	
			Angka Putus Sekolah (APtS)	
			APtS SD / MI / SDLB	
			APtS SMP / MTs / SMPLB	
			Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Kasar PAUD	
5	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	370.130.000,00	Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah	370.130.000
6	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	1.756.323.328,00	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	887.215.328
			Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bernuansa religi	869.108.000
7	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	5.323.584.000,00	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	4.844.514.000
			Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	59.710.000
			Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	150.726.100
			Angka laju pertumbuhan penduduk	268.633.900
8	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	1.659.695.850,00	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	1.659.695.850
9	Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular	776.100.000,00	Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	776.100.000
10	Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	82.603.674.726,00	Persentase Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	82.603.674.726
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
11	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	785.823.000,00	Angka Pengangguran Terbuka	785.823.000,00
12	Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial	4.965.425.895,00	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	4.965.425.895
13	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	112.160.000,00	Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	81.775.000,00
			Persentase Kelurahan Layak anak	30.385.000,00
14	Meningkatnya mitigasi bencana	1.404.660.000,00	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	879.760.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

BANJAR



No.	Sasaran	Anggaran Per Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Anggaran
			Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	524.900.000,00
15	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	1.731.552.945,00	Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	1.731.552.945
16	Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	2.006.981.180,00	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga.	2.006.981.180
17	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	32.336.147.971,00	Produksi karet	254.705.760,00
			Produksi komoditas prioritas padi sawah	4.069.344.360
			Produksi komoditas prioritas padi ladang	
			Produktifitas komoditas prioritas padi sawah	
			Produktifitas komoditas prioritas padi ladang	
			Produktifitas karet	254.705.760,00
			Persentase Kelompok tani madya	3.649.081.130
			Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi	22.218.667.000
			Populasi sapi	1.107.732.120
			Jumlah produksi ikan budidaya	521.623.341,00
			Jumlah produksi ikan tangkap	154.381.000,00
			Jumlah konsumsi ikan	105.907.500,00
18	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	349.804.380,00	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	243.896.880,00
			Jumlah produksi olahan hasil perikanan	105.907.500,00
19	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	1.992.435.000,00	Ketersediaan Energi	664.145.000,00
			Ketersediaan Protein	664.145.000,00
			Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	664.145.000
20	Meningkatnya investasi daerah	1.172.845.000,00	Pertumbuhan investasi (Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN)	1.172.845.000
21	Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	-	Opini akuntan publik	
22	Meningkatnya kualitas lingkungan	3.853.318.800,00	Persentasi sampah yang terolah di TPA	
			Rasio luasan RTH Publik sebesar 20persen dari luas kawasan perkotaan	
			Kualitas air	3.853.318.800
	Kualitas udara			
23	Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	2.699.288.951,00	Persentasi koperasi aktif.	282.089.000
			Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	436.640.000
			Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat dikawasan transmigrasi	63.030.500
			Jumlah nilai ekspor karet.	203.000.000
			Persentase Desa Berkembang	1.714.529.451
24	Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	2.141.506.100,00	Persentase peningkatan wisatawan lokal	2.141.506.100,00
			Persentase peningkatan wisatawan mancanegara	
25	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	4.526.392.260,00	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.526.392.260
26	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	87.197.329.000,00	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	58.742.407.700
			Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	28.454.921.300
27	Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;	769.510.263,00	Persentase pengujian kendaraan bermotor	769.510.263

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2017**



No.	Sasaran	Anggaran Per Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Anggaran
28	Meningkatnya infrastruktur perhubungan	542.811.000,00	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	297.161.000
			Cakupan layanan internet dan telepon seluler	245.650.000
29	Meningkatnya sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan yang layak;	9.358.897.700,00	Cakupan rumah layak huni	9.358.897.700
30	Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;	12.433.595.060,00	Cakupan air minum	12.433.595.060
31	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal	5.524.361.990,00	Persentase Rata-rata nilai prestasi kerja SKPD	328.759.800
			Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	172.397.600
			Persentase Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	1.747.367.300
			Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	175.260.370
			Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	2692216920
			Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	408.360.000
32	Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	36.920.149.263,00	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	852.903.080
			Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	389.848.300
			Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPd	1.742.536.300
			Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	965.938.100
			Persentase pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD	1.279.328.400
			Persentase cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran	1.638.785.620
			Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	2.395.676.640
			Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	261.891.000
			Tingkat Maturitas SPIP	2.359.700.000,00
			Tingkat Kapabilitas APIP	430.050.000,00
			Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	36.000.000,00
			Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi	3.624.851.600
			Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	9.447.457.680
			Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah	3.665.041.100
			Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	622.325.000
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	828.570.000
Persentase kejadian gangguan ketertarikan dan ketertiban yang ditangani	1.470.480.000			

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2017**



No.	Sasaran	Anggaran Per Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Anggaran
			Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gejala masyarakat)	890.606.000
			Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	1.541.000.000
			Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	556.000.000
			Persentase peraturan yang dibuat	1.253.618.000
			Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	443.377.500
			Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	224.164.943
33	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	1.672.264.222,00	Persentase SPM yang terpenuhi	315.372.000
			Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	767.496.000
			Persentase kelengkapan administrasi desa	589.396.222
34	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.364.362.120,00	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti	100.060.000
			Indeks Kepuasan masyarakat	477.915.120
			Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	786.387.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG		411.505.793.233		411.505.793.233



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam penyediaan layanan publik langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PK dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Meskipun Permenpan dan RB di atas sudah direvisi dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2017 ini telah mengakomodir beberapa perihal penting yang menjadi bagian dari analisa capaian kinerja seperti perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan standar nasional, dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sebagai alternative solusi yang telah dilakukan.



Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kategori Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kab. Banjar tahun 2017. Pencapaian IKU Tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh table berikut ini :

Tabel 3. 2. Pencapaian IKU Bupati Tahun 2017

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	Persentase Kawasan Santri Yang Diberdayakan	0%	20%	33,33	166,50%	Sangat Tinggi
		Penurunan Jumlah Kasus Kriminal	70,17%	580	638	90,00%	Tinggi
		Jumlah Dana Badan Amil Zakat yang tersalurkan	0%	24.000.000	374.280.000	156%	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik	Persentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Qur'an	101,56%	92,00%	99,54%	108,2	Sangat Tinggi
3	Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal	Penurunan Jumlah Pelanggaran PERDA yang bernuansa kearifan lokal	13	12	42	-150	Sangat Rendah
4	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI /SDLB	93,22%	96,09%	97,36%	101,32%	Sangat Tinggi
		APM SMP/ MTs/SMPLB	93,83%	63,46%	62,58%	98,61%	Sangat Tinggi

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2017**



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD/MI /SDLB	88,56%	120,25%	113,72%	94,57%	Sangat Tinggi Sangat Tinggi
		APK SMP/ MTs/SMPLB	91,26%	89,63%	86,40%	96,40%	
		Angka Putus Sekolah (Apts) APT\$ SD/MI /SDLB	82,14%	0,27%	0,27%	100,00%	Sangat Tinggi Sangat Tinggi
		APT\$ SMP/ MTs/SMPLB	100%	0,90%	0,34%	162,22%	
		Angka rata-rata lama sekolah	98,14%	7,03 Tahun	7,6 Tahun	108,11%	Sangat Tinggi
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	100%	65,66%	67,80%	103,26%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah	201,20%	3,40%	6,73%	198%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	100	80%	80%	100	Sangat Tinggi
		Jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi	100	7 Keg	8 Keg	114,28	Sangat Tinggi
7	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	100	187,9	90,85	151,65	Sangat Tinggi
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	100	13	6,9	146,92	Sangat Tinggi
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	100	42%	37,00%	110,33	Sangat Tinggi
		Angka laju pertumbuhan penduduk	100	2,06%	1,81%	112,13%	Sangat Tinggi
8	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	100	27,76%	16,50%	140,56	Sangat Tinggi
9	Terkendalnya faktor risiko penyakit tidak menular	Persentase pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	100%	^a 15%	82,80%	552%	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	595 Dok	624 Dok	104,87%	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	75%	80,20%	106,93%	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka	65,66%	2,55%	3,11	78%	Tinggi
12	Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	100	70	70	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian	
13	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	70	100	142.85%	Sangat Tinggi
		persentasi kelurahan layak anak	0	7.7	7.7	100%	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	102,04 %	0,05%	0,06%	87,27	Tinggi
		Persentase Kejadian Bencana yg tertanggulangi	100 %	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	Persentasi Pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	100%	0,60%	0,70%	117%	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas olahraga	94,85	56,86%	50%	88	Tinggi
17	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	Produksi komoditas prioritas padi sawah (ton)	104,37% 242.947	242.752	218.855*	90,16	Tinggi
		Produksi komoditas prioritas padi ladang (ton)	100 34.921	28.047	31.532*	100	Sangat Tinggi
		Produksi karet (ton)	93,67 16317,3	19160,99	17627	91,99	Sangat Tinggi
		Produktifitas komoditas prioritas padi sawah kw/ha	96,00% 38,1	43	38,95*	90,58	Tinggi
		Produktifitas komoditas prioritas padi ladang kw/ha	100 33,48	30	28,33*	94,43	Sangat Tinggi
		Produktifitas karet (kg/ha)	87,98 970	1163	892	76,7	Tinggi
		Persentase Kelompok tani madya (%)	100% 2,86	3,03	3,03	100	Sangat Tinggi
		Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi (%)	100 80	80	81,89	100%	Sangat Tinggi
		Populasi sapi (ekor)	100 16700	16.950	17.627	100	Sangat Tinggi
		Jumlah produksi ikan budidaya (ton)	100 58000	50.000	58.105	116%	Sangat Tinggi
		Jumlah produksi ikan tangkap (ton)	75,68 8228	8.228	11,182	86	Tinggi
		Jumlah konsumsi ikan kg/kapita	100 51	51	51	100.00	Sangat Tinggi
		18	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	48%	30	35
Jumlah produksi olahan hasil perikanan	100			710	715	100,7	Sangat Tinggi
19	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Ketersediaan Energi	97,21	3.610	3.591	99,47	Sangat Tinggi
		Ketersediaan Protein	92,93	101	150,46	149%	Sangat Tinggi
		Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	99,66	90	89,2	99,11	Sangat Tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian	
20	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi (Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN)	119%	84%	143%	169,64%	Sangat Tinggi
21	Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	Opini Akuntan Publik	100%	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi
22	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Sampah Yang Terolah Di TPA	100	100	100	100%	Sangat Tinggi
		Rasio Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen Dari Luas Kawasan Perkotaan.	1,58	1,59	1,59	100%	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Air	48	33	36	109%	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Udara	98	83	103	125%	Sangat Tinggi
23	Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	Persentase koperasi aktif	100,59	63,5	63,9	100,63	Sangat Tinggi
		Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	40	0,75	0,5	66,67	Sedang
		Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi	0	20	17,14	85,7	Tinggi
		Jumlah nilai ekspor karet	8,17	504.447.929,32	52.181.067	10,34	Sangat Rendah
		Persentase desa berkembang	75,9	37,18	22,74	61,16	Rendah
24	Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan wisatawan lokal	127,39	1.919.428	2.027.415	105,63	Sangat Tinggi
		Peningkatan wisatawan mancanegara	77,4	5	-11,89	-237,8	Sangat Rendah
25	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	175,07	55	92,11	167,47	Sangat Tinggi
26	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	100,84	68,69	68,85	100,23	Sangat Tinggi
		Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	101,58	88,37	89,08	100,8	Sangat Tinggi
27	Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;	Cakupan Layanan internet dan telepon seluler	54,16	71	80,34	113,15	Sangat Tinggi
28	Meningkatnya infrastuktur perhubungan	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	102,62	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase pengujian kendaraan bermotor	82,7	81,25	62,95	77,48	Tinggi

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2017**



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian	
29	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;	Cakupan rumah layak huni	102,07	96,52	98,6	102,16	Sangat Tinggi
30	Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;	Cakupan air minum	108,05	61,03	67,19	110,09	Sangat Tinggi
31	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Rata - Rata Nilai Prestasi Kerja SKPD	100,00%	100%	65,57%	65,57%	Rendah
		Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	100,00%	0,12%	0,13%	91,67%	Sangat Tinggi
		Persentase penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	100,00%	100%	47,99%	47,99%	Sangat Rendah
		Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	100,00%	100%	100,00%	100,00%	Sangat Tinggi
		Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan	100,00%	100%	30,28%	30,28%	Sangat Rendah
		Persentase Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	65,81%	42,24%	42,24%	100,00%	Sangat Tinggi
32	Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	100%	75%	91,68%	122,24%	Sangat Tinggi
		Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	100%	40%	30%	75%	Sedang
		Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	100%	40%	54,55%	136,36%	Sangat Tinggi
		Persentase pengguna Website Domain dan Sub Domain SKPD	100%	72,73%	88,23%	121,31%	Sangat Tinggi
		Persentase Cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran	69.85%	62%	52,39%	84.5%	Tinggi
		Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	99.35%	95%	95,14%	100,15%	Sangat Tinggi
		Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	100%	42,86%	30,19%	70,43%	Sedang
		Tingkat Maturitas SPIP	100%	1	3	100%	Sangat Tinggi
		Tingkat Kapabilitas APIP	100%	3	3	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Temuan yang difindaklanjuti	100%	80%	81,40%	101,75%	Sangat Tinggi

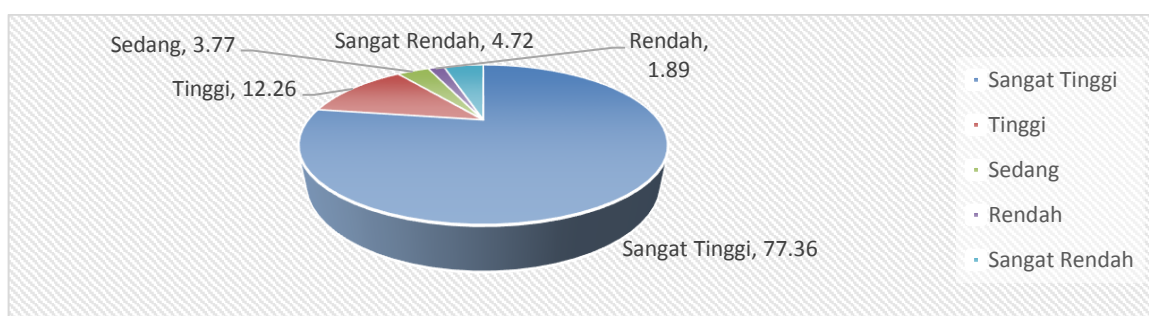
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2017



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian	
		Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	90,61%	60,61%	79%	130,34%	Sangat Tinggi
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi	-	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	Sangat Tinggi
		Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah	99,10	98	95,51	97,46	Sangat Tinggi
		Persentase desa terlibat pengelolaan keuangan desa	49,62%	39,70%	45,13%	113,68	Sangat Tinggi
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	89,56%	88,36%	90,73%	103	Sangat Tinggi
		Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	81,97%	97,28	95,81	98,51	Sangat Tinggi
		Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gejalak masyarakat)	100%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	68%	100%	70%	70%	Sedang
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase peraturan yang dibuat	95%	70%	99,34%	142%	Sangat Tinggi
		Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	83,45%	85	92,76	105,49	Sangat Tinggi
		Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	71,97%	33,15	25,68	77,46	Tinggi
33	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efisien dan efektif	Persentase SPM yang terpenuhi	75	85	73,53%	86,50%	Tinggi
		Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	0,00	50	50	100	Sangat Tinggi
		Persentase Kelengkapan Administrasi Desa	100%	42,24%	42,24%	100%	Sangat Tinggi
34	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan public yang telah ditindaklanjuti	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	97,45	81,7	79,04	96,27	Sangat Tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian	
		Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	100	20	20	100	Sangat Tinggi

Gambar 3. 1. Tingkat Capaian IKU Tahun 2017



3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama

Meningkatnya pengamalan nilai nilai agama merupakan sasaran pertama dari misi ke 1, kinerjanya diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu Persentase kawasan santri yang diberdayakan, Penurunan Jumlah kasus kriminal dan jumlah dana Badan Amil Zakat yang tersalurkan. Rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 137.5% dengan predikat sangat tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam

menjalankan nilai-nilai dan norma agama sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama. Juga Komitmen Pemerintah Daerah dan peran serta ulama/tokoh agama serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mendukung Martapura sebagai serambi Mekkah melalui pembentukan masyarakat yang religius.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 3. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Kawasan Santri Yang Diberdayakan	0%	20%	33,33	166,50%	50%	66,60%
2	Penurunan Jumlah Kasus Kriminal	70,17%	580	638	90,00%	520	77,96%
3	Jumlah Dana Badan Amil Zakat yang tersalurkan	0%	24.000.000	374.280.000	156%	360 juta	103,96%

a. Persentase Kawasan Santri yang Diberdayakan

Sejauhmana capaian sasaran **Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama diukur dengan 3 (tiga) indikator, indikator yang pertama adalah** Persentase Kawasan Santri Yang Diberdayakan, dapat diartikan sebagai jumlah kawasan yang diberdayakan agar lebih berkemajuan dan menjadi contoh dalam pengamalan nilai – nilai luhur dari sejumlah kampung/desa yang akan dinyatakan sebagai kawasan santri. Kawasan santri yang dimaksud disini adalah Lokasi tempat tinggal santri desa/kelurahan yang banyak dihuni para santri, di Kabupaten Banjar telah diinventarisasi terdiri dari :

- 1) Desa Pekauman
- 2) Desa Melayu Mekar
- 3) Desa Pasayangan Utara
- 4) Desa Pasayangan Selatan
- 5) Kelurahan Pasayangan
- 6) Kelurahan Keraton
- 7) Kelurahan Sekumpul
- 8) Desa Murung Kenanga
- 9) Desa Antasan Senior

Pencapaian indikator ini menjadi tanggung jawab beberapa perangkat daerah antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perumahan dan Pemukiman. Pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 20%. Kawasan santri yang dibina melalui program pada dinas terkait pada tahun ini telah dapat direalisasikan pada 3 kawasan yakni kelurahan Pesayangan, Desa Pekauman dan kelurahan sekumpul atau 33,3%, lebih rinci capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Kawasan Santri Yang Diberdayakan	0%	20%	33,33	166,50%	50%	66,60%

Dari tabel tersebut diketahui capaian indikator Persentase Kawasan Santri Yang Diberdayakan sebesar 166,5% diperoleh dari realisasi kawasan santri yang diberdayakan dibandingkan dengan target, hasil capaian masuk pada kategori capaian sangat tinggi. Dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian tahun ini menunjukkan kemajuan yang cukup baik dimana tahun lalu belum ada pembinaan kawasan santri, hal ini menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap kawasan santri. Dibandingkan terhadap target akhir RPJMD realisasi tahun kedua periode ini dapat menyumbang pencapaian sebesar 66,6% artinya agar target dapat terwujud maka pencapaian tahun ini dapat di tingkatkan pada tahun yang akan datang.

Upaya yang dilakukan guna memberdayakan kawasan santri antara lain

- a) Memberdayakan melalui penyelenggaraan pendidikan nonformal paket A,B dan C dipondok pesantren. Pendidikan pada pondok pesantren banyak menjadi pilihan siswa dan orang tua, setelah menamatkan pendidikan dasar banyak siswa yang memilih melanjutkan ke pondok pesantren, hal ini baik karena dipesantren lebih banyak mengajarkan pendidikan agama, namun siswa dipesantren belum mendapat pengakuan melanjutkan sekolah atau dianggap putus sekolah pada system pendidikan apabila dipesantren tersebut tidak menyelenggarakan pendidikan paket dan tercapat pada aplikasi Dapodik



- b) Memberdayakan melalui pembinaan lembaga ekonomi yang ada dikawasan santri seperti koperasi yang ada dipesantren
- c) Memberdayakan melalui pelatihan keterampilan
- d) Memberdayakan melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur pendukung seperti jalan lingkungan dikawasan santri, bantuan untuk membangun rumah yang layak dikawasan santri

Upaya yang dilakukan antara lain :

- Dinas Pendidikan pada Tahun 2017 mempunyai peran memfasilitasi pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banjar dalam melaksanakan program UNKP (Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil). Memfasilitasi pelaksanaan ujian serta melakukan entry data peserta ujian Paket A, B dan C dalam aplikasi DAPODIK untuk mendapatkan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP), karena selama ini siswa-siswa yang ada dipondok pesantren hanya terdaftar dalam aplikasi Emis yang tidak online/tidak terhubung dengan DAPODIK. Pada Tahun 2017 ini ada sebanyak 21 Pondok Pesantren yang mengikuti UNKP, dari jumlah tersebut ada pesantren yang berada pada kawasan santri yakni pesantren darussalam yang ada pada kelurahan pesayangan
- Dinas Koperasi dan UMKM melaksanakan pemberdayaan melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan berbagai kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian. Kegiatan sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian pada tahun 2017 ini dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali terdiri dari : sosialisasi akuntansi koperasi dan administrasi keuangan dan pelaksanaan RAT (membuat laporan keuangan koperasi) sebanyak 1 kali (50 orang) dilaksanakan di Kecamatan Martapura Kota. Sosialisasi tentang perkoperasian dan pelaksanaannya dilaksanakan sebanyak 1 kali (50 orang) dilaksanakan di Kecamatan Martapura Kota. Masing-masing kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari koperasi pesantren darussalam yang ada pada kelurahan pesayangan
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemberdayaan melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, berupa Pelatihan

- dasar menjahit dengan peserta sebanyak 64 orang yang dilaksanakan di desa pesayangan Kecamatan Martapura.
- Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan pemberdayaan pada sisi penyediaan infrastruktur melalui program Pengembangan Perumahan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Perumahan, upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah
 - Rumah layak huni yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 552 unit yang tersebar di Kecamatan Martapura. Dari jumlah tersebut ada yang rumah yang mendapatkan bantuan pada kawasan santi yakni pada desa pekauman
 - Pembangunan jalan lingkungan yang berada di kawasan permukiman yang didukung oleh PSU di area perumahan pada kawasan santri di kelurahan sekumpul, yaitu :
 - ✓ Perbaikan Jalan Perumahan Komplek Keruing Indah Jalan Bani Afdal RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura
 - ✓ Perbaikan Jalan Perumahan Komplek Rolanda 9 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura
 - ✓ Perbaikan Jalan Lingkungan Gg. PGRI, Gg. Ar Rahim, Gg. Keluarga Sekumpul Martapura

b. Penurunan Jumlah Kasus Kriminal

Penurunan Jumlah Kasus Kriminal merupakan indikator kedua untuk mengukur pencapaian sasaran Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dengan hasil capaian kinerja adalah sebesar 90% atau dengan kategori tinggi, diperoleh dari capaian penurunan kasus kriminal yang ditargetkan menjadi 580 kasus, dengan realisasi terjadi 638 kasus. (semakin rendah jumlah kasus semakin tinggi keberhasilan kinerja).

Capaian Kinerja indikator diatas diperoleh dari jumlah kasus kriminal yang terjadi pada tahun 2017 terhadap jumlah kasus kriminal yang diperkirakan akan terjadi. Jumlah kasus kriminal yang terjadi ditargetkan adalah 580 kasus, turun 20 kasus dari target yang ditetapkan pada 2016 yakni sebesar 600 kasus, sementara realisasi / jumlah kasus kriminal yang terjadi pada tahun 2017 sebanyak 638 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui capaian kinerja indikator tersebut sebesar 90% atau dengan kategori tinggi.

Adapun tingkat capaian sasaran diatas dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 4. Capaian Indikator Penurunan Jumlah Kasus Kriminal Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Penurunan Jumlah Kasus Kriminal	70,17%	580	638	90,00%	520	77,96%

Jumlah Kasus Kriminal yang terjadi pada Tahun 2017 merupakan akumulasi perhitungan jumlah kasus kriminal yang datanya berasal dari kepolisian Resort Banjar. Diperoleh data Jumlah kasus kriminal sebanyak 638 kasus. Dibanding tahun sebelumnya capaian kinerja tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 20% dimana pada tahun 2016 capaian kinerja pada indikator ini sebesar 70,17%, dari target penurunan kasus kriminal menjadi 600 kasus namun kasus yang terjadi adalah 779 kasus.

Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD capaian tahun 2017 ini telah menyumbang penurunan kasus criminal dimana ditargetkan turun menjadi 520 kasus atau dengan capaian 77,96%,

Dari jumlah kasus kriminal yang ada di kabupaten Banjar tersebut, bila dilihat lebih rinci lagi berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penurunan jumlah kriminal yang sesuai dengan tugas dan fungsi pada BAKESBANGPOL yaitu :

No	Jenis kasus	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Perjudian	7 kasus	16 kasus (naik)
2	Bawa sajam/ lahgun sajam	50 kasus	34 kasus (turun)
3	Miras	0 kasus	0 kasus (tidak ada kasus)
4	Mengedarkan obat keras/ tidak izin edar	108 kasus	134 kasus (naik)
5	Narkotika	78 kasus	3 kasus (turun)
	Jumlah	250 Kasus	187 Kasus

Dari tabel tersebut dapat diketahui kasus kriminal yang selaras dengan tugas fungsi BAKESBANGPOL mengalami penurunan, tahun 2016 sebanyak 250 kasus dapat diturunkan menjadi 187 kasus pada tahun 2017. Namun dilihat dari jenis kasusnya, kasus perjudian dan kasus pengedaran obat tidak layak edar mengalami peningkatan.

Upaya penekanan kasus kriminal didukung melalui program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dengan kegiatan:

- a) Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba, hal yang telah dilakukan yakni :
 - Melakukan penyuluhan didaerah rawan narkoba, di kabupaten banjar telah dipetakan terdapat 110 sepuluh desa rawan narkoba, sampai dengan tahun 2017 telah dilakukan penyuluhan pada 12 desa rawan narkoba atau sebesar 10% dari daerah rawan narkoba.
 - membentuk dan membina satgas gerakan anti narkoba di tingkat kecamatan, telah dibentuk pada 1 kecamatan
 - pembinaan desa bebas narkoba, pada tahun 2017 telah dibina 1 desa yakni desa telok selong ulu kec. Martapura barat
- b) Penyuluhan pencegahan praktek perjudian dan pencegahan membawa sajam, hal yang telah dilakukan yakni koordinasi/pertemuan kantrantibmas di wilayah Kab. Banjar melibatkan tim kominda dan tim terpadu (TIMDU) penganganan konflik sosial

c. Jumlah Dana BAZ Yang Tersalurkan

Indikator ini merupakan indikator ketiga dari sasaran meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama, Jumlah Dana BAZ Yang Tersalurkan merupakan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun dari muzakki / masyarakat dan disalurkan kepada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat menurut syari'at. hasil capaian Jumlah Dana BAZ yang tersalurkan pada tahun 2017 adalah sangat tinggi atau sebesar 156%, hasil tersebut diperoleh dari pencapaian realisasi melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 target penyaluran BAZ Kabupaten Banjar sebesar Rp. 240.000.000, sampai dengan desember 2017 telah tersalurkan sebesar Rp. 374.281.000.

Tabel 3. 5. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Dana BAZ yang tersalurkan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Jumlah Dana BAZ yang tersalurkan	0%	240.000.000	374.281.000	156%	360.000.000	103.96%

Bila dibanding dengan tahun lalu BAZ maka diperoleh hasil yang menunjukkan kemajuan yang sangat baik, pada tahun lalu BAZ belum dapat merealisasikan tidak dapat mengumpulkan dana disebabkan BAZ Daerah belum beroperasi. Hasil ini menunjukkan adanya peranan BAZ menerima dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Banjar. bila dibandingkan dengan akhir tahun RPJMD capaian tahun ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yakni sebesar 103,96%, artinya untuk mencapai target tersebut cukup mudah untuk direalisasikan dengan memantapkan prestasi yang telah dicapai

Dana yang dihimpun oleh BAZ bersumber dari Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dihimpun oleh BAZ Kab. Banjar dan juga yang dihimpun oleh unit pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di tiap perangkat daerah, instansi vertikal dan perudahaan daerah. Rincian penerimaan ZIS tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 6. Penerimaan BAZ Tahun 2017

No.	Sumber Penerimaan		Jumlah Rp
1	BAZ Kab. Banjar	Zakat Perorangan	48.200.000
		Zakat Badan Usaha	28.500.000
		Infaq/Shadaqah perorangan	12.998.300
		Infaq/Shadaqah Badan Usaha	750.000
		Dana GAS Kab. Banjar	73.680.242
		Jumlah	164.148.542
2	Unit Pengumpul Zakat BAZ Kab. Banjar	UPZ di SKPD	245.059.200
		UPZ di Kecamatan	33.154.000
		UPZ dari Instansi Vertikal	7.854.000
		UPZ di Perusahaan Daerah	34.395.000
		Jumlah	320.662.200
		Total	484.810.742

Dari tabel diatas diperoleh informasi dana Zakat Infaq dan Shadaqah yang berhasil dihimpun oleh BAZ Kabupaten Bajar, baik yang dihimpun langsung melalui BAZ Kabupaten Banjar dan Juga dari UPZ yang dibentuk di instansi di wilayah Kabupaten Banjar. Dana yang berhasil dihimpun sebesar 484.810.742. sebagian besar berasal dari UPZ yang ada di instansi seberar 32.662.200 atau 66,16%.

Selanjutnya dana yang dihimpun tersebut disalurkan melalui proram pendistribusian dan penyaluran kepada masyarakat di Kabupaten Banjar yang memerlukan, rincian penyaluran dana BAZ sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3. 7. Penyaluran BAZ

No.	Program Pendistribusian	Jumlah Rp	Jumlah Penerima (Orang)
1	Banjar Taqwa	38.925.000	4
2	Banjar Sehat	40.950.000	3
3	Banjar Peduli	238.715.000	17
4	Banjar makmur	6.000.000	2
5	Banjar cerdas	18.426.000	5
6	Biaya Operasional BAZ Kab. Banjar	31.265.000	
	Jumlah	374.281.000	31

Jumlah dana BAZ yang disalurkan sebesar 374.281.000 melalui program pendistribusian dan juga untuk membiayai operasional BAZ Kab. Banjar. Penyaluran dana baz melalui program banjar taqwa, banjar sehat, banjar peduli dan banjar cerdas diharapkan tepat sasaran dan yang menerima adalah mereka yang benar-benar memerlukan bantuan

Faktor-faktor yang mendorong pencapaian target antara lain

- a) Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana amanat Undang Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta menggalakkan penghimpunan zakat, infaq dan shodaqoh.
- b) Dorongan dan dukungan yang kuat dari pimpinan daerah Faktor penghambat antara lain Sulit membangun kepercayaan masyarakat atas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah melalui baz, masyarakat cenderung mengeluarkan dan menyerahkan langsung

Upaya yang dilakukan dimasa mendatang, untuk meningkatkan jumlah dana yang disalurkan melalui BAZ tentunya jumlah pemasukan BAZ juga harus meningkat, untuk itu dimasa mendatang berupaya agar masyarakat menjadikan lembaga BAZ sebagai pilihan untuk mengeluarkan zakat infaq dan shadaqah melalui peningkatan sosialisasi dan penguatan kelembagaan BAZ.

Program Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Dengan Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar, kegiatan yang dilakukan berupa

- a) Pembentukan BAZ di SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar
- b) Pembentukan BAZ di BUMD di Kabupaten Banjar



- c) Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang peran BAZ agar Zakat, infaq dan shadaqoh yang disisihkan dari pendapatan dapat disalurkan melalui BAZ

Permasalahan :

- Belum ada penetapan Kawasan santri yang akan diberdayakan, kawasan santri yang diberdayakan pada laporan ini adalah hasil inventarisir kawasan yang banyak santri bertempat tinggal.
- Setelah musim panen, masyarakat di pedesaan tidak ada aktivitas/menganggur sampai dengan musim persiapan tanam. Waktu senggang tersebut dimanfaatkan dengan kegiatan yang tidak bermanfaat antarlain dengan judi
- Penyalahgunaan obat tidak layak edar untuk lari dari Depresi /tekanan hidup yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial dan lainnya
- Lemahnya pengawasan orang tua dan masyarakat
- Kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama
- Kebiasaan sebagian masyarakat yang membawa senjata tajam tanpa izin dengan alasan tuah dari sajam dapat memberikan keselamatan

Solusi :

- Penetapan kawasan santri
- Menanamkan nilai-nilai kesadaran dengan berlandaskan norma hukum pembinaan dan penyuluhan, membentuk satgas anti narkoba di tiap kecamatan. Pencegahan narkoba melalui pendekatan keluarga melalui Pembinaan desa bebas narkoba,
- Selalu melibatkan unsur dari kepolisian dalam setiap pembinaan dan penyuluhan terkait kegiatan yang berhubungan dengan penurunan jumlah kriminal.
- Lebih mengintensifkan lagi penyuluhan pada titik rawan pelanggaran
- Pendekatan kepada generasi muda melalui pemilihan pemuda/pemudi pelopor anti narkoba
- Mengaktifkan lagi lembaga-lembaga amil zakat, dan menghimbau pembentukan BAZ di tiap instansi pemerintah dan badan usaha
- Kerjasama dengan program bantuan sosial yang telah ada di kabupaten banjar, agar bantuan tepat sasaran
- Sosialisasi langsung kemasyarakatan melalui brousur tentang peran dan fungsi BAZ.



3.2.2. Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Quran Peserta Didik

Kemampuan baca tulis Alqur'an merupakan bekal utama bagi siswa untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran islam dimasa depan, oleh karenanya pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemampuan baca tulis Alqur'an pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan Alqur'an di lembaga pendidikan dasar.

Sejalan dengan itu kemampuan baca tulis Alqur'an dijadikan salah satu sasaran untuk melaksanakan misi pertama dokumen RPJMD. Hasil pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kemampuan baca tulis Al Qur'an peserta didik dengan 1 (satu) indikator sasaran yaitu indikator Prosentase Peserta Didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Qur'an menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dari target dengan predikat Sangat Tinggi.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Peningkatan kemampuan baca tulis Al Qur'an peserta didik:

Tabel 3. 8. Realisasi dan Capaian Sasaran Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an Peserta Didik

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Qur'an	101,56%	92,00%	99,54%	108,2	98,00%	101,57%

Realisasi indikator diperoleh dari perhitungan jumlah siswa SD dan SMP yang lulus/tamat yang dapat membaca Al-Qur'an dengan benar sesuai kaidah tajwid ada sebanyak 14.247 siswa (SD/ sederajat : 7.881 siswa dan SMP/ sederajat : 6.366 siswa) terhadap jumlah siswa SD dan SMP yang lulus pada tahun 2017 yakni sebanyak 14.313. siswa (SD/ sederajat : 7.908 siswa dan SMP/ sederajat : 6.405 siswa) yang lulus dengan memiliki kecakapan membaca alqur'an di dibarengi dengan acara Khatamul Al Qur'an yang dilaksanakan diberbagai kecamatan di Kabupaten Banjar. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, Capaian tahun 2017 ini telah melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 101,57% dimana pada akhir periode

RPJMD ditetapkan target sebesar 98%, realisasi kinerja tahun tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 9,54% dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 diperoleh realisasi 90%.

Kompetensi baca tulis Al-Quran dimaksud disini sebagaimana perda Nomor 4 tahun 2004 pada masing-masing jenjang pendidikan adalah adalah :

- 1) Bagi peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikan tingkat SD/ MI diwajibkan memiliki kemampuan membaca, menulis Al Qur'an dan Khatam Al-Qur'an serta hafal 10 (sepuluh) surah pendek.
- 2) bagi peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikan tingkat SMP/ MTS diwajibkan memiliki kemampuan membaca, menulis Al-Qur'an dan Khatam Al Qur'an serta hafal 22 (dua puluh dua) surah pendek

Bagi peserta didik yang sudah memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an dan telah Khatam Al-Qur'an akan diberikan sertifikat sebagai tanda pengakuan dan bukti terhadap prestasi baca tulis Al-Qur'an. Peserta didik yang wajib untuk memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an dan Khatam Al-Qur'an adalah mereka yang beragama Islam sedangkan bukan muslim tidak diwajibkan.

Faktor-faktor penunjang keberhasilan capaian prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Qur'an pada sasaran Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al Qur'an peserta didik adalah :

- Upaya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an telah didukung dengan adanya perda nomor 04 Tahun 2004 tentang khatan Al-Qur'an bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Banjar
- Meningkatnya kesadaran orang tua dan siswa akan pentingnya kemampuan baca tulis Alqur'an
- Dinas Pendidikan selalu dan rutin melakukan sosialisasi masalah pentingnya membaca Al Qur'an ke sekolah-sekolah sebagai bentuk pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari.
- Setiap Tahunnya UPT Pendidikan Kecamatan selalu melakukan acara Khatam Al Qur'an.
- Capaian tidak mencapai 100% dikarenakan adanya siswa non muslim dan siswa yang telah memiliki sertifikasi Khatam Al Qur'an dari lembaga pendidikan Al Qur'an.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui

- Program dan kegiatan yaitu Program Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui kegiatan Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs, dari kegiatan tersebut diperoleh realisasi output penyediaan dan pembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs sebanyak 170 sekolah lebih rendah dari target yang ditetapkan yakni sebanyak 175 sekolah

Dari kegiatan tersebut telah dilaksanakan antara lain :

- Menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal sebagai bahan kajian pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten yang memuat materi pembelajaran tentang Membaca Al Qur'an, menyalin ayat-ayat Al Qur'an, menghafal surah tertentu/ayat tertentu, dan Batamat Al Qur'an. Selain itu Dilaksanakan pada Kegiatan Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
 - Kegiatan Seminar Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal diadakan pada tanggal 23 Mei 2017 di Wisma Sultan Sulaiman Martapura. Salah satu fungsi yang diemban oleh muatan lokal pendidikan dasar Kabupaten Banjar adalah memelihara dan mengembangkan kemampuan baca tulis AL Qur'an sebagai masyarakat "Serambi Mekkah".
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik melauai kegiatan Peningkatan kualifikasi akademik bagi guru ke S1 yang berhubungan dengan pelajaran muatan lokal ini ada sebanyak 5 orang yang menempuh pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah STAI Darussalam sejak tahun 2014 sampai tahun 2017

Sedangkan langkah-langkah yang akan dilakukan pada masa akan datang dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai adalah :

- Meningkatkan wawasan Baca Tulis Al Qur'an bagi guru PAI.
- Melakukan sosialisasi kurikulum muatan Al Qur'an.
- Melakukan pengadaan Kitab Suci Al Qur'an ke sekolah – sekolah.

Langkah-langkah yang akan dilakukan pada masa akan datang dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai adalah:

- Meningkatkan wawasan Baca Tulis Al Qur'an bagi guru PAI.
- Melakukan sosialisasi kurikulum muatan Al Qur'an.

- Melakukan pengadaan Kitab Suci Al Qur'an ke sekolah – sekolah.

3.2.3. Berkurangnya Pelanggaran Perda Kearifan Lokal

Berkurangnya pelanggaran PERDA bernuansa kearifan lokal merupakan merupakan sasaran ketiga dari tujuan Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama, capaian kinerja dari sasaran ini diukur dengan indikator penurunan jumlah pelanggaran yang bernuansa kearifan lokal. maksud dari indikator tersebut adalah jumlah penurunan kasus – kasus pelanggaran perda bernuansa agama yang terjadi dimasyarakat dari angka yang tinggi pada tahun awal ke angka yang lebih rendah pada tahun setelahnya. Hasil pengukuran capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 9. Realisasi dan Capaian Sasaran Berkurangnya Pelanggaran PERDA Kearifan Lokal.

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Penurunan Jumlah Pelanggaran PERDA yang bernuansa kearifan lokal	92,86%	12	42	-150	6 kasus	-500%

Indikator ini dikatakan baik pencapaiannya apabila realisasinya semakin rendah dan sebaliknya buruk apabila capaiannya tinggi, untuk indikator seperti ini mengukurnya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Pada tahun 2017 terdapat 42 kasus pelanggaran, realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yakni sebanyak 12 kasus, capaian kinerja indikator ini sebesar -150%, maka dapat dikategorikan sangat rendah. Dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 6 kasus, maka diperoleh capaian sebesar -500% hal ini menunjukkan perlunya upaya dan perhatian yang lebih kuat lagi agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

PERDA yang bernuansa kearifan lokal yang dimaksud disini adalah Perda Nomor 05 tahun 2004 tentang Membuka Restoran, Warung, Rombong Dan Yang Sejenis Serta Makan Minum Dan Atau

Merokok Ditempat Umum Pada Bulan Ramadan. Pada tahun 2017 terdapat 42 kasus pelanggaran, dilihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terjadi fluktuasi kasus pelanggaran, tahun 2015 jumlah kasus pelanggaran sebanyak 19 kasus, mengalami penurunan pada tahun 2016 dapat ditekan hingga menjadi 13 kasus, namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan.

Jenis pelanggaran PERDA yang bernuansa kearifan lokal paling banyak terjadi adalah melakukan aktivitas makan minum dan merokok ditempat umum pada siang hari di bulan Ramadhan, lebih rinci jenis pelanggaran perda dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 10. Tingkat penyelesaian kasus pelanggaran perda berkearifan lokal

Uraian Jenis Kasus Pelanggaran	2015	2016	2017
Membuka usaha diluar waktu	6 kasus	4 kasus	18 kasus
Melakukan aktivitas makan minum dan merokok ditempat umum	13 kasus	9 kasus	24 kasus
Jumlah Kasus Pelanggaran	19 kasus	13 kasus	42 kasus

Program dan kegiatan pada perangkat daerah yang dilakukan pada tahun 2017 untuk menurunkan pelanggaran perda kearifan lokal adalah Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal pada tingkat program indikator kinerja yang ingin dicapai adalah persentase kasus pelanggaran Perda bernuansa kearifan lokal dengan tingkat penyelesaian target 100% dari 42 kasus pelanggaran perda berkearifan lokal yang didapat dalam hasil pelaksanaan operasi gabungan bersama TNI/Polri 42 kasus pelanggaran dapat diselesaikan atau capaian yang dicapai 100% atau skala yang didapat Sangat Tinggi. Serta kegiatan penyebaran informasi dan sosialisasi Perda bernuansa kearifan lokal, direalisasikan pada pada 7 kecamatan

Permasalahan

- Belum sinerginya penegakan perda antar SKPD terkait
- Tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat pada bulan puasa dan menghadapi hari raya yang menyebabkan tingginya pula tingkat pelanggaran.

- Masih belum optimalnya sosialisasi dan penyebaran informasi tentang Perda bernuansa kearifan lokal, pada tahun 2017 sosialisasi hanya dapat dilaksanakan pada 7 kecamatan
- Masih kurangnya pemanfaatan media informasi seperti baliho, spanduk dan lain-lain tentang perda berkearifan lokal pada area publik
- tingkat sumber daya aparatur terutama dalam petugas penyelesaian kasus seperti PPNS dan perangkat pendukungnya berkerja secara professional dan optimal dalam penanganan kasus
- Gencarnya operasi penegakan perda berkearifan lokal. Dilakukan dengan melaksanakan operasi gabungan bersama TNI/Polri, pada tahun 2017 Jumlah rencana kegiatan operasi gabungan adalah 20 kali dan direalisasikan sebanyak 20 kali kegiatan operasi gabungan yang dilaksanakan di 7 wilayah kecamatan

Solusi

- Solusi yang dilakukan untuk menekan jumlah kasus pelanggaran Perda Kearifan Lokal adalah dengan upaya lebih mengedepankan pencegahan pelanggaran

3.2.4. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah

Meningkatnya angka partisipasi sekolah merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan strategi memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses sarana pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, mengurangi jumlah siswa putus sekolah, meningkatkan kesadaran kepada orangtua siswa akan pentingnya pendidikan terhadap anak-anaknya, meningkatkan jumlah sekolah inklusi sehingga anak dengan kebutuhan khusus pada tingkat awal dapat menjalani proses belajar di sekolah umum, meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan serta meningkatkan peran dan partisipasi madrasah swasta/pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket. Pada tahun 2017 untuk mencapai sasaran meningkatnya angka partisipasi sekolah diukur dengan 8 (delapan) indikator yaitu : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB, angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/SMPLB, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB, Angka Putus Sekolah (AptS)

SD/MI/SDLB, Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs/SMPLB, angka rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi kasar PAUD.

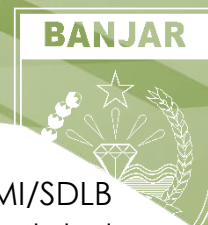
Pencapaian sasaran peningkatan angka partisipasi sekolah menunjukkan hasil sangat positif dengan capaian melebihi diatas 100% pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB, Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI/SDLB dan Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs/SMPLB, angka rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi kasar PAUD sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB menunjukkan hasil yang kurang memuaskan/ tidak mencapai dari target yang ditetapkan akan tetapi capaiannya diatas 94% (sangat tinggi), capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI /SDLB	93,22%	96,09%	97,36%	101,32%	96,63%	100,76%
2	APM SMP/ MTs/SMPLB	93,83%	63,46%	62,58%	98,61%	70,06%	89,32%
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD/MI /SDLB	88,56%	120,25%	113,72%	94,57%	121,60%	93,52%
4	APK SMP/ MTs/SMPLB	91,26%	89,63%	86,40%	96,40%	103,35%	83,60%
5	Angka Putus Sekolah (Apts) APTS SD/MI /SDLB	82,14%	0,27%	0,27%	100,00%	0,21%	71,43%
6	APTS SMP/ MTs/SMPLB	100%	0,90%	0,34%	162,22%	0,74%	152,70%
7	Angka rata- rata lama sekolah	98,14%	7,03 Tahun	7,6 Tahun	108,11%	7,14 Tahun	106,44%
8	Angka Partisipasi Kasar PAUD	100%	65,66%	67,80%	103,26%	73,05%	92,81%

a. Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/SDLB

Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB yaitu Proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan SD/MI/SDLB yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur 7 – 12 Tahun. Realisasi pada tahun 2017 sebesar 97,36% yang didapat dari jumlah siswa usia 7-12 tahun pada jenjang SD/ sederajat sebanyak 50.960 orang berbanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 52.344 orang. Jika dibandingkan dengan tahun lalu capaian APM SD/MI/SDLB pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 8,1% dan Jika



dibandingkan dengan provinsi dan pusat, APM SD/MI/SDLB Kabupaten Banjar diatas provinsi dan pusat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Realisasi APM SD/MI/SDLB antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Pusat	Propinsi	Kabupaten
Realisasi :				
1	Angka Partisipasi murni (APM) SD/MI/SDLB	93,02 %	92,20 %	97,36 %
Capaian Realisasi :				
1	Angka Partisipasi murni (APM) SD/MI/SDLB	113,27 %	N/A	101,32 %

Sumber data : PDSPK Kemdikbud 2017

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB telah berhasil menyumbang 100,76% dari target 96,63 pada tahun 2020. Keberhasilan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

- Membangun dan memberikan izin operasional bagi sekolah baru yang sesuai prosedur di perbatasan padat penduduk untuk supaya dapat menampung peserta didik baru;
- Selalu melakukan kerjasama dan koordinasi untuk melakukan pendataan siswa;
- Mengoptimalkan program Paket A;
- Selalu memantau penerimaan murid baru di sekolah agar lebih diperhatikan dan tepat waktu.

b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB

Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB yaitu Proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur 13 – 15 Tahun. Capaian angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/SMPLB tahun 2017 tergolong sangat tinggi, yaitu sebesar 98,61% di dapat dari angka realisasi sebesar 62,58% dibanding target 63,46%, angka realisasi tersebut didapat dari jumlah siswa usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/ sederajat sebanyak 20.619 orang berbanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 32.950 orang. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB ini berkontribusi sebesar 89,32% dari target 70,06% pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun lalu capaian



APM SMP/MTs/SMPLB pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4,78% akan tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan Jika dibandingkan dengan provinsi dan pusat, APM SMP/MTs/SMPLB Kabupaten Banjar dibawah dari provinsi dan pusat, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 13. Perbandingan realisasi dan capaian realisasi APM SMP/MTs/SMPLB antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Pusat	Propinsi	Kabupaten
Realisasi :				
1	Angka Partisipasi murni (APM) SMP/MTs/SMPLB	76,99 %	73,65 %	62,58 %
Capaian Realisasi :				
1	Angka Partisipasi murni (APM) SMP/MTs/SMPLB	105,37 %	N/A	98,61%

Sumber data : PDSPK Kemdikbud 2017

Tidak tercapainya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB dari target disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

- Anak usia 13-15 di Kab. Banjar banyak bersekolah di Madsarah salafi dan pondok pesantren yang tidak tergolong jenjang pendidikan Dasar, karenanya saat penghitungan APM santri ini tidak dihitung, karena mengalami kesulitan mendatannya.
- Kondisi Kab.Banjar memiliki geografis yang unik, seperti daerah daratan, daerah sungai daerah perkotaan, pedesaan, terpencil, terjauh, bahkan daerah perbatasan. Kondisi ini memberi dampak sulitnya anak usia sekolah melanjutkan pendidikannya, seperti melewati rawa, sungai atau terpencil yang tidak tersedia alat transportasi umum karenanya banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMP sederajat.
- Faktor ekonomis sangat berpengaruh juga seperti pemanfaatan anak untuk membantu mencari nafkah orangtua, sehingga tidak ada waktu lagi bagi anak bersekolah dan pada akhirnya tidak mau bersekolah lagi.
- Kawin dini banyak juga ditemui di usia 12-15 tahun di Kab. Banjar. Hal ini disebabkan oleh budaya daerah yang menyatakan orangtua merasa malu kalau anaknya tidak dikawinkan dan dianggap mampu mengurangi beban kehidupan orangtua.
- Domisili anak di perbatasan menyebabkan banyaknya anak usia SMP sederajat melanjutkan ke Kab/kota lain karena



mereka beranggapan lebih dekat sekolah di kab/kota lain dan lebih bermutu dibanding sekolah di Kabupaten Banjar sendiri.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB

Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB yaitu Proporsi anak sekolah aktif pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB tahun 2017 tergolong sangat berhasil, yaitu sebesar 94,57% yang didapat dari realisasi sebesar 113,72% dibandingkan dengan target sebesar 120,25%. Realisasi pada tahun 2017 didapat dari jumlah siswa keseluruhan pada jenjang SD/ sederajat sebanyak 59.525 orang berbanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 52.344 orang. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB telah berkontribusi sebesar 93,52% dari target 121,6% pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun lalu capaian APK SD/MI/SDLB pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 6,01% akan tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan target yang ditetapkan melebihi 100% dan Jika dibandingkan dengan provinsi dan pusat realisasi APK SD/MI/SDLB Kabupaten Banjar diatas dari provinsi dan pusat, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 14. Perbandingan realisasi dan capaian APK SD/MI/SDLB antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Pusat	Propinsi	Kabupaten
Realisasi :				
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB	105,89 %	105,72 %	113,72 %
Capaian Realisasi :				
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB	108,03 %	N/A	94,57 %

Sumber data : PDSPK Kemdikbud 2017

Faktor-faktor penunjang yang menyebabkan tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB pada sasaran meningkatnya angka partisipasi sekolah adalah:

- Jika dilihat dari data yang tercantum dalam RPJMD memang tidak mencapai realisasi karena capaiannya dibawah 100% atau hanya 94,57%, Secara umum untuk capaian APK SD/MI/SDLB sudah sesuai harapan karena realisasi pada tahun 2017 sudah melebihi 100%. Oleh karena itu Dinas pendidikan



akan mengajukan perubahan target pada RPJMD dimana target yang melebihi 100% akan diajukan perubahan menjadi maksimal 100%.

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, sehingga banyak jumlah anak yang bersekolah;
- Adanya siswa SD/MI/SDLB yang berasal dari daerah/kota disekitar wilayah Kabupaten Banjar yang bersekolah di wilayah Kabupaten Banjar, misal siswa yang berdomisili di kota Banjarmasin tapi bersekolah di Kecamatan Kertak Hanyar/Gambut;
- Adanya program dari pemerintah untuk pendidikan gratis di jenjang pendidikan dasar, serta program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa yang kurang mampu.

d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB

Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APK) SMP/MTs/SMPLB yaitu Proporsi anak sekolah aktif pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Capaian Angka Partisipasi Murni (APK) SMP/MTs/SMPLB tahun 2017 tergolong sangat berhasil, yaitu sebesar 96,40% di dapat dari realisasi sebesar 86,40% dibandingkan dengan target 89,63%. Realisasi pada tahun 2017 didapat dari jumlah siswa keseluruhan pada jenjang SMP/ sederajat sebanyak 28.468 orang berbanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 32.950 orang. Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB telah berkontribusi sebesar 83,60% dari target 103,35% pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu APK SMP/MTs/SMPLB pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 5,14% akan tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan Jika dibandingkan dengan provinsi dan pusat realisasi APK SMP/MTs/SMPLB Kabupaten Banjar masih dibawah provinsi dan pusat, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 15. Perbandingan realisasi dan capaian APK SMP/MTs/SMPLB antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Pusat	Propinsi	Kabupaten
Realisasi :				
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB	102,08 %	99,41 %	86,40 %
Capaian Realisasi :				
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB	123,88 %	N/A	96,40 %

Sumber data : PDSPK Kemdikbud 2017

Faktor tidak tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB dari target sama halnya dengan faktor penyebab yang disebutkan dalam penyebab APM SMP/MTs/SMLB tidak tercapai diatas, karena APM dan APK untuk jenjang SMP/ sederajat saling berkaitan.

e. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI/SDLB

Pencapaian Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI/SDLB yaitu Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Capaian Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI/SDLB pada tahun 2017 mencapai target yang ditetapkan sebesar 0,27% dengan realisasi pada sebesar 0,27% yang didapat dari dari jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/ sederajat sebanyak 160 orang berbanding dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama pada jenjang SD/ sederajat pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 58.498 orang. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu APtS SD/MI/SDLB pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 17,86% dan berkontribusi sebesar 71,43% dari target 0,21% pada tahun 2020.

Faktor-faktor penunjang yang menyebabkan tercapainya Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI/SDLB sesuai dengan target adalah:

- Sosialisasi kepada Orang tua siswa dilakukan pihak sekolah saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ditekankan berbagai antisipasi agar anak tidak putus sekolah, seperti tidak terlibat pergaulan bebas, salah guna Narkoba, senang bolos, dan sebagainya yang menyebabkan berhenti/putus sekolah. Program ini sekaligus diagendakan dengan PENDIDIKAN KELUARGA awal tahun ajaran.
- Keluarga siswa tidak mampu telah teratasi dengan KIP (beasiswa) sehingga mengurangi alasan siswa berhenti karena tidak ada biaya, karena dipastikan KIP dapat mencukupi biaya membeli keperluan sekolah.
- Program dana BOS sangat membantu sekolah untuk DILARANG MELAKUKAN PUNGUTAN APAPUN hal ini sangat menekan angka putus sekolah, karena orangtua tidak ada beban biaya sekolah.

f. Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs/SMPLB

Pencapaian Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs/SMPLB yaitu Proporsi anak menurut kelompok usia yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, capaian Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs/SMPLB Tahun 2017 adalah sebesar 162,22% didapat dari realisasi sebesar 0,34% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 0,9%. Realisasi Tahun 2017 sebesar 0,34% yang didapat dari jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/ sederajat sebanyak 81 orang berbanding dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama pada jenjang SMP/ sederajat pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 23.293 orang. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu AptS SMP/MTs/SMPLB pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 62,22%, dan berkontribusi sebesar 152,70% dari target 0,74% pada tahun 2020.

Keberhasilan capaian Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs/SMPLB disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

- Sosialisasi kepada Orang tua siswa dilakukan pihak sekolah saat PPDB ditekankan berbagai antisipasi agar anak tidak putus sekolah, seperti tidak terlibat pergaulan bebas, salah guna Narkoba, senang bolos, dan sebagainya yang menyebabkan berhenti/putus sekolah. Program ini sekaligus diagendakan dengan PENDIDIKAN KELUARGA awal tahun ajaran.
- Keluarga siswa tidak mampu telah teratasi dengan KIP (beasiswa) sehingga mengurangi alasan siswa berhenti karena tidak ada biaya, karena dipastikan KIP dapat mencukupi biaya membeli keperluan sekolah.
- Program dana BOS sangat membantu sekolah untuk DILARANG MELAKUKAN PUNGUTAN APAPUN hal ini sangat menekan angka putus sekolah, karena orangtua tidak ada beban biaya sekolah.

g. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Pencapaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang sudah dijalani, dari jumlah penduduk di Kabupaten

Banjar secara keseluruhan sebanyak 537.893 orang, yang terbagi berdasarkan pendidikan : Pendidikan SD (164.539 orang), Pendidikan SMP (85.923 orang), Pendidikan SMA (80.628 orang), Pendidikan DII (2.069 orang), Pendidikan DIII (3.816 orang), Pendidikan S1 (13.815 orang), Pendidikan S2 (871 orang) dan pendidikan S3 (43 orang). Capaian angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 tergolong sangat berhasil didapat dari realisasi 7,6% dibandingkan dengan target 7,03%. Realisasi rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 adalah 7,6 Tahun yang didapat dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali lama pendidikan yang dihabiskan dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang sudah sekolah atau telah berijazah, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Ijazah Pendidikan Formal Yang Dimiliki	Jumlah Penduduk 15 Keatas yang sudah sekolah/telah berijazah	Lama Masa Pendidikan Yang di Habiskan	Jumlah Penduduk X Pendidikan Yang Dihabiskan
S3/Doktor	43	21	903
S2	871	18	15.678
S1	13.815	16	221.040
DIII	3.816	15	57.240
DII	2.069	14	28.966
SMA/SMK/MA	80.628	12	967.536
SMP/MTs	85.923	9	773.307
SD/MI	164.539	6	987.234
Masih Sekolah	56.993		56.993
Jumlah	408.697		3.108.897

$$\text{Jadi Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Banjar} = \frac{3.108.897}{408.697}$$

$$= 7,6$$

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 9,97%, dan berkontribusi sebesar 106,44% dari target 7,14 tahun pada tahun 2020. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mencapai target diantaranya adalah :

- Dinas Pendidikan selalu mengupayakan dan mengoptimalkan program-program pendidikan baik formal maupun non formal;
- Mengoptimalkan program Paket A, B dan C;
- Selalu bekerjasama dengan BPS dan Disdukcapil dalam pendataan karena pengambilan datanya dari dua instansi tersebut.

Pencapaian kinerja untuk indikator APM SD/MI/SDLB, APM SMP/MTs/SMPLB, APK SD/MI/SDLB, APK SMP/MTs/SMPLB, AptS SD/MI/SDLB, AptS SMP/MTs/SMPLB dan Angka rata-rata lama sekolah didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

➤ Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

Untuk program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mempunyai target sebesar 51.810 siswa dengan indikatornya Jumlah anak usia 7-15 tahun yang terlayani pendidikan dasar. Sedangkan realisasinya sebesar 57.601 siswa dengan rincian jumlah siswa SD : 43.273 siswa dan SMP : 14.328 siswa.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- ✓ Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Berupa Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah pada desa terpencil
- ✓ Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah
penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk mengantisipasi penambahan jumlah siswa dampak dari pertambahan jumlah penduduk
- ✓ Kegiatan Penambahan Ruang Guru Sekolah
Merupakan kegiatan untuk membangun Ruang sebagai tempat para guru sekolah serta kepala sekolah bekerja selain dari tugas mengajar yang dilaksanakan di kelas.
- ✓ Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Kegiatan ini merupakan kegiatan meningkatkan kualitas taman lapangan sebagai tempat upacara sekaligus tempat bermain. Kegiatan ini meliputi pembangunan taman, pengurugan, pemasangan con block atau bata press halaman, pembuatan halaman panggung untuk kontur tanah yang merupakan daerah rawa atau bantaran sungai serta pembangunan pagar halaman sekolah.
- ✓ Kegiatan Pembangunan Ruang Ibadah
Meliputi pembangunan mushalla untuk SD dan SMP karena mayoritas siswa dan guru di Kabupaten Banjar beragama Islam.
- ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membangun atau merehabilitasi prasarana sanitari berupa WC atau Jamban untuk para guru dan siswa sebagai sarana penunjang lainnya.

- ✓ Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah
Merupakan kegiatan untuk menyediakan prasarana untuk menunjang pembelajaran berupa pengadaan meja dan kursi siswa saja
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Kegiatan ini adalah kegiatan untuk memelihara dan memperbaiki Rumah Dinas untuk para kepala sekolah, guru atau penjaga sekolah yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak bisa didiami lagi.
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perpustakaan Sekolah
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara dan memperbaiki ruang perpustakaan sekolah yang mengalami kerusakan sedang atau berat dan berfungsi sebagai tempat para siswa menimba ilmu dengan membaca buku-buku baik pelajaran, pengetahuan umum maupun referensi lainnya
- ✓ Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah
Meliputi Rehabilitasi Sedang dan Rehabilitasi Berat ruang kelas atau belajar. Untuk ruang kelas yang mengalami rusak ringan tidak dianggarkan, cukup dengan memakai dana operasional sekolah saja.
- ✓ Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK Reguler)
berupa penambahan ruang kelas sekolah pada SDN Keraton 5.
- ✓ Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK Reguler)
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara dan memperbaiki ruang kelas yang berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar utama serta sebagai sarana interaksi antara guru dan siswa. Meliputi Rehabilitasi Sedang ruang kelas tanpa perabotnya dan Rehabilitasi Berat ruang kelas atau belajar dengan perabotnya.
- ✓ Kegiatan Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK Reguler)
Berupa pengadaan koleksi buku perpustakaan sekolah.



- ✓ Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK)
Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa diadakan dalam rangka memenuhi kebutuhan alat penunjang pembelajaran siswa. Terdiri dari alat peraga IPA Fisika, IPA Biologi, Matematika, IPS, PJOK, TIK maupun Seni Budaya.
 - ✓ Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah (DAK)
Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah diadakan guna memenuhi kebutuhan ruang belajar siswa. Gedung sekolah berupa Laboratorium IPA, Ruang perpustakaan atau ruang keterampilan. Dengan sekolah sasarannya adalah SMPN 3 Karang Intan.
 - ✓ Kegiatan Penyelenggaraan dana BOS SD dan SMP
Kegiatan penyelenggaraan dana BOS SD dan SMP ini untuk menunjang operasional sekolah seperti pengadaan buku pelajaran peserta didik, pengadaan ATK sekolah, pembayaran guru honor bagi sekolah yang kekurangan guru, pembayaran listrik, telpon, air sekolah.
- Program Pendidikan non formal
- Untuk program pendidikan non formal menetapkan target sebesar 70% dari penduduk usia 15 tahun keatas yang terlayani pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan kecakapan hidup, sedangkan realisasinya sebesar 0,90% (Jumlah siswa Paket A : 385 orang, paket B : 1.103 dan Paket C : 2.196 orang dengan jumlah keseluruhan 3.684 orang dari jumlah penduduk usia 15 keatas sebanyak 408.697 orang).
- ✓ Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Terdiri dari : Diklat Tutor Paket A , Paket B dan Paket C, Workshop Penilik dan Petugas Lapangan PAUDNI, Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa Transisi dan Apresiasi GTK PAUDNI.
 - ✓ Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal
Kegiatan berupa :
 - Sosialisasi akreditasi lembaga PKBM LKP;
 - Workshop tutor keaksaraan fungsional angkatan I dan II;
 - Bimtek Kurikulum Paket A, Paket B dan Paket C;

- Cerdas Cermat Kesetaraan;
- Workshop Pengelola PKBM dan KLP.

➤ Program manajemen pelayanan pendidikan

Capaian program manajemen pelayanan pendidikan sebesar 4 kegiatan atau 100% sudah dilaksanakan, dimana 4 kegiatan tersebut sebagai berikut :

- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil kinerja Bidang Pendidikan
Target kinerja pada kegiatan pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan adalah (68) dengan realisasi kinerja (68) dengan capaian (100%).
- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
Target kinerja pada kegiatan pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan adalah (1) dengan realisasi kinerja (1) dengan capaian (100)
- ✓ Kegiatan Pembinaan Komite Sekolah
Kegiatan ini bertujuan untuk : (1) meningkatkan pengetahuan dan wawasan dan memberdayakan komite sekolah sebagai mitra kerja (2) Melaksanakan Muscab Dewan Pendidikan Barakat yang melibatkan Unsur Organisasi Pendidik sebagai Evaluasi dalam penggantian pengurus periode yang akan datang. (3) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan anggota Dewan Pendidikan Barakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wadah organisasi yang mengemban amanat untuk kemajuan pendidikan.
- ✓ Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Kegiatan berupa :
 - Rapat koordinasi bidang pendidikan dilaksanakan dalam rangka untuk menghimpun usulan-usulan terkait pembangunan pendidikan dan mensosialisasikan program tahun 2017 dan usulan program tahun 2018, serta membahas hal-hal prinsip di bidang pendidikan baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional yang merumuskan program dan kebijakan RPJMD Kab.

Banjar 2016-2021 yang berhubungan dengan bidang pendidikan;

- Kegiatan sosialisasi pendataan pendidikan yang bertujuan tersusunnya data individu sekolah yang memuat identitas sekolah, siswa, rombel, kelas, fasilitas sekolah, ketenagaan yang terdiri dari kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi, menambah wawasan pengetahuan dan teknis pendataan, membahas hal-hal yang dianggap perlu yang berhubungan dengan pendataan pendidikan;
- Kegiatan pelaksanaan validasi data kecamatan yang bertujuan untuk menghimpun, merangkum dan memvalidasi data yang terekam dalam lembar individu sekolah sehingga dapat terbentuk dokumen rekapitulasi data pendidikan yang diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi, juga sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang pendidikan, yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan di daerah.

h. Angka Partisipasi Kasar PAUD

Pencapaian Angka Partisipasi Kasar PAUD yaitu Proporsi anak mengikuti pendidikan usia dini aktif pada jenjang pendidikan usia dini terhadap penduduk pada kelompok usia pendidikan usia dini, capaian angka partisipasi kasar PAUD adalah sebesar 103,26% didapat dari realisasi sebesar 67,80% dibandingkan dengan target sebesar 65,66%. Realisasi pada tahun 2017 sebesar 67,80% yang didapat dari jumlah siswa pada jenjang TK/ sederajat sebanyak 17.859 orang berbanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun sebanyak 27.303 orang. Jika dibandingkan dengan tahun lalu capaian angka partisipasi kasar PAUD pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,26% dan Jika dibandingkan dengan provinsi dan pusat, angka partisipasi kasar PAUD Kabupaten Banjar dibawah dari provinsi dan pusat, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 16. Perbandingan realisasi dan capaian angka partisipasi kasar PAUD antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Pusat	Propinsi	Kabupaten
Realisasi				
1	Angka Partisipasi Kasar	74,28 %	69,35 %	67,80 %



No	Indikator Kinerja	Pusat	Propinsi	Kabupaten
	(APK) PAUD			
Capaian Realisasi				
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	99,97 %	N/A	103,26%

Sumber data : Renstra Disdik Kab. Banjar, Profil Pendidikan Kab. Banjar 2017, Renstra Kemdikbud, PDSPK Kemdikbud 2017

Capaian Angka Partisipasi Kasar PAUD pada tahun 2017 telah berhasil menyumbang 92,81% dari target 73,05% pada tahun 2020. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

- Tersedianya alokasi dana desa yang dianggarkan untuk program PAUD;
- Adanya komitmen Pemerintah Daerah pada program wajib PAUD 1 tahun pra SD;
- Adanya regulasi (Perda nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan PAUD);
- Adanya kemitraan Dinas Pendidikan dengan Bunda PAUD Kab/Kec/Desa dan PKK serta Ormit lainnya;
- Selalu melakukan koordinasi dan konsultasi secara intens dengan pihak Dirjen PAUD Dikmas Kemdikbud RI;
- Melakukan penyaluran Dana DAK Non Fisik BOP PAUD sesuai schedule

➤ Program pendidikan anak usia dini

Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah PAUD
Target kinerja pada kegiatan pembangunan gedung sekolah PAUD adalah 2 paket dengan realisasi kinerja 2 paket dengan capaian (100%).
- ✓ Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Target kinerja pada kegiatan penambahan ruang kelas sekolah adalah 3 paket dengan realisasi kinerja 3 paket dengan capaian (100%)
- ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain
Berupa peningkatkan kualitas taman lapangan sebagai tempat upacara sekaligus tempat bermain TK Terpadu Mawar Martapura
- ✓ Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Kegiatan berupa peningkatan meningkatkan kualitas taman lapangan sebagai tempat upacara sekaligus

tempat bermain dengan bentuk pembangunan pagar halaman.

- ✓ Kegiatan Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa yakni pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa sebanyak 12.000 buah
- ✓ Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Berupa pengadaan Peralatan Pendidikan berupa Alat Peraga Edukatif indoor dan out door.
- ✓ Kegiatan Pengadaan Mebeluer Sekolah berupa pengadaan meja dan kursi siswa, lemari buku dan berkas juga perlengkapan lainnya.
- ✓ Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Berupa pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir PAUDNI sebanyak 10 buah
- ✓ Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Non DAK)

Target kinerja pada kegiatan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir PAUDNI adalah 1 kegiatan dengan realisasi kinerja 1 kegiatan dengan capaian (100%).

➤ Program Pendidikan NonFormal

Untuk program pendidikan non formal menetapkan target sebesar 70% dari penduduk usia 15 tahun keatas yang terlayani pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan kecakapan hidup, sedangkan realisasinya sebesar 0,90% (Jumlah siswa Paket A : 385 orang, paket B : 1.103 dan Paket C : 2.196 orang dengan jumlah keseluruhan 3.684 orang dari jumlah penduduk usia 15 keatas sebanyak 408.697 orang).

- ✓ Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal

Kegiatan berupa :

- Pemberian Insentif bagi Guru PAUD (TK,KB,TPA,SPS) diberikan kepada :
 - Guru Honor Non PNS berjumlah, 750 orang
 - Honorarium Tenaga Lepas Guru Kontrak PAUD berjumlah 50 orang
 - Karyawan Kontrak Tata Usaha TK Negeri berjumlah 5 orang
 - Pemberian Insentif Ustadz/Ustazdah TPQ Al Qur'an berjumlah, 4516 orang

- Sosialisasi Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga PAUD diikuti oleh 60 orang pengelola/pendidik PAUD.
- Lomba Gugus PAUD Peduli Lingkungan Tingkat Kab. Banjar.
- Hari Anak Nasional (HAN) 2017.
- Hari Aksara internasional (HAI)
- Bimbingan Teknis Penilaian Pembelajaran PAUD
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program PAUD
- Panitia Pelaksana Kegiatan Program PAUD (Pembinaan terhadap Gugus PAUD Di Kecamatan Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten)
- ✓ Kegiatan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), kegiatan ini berupa pelatihan pembuatan nugget dari bahan dasar ikan untuk konsumsi peserta didik PAUD, dan kegiatan ini diikuti oleh guru PAUD.

Permasalahan

- Anak usia 13-15 di Kabupaten Banjar banyak bersekolah di Madsarah salafi dan pondok pesantren yang tidak tergolong jenjang pendidikan Dasar, karenanya saat penghitungan APM santri ini tidak dihitung, karena mengalami kesulitan mendatannya.
- Kondisi Kab.Banjar memiliki geografis yang unik, seperti daerah daratan, daerah sungaidaerah perkotaan, pedesaan, terpencil, terjauh, bahkan daerah perbatasan. Kondisi ini memberi dampak sulitnya anak usia sekolah melanjutkan pendidikannya, seperti melewati rawa, sungai atau terpencil yang tidak tersedia alat transportasi umum karenanya banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMP sederajat.
- Faktor ekonomis sangat berpengaruh juga seperti pemanfaatan anak untuk membantu mencari nafkah orangtua, sehingga tidak ada waktu lagi bagi anak bersekolah dan pada akhirnya tidak mau bersekolah lagi.
- Kawin dini banyak juga ditemui di usia 12-15 tahun di Kab. Banjar. Hal ini disebabkan oleh budaya daerah yang menyatakan orangtua merasa malu kalau anaknya tidak dikawinkan dan dianggap mampu mengurangi beban kehidupan orangtua.

- Domisili anak di perbatasan menyebabkan banyaknya anak usia SMP sederajat melanjutkan ke Kab/kota lain karena mereka beranggapan lebih dekat sekolah di kab/kota lain dan lebih bermutu dibanding sekolah di Kabupaten Banjar sendiri.

Solusi

- Anak yang di Pondok Pesantren dan Salafi DIWAJIBKAN mengikuti pendidikan Fomal melalui SMP TERBUKA dengan Tempat Kegiatan Belajar (TKB) di Madrasah itu sendiri.
- Segera menerbitkan INSTRUKSI BUPATI agar pengasuh Ponpes dan salafiah mau membuka SMP Terbuka.
- Perlu segera dibangun infrastruktur jembatan, jalan desa gang-gang kecil dan alat transformasi seperti kelotok dinas, angkot atau subsidi anak sekolah naik angkot. Kalau memungkinkan mobil2 dinas yang sudah tidak terpakai, dapat dijadikan mobil angkut gratis seperti di Kota banjarbaru.
- Ke depan bisa diperjuangkan BOSDA agar sekolah menjadi lebih baik dalam memebrikan pelayanannya dan menjadikan sekolah semakin berkulaitas serta memiliki daya saing tinggi, sehingga memotivasi masyarakat memasukkan anaknya di sekolah tersebut.
- Memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa akan pentingnya pendidikan.
- Membuka program paket A, B dan C untuk penyataran pendidikan.
- Melakukan sosialisasi program PAUD Pra SD 1 Tahun.
- Membuat draf Peraturan Bupati tentang pendidikan PAUD.
- Menambah jejaring kemitraan berkenaan dengan PAUD.

3.2.5. Meningkatkan Budaya Baca Pelajar Dan Masyarakat

Peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah merupakan salah satu kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka peningkatan budaya baca pelajar dan masyarakat. Pada tahun 2017 pencapaian sasaran meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian sasaran meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat diukur dengan indikator persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah, capaian dari indikator dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3. 17. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat Kab. Banjar Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah	201,20%	3,40%	6,73%	198%	5,30%	126,98%

a. Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah

Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah merupakan jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling. Untuk capaian jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Banjar meningkat jika dibandingkan dengan kunjungan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebanyak 23.344 kunjungan dan tahun 2017 ini sebanyak 23.767 kunjungan, sehingga ada peningkatan sebesar 1,81%. Demikian pula dengan jumlah kunjungan ke Mobil Pelayanan Perpustakaan Keliling, hal ini disebabkan karena koleksi buku yang sudah ditambah dan lebih bervariasi, disamping itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga lebih bervariasi dengan adanya kerjasama dengan mitra dan atau library supporter yang mendukung kegiatan perpustakaan, diantaranya:

- 1) Kerjasama/bermitra dengan Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI) melalui program Perpuseru,
- 2) Kerjasama dengan Polres Banjar melalui Program Kabinaktar Binmas Polres Banjar
- 3) Kerjasama dengan beberapa SKPD terkait yang mendukung program peningkatan minat dan budaya baca masyarakat, dan pula sebaliknya program dan kegiatan perpustakaan yang dapat mendukung program SKPD lain dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana yang diinginkan dalam pencapaian misi kedua.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut diatas dan kegiatan pengembangan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi serta Perpuseru sehingga indikator kinerja sasaran Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah dapat melampaui target yang telah ditetapkan yakni dengan capaian tahun 2017 sebesar 198% dan telah berhasil melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 126,9% dari target 5,3% pada tahun 2020.

Sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan minat baca masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar melalui Bidang Perpustakaan juga melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran diatas adalah :

- Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan, dengan outcome adalah untuk menumbuh kembangkan minat dan kegemaran membaca melalui berbagai bahan bacaan dan media dan menarik minat baca anak melalui buku-buku cerita lokal budaya daerah, sejarah dan kepahlawanan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- ✓ Kegiatan Pemasarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
Kegiatan ini adalah kegiatan rutin bulanan yang sarannya adalah untuk siswa-siswi TK dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah baik sekolah negeri maupun swasta yang sekolahnya mempunyai perpustakaan sekolah.
- ✓ Kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca
Kegiatan ini adalah kegiatan lomba bercerita tingkat SD/Sederajat baik sekolah negeri maupun swasta yang sekolahnya mempunyai perpustakaan sekolah.
- ✓ Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca berupa Kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling
- ✓ Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Kegiatan ini adalah kegiatan perpustakaan untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam memperoleh berbagai macam informasi serta meningkatkan ilmu pengetahuan, pada tahun ini dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan, biasanya waktu pelaksanaannya bersamaan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Banjar (pameran/Expo) yang dilaksanakan setiap bulan Agustus setiap tahunnya, pada tahun 2017 ini dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 18 Agustus 2017 bertempat di Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura.

- ✓ Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
Berupa pengadaan buku/koleksi perpustakaan sebanyak 1030 eksemplar, terdiri dari kasifikasi buku dari buku buku umum, sosial dan budaya, ekonomi dan tehnologi serta buku keagamaan, untuk buku buku keagamaan porsinya lebih besar dari pengadaan buku lainnya.
Sehingga jumlah koleksi buku keseluruhan sampai dengan Desember 2017 menjadi 13.992 judul / 20.870 eksemplar dan jika digabung secara keseluruhan dengan jumlah koleksi tabloid, majalah, koran sampai dengan Desember 2017 menjadi 41.479 eks.
- ✓ Perpustakaan menjadi Pusat Belajar Masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi bekerjasama dengan Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI) melalui Program Perpuseru yaitu kegiatan yang berorientasi pada Pendidikan, Kesehatan dan UKM. Jumlah Peserta yang mendaftar pelatihan tersebut sebanyak 1714 orang.
Sebagai realisasi dari pengembangan kegiatan tersebut sudah ada 3(tiga) Perpustakaan Desa/Kelurahan yang mereplikasi kegiatan perpustakaan daerah yaitu perpustakaan desa Indrasari Kecamatan Martapura, perpustakaan kelurahan Pesayangan Kecamatan Martapura dan perpustakaan desa Dalam Pagar Ulu Kecamatan Martapura Timur.

3.2.6. Meningkatnya Apresiasi Terhadap Seni Dan Budaya

Meningkatnya pelestarian dan apresiasi terhadap seni dan budaya merupakan salah satu sasaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui dinas kebudayaan pariwisata dalam meningkatkan perlindungan serta pengembangan seni dan budaya dengan strategi pengembangan dan pemeliharaan terhadap keragaman dan kekayaan seni dan budaya. Pada Tahun 2017 pencapaian sasaran apresiasi terhadap seni dan budaya menunjukkan hasil yang positif dengan rata-rata capaian sebesar 100% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Keberhasilan kinerja sasaran terwujud dari pembinaan kelompok-kelompok seni dan budaya serta masih memastikan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi di masyarakat Kabupaten Banjar tetap terjaga. Capaian sasaran meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya diukur dengan 2(dua) indicator, yaitu : persentase kelompok seni dan budaya yang dibina dan jumlah kegiatan kebudayaan yang



bernuansa religi, capaian dari masing-masing indicator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 18. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	100	80%	80%	100	100%	80
2	Jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi	100	7 Keg	8 Keg	114,28	8 Kegiatan	100

a. Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina

Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina merupakan jumlah kelompok seni budaya lokal yang dibina berbanding dengan jumlah seluruh kelompok seni dan budaya lokal. Capaian jumlah kelompok seni budaya lokal yang dibina pada tahun 2017 adalah 100% didapat dari realisasi sebesar 80% dibandingkan dengan target tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 80%. Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina pada tahun 2017 sebanyak 140 kelompok dari jumlah kelompok seni dan budaya di Kabupaten banjar sebanyak 175. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian pada tahun 2017 tetap dan mampu menyumbang 80% dari target 100% pada tahun 2020.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program pengelolaan kekayaan budaya
Program ini dilaksanakan untuk mencapai outcome meningkatnya pelestarian serta apresiasi terhadap seni dan budaya, dengan indikator, target, realisasi dan capaian sebagai berikut :
 - ✓ Indikator outcome : Cakupan pemajuan kebudayaan tak benda
 - ✓ Target kinerja outcome : 50%
 - ✓ Realisasi kinerja outcome : 50%
 - ✓ Capaian : 100%

Untuk mencapai target outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :



- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah berupa , penyelenggaraan even budaya sebanyak 4 even
 - Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, berupa partisipasi dalam penyelenggaraan festival/even budaya di luar daerah sebanyak 4 even
 - Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, dengan berupa sosialisasi pebngelolaan dan keragaman budaya dengan jumlah peserta 125 orang
- Program pengelolaan keragaman budaya
- Program tersebut dilaksanakan untuk mencapai outcome Meningkatnya pelestarian serta apresiasi terhadap seni dan budaya, dengan indikator outcome, target, realisasi beserta capaian sebagai berikut :
- ✓ Indikator outcame : Persentase kebudayaan benda yang dikelola
 - ✓ Target kinerja outcome : 69,70%
 - ✓ Realisasi kinerja outcome : 76%
 - ✓ Capaian : 109%

Untuk mencapai terget outcame tersebut dilaksanakan kegiatan :

- Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, dengan indikator output, target, realisasi beserta capaian sebagai berikut :
 - Output : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya benda
 - Indikator output 1 : Jumlah juru pelihara warisan/cagar budaya yang dikoordinir
 - Target kinerja output 1 : 300 orang bulan
 - Realisasi kinerja output 1 : 300 orang bulan
 - Capaian : 100%
 - Indikator output 2 : Jumlah petugas informasi seni dan budaya yang dikoordinir
 - Target kinerja output 2 : 36 orang bulan
 - Realisasi kinerja output : 36 orang bulan
 - Capaian : 100%
- Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air, berupa penelitian/kajian warisan budaya dan penelitian/kajian sejarah lokal



b. Jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi

Jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi merupakan jumlah kegiatan kebudayaan yang mengandung unsur penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama yang diyakini dalam bentuk ketaatan dan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut untuk kemudian dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Capaian jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi pada tahun 2017 adalah 114,28% didapat dari realisasi sebesar 8 kegiatan dibandingkan dengan target tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 7 kegiatan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian pada tahun 2017 mengalami peningkatan 14,28% dan telah mencapai target akhir pada tahun 2020. Faktor keberhasilan sehingga tercapainya target yang ditetapkan karena didukung oleh keberadaan kelompok seni budaya yang bernuansa religi di Kabupaten Banjar seperti kelompok seni sinoman hadrah, maulid habsyi dan rudat terutama di lingkungan santri.

Kegiatan budaya yang bernuansa religi yang telah dilaksanakan meliputi :

1. Festival Bedug
2. Pasar Wadai Ramadhan
3. Festival Sinoman Haderah
4. Festival Rebana
5. Even Muharram 1439 H
6. Even Budaya Tahunan/Festival Rudat
7. Festival Maulid Habsyi
8. Peringatan Hari Santri 2017

Keberhasil pencapaian kinerja pada tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Keragaman Budaya dan Program Pengembangan Nilai Budaya.

Program tersebut dilaksanakan untuk mencapai outcome meningkatnya pelestarian serta apresiasi terhadap seni dan budaya, dengan indikator, target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

- ✓ Indikator outcome : Cakupan pemajuan kebudayaan tak benda
- ✓ Target kinerja outcome : 50%
- ✓ Realisasi kinerja outcome : 50%



- ✓ Capaian : 100%

Untuk mencapai terget outcame tersebut dilaksanakan kegiatan :

- Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah, berupa berupa penyelenggaraan even budaya sebanyak 8 even
- Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, dengan berupa jumlah even budaya yang diselenggarakan sebanyak 8 even

Permasalahan

- Banyaknya kelompok seni dan budaya yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Banjar yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat terus aktif dan mampu melestarikan kebudayaan lokal yang tidak sebanding dengan ketersediaan SDM Disbudpar;
- Semakin berkurangnya minat generasi muda terhadap seni dan budaya tradisional terutama yang bernuansa religi sehingga proses regenerasi dalam rangka pelestarian budaya menjadi terhambat

Solusi

- Melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk melakukan pembinaan kelompok seni dan budaya serta secara rutin menyelenggarakan festival seni dan budaya agar tersedia wadah bagi kelompok seni dan budaya untuk tetap aktif dan mengembangkan diri
- Melibatkan lingkungan pesantren untuk terlibat aktif dalam pelestarian budaya/kesenian bernuansa islami dengan melibatkan masyarakat di sekitar pesantren

3.2.7. Menurunnya Kematian Ibu Melahirkan Dan Kematian Bayi

Dalam rangka akselerasi penurunan angka kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan perbaikan status gizi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjar sejak tahun 2016 membentuk Satuan Tugas (Satgas) Desa yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat dengan tugas penggerakan masyarakat agar berperan aktif dalam pelayanan kesehatan dasar khususnya yang berkaitan dengan masalah kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan status gizi masyarakat.

Keberadaan Satgas Desa tersebut didukung oleh lintas sektor terkait di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan sehingga kebijakan ini dapat mengatasi permasalahan dari hulu sampai permasalahan pelayanan terdepan.

Jenis layanan, tugas dan uraian yang diberikan kepada Satgas Desa berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu, Kematian Bayi dan Perbaikan Status Gizi Masyarakat Melalui Satuan Tugas Desa di Kabupaten Banjar adalah:

Tabel 3. 19. Tugas dan Jenis Layanan Satgas Desa

No	Jenis Layanan	Uraian
1	Keluarga mengikuti KB	Bekerjasama dengan tenaga kesehatan untuk memantau serta menganjurkan kepada setiap keluarga yang merupakan pasangan usia subur, suami atau istri atau keduanya agar terdaftar secara resmi sebagai peserta / akseptor KB dan/atau menggunakan alat kontrasepsi
2	Ibu bersalin di fasilitas kesehatan	Bekerjasama dengan tenaga kesehatan terutama bidan di desa untuk mendampingi ibu hamil agar melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) serta melaporkan seluruh perkembangan, kejadian / gejala yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil hingga melahirkan di fasilitas kesehatan.
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	Memantau serta menganjurkan agar bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4	Bayi diberi ASI Eksklusif selama 6 bulan	Mendampingi, menganjurkan, memantau serta melaporkan agar ibu bayi/balita selalu memberikan ASI Eksklusif saja selama 6 bulan
5	Pertumbuhan balita dipantau setiap bulan	Menganjurkan untuk memantau tumbuh kembang balita setiap bulan serta permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan dan status gizi balita ke tenaga kesehatan

Sumber : Perbup Nomor 24 Tahun 2016

Upaya ini memberikan hasil yang cukup bermakna dalam mengatasi permasalahan kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan perbaikan status gizi masyarakat di Kabupaten Banjar yang dapat diukur berdasarkan hasil capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sejak pertengahan tahun 2016.

Pada tahun 2017 Hasil evaluasi capaian kinerja pencapaian sasaran menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi

menunjukkan hasil yang positif atau kategori **sangat tinggi**, dengan rata-rata capaiannya 130,26%. Capaian sasaran menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi diukur dengan 4 (empat) indikator yang terdiri dari 2 (dua) indikator dengan SKPD penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan yaitu Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dan Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, 2 (dua) indikator sebagai SKPD penanggung jawab adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yaitu Angka kelahiran pada remaja usia 15-59 tahun (ASFR) dan Angka laju pertumbuhan penduduk. Masalah kematian ibu melahirkan dan kematian bayi tidak semata-mata menjadi masalah kesehatan sehingga dalam penanggulangannya melibatkan lintas sektor terkait yang mempunyai peran cukup besar yaitu DP2KBP3A. Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3. 20. Realisasi dan Capaian Sasaran Menurunnya Kematian Ibu Melahirkan dan Kematian Bayi

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	100	187,9	90,85	151,65	110,4	121,51%
2	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	100	13	6,9	146,92	10,7	155,07%
3	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	100	42%	37,00%	110,33	36%	95,66%
4	Angka laju pertumbuhan penduduk	100	2,06%	1,81%	112,13%	2%	110,49%

Sumber : Dinas Kesehatan

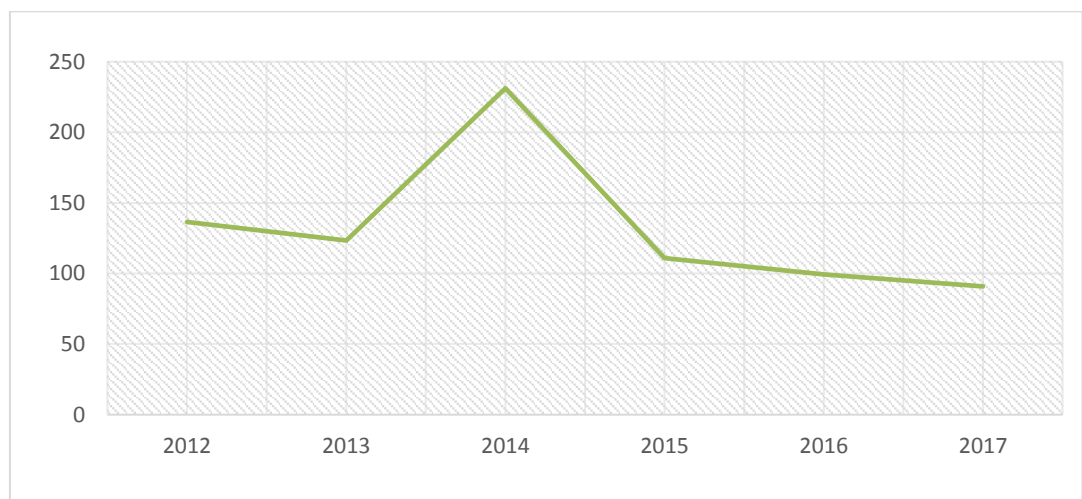
a. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

Kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu bangsa diukur dengan menentukan tinggi rendahnya angka kematian ibu dan perinatal dalam 100.000 persalinan hidup. Kematian maternal menurut batasan dari The Tenth Revision of The International Classification of Diseases (ICD – 10) adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau

penanganannya, tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan.

Capaian indikator Angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup sebesar 151,65% atau masuk kategori Sangat tinggi. Realisasi indikator ini sebesar 90,85 artinya lebih rendah dari target sebesar 187,9 per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini bersifat negatif artinya semakin rendah realisasi yang dicapai kinerjanya semakin baik. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2016, terjadi penurunan yang sangat bermakna dari 99,33/100.000 kelahiran hidup menjadi 90,85/100.000 kelahiran hidup, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2020 capaian tahun 2017 ini sudah tercapai yaitu 121,51%, tercapainya target akhir RPJMD sudah terjadi sejak tahun 2016. Progres Kabupaten Banjar dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3. 2. AKI Kabupaten Banjar Tahun 2012-2017



Sumber : Dinas Kesehatan

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, Angka kematian ibu melahirkan mengalami penurunan sejak tahun 2012, kemudian naik cukup tinggi pada tahun 2014 dan selanjutnya turun secara teratur hingga tahun 2017 menjadi 90,85 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan Angka kematian ibu melahirkan yang cukup bermakna tersebut disebabkan antara lain oleh intervensi yang dilakukan melalui pembentukan Satgas Desa seperti diuraikan diatas.

Perhitungan Angka kematian ibu dipengaruhi oleh 2 variabel yaitu jumlah kelahiran hidup dan kasus kematian ibu melahirkan. Tabel dibawah ini memberikan gambaran jumlah kelahiran hidup



dan jumlah kasus kematian ibu melahirkan dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Tabel 3. 21. Jumlah Kelahiran Hidup dan Kasus Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	Perhitungan AKI per 100.000 kh
2011	14	9.986	140,2
2012	14	10.246	136,6
2013	13	10.533	123,4
2014	25	10.813	231,2
2015	12	10.814	108,1
2016	11	11.074	99,3
2017	10	11.007	90,85

Sumber : Bidang Kesmas

Penurunan Angka Kematian Ibu pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak hanya bergantung pada naiknya jumlah kelahiran hidup, namun secara absolut jumlah kasusnya pun dapat ditekan seperti terlihat pada Tabel diatas.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 didukung dari program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pertolongan Persalinan Dari Keluarga Kurang Mampu dan Jaminan Persalinan. Capaian fisik dari program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak yaitu sebesar 81,57%, dengan capaian keuangan sebesar 80,47%.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan melalui program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang didukung dengan kegiatan :

- Kegiatan Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu yaitu berupa :
 - Sewa Rumah Tunggu Kelahiran 3 buah (RTK), dimana rumah tunggu kelahiran ini diperuntukkan bagi ibu bersalin yang rumah nya jauh dari sarana fasilitas kesehatan, sehingga dapat menurunkan resiko terjadinya komplikasi dalam persalinan;
 - Kunjungan untuk pelacakan Ibu Hamil Resiko Tinggi Di Desa wilayah kerja puskesmas;
 - Pendampingan ibu hamil resiko tinggi.
 - Monitoring dan Evaluasi Program ke Puskesmas/Bimtek



- Kegiatan Jampersal yaitu berupa :
 - Pertemuan sosialisasi jaminan persalinan, sehingga para petugas kesehatan dapat mengetahui semua kegiatan yang menjadi tanggungan dalam kegiatan jaminan persalinan (jampersal);
 - Monev jaminan persalinan untuk monitoring serta evaluasi semua hambatan dalam kegiatan jaminan persalinan di Puskesmas.
 - Kegiatan kelas ibu hamil di setiap desa;
 - AMP (Audit Maternal Perinatal) tingkat Puskesmas yaitu audit kasus kematian ibu di desa dengan pelaksana tim dari Puskesmas;
 - Pertemuan ANC terpadu di tingkat Kabupaten Banjar peserta seluruh bidan coordinator Puskesmas dan Staf dari seksi kesehatan keluarga dan gizi;

b. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Capaian indikator Angka kematian bayi (AKB) adalah sebesar 6,9 per 1.000 kelahiran atau masuk kategori **Sangat Tinggi**. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan target tahun 2017 yaitu 13 per 1.000 kelahiran hidup dengan persen capaian sebesar 146,9% dan indikator ini bersifat negatif sebagaimana angka kematian ibu melahirkan. Dibandingkan dengan capaian awal pada tahun 2016, terjadi kenaikan dari 9,5/1.000 kelahiran hidup menjadi 6,9/1.000 kelahiran hidup. jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2020 capaian tahun 2017 ini sudah tercapai yaitu 155,07%, tercapainya

target akhir RPJMD sudah terjadi sejak tahun 2016. Progres Kabupaten Banjar dalam menurunkan angka kematian bayi ini berkaitan dengan pembentukan Satgas Desa sebagaimana penurunan kematian ibu melahirkan.

Tabel 3. 22. Jumlah Kelahiran Hidup dan Kasus Kematian Bayi

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Perhitungan AKB per 1.000 kh
2011	105	9.986	10,5
2012	112	10.246	10,9
2013	126	10.533	12,0
2014	158	10.813	14,6
2015	103	10.814	9,52
2016	106	11.074	9,57
2017	83	11.007	6,9

Sumber :Bidang Kesmas Dinas Kesehatan

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 didukung dari Program yang mendukung indikator ini adalah program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu monitoring, evaluasi dan pelaporan. Capaian kinerja dari program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita ini adalah 99,06%, dan capaian keuangan sebesar 80%.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan dalam menurunkan angka kematian bayi melalui program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang didukung dengan kegiatan :

- Kegiatan Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu yaitu berupa :
 - Evaluasi Program Kesehatan Anak di Puskesmas
 - Pertemuan ANC (Audit Maternal Children) tingkat Puskesmas yaitu audit kasus kematian bayi di desa dengan pelaksana tim dari Puskesmas terpadu di tingkat Kabupaten Banjar peserta seluruh bidan koordinator Puskesmas dan Staf dari seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 - Pertemuan Penyelia fasilitatif
 - Monitoring dan Evaluasi Program ke Puskesmas/Bimtek
- Kegiatan Jampersal yaitu berupa
 - Rumah Tunggu Kelahiran
 - Jaminan Pembiayaan Kelahiran dan Perawatan Bayi
 - Monev KIA ke puskesmas

Gambar 3. 3. Kegiatan Penyuluhan di Kelas Ibu Hamil Oleh Bidan Desa



c. Angka Pada Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR)

Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun merupakan penduduk wanita usia antara 15-19 tahun yang pernah melahirkan atau sedang mengalami hamil anak pertama. ASFR yang dalam kegunaannya adalah untuk mengukur tingkat kehamilan usia muda dimana melahirkan dalam usia 15-19 tahun adalah kelahiran yang berisiko terhadap ibu maupun anaknya. Pengetahuan tentang ASFR berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Capaian angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun pada tahun 2017 adalah 110,33% dari realisasi tahun 2017 37,66% berbanding dengan target yang ditetapkan sebesar 42%, dikarenakan Indikator ini bersifat negatif artinya semakin rendah realisasi yang dicapai maka kinerjanya semakin baik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) ASFR mengalami peningkatan dari 44% menjadi 37,66% dan capaian pada tahun 2017 berhasil menyumbang 95,66% dari target 36% pada tahun 2020. Keberhasilan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) salah satu faktor pendukung adalah terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK – R) di Kecamatan baik itu jalur pendidikan maupun jalur masyarakat.

Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) Kabupaten Banjar masih diatas dari provinsi dan nasional seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 23. Perbandingan data angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten

	Tahun 2016		
	Target	Realisasi	Capaian
Nasional	46%	48%	95,65%
Provinsi	47%	51%	91,48%
Kabupaten	45%	44%	102,22%
	Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian
Nasional	46%	48%	95,65%
Provinsi	47%	42%	110,64%
Kabupaten	42%	37,66%	110,33%

Keberhasilan kinerja indikator Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun pada tahun 2017 di dukung oleh Program dan Kegiatan :

- Program Keluarga Berencana
Didukung oleh kegiatan :
 - ✓ Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).
Kegiatan ini berupa :
 - Kegiatan berupa sosialisasi pendewasaan Usia Perkawinan tingkat Kecamatan dilaksanakan di 10 Kecamatan.
 - Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Tingkat Kecamatan di Desa Kampung KB agar termotivasinya Remaja guna menunda usia kawin sehingga menekan perkawinan di usia muda. Sosialisasi juga dilakukan melalui spanduk himbauan dan pamflet
- Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Kegiatan berupa :
 - ✓ Penyuluhan Program KKBPK 20 kecamatan dengan peserta 1.750 orang , 25 orang per kegiatan.
 - ✓ Staffmeeting Penyuluh KB sebanyak 22 kali bertujuan untuk rencana kerja mingguan maupun mengevaluasi seluruh kegiatan yang ada dilapangan peserta Penyuluh KB PNS



- dan Non Petugas Lapangan Non PNS bertempat di 20 Kecamatan se Kab.Banjar.
- ✓ Rakor Teknis Penyuluh KB.dilaksanakan di Masing masing 20 Kecamatan di wilayah Kab.Banjar dengan peserta Camat, Bidan, Penyuluh KB PNS dan Non PNS, kepala Desa dan peserta lintas sector lainnya.
 - ✓ Alokon ke Puskesmas se Kab.Banjar di 24 Puskesmas se Kab.Banjar sehingga memenuhi permintaan masyarakat agar menjadi peserta KB aktif dan agar tercapainya peserta KB Baru.
 - ✓ Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB di Sei Kitano Kecamatan Martapura Timur , dengan jumlah peserta 20 orang terlaksana sesuai rencana yang bertujuan untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan agar terlaksana dengan baik.
 - ✓ Lokakarya Mini Pokja Kampung KB, pertemuan di Kecamatan Kertak Hanyar (Belanjung Baru), Sei Kitano (Martapura Timur), Sei Pinang (Rantau Nangka), Astambul (Tambak danau) dihadiri 20 orang peserta berasal dari lintas sektor (Camat, PPL Pertanian, Pendamping Desa, Kepala Puskesmas Penyuluh KB, Kepala Desa dan perangkat serta kader-kader).
 - ✓ Pertemuan Forum Musyawarah Kampung KB, bertempat di Sei Kitano Kec.Martapura Timur, 12 kali kegiatan dengan setiap kali kegiatan dihadiri 30 peserta yang terdiri dari Kepala Desa, PPL Pertanian Pendamping Desa, BPD,Kader kader, Bidan Desa dan Penyuluh
 - ✓ Pemeliharaan Balai Penyuluhan KB se Kab.Banjar, berupa pengecatan dan pengecoran lantai di 7 Balai Penyuluh KB Kecamatan
- Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Kegiatan berupa :
- ✓ Memperkuat Dukungan dan partisipasi masyarakat melalui Sosialisasi GenRe dengan tujuan memfasilitasi Remaja belajar memahami dan mempraktekan perilaku hidup sehat dan berahlak untuk mencapai ketahanan Remaja sebagai dasar mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.
 - ✓ Kegiatan Operasional PIK/R yang diberikan kepada kelompok PIK Remaja dan Mahasiswa untuk kegiatan operasional dengan harapan lebih meningkatnya kinerja Genre karena adanya dukungan operasional .

- ✓ Kegiatan Orientasi KB / KR bagi Mitra Kerja sebanyak 5 kali kegiatan yaitu kecamatan Paramasan, Sungai Tabuk Aranio, Martapura Barat dan Sambung Makmur dengan masing masing kegiatan 30 peserta.
- ✓ Kegiatan Pramuka Saka Kencana yaitu pertemuan dan sosialisasi program KB dengan peserta pramuka dari kwarcab kab.Banjjar dilaksanakan 6 kali kegiatan dilaksanakan di Gedung Juang dengan jumlah peserta masing masing kegiatan 30 orang peserta dengan tujuan menekan penundaan usia kawin muda.

Gambar 3. 4. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Tingkat Kecamatan



d. Angka Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Capaian angka laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2017 adalah 112,13% dari realisasi tahun 2017 1,81% berbanding dengan target yang ditetapkan sebesar 2,06%, dikarenakan Indikator ini bersifat negatif artinya semakin rendah realisasi yang dicapai maka kinerjanya semakin baik. Capaian pada tahun 2017 telah berhasil mencapai target pada tahun 2020 yakni 2%. Keberhasilan indikator angka laju pertumbuhan penduduk salah satu faktornya disebabkan oleh menggunakan program keluarga berencana dan penduduk yang pergi kewilayah lain dengan tujuan untuk menetap, belajar atau bekerja.

Keberhasilan capaian pada indikator sasaran angka laju pertumbuhan penduduk pada kinerja pada tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan :

- Program Keluarga Berencana
Didukung oleh kegiatan :
 - ✓ Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon Bagi Keluarga Miskin.
Kegiatan ini berupa :
 - Operasional Penggerakan Akseptor MJP Kabupaten dan kecamatan dilaksanakan di 10 (sepuluh) Kecamatan
 - Kegiatan Bhakti Sosial Kes. TNI dilaksanakan di Desa Rantau Nagka, Kec.Sei Pinang, 68 orang akseptor yang terlayani.
 - ✓ Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).
Kegiatan berupa :
 - Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Tk Kecamatan dilaksanakan di 10 Kecamatan.
 - Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Tingkat Kecamatan di Desa Kampung KB untuk memotivasi remaja guna menunda usia kawin sehingga menekan perkawinan di usia muda.

Permasalahan

- RTK tidak terealisasi dikarenakan pasien dan keluarga yang tidak bersedia ditempatkan di RTK
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat kartu keluarga baru (anggota keluarga yang sudah menikah dan masyarakat pendatang) sehingga kesulitan saat diperlukan
- Permasalahan dalam pencapaian kinerja penurunan angka kematian bayi yaitu masih adanya persalinan yang ditolong bukan dengan tenaga kesehatan, pelayanan pengobatan yang terlambat ditolong karena tidak dibawa ke sarana kesehatan.

Solusi

- Sosialisasi program jaminan persalinan ke masyarakat
- Sosialisasi RTK
- Sosialisasi administrasi kependudukan
- Kerjasama dengan Bidan Praktik mandiri yang bersedia membuat perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan.
- Untuk mengurangi angka kematian bayi yaitu dengan mengadakan penyuluhan di masyarakat dalam masalah

pengecahan dan pengobatan masalah kesehatan pada bayi di masyarakat, serta meningkatkan peran bidan desa serta kader dalam melakukan pelayanan kesehatan

3.2.8. Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk Dan Gizi Kurang

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Gizi buruk merupakan kondisi kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein (KEP) dalam makanan sehari-hari. Dalam menentukan klasifikasi status gizi harus ada ukuran baku yang sering disebut *reference*. Buku antropometri yang sekarang digunakan di Indonesia adalah WHO-NCHS dengan indeks berat menurut umur, indeks tinggi badan menurut umur, berat badan dibanding tinggi badan. Pada tahun 2017 pencapaian sasaran menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Capaian sasaran menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang diukur dengan indikator prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang, sebagai mana di sampaikan pada table berikut:

Tabel 3. 24. Realisasi dan Capaian Sasaran Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	100	27,76%	16,50%	140,56	17%	103,03%

Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang merupakan perbandingan berat badan dan umur. Gizi buruk dan gizi kurang jika mempunyai nilai Z score kurang dari 2 SD. Pengukuran indikator ini dihitung pada saat PSG (pemantauan Status Gizi) dengan dihitung Berat Badan per Umur pada saat kegiatan ini didapatkan hasil yaitu jumlah balita laki-laki 19.791 anak dan perempuan 18.877 anak dengan total yang dipantau sebanyak 38.668 anak, didapatkan balita dengan gizi buruk sebanyak 1.496 anak (3,87%) dan balita gizi kurang sebanyak 4.886 (12,64%).

Indikator Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang merupakan indikator negatif dengan pengertian bahwa semakin rendah realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik sehingga bisa dilihat pada tabel diatas capaian prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang pada tahun 2017 adalah 140,56% didapat dari realisasi sebesar 16,50%

dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 27,76%, faktor pendorong sehingga tercapainya target adalah disebabkan :

- ✓ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan pada ibu dan bayi;
- ✓ Program satu desa satu bidan sehingga semua desa di Kabupaten Banjar terdapat petugas kesehatan yang bertugas mendampingi masyarakat dalam menanggulangi kesehatan.
- ✓ Kegiatan pekan penimbangan pada bulan february 2017
- ✓ Pelaksanaan kelas BGM di 9 Puskesmas yaitu Puskesmas Aluh-Aluh, Tatah Makmur, Kertak Hanyar, Gambut, Martapura Barat, Martapura Timur, Astambul, Karang Intan 1 dan Martapura 2).

Capainya prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 103,03% atau telah melampaui target akhir RPJMD yang menargetkan 17%.

Perbandingan capaian Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang sama dengan capaian Provinsi Kalimantan Selatan yakni 16,5% seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 25. Perbandingan Realisasi Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Terhadap Provinsi

No	Indikator	Satuan	Banjar			Kal.Sel		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	Persen	34,96*)	20,46	28,49	26,2	18,8	16,5

Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan

*) Data Riskesdas 2013

Gambar 3. 5. Acara Sosialisasi Satgas Desa



Upaya yang dilakukan dalam menurunkan kejadian masalah gizi kurang dan gizi buruk yaitu melalui Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang didukung oleh :

- Kegiatan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi yaitu berupa :
 - Pertemuan Penyusunan Peta Masalah Gizi
 - Pertemuan Penyusunan Peta Masalah Gizi Sebanyak 24 Orang TPG sehingga diharapkan dari pertemuan ini bisa diperoleh Gambaran Status gizi dan permasalahan gizi di masyarakat melalui PWS Gizi
 - Pembelajaran peta informasi gizi di Kabupaten Klaten Daerah Istimewa Yogyakarta bersamaan dengan Dinas Kesehatan Propinsi Kalsel dan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota (tentang program-program gizi yang diunggulkan seperti pelaporan PWS Gizi melalui Software Posyanduku)
 - Kegiatan Bimbingan Teknis Pekan Penimbangan di Tingkat Puskesmas dengan Sasaran 1602 Kader Posyandu yang akan turun ke lapangan (posyandu) melakukan kegiatan pekan penimbangan
 - Pekan penimbangan di 513 Posyandu
 - Kegiatan pekan penimbangan balita sebanyak 1 kali pada bulan Februari dengan sasaran 48.080 Sampel
- Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin yaitu berupa :
 - Pengadaan Bubur dan Biskuit MP-ASI
 - Distribusi Bubur dan Biskuit MP-ASI
 - Kurang Energi Protein dan Kurang Energi Kronik
 - Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya
 - Konseling Menyusui
 - Garam Beryodium
 - Vitamin A
 - Sosialisasi 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan)
 - Pertemuan Multi sektor Gizi Makro dan Mikro
 - Taburia
 - Kelas BGM
 - Pengumpulan Data Status Anemia Remaja Putri
- Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
 - Keluarga Sadar Gizi



- Pekan Sarapan Anak Nasional
- Peningkatan Gizi Lebih
 - Konseling Permasalahan Gemuk dan Obesitas

Permasalahan :

- Kegiatan Pekan Penimbangan Menggunakan sampel yang banyak hal ini sangat baik namun ada kekurangannya terjadi pembengkakan biaya dan memungkinkan terjadi human error;
- Kurangnya Pengetahuan Kader Posyandu dalam pengukuran BB dan TB.

Solusi :

- Perlu Alternatif kegiatan lain yang lebih efektif dengan hasil yang sama dengan pekan penimbangan seperti PSG dengan metode sampling;
- Melakukan Pelatihan Kader Posyandu.

3.2.9. Terkendalinya Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

Dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun terakhir ini, prevalensi penyakit tidak menular cenderung mengalami kenaikan khususnya Hipertensi dan Diabetes Melitus, sehingga untuk mengatasi masalah ini Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di haruskan ada sub unit atau setingkat Seksi yang menangani masalah penyakit tidak menular baik di Dinas Kesehatan Provinsi maupun di Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.

Kebijakan sasaran ini pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 adalah Peningkatan jumlah Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) dan optimalisasi dan revitalisasi upaya promosi kesehatan untuk mencapai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Posbindu PTM adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola oleh kader kesehatan dengan bantuan petugas kesehatan yang kegiatannya berupa pemantauan / pemeriksaan kesehatan secara rutin penyakit-penyakit tidak menular khususnya Hipertensi dan Diabetes serta promosi dan penyuluhan kesehatan.

Sebagai gambaran berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, prevalensi Hipertensi di Kabupaten Banjar sebesar 25,65% lebih tinggi dibandingkan prevalensi hasil Riskesdas tahun 2007 yaitu 10,82%. Untuk Diabetes Melitus berdasarkan Riskesdas tahun 2013 prevalensinya sebesar 1,56%, angka ini masih termasuk cukup tinggi karena ada kabupaten lain di Kalimantan Selatan dengan prevalensi 1,01%.

Pada tahun 2017 pencapaian sasaran terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular menunjukkan hasil positif dengan capaian sebesar lebih dari 100% masuk dalam kategori sangat tinggi. Capaian sasaran terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular diukur dengan indikator presentase pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM) purnama dan mandiri, sebagai mana di sampaikan pada table berikut :

Tabel 3. 26. Realisasi dan Capaian terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	100%	≥15%	82,80%	552%	≥60	138%

Persentase pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu PTM) Purnama dan Mandiri merupakan pusat bimbingan pelayanan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan dalam rangka mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera (Depkes RI 2002). Jumlah posbindu yang ideal adalah 1 desa 1 Posbindu PTM.

Capaian pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu PTM) Purnama dan Mandiri pada tahun 2017 adalah 552% didapat dari realisasi sebesar 82,8% atau sudah terbentuk 240 posbindu purnama dan mandiri dari sasaran 290 desa dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu lebih dari sama dengan 15%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu PTM) Purnama dan Mandiri mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 12,07%.

Analisa tercapainya indikator ini adalah karena adanya percepatan pembentukan Posbindu PTM sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dimana untuk pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelaksanaan skriningnya salah satunya adalah di Posbindu PTM dengan target 100% sasaran, sehingga untuk dapat menjangkau sasaran lebih maksimal perlu dibentuk Posbindu PTM lebih banyak dengan standar pelayanan untuk yang Purnama dan Mandiri. Terlepas dari itu capaian persentase pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu PTM) Purnama dan Mandiri pada tahun 2017 telah berhasil menyumbang 138% dari target akhir RPJMD sebesar lebih dari sama dengan 60%.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 tergolong sangat tinggi, keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 didukung dari program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Pencegahan Penyakit Tidak Menular yang terdiri dari sumber dana dari APBD dan dari DAK.

Kegiatan pencegahan penyakit tidak menular dengan sumber pendanaan dari APBD dengan target 41 posbindu target realisasi fisik 100% dapat dicapai sebesar 97,56%, sedangkan untuk kegiatan pencegahan penyakit tidak menular dengan sumber dana dari DAK dari target 41 posbindu, dicapai realisasi fisik sebesar 99,46%.

Gambar 3. 6. Pelayanan di Posbindu PTM



Upaya yang dilakukan dalam mencapai target persentase pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu PTM) Purnama dan Mandiri yaitu melalui Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular yang didukung Kegiatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular, yaitu berupa :

- Terlaksananya pembekalan kader posbindu Kabupaten Banjar tahun 2017 sebanyak 2 angkatan (100 orang)
- Tersedianya Posbindu Kit sebanyak 24 buah
- Terlaksananya deteksi dini kanker leher rahim dan payudara di Kabupaten Banjar tahun 2017 sebanyak 6 kali
- Terbentuknya Posbindu sebanyak 238 Posbindu
- Tersedianya Media KIE sebanyak 50 paket
- Tersedianya Buku Panduan Posbindu sebanyak 500 buah
- Tersedianya Buku Monitoring sebanyak 3.750 buah

Permasalahan :

- Masih banyak kader Posbindu yang belum mendapat pembekalan tentang Posbindu PTM (5 org x 290 desa = 1.450 orang), jadi masih kurang 1.350 orang yang belum dilatih;
- Posbindu Kit masih kurang, mengingat Jumlah Posbindu yang terbentuk sudah 240 buah, baru ada 65 buah Posbindu Kit;
- Untuk pelaksanaan IVA masih dibutuhkan Bed Gynekolog dan lampu sorot, karena belum semua Pustu dan Poskesdes mempunyai Bed Gynekolog dan lampu sorot;
- Untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan IVA test positif belum ada tindak lanjutnya;
- Tidak memiliki krioterapi;
- SDM untuk skrening kesehatan jiwa masih kurang, diperlukan pelatihan khusus

Solusi :

- Mengupayakan untuk adanya pelatihan/pembekalan untuk kader posbindu
- Pelatihan bagi nakes pengelola jiwa
- Pengadaan jumlah posbindu kit diperbanyak
- Berupaya melakukan pengadaan jumlah posbindu kit yang lebih banyak
- Meningkatkan frekuensi pelatihan kader posbindu dan nakes pengelola kesehatan jiwa

3.2.10. Meningkatkan Mutu Pelayanan Di RSUD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 054 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan RSUD Ratu Zalecha Martapura ditetapkan sebagai RS rujukan regional 2 (dua) yang meliputi kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dengan keadaan tersebut dari tahun ke tahun RSUD Ratu Zalecha Martapura terus berbenah diri untuk meningkatkan citra rumah sakit sebagai wujud nyata dalam pelayanan kesehatan yang prima.

Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD merupakan kinerja utama yang ditempuh dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di RSUD. Pada tahun 2017 pencapaian sasaran meningkatnya mutu pelayanan di RSUD menunjukkan hasil yang sangat memuaskan atau masuk dalam kategori sangat tinggi dengan capaian rata-rata sebesar 100%. Capaian sasaran meningkatnya mutu pelayanan di RSUD diukur dengan 2 (dua) indikator Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian sasaran dari masing-masing indikator dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 27. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan di RSUD

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	595 Dok	624 Dok	104,87%	700 Dokumen	89,14%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	75%	80,20%	106,93%	85%	94,35%

Sumber : RSUD Ratu Zalecha

a. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur

Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan pelayanan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Capaian pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahun 2017 adalah 104,87% didapat dari realisasi sebesar 624 Dokumen dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 595 Dokumen. Tercapainya pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun

2017 ini dikarenakan seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang diwajibkan untuk pemenuhan dan penerapan SOP sesuai dengan standar.

Jumlah SOP tahun 2017 turun dari tahun 2016 disebabkan adanya SOP pada tahun 2016 yang mirip atau sama, sehingga SOP yang mirip atau yang sama dihilangkan/digabungkan, dan juga karena ada salah dalam penjumlahan dalam perhitungan SOP keseluruhan. Terlepas dari itu capaian pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahun 2017 telah berhasil menyumbang 89,14% dari target 700 dokumen pada tahun 2020. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

➤ Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD,

Outcome yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebesar 104,87% (624 SOP). Pencapaian ini melebihi dari target 595 SOP yang ditetapkan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan dengan output yaitu: Pelayanan dan Pendukung Pelayanan yang telah tersedia, target 85 %. Hasil kegiatan persentase 98,73%, klasifikasi indikator berdasarkan capaiannya (sangat tinggi).

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. RSUD Ratu Zalecha Martapura sebagai salah satu pelayanan publik yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, dalam perbaikan pelayan publik ini dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat atau Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai jawaban yang tepat untuk mengevaluasi sejauh mana institusi publik dalam memberikan pelayanan prima secara langsung kepada masyarakat.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD pada tahun 2017 adalah 106,93% didapat dari realisasi sebesar 80,20%

dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 75%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD mengalami peningkatan 6,93% dan capaian pada tahun 2017 telah berhasil menyumbang 94,35% dari target 85% pada tahun 2020.

Faktor-faktor yang mendukung atau mempengaruhi dalam tercapainya target adalah :

- ✓ Jam pelayanan disetiap unit sesuai jadwal yang telah ditentukan
- ✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan untuk kenyamanan pasien
- ✓ Penerapan pedoman dan SPO sesuai standar disetiap unit pelayanan
- ✓ Komitmen seluruh pegawai RS untuk meningkatkan mutu pelayanan

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD,

Outcome yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2017 adalah sebesar 80,20% (target 75%). Pencapaian ini 106,93% melebihi dari target yang ditetapkan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan yang telah tersedia, target 85 %. Hasil kegiatan persentase 98,73%, klasifikasi indikator berdasarkan capaiannya (sangat tinggi).

Permasalahan :

- Masih kurang maksimalnya fungsi pengawasan kontrol dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga masih ditemukan pelaksanaan penggunaan anggaran yang tidak efisien

Solusi :

- Diharapkan fungsi pengawasan kontrol lebih dimaksimalkan dengan melakukan evaluasi secara berkala

3.2.11. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

Sasaran Meningkatnya kompetensi tenaga kerja terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Angka Pengangguran Terbuka, capaian indikator ini menunjukkan hasil yang positif dari tahun sebelumnya. Tahun 2016 persentase angka pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 2,56 % dan realisasi pada tahun 2016 sebesar 3,44 % dengan capaian sebesar 65,63%. Sementara pada tahun 2017 dari target yang ditetapkan sebesar 2,55 % realisasi sebesar 3,11% atau capaian sebesar 78 % masuk dalam kategori tinggi. Realisasi kinerja pada tahun 2017 berhasil menyumbang 76% untuk target akhir RPJMD.

Capaian target kinerja indikator Angka Pengangguran Terbuka, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 28. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Angka Pengangguran Terbuka	65,66%	2,55%	3,11	78%	2,51	76%

Untuk capaian kinerja pada Misi 2 (dua) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Untuk Indikator Angka Pengangguran terbuka Tahun 2017 merupakan angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, akumulasi dari perhitungan jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan/jumlah seluruh angkatan kerja x 100 %. Untuk tahun 2017 realisasi 3,11 dengan capaian sebesar 78 % termasuk dalam kategori tinggi.

Berdasar data yang diril BPS bulan Desember 2017, Angka Pengangguran Terbuka Nasional berada di angkat 5,50 % dan Provinsi Kalimantan Selatan berada di urutan 15 terendah dari 34 Provinsi di Indonesia dengan Angka Pengangguran Terbuka sebesar 4,77 % dan Kabupaten Banjar menduduki peringkat ke 3 dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan dengan Angka Pengangguran Terbuka sebesar 3,11 %.

Menurut data BPS Tahun 2017, untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Kabupaten Banjar menduduki urutan ke 8 dari 13 kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kalsel yaitu sebesar 71,90 %. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15



tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Untuk data pencari kerja tahun 2018 sejumlah 2.182 yang terdiri dari usia 15-19 tahun sejumlah 812 orang, usia 20-29 tahun sejumlah 1.218 orang, usia 30-44 tahun sejumlah 135 orang, usia 45-54 tahun sejumlah 12 orang dan diatas usia 55 tahun sejumlah 5 orang. Sedangkan untuk pencaker yang telah mendapatkan pekerjaan sejumlah 200 orang.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kompetensi tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai program untuk tahun 2017 yaitu :

➤ Program Peningkatan kesempatan kerja

Program Peningkatan kesempatan kerja pada tahun 2017 mempunyai target sebesar 15 % dengan realisasi sebesar 9,16 % atau capaian sebesar 61 % dengan realisasi keuangan yang dapat diserap sebesar 91,98 % dan realisasi fisik sebesar 9,16 %. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

- Kegiatan pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.

data dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar jumlah pencari kerja yang terdaftar yang terserap dalam dunia kerja adalah sebanyak 278 orang.

Pelaksanaan kegiatan berupa kegiatan padat karya fisik berupa pengerasan jalan desa di Desa Belimbing Lama kec. Sungai Pinang dan Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur dengan menyerap tenaga kerja 132 orang.

Kegiatan pelatihan tenaga kerja mandiri di 4 (empat) desa yaitu :

- Desa Awang Bangkal Kec. Karang intan, pelatihan pembibitan ikan lele
- Desa Pulau nyiur kecamatan Karang Intan, pelatihan ternak ayam buras
- Desa Karya Makmur kec. Cintapuri, pelatihan ternah ayam petelur
- Desa tungkaran kecamatan Martapura Kota, pelatihan penetasan ternak bebek

Ke 4 (empat) kegiatan tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 176 orang. Kegiatan Tahun 2017 ini belum dapat diperhitungkan tetapi akan diperhitungkan di tahun 2018,

berapa orang yang berusaha setelah mendapatkan pelatihan.

- o Kegiatan Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat Kegiatan berupa pelatihan wira usaha bidang perikanan (budidaya ikan lele bioflok) sebanyak 15 orang dari target 10 orang di desa Mandikapau timur kecamatan Karang Intan.

Gambar 3. 7.



- o Kegiatan penyebarluasan Informasi pasar kerja, Berupa sosialisasi sebanyak 100 orang di SMKN 1 Martapura dan SMKN Darusalam
- o Kegiatan Penyiapan Tenaga kerja siap pakai, berupa penyuluhan/sosialisasi kepada calon TKI, tenaga kerja asing dan TKI Luar Negeri dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, di kecamatan Sungai Tabuk pada tanggal 13 Juli 2017 dan Kecamatan Astambul pada tanggal 20 Juli 2017 dengan peserta 90 orang
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini mempunyai target sebesar 52 % dengan realisasi 47 % dengan capaian sebesar 90 %, program didukung kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, untuk Tahun 2017 target 64 orang, kegiatan yg di danai APBD sebanyak 16 orang dan kegiatan yang dilaksanakan LPK yang bekerja sama dengan Disnaker sebanyak 60 orang yaitu Pelatihan dasar menjahit yang dilaksanakan di desa pesayangan Kecamatan Martapura.



- Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan
Program ini mempunyai target pada tahun 2017 sebesar 15 % dengan realisasi sebesar 12 % dan capaian 120 %, program ini didukung kegiatan :
 - Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial yang selesai ditangani.
Dari 12 kasus perselisihan yang ada semuanya dapat difasilitasi penyelesaiannya untuk tahun 2017, terdiri dari perusahaan:
 - PT.Rhodes
 - PT. Sejahtera Sukses Sejati
 - PT. Kartika Purna Yudha
 - PT. Cimb Niaga
 - PT. Dafana Surya Medika
 - PT. Indo Marco Aditama
 - PT. Indo Marco Aditama
 - PT. Palmina Utama
 - PT. Palmina Utama
 - PT. Columbindo Perdana
 - PT. Nawakara
 - PT. Batu Anugerah Mineral Recause
 - Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Dengan target 45 perusahaan terealisasi 55 perusahaan yang mendapatkan sosialisasi UU ketengakerjaan dan BPJS ketenagakerjaan, perusahaan yang mengerti dan membuat peraturan perusahaan, perpanjangan peraturan perusahaan, pendaftaran dan pencatatan sesuai permanaker no 19 Tahun 2012 dan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai permen No 100 Tahun 2004.

Permasalahan

- Angka Pengangguran terbuka didapat dari data BPS Kab. Banjar yang perhitungannya hanya dilakukan sebanyak 2 tahun sekali, Dinas Tenaga kerja dan Kab. Banjar tidak mempunyai data dasar perhitungannya
- Banyaknya perusahaan yang jalan ditempat (slow down) dan menutup kegiatannya karena tidak dapat beroperasi terutama perusahaan tambang sehubungan cadangan batu bara yang sudah habis sehingga mengakibatkan tidak bisa menyerap

tenaga kerja dan malah lebih parah lagi mengakibatkan Pemutusan hubungan kerja.

- Perselisihan yang terjadi sekarang ini karena PHK dan didominasi perusahaan tambang, karena tambang tutup sehubungan cadangan batu bara yang sudah habis.
- Belum adanya tempat pelatihan kerja dan tenaga fungsional instruktur sangat mempengaruhi Kegiatan pelatihan tenaga kerja, karena Dinas Tenaga kerja dengan keterbatasan sarana dan sumber daya manusia maka pelatihan kepada tenaga kerja belum maksimal, sehingga penyerapan tenaga kerja ke dunia kerja masih dibawah dari target dan saat ini hanya mengandalkan kebutuhan dari perusahaan
- kegiatan pelatihan tenaga kerja mandiri/wirausaha baru dipedesaan dan pelatihan menjahit, tahun 2017 belum ada penganggaran monitoring untuk ex peserta pelatihan apakah mereka berusaha setelah mendapatkan pelatihan keterampilan tersebut.
- Tenaga kerja asing yang bekerja di Kab. Banjar rata-rata memiliki ijin memperkerjakan tenaga asing pada Kementerian Tenaga Kerja dan Pemerintah Propinsi, karena mereka bersifat sementara dan rata rata ijin IMTanya hanya 6 bulan.

Solusi

- Untuk menekan angka pengangguran terbuka Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi harus mempunyai program yang mensinegritaskan programnya dengan dinas dinas terkait terutama program dan kegiatan pelatihan ketenagakerjaan untuk bisa berusaha.
- merubah arah kebijakan dengan sasaran program lebih kepada kegiatan pelatihan yang bersifat produktivitas.
- Tahun 2018 akan melaksanakan kegiatan Job fair dengan dana APBN untuk penyerapan tenaga kerja di dunia usaha
- Melaksanakan kegiatan pelatihan yang bersifat kompetensi, produktivitas, masyarakat dengan peserta dari pencari kerja yang terdaftar (AK1) dan dari desa sesuai usulan masyarakat dalam musrembang kabupaten.
- Tahun 2018 akan melaksanakan kegiatan bursa kerja online untuk mempertemukan pencari kerja dan dunia usaha.
- Memonitoring peserta ex-pelatihan, apakah dari hasil pelatihan tersebut mereka membuka dunia usaha

3.2.12. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial

Sasaran Meningkatkan Cakupan Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial memiliki 1(satu) indicator yaitu Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani, capaian indikator Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani sebesar 70 % masuk dalam kategori Sangat Tinggi, dengan realisasi 70 dari target 100 %.

Capaian target kinerja indikator persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 29. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	100	70	70	100	100	100

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS yaitu Anak Balita Telantar, Anak Telantar, Anak berhadapan dengan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut Usia Telantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga bermasalah social psikologis, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Komunitas Adat Terpencil.

Indikator Kinerja Utama dari Sasaran meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial yaitu persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani, dengan definisi operasional penyandang masalah kesejahteraan sosial (fakir miskin, penyandang disabilitas, orang terlantar) yang mendapat pelayanan dengan formulasi jumlah PMKS (fakir miskin, penyandang disabilitas, orang terlantar) yang mendapat pelayanan dibagi dengan jumlah PMKS (fakir miskin, penyandang disabilitas, orang terlantar) yang terdaftar dikali 100.

Untuk tahun 2017, menurut data PMKS yang mendapat pelayanan sebanyak 18.820 jiwa dibandingkan dengan Jumlah PMKS yang terdaftar sebanyak 26.806 jiwa dikalikan dengan dengan 100 sehingga didapat realisasi sebanyak 70% dari target yang ditetapkan sebesar 70% atau capaian sebesar 100%.

Data PMKS yang mendapat layanan dari Dinas Sosial dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Bedah Rumah	20 Buah
2	KUBE	10 Kelompok
	KUBE PKH	44 Kelompok
3	WRSE	30 Orang
4	PSBR/PSBW	100 Orang
5	Evakuasi Orang/Anak terlantar	20 Orang
6	Penyandang Disabilitas	70 jiwa 10 jiwa
7	Eks Penyandang Penyakit Sosial Lansia	14 jiwa 376 jiwa
8	Penerima PBI JKN	3.574 jiwa
9	Rastra	12.386 jiwa
10	PKH	2.166 KK
	Jumlah	18.820 jiwa

Program dan kegiatan yang menjadi pengungkit bagi ketercapaian target yaitu :

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan:
 - Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak; Kegiatan berupa Tim Koordinasi dan Operasional Perlindungan Sosial Hukum Perempuan Anak;
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

- Kegiatan berupa Validasi Data PMKS, PBI JKN dan KKS kab. Banjar
- Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
Kegiatan berupa penanganan bencana dan peningkatan keterampilan relawan social Tagana Kab. Banjar.
 - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan:
 - Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin;
Kegiatan berupa pemberian pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin, pemberian peralatan dan bahan untuk berusaha.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin;
Pemberian Bahan Material untuk pemenuhan kebutuhan papan masyarakat miskin (Bedah Rumah).
 - Pendidikan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
Kegiatan berupa bimbingan social bagi PMKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi), bantuan uang saku dan transport untuk siswa PSBR dan PSBW serta pemberian peralatan dan perlengkapan membuat kue bagi WRSE.
 - Program Pembinaan Anak Terlantar;
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; kegiatan berupa penanganan orang terlantar.
 - Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya, dengan kegiatan :
 - Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma;
Kegiatan berupa Bimbingan social untuk Penyandang Disabilitas, pelatihan Baca Tulis Al Quran Digital/Brailey, pemberian peralatan dan perlengkapan membuat kue, penyerahan Al Quran Digital/Brailey bagi peserta bintek dan penyerahan Al Quran Digital/Brailey untuk Perpustakaan Daerah.
 - Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
Kegiatan berupa pembinaan Penyandang Disabilitas dengan diikuti pendidikan dan pelatihan ke Solo, Makassar, Cibinong dan Provinsi.

- Program Perberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial; kegiatan berupa pemberian pendidikan dan pelatihan, penyerahan blender dan mesin pencuci kendaraan bermotor bagi eks Napi, Narkoba dan gepeng di Kab. Banjar.

Gambar 3. 8. Kegiatan Bedah Rumah



Gambar 3. 9. Kegiatan Wanita Rawan Sosial Ekonomi



3.2.13. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 2(dua) indikator yaitu Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Persentase Kelurahan Layak anak, capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 30. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	70	100	142.85%	80	81.25
2	Persentase kelurahan layak anak	0	7.7	7.7	100%	46	0



a. Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak

Definisi operasional dari sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu penyelesaian kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi dari segi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Formulasi yang digunakan untuk sasaran ini yaitu jumlah penanganan masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tuntas dan ditutup kasusnya berbanding dengan jumlah pengaduan masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditangani.

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 142,85 % (tercapai), terealisasi 70 % dari target 70 % tingginya tingkat ketercapaian ini diakibatkan beberapa faktor pengungkit diantaranya kegiatan dan program yang dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan Jumlah korban yang melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ke P2TP2A Kab. Banjar pada tahun 2017 sebanyak 32 kasus. Korban terbanyak berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 22 orang (68,72%) sedangkan anak laki-laki sebanyak 10 orang (31,25%). Jenis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak laki-laki sebanyak 5, dimana jenis kasus terbesar adalah kekerasan seksual sebanyak 16 kasus, dimana 11 kasus terjadi pada anak perempuan. Jumlah kasus keseluruhan sebanyak 37 kasus, dimana 14 kasus terjadi pada anak perempuan. Seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak laki-laki yang melapor dapat ditangani dan diselesaikan.

Keberhasilan capaian indikator diatas dikarenakan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksimal, koordinasi yang baik dan intensif baik dengan kepolisian, Pihak RS dan Psikolog ULM, Rapat koord dan kerjasama dg pihak lapas anak lintas sektor yg terkait.

Gambar 3. 10. Koordinasi dan Kerjasama dengan Pihak Lapas Anak



Program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator tersebut meliputi :

- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan :
 - Kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
 - Kegiatan berupa jasa medis untuk visum korban kekerasan;
 - Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT, kegiatan berupa pelatihan SDM tentang pelayanan korban kekerasan target dilaksanakan 1 kali pada bulan Oktober.

b. Persentasi kelurahan layak anak

Menurut definisi operasional yang dimaksud dengan kelurahan layak anak yaitu kelurahan yang telah memenuhi 31 indikator dengan formulasi jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria layak anak dibandingkan jumlah seluruh kelurahan yang ada dikalikan dengan 100.

Untuk tahun 2017 dari target yang ditetapkan sejumlah 7,7, persen didapat realisasi 7,7% dengan capaian sebesar 100% dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Dari 13 kelurahan yang ada di Kabupaten Banjar telah terpenuhi 1 indikator kelurahan layak anak yaitu di Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura. Bila

dibandingkan dengan capaian tahun 2016 masih belum ada dikarenakan belum ada target pada tahun tersebut.

Sebagai tindak lanjut di tahun 2017 telah terbentuk Gugus Tugas Layak Anak di tingkat Kabupaten dan terbentuknya Forum Anak tingkat Kabupaten dan Forum Anak di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Gambut, Kecamatan Martapura dan Kecamatan Astambul.

Telah terbangunnya Komitemen SKPD yang terkait dan terbitnya Perda Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar menjadi faktor pendukung terpenuhinya target persentase Kelurahan Layak Anak. Pembuatan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah perlindungan perempuan dan anak segera direalisasikan.

Gambar 3. 11. Komitmen SKPD Terkait Dalam Pembentukan Forum Anak



Adapun program yang menjadi faktor penguangkit ketercapaian sasaran persentase Kelurahan Layak Anak yaitu:

- Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.

Dengan kegiatan :

- Kegiatan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak. Kegiatan berupa sosialisasi program kegiatan dan peraturan perundang-undangan PP dan PA dengan 200 orang. lokasi kegiatan di Martapura;

- Kegiatan sosialisasi sekolah ramah anak dengan 100 orang di Kabupaten Banjar. Kegiatan berupa sosialisasi sekolah ramah anak dengan 100 orang di Martapura.
- Kegiatan sosialisasi puskesmas ramah anak dengan 100 orang di martapura.

Permasalahan :

- Tidak adanya PERDA dan PERBUP mengenai perlindungan perempuan dan anak
- Masih minimnya pengetahuan dan dukungan masyarakat
- Masih minimnya sarana prasarana khususnya pada fasilitas umum yang mendukung pemenuhan hak anak seperti pojok laktasi dan pojok bermain

Solusi :

- Perlu lebih giat lagi sosialisasi terkait Layak Anak khususnya di tingkat sekolah dan sarana kesehatan

3.2.14. Meningkatnya Mitigasi Bencana

Sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana memiliki 2(dua) indikator yaitu Persentase Pengurangan Resiko Bencana dan Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi, capaian indikator kinerja Persentase pengurangan resiko bencana sebesar 87,27 % masuk dalam kategori sangat berhasil, dengan realisasi 0,048 % dari target 0,055 %. Dan capaian indikator kinerja sasaran persentase kejadian bencana yang ditanggulangi sebesar 100 % (tercapai) terealisasi 100 % dari target 100 %.capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 31. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	102,04 %	0,05%	0,06%	87,27	0,04%	72,73%
2	Persentase Kejadian Bencana yg ditanggulangi	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %

a. Persentase Pengurangan Resiko Bencana

Berdasar definisi operasional pengurangan resiko bencana meliputi manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana.

Adapun persentase pengurangan resiko bencana sebesar 0,048 % untuk tahun 2017 terealisasi sebesar 0,055 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,048% atau dengan capaian sebesar 87,27% dengan penilaian peringkat kerja tinggi walaupun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 terjadi penurunan capaian sebesar 14,77% dari 102,04%. Karena keterbatasan data yang ada, data yang dapat diperhitungkan untuk tahun 2017 hanya pada luasan wilayah terdampak kebakaran hutan & lahan.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat capaian diantaranya yaitu terjadi peningkatan kejadian bencana dibandingkan dengan tahun 2016. Untuk Kasus Kebakaran Hutan & Lahan dari 14 kasus menjadi 30 kasus. Hal ini dikarenakan faktor iklim dan cuaca yang panas yang menyebabkan banyaknya titik panas / hot spot. Luas lahan yang terbakar juga bertambah dari 189 Ha (2016) menjadi 211,5 Ha (2017). Hal itu seiring dengan bertambahnya jumlah hot spot dari 42 titik (2016) menjadi 98 titik (2017).

Sedangkan untuk Bencana Puting Beliung juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Cuaca ekstrem yang terjadi di sebagian besar Wilayah Indonesia cukup berpengaruh terhadap cuaca di Kabupaten Banjar. Kondisi wilayah Kabupaten yang kebanyakan daerah terbuka, datar dan dipicu oleh perubahan iklim sangat potensial terjadinya angin puting beliung. Tercatat 41 kasus kejadian puting beliung selama Tahun 2017 atau meningkat dari 22 kasus di tahun 2016. Untuk jenis bencana lainnya seperti Banjir & Tanah Longsor relatif sama dengan tahun sebelumnya.

Dari catatan BPBD tahun 2016 s/d 2017 telah terjadi beberapa bencana sebagai berikut :

Tabel 3. 32. Bencana yang Terjadi di Tahun 2017

No	Jenis bencana	Tahun			
		2016	Korban/ Daerah terdampak	2017	Korban/ Daerah terdampak
1	Banjir	15 kasus	4 kecamatan (14 Desa/kel)	13 kasus	4 kecamatan (13 Desa/kel)
2	Karhutla	14 kasus	42 hot spot (8 kecamatan)	30 kasus	98 HOT SPOT (15 Kecamatan)
3	Puting Beliung	22 kasus	10 Kecamatan (25 desa)	41 kasus	12 Kecamatan (43 desa)
4	Tanah Longsor	1 kasus	1 Desa (Paramasan Bawah)	1 kasus	Kecamatan Aranio

No	Jenis bencana	Tahun			
		2016	Korban/ Daerah terdampak	2017	Korban/ Daerah terdampak
5	Kebakaran Pemukiman	27 kasus	92 bangunan/ rumah	21 kasus	61 rumah/ Bangunan

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target Persentase Pengurangan Resiko Bencana didukung oleh program kegiatan yaitu:

- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam yang didukung oleh kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana dengan kegiatan berupa :
 - Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) sebanyak 5 kegiatan di Kec. Astambul Desa Pingaran Ilir, Kec. Martapura, Kec. Astambul Desa Jati, Kec. Astambul Kota dan Kec. Astambul Desa Pasar Jati. Untuk tahun 2017 pengurangan risiko bencana menitik beratkan pada beberapa kawasan yang ada di Kec. Astambul, Kabupaten Banjar.
 - Rapat Koordinasi (RAKOR) Penanggulangan Bencana sebanyak 1 kegiatan di Aula Barakat Kabupaten Banjar.
 - Sosialisasi Pengembangan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di laksanakan di 2 Desa yang telah di bentuk yaitu Desa Lumpangi Kec. Pengaron dan Desa Lawiran Kec. Simpang Empat, Kabupaten Banjar. Untuk 2 Destana yang baru di bentuk akan dilaksanakan pengembangannya pada tahun 2018.
 - Sosialisasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan, 1 kegiatan di Kec. Gambut, 1 kegiatan di Kec. Simpang Empat dan 2 kegiatan di Kec. Martapura.
 - Gladi Penanggulangan Bencana sebanyak 1 kegiatan yang di laksanakan di Halaman Kantor BPBD Kab. Banjar.
 - Apel Siaga Bencana Karhutla sebanyak 1 kegiatan yang di laksanakan di Halaman Kantor BPBD Kab. Banjar.
 - Mempublikasi Media Cetak dan Elektronik yang dilaksanakan setiap bulan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang kebencanaan, selain itu juga menggunakan Leaflet, stiker, Spanduk Himbauan, Kalender serta mencetak Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI).

- Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan didukung oleh Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran melalui kegiatan berupa :
 - Pembentukan Posko Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan mulai tanggal 01 Agustus s/d 15 Oktober 2017 dengan menyiapkan 50 personil untuk 5 buah posko yang tersebar di Kec. Martapura Barat, Beruntung Baru, Tatah Makmur, Km.17 Gambut dan Kantor BPBD Kab. Banjar di Martapura, personil terdiri dari PMI Kab. Banjar, TNI, Polri dan BPBD Kab. Banjar.
- Program Tanggap darurat dengan didukung oleh Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana melalui kegiatan berupa;
 - In House Training Pengoperasian GPS sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah peserta 25 orang.
 - In House Training Scuba Diving sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah peserta 5 orang.
 - In House Traing Tim Reaksi Cepat sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah peserta 25.
 - Pelatihan Tanggap Darurat Bencana sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah peserta 25 orang.
 - Pengembangan Pelatihan Lapangan Aparatur Kebencanaan sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah peserta 20 orang.

Kegiatan Tanggap darurat di daerah terkena bencana

 - Pada tahun 2017 sekitar 658 jiwa yang terdampak bencana diberikan bantuan logistik baik berupa sandang maupun pangan.
 - Kegiatan Penyediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
 - Pemenuhan kebutuhan untuk buffer stock logistic dalam rangka penanggulangan bencana untuk 12 bulan serta pembelian peralatan penanggulangan bencana dalam mendukung operasional.
- Program Pasca Bencana didukung oleh kegiatan
 - Kegiatan Pendataan Dampak Bencana dengan indicator tersusunnya data dampak bencana meliputi;
 - Berupa cetak peta hasil rehab rekons beserta data kerusakan dan kerugian pasca bencana selama 12 bulan.
 - Kegiatan Pengembangan Partisipasi dan Kerjasama Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan indicator

terlaksananya sosialisasi rehab rekons pasca bencana dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat pasca bencana meliputi;

- Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebanyak 2 kegiatan di Desa Tangguh Bencana yaitu di Desa Lawiran Kec. Simpang Empat dan Desa Lumpangi Kec. Pengaron Kabupaten Banjar.
- o Kegiatan Penyusunan Program Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan indicator tersedianya tim konsultan perencana pendampingan dana hibah rehab rekons meliputi;
 - Kegiatan berupa jasa konsultasi perencanaan kegiatan rehab rekons pasca bencana sebanyak 1 kegiatan.
- o Kegiatan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan indicator tersusunya tim Jitu Pasna.
- o Bimbingan teknis kajian terpadu pasca bencana (Jitu Pasna) yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan tim dalam penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana.
- o Pengembangan Partisipasi dan Kerjasama Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Dana Hibah) dengan indicator terlaksananya perbaikan jalan desa untuk menunjang perekonomian masyarakat pasca bencana meliputi;
 - Rehabilitasi Jalan Desa, Jalan Sei. Tabuk - Tanah Intan Kec. Simpang empat berupa cor beton.
 - Rehabilitasi Jalan Desa, Jalan Melayu Ulu – Pematang Baru Kec. Martapura Timur berupa cor beton dengan paving blok.
 - Rehabilitasi Jalan Desa, Jalan Pemakuan – Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk berupa cor beton.
(pengerjaannya menggunakan kontrak multiyear).

Dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Banjar telah melakukan upaya Mitigasi Penanggulangan bencana dengan membangun upaya penanggulangan yang bersifat Non Struktural. Sedangkan upaya mitigasi yang bersifat struktural dilaksanakan oleh SKPD lain seperti Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Bina Marga dan instansi terkait lainnya.



b. Persentase Kejadian Bencana yg Tertanggulangi

Persentase kejadian bencana yang tertanggulangi yaitu kemampuan daerah untuk menanggulangi dampak bencana yang terjadi dengan formulasi kejadian bencana yang ditanggulangi dibagi dengan seluruh jumlah kejadian bencana dikalikan 100%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjar selalu di respon dan di tanggulangi sesuai dengan kebutuhan peralatan dan logistik yang perlukan.

Berdasarkan laporan petugas operator kecamatan tentang kejadian bencana, tim langsung diterjunkan untuk mengidentifikasi kerusakan/ kerugian yang dialami korban. Setelah itu akan dikirim bantuan peralatan atau logistik serta sandang berupa bahan makanan siap saji serta pakaian yang diperlukan. Untuk capaian pada indikator kinerja ini sebesar 100% yang berarti seluruh kejadian bencana yang ada di Kabupaten banjar telah tertanggulangi dengan baik.

Upaya-upaya preventif adalah dengan memberikan pembekalan kepada masyarakat dan relawan berupa pengetahuan dan pelatihan bagaimana cara menanggulangi bencana, evakuasi saat terjadi bencana dengan kegiatan Penyuluhan, Pelatihan, Bimbingan Teknis serta himbauan dalam bentuk spanduk, leafleat

Permasalahan

- Penyelenggaraan Penanggulangan bencana merupakan salah satu instrumen Pembangunan di Kabupaten Banjar belum sepenuhnya berbasis pada Pengurangan Resiko Bencana (PRB) karena tidak hanya BPBD yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi resiko bencana oleh karena itu masih kurangnya sinergitas antara stakeholder.
- Belum adanya indikator yang jelas untuk menghitung formulasi prosentase Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang merupakan IKU dari RPJMD
- Masih kurangnya peralatan evakuasi penanggulangan bencana
- Perlunya pembinaan kelembagaan bagi masyarakat terhadap proses tahapan pengajuan bantuan untuk pasca bencana dalam penanggulangan bencana.
- Kurangnya data-data presisi dalam penyusunan kebutuhan pascabencana (JITUPASNA)



Solusi

- Untuk mengatasi permasalahan dalam Pengurangan Resiko Bencana (PRB), dokumen yang sudah dimiliki yaitu Resume Penanggulangan Bencana (RPB) lima tahunan periode 2013-2017 di review karena pada dokumen RPB tersebut memuat seluruh kegiatan Penanggulangan Bencana selama lima tahun kedepan dengan menyesuaikan dengan visi dan misi bupati terpilih dan melibatkan semua SOPD dan stakeholder terkait dalam penyusunannya.
- Untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana seharusnya ditetapkan dalam Perbup/Perda sehingga RPB bukan saja menjadi dokumen BPBD tetapi menjadi dokumen Kabupaten yang dapat menjadi acuan stakeholder terkait.
- Pembelian Peralatan Penanggulangan Bencana agar dapat dianggarkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- Hendaknya dibentuk forum SOPD serta lintas sektoral lainnya dalam penanganan bencana di kabupaten banjar secara terpadu dan komprehensif
- Pemberian Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pascabencana dan peningkatan anggaran dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengumpulan data JITU PASNA, serta peningkatan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyusunan JITU PASNA.

3.2.15. Meningkatnya Kualitas Organisasi Kepemudaan dan Jiwa Kewirausahaan Pemuda

Sasaran Meningkatnya Kualitas Organisasi Kepemudaan dan Jiwa Kewirausahaan Pemuda diukur indikator Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan. Capaian pada tahun 2017 adalah sebesar 117 % dan masuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 0,7 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,6 %. capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3. 33. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas Organisasi Kepemudaan dan Jiwa Kewirausahaan Pemuda

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentasi Pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	100%	0,60%	0,70%	117%	1,2	58,87%

Untuk Indikator Persentasi Pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan divinisi oprasionalnya yaitu Pemuda adalah penduduk dengan usia 16 – 30 Tahun dan Pembinaan Kepemimpinan adalah pelatihan dan kegiatan sejenisnya yang berorientasi pada pembentukan karakter pemuda, formulasi untuk sasaran ini adalah jumlah pemuda yang dibina/ jumlah seluruh pemuda x 100%. Jumlah pemuda yang dibina pada tahun 2017 sebanyak 1.029 orang dibagi dengan jumlah seluruh pemuda 145.680 orang dikalikan 100, Untuk tahun 2017 Realisasi adalah 0,7 dengan target 0,6 pencapaian kinerja sebanyak 117%. Kinerja dari sasaran ini dapat diklasifikasikan sangat tinggi. Keberhasilan capaian pada tahunj 2017 telah menyumbang sebesar 58,87% untuk target akhir RPJMD.

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 0,4 % dengan tingkat capaian 100% terjadi peningkatan sebesar 0,3%. Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sangat berhasil bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dengan indikator program persentase Pemuda Yang Dapat Dikembangkan Bakat dan Potensinya, formulasi jumlah pemuda yang dikembangkan bakatnya 150 orang dibagi dengan jumlah seluruh pemuda di kabupaten banjar 145.680. target 0,1% realisasi 0,1%, persentase realisasi kinerja 100% . didukung kegiatan :
 - Kegiatan Pendataan Potensi Kepemudaan, berupa pemuda yang dikembangkan potensinya sebanyak 51 orang melalui Pencarian Bakat Pemuda berupa seleksi seleksi berjenjang diantaranya Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Kapal Pemuda Nusantara (KPN), Bhakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP), Jambore Pemuda

Indonesia (JPI), Paskibraka Indonesia dan Napak Tilas Jejak Pahlawan.

Gambar 3. 12. Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan



- Banyaknya pemuda Kegiatan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan berupa pemuda (non pesantren) yang paham baca tulis alquran sebanyak 100 org, melalui Pegerlaran serta lomba lomba keagamaan
- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan indikator program persentase Pemuda Yang berperan dalam pembangunan, formulasi jumlah pemuda yang berperan dalam pembangunan 225 orang dibagi dengan jumlah seluruh pemuda di kabupaten banjar 145.680. target 0,15% realisasi 0,16%, persentase realisasi kinerja 100% didukung kegiatan :
 - Pendidikan dan Pelatihan Dasar kepemimpinan, berupa pemuda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dasar sebanyak 77 org melalui Pelatihan dan Pendidikan yang pesertanya di Karantina di suatu tempat dan diberi pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh Tutor yang terlatih.

Gambar 3. 13. Pendidikan dan Pelatihan Dasar kepemimpinan





- Pembinaan Organisasi Kepemudaan berupa pemuda yang ikut dalam kegiatan PHBN dan Duta Pemuda sebanyak 55 orang
- Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda indikator kegiatan Jumlah pemuda yang paham akan peraturan ke organisasian dan UU pemuda, target 100 org, realisasi 200 % Kegiatan ini berupa Temu Wicara dan Rakor Pemuda yang diikuti Pemuda dan Pengurus OKP persentase kinerja 100%, Karena antusiasnya pemuda dalam mengikuti kegiatan tersebut.
- Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda indicator kegiatan Jumlah Pemuda yang mampu membuka usaha setelah mendapatkan pelatihan, target 15 orang realisasi 100 % Kegiatan ini berupa Pemberian bimbingan Kelompok Usaha Pemuda Produktif dan Pemuda Pelopor selanjutnya diikutsertakan dalam penilaian tingkat Provinsi Kalimantan Selatan persentase kinerja 100%, Karena antusiasnya pemuda dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Permasalahan

- Kurangnya fasilitas atau sarana prasarana yang tersedia, seperti tidak adanya ruangan untuk kegiatan tersebut di atas, alat alat kesenian untuk pemuda yang berbakat serta anggaran yang tidak mencukupi.
- Tidak adanya ruangan yang besar untuk menyelenggarakan kegiatan ini jadi terpaksa harus menyewa tempat di luar dinas.
- Tidak mempunyai alat-alat latihan yang memadai serta mobilitas kegiatan peserta tinggi yaitu mengantar antar jemput latihan dilapangan, seperti kegiatan Paskibaraka.
- Tidak adanya fasilitas atau sarana prasarana yang tersedia, seperti tidak adanya ruangan untuk kegiatan tersebut di atas, alat alat kesenian untuk pemuda yang berbakat serta anggaran yang tidak mencukupi.
- Tidak semua OKP dan Pemuda yang bisa mengikuti karena tempat OKP yang berada di kecamatan Jauh.
- Tidak semua KUPP tertampung dalam kegiatan tersebut diakibatkan dana / anggaran yang kurang
- Pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan kewirausahaan merupakan Tugas dan fungsi SKPD lain seperti Disnaker, Disperindag dan Dinas Koperasi dan UKM, jadi sulit untuk dikerjakan oleh Dispora



Solusi

- Dibuatkan ruangan yang presentatif, disediakan alat alat kesenian untuk pemuda, dan diberikannya anggaran yang memadai.
- Dibuatkan aula yang cukup luas di Dinas Pemuda Olahraga untuk kegiatan tersebut agar pergelaran lmtaq bisa diselenggarakan di Dispora Kabupaten Banjar.
- Diadakan alat transportasi yang cukup seperti bus untuk mengangkut peserta dari asrama ke lapangan.
- Dibuatkan ruangan yang representatif, disediakan alat alat kesenian untuk pemuda, dan diberikannya anggaran yang memadai.
- Kegiatan dilakukan di Kecamatan yang jauh agar pemuda dan OKP dikecamatan yang jauh bisa ikut.
- Dana kegiatan di tambah agar lebih banyak menampung kegiatan kelompok Usaha Pemuda Produktif.
- Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar akan merubah Indikator Kinerja Utama pada Revisi RPJMD Kab. Banjar 2019-2021.

3.2.16. Meningkatkan Perilaku Berolah Raga Di Masyarakat

Sasaran Meningkatkan Perilaku Berolahraga di Masyarakat diukur dengan indikator Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga, memiliki capaian kinerja sasaran sebesar 88 % masuk dalam kategori tinggi, dengan realisasi 50 % dari target 56,86 %. capaian indikator dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 34. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatkan perilaku berolah raga di masyarakat

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas olahraga	94,85	56,86%	50%	88	67,24	74%

Realisasi kinerja pada sasaran ini (Persentase desa yang memiliki fasilitas olahraga) mencapai 50%. Pencapaian tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga salah satu atau lebih yaitu lapangan sepak bola, lapangan volley, lapangan futsal, atau lapangan bulu tangkis dibagi

dengan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Banjar dikalikan 100. Sampai dengan tahun 2017 jumlah lapangan olah raga sebanyak 145 desa/kelurahan dibagi dengan 290 desa/kelurahan dikalikan 100. Dengan demikian realisasi dibandingkan dengan target mencapai 88% (lebih rendah dari dari capaian realisasi yang dicapai tahun 2016).

Capaian kinerja sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 50% atau tidak ada penambahan desa yang memiliki lapangan olahraga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir periode RPJMD, capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 telah mencapai 74%. Dengan demikian untuk mencapai target jangka menengah masih diperlukan pencapaian target sebesar 26%.

Gambar 3. 14. Lapangan Olahraga di Desa



Guna mencapai sasaran 2 ditunjang dengan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga melalui kegiatan :

- Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga berupa Fasilitasi Kontingen Kab. Banjar pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi, Fasilitasi Pengiriman Kontingen POPDA Spesial Olympic Indonesia (SOIna) Tingkat Provinsi di Banjarbaru,
- Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah dengan menyelenggarakan Kejuaraan Sepak Bola, Kejuaraan Bola Volly, Kejuaraan Bola Basket

Gambar 3. 15. Lapangan Olahraga di Desa



- Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi yang diisi dengan sub kegiatan berupa Senam Massal Setiap Hari Minggu yang bertujuan untuk menggalakkan dan memasyarakatkan olah raga, Gowes Pesona Nusantara Etape Martapura, Jalan Santai Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjar, Jalan Santai Peringatan Hari Olahraga Nasional.

Gambar 3. 16. Event Gowes Pesona Nusantara Etape Martapura



- Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat, berupa Fasilitas Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA), Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja- Perlengkapan Kontingen PEPARPROV III Tahun 2017, Fasilitas Pekan Olahraga Paralympic Tk. Provinsi Kal- Sel (PEPARPROV III).
- Pengembangan Olahraga Rekreasi, yang diisi dengan sub kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan pelaksanaan sebanyak 3 kali, Fasilitas Pengadaan Sarana

Olahraga Tradisional, Fasilitas Pengiriman Kontingen Olahraga Rekreasi, Pengiriman Gerak Jalan HUT Provinsi dan HUT RI Tahun 2017 di Banjarmasin, Pengiriman Kontingen pada Festival Olahraga Rekreasi Nasional Tahun 2017 di Banjarmasin.

Permasalahan

- Pada saat penyusunan RKA 2017 kegiatan pembangunan fasilitas olahraga tidak dianggarkan dan direncanakan dianggarkan pada APBD perubahan/Rencana Kerja Anggaran Perubahan Anggaran 2017.
- penganggaran pada APBDP/RKAP 2017 tidak memungkinkan karena adanya kebijakan pengurangan/efisiensi anggaran dan waktu untuk proses pengadaan fasilitas olahraga setelah pengesahan APBDP terlalu pendek.

Solusi

- Pengadaan fasilitas lapangan olah raga dan sarana penunjangnya dapat bekerjasama dengan pihak desa melalui optimalisasi dana desa.

3.2.17. Meningkatkan Produksi Dan Produktifitas Pertanian Dan Perikanan

Ditinjau dari struktur perekonomian, Kabupaten Banjar berada pada tipe agraris terlihat dari besarnya dominasi kategori lapangan usaha pertanian yang menyumbang lebih dari 18,61% dari total PDRB atau memberikan kontribusi terbesar. Merupakan pilihan yang tepat bagi pemerintah daerah membangun sektor pertanian karena sesuai dengan potensi daerah. Dilakukan melalui sasaran Meningkatkan Produksi Dan Produktifitas Pertanian Dan Perikanan, kinerjanya diukur melalui 12 indikator, rata-rata capaian sebesar 95,49% masuk dalam kategori tinggi. Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 35. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Produksi komoditas prioritas padi sawah (ton)	104,37%	242.752	218.855*	90,16	263.251	83,14
2	Produksi komoditas prioritas padi ladang (ton)	100%	28.047	31.532*	100	36.671	85,99

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
3	Produksi karet (ton)	93,67%	19160,99	17627	91,99	26205,16	67,27
4	Produktifitas komoditas prioritas padi sawah kw/ha	96,00%	43	38,95*	90,58	52,33	74,43
5	Produktifitas komoditas prioritas padi ladang kw/ha	100%	30	28,33*	94,43	39,3	72,09
6	Produktifitas karet (kg/ha)	87,98%	1163	892	76,7	1.590	56,1
7	Persentase Kelompok tani madya (%)	100%	3,03	3,03	100	3,68	82,34
8	Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi (%)	100%	80	81,89	100%	82%	99,86
9	Populasi sapi (ekor)	100%	16.950	17.627	100	18000	97,92
10	Jumlah produksi ikan budidaya (ton)	100%	50.000	58.105	116%	65.000	89,39
11	Jumlah produksi ikan tangkap (ton)	75,68%	8.228	11,182	86	12.112	79,47
12	Jumlah konsumsi ikan kg/kapita	100%	50	51	102,00	55	92,72

Dari 12 indikator kinerja pada sasaran meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan di atas, 10 indikator termasuk kategori sangat tinggi dan 2 indikator termasuk kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka terlihat pada tabel di atas bahwa ada 2 indikator yang melampaui terhadap target akhir RPJMD yaitu capaian indikator persentase luasan pertanian yang terlayani air irigasi (102,36%) dan capaian indikator konsumsi perikanan (102,00%).

Analisa capaian masing-masing indikator sebagai berikut :

a. Indikator komoditas prioritas padi sawah

Yang dimaksud dengan produksi padi sawah adalah jumlah output atau hasil panen padi sawah dari luas lahan petani selama satu kali musim tanam. Formulasi produksi padi adalah fungsi dari luasan lahan yang panen dikali produktifitas lahan (sampling ubinan) pada 1 atau beberapa kali musim tanam

Berdasarkan angka sementara angka produksi padi sawah sampai Desember 2017 sebesar 218.885 ton, bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan realisasi ini menorehkan capaian sebesar 90,16% dengan kategori tinggi . dibanding tahun sebelumnya capaian kinerja indikator tahun ini lebih rendah, pada tahun 2016 mampu melampaui target dengan capaian 104,37%. terhadap target akhir RPJMD capaian tahun ini telah mencapai 83,14%



Dari sisi realisasi, produksi padi sawah tiap tahunnya mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 ini merupakan produksi terendah dari tahun-tahun sebelumnya. dari tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 24.062 ton (9,90%), produksi padi sawah dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 36. Realisasi Indikator Produksi Padi Sawah Tahun 2013 s/d 2017

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017
Produksi padi sawah	(ton)	257.555	236.614	235.504	242.947	218.855

Penurunan produksi padi sawah disebabkan oleh berkurangnya luas tanam dan panen sebagai dampak dari alih fungsi lahan potensial dan dampak perubahan iklim, petani hanya dapat menanam satu kali setahun musim hujan yang panjang pada awal musim tanam (Okt-Mar 2016/2017) menyebabkan permukaan air di lahan pasang surut cukup tinggi dan dalam waktu cukup lama sehingga petani memundurkan jadwal tanamnya

b. Indikator Produksi komoditas prioritas padi ladang

Definisi operasional dari produktifitas padi sawah dan ladang adalah produksi padi sawah dan ladang per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusahatani padi sawah dan ladang selama satu kali musim tanam. Formulasi produktifitas padi diperoleh dari hasil sampling ubinan pada 1 atau beberapa kali musim tanam dilaksanakan bersama Dinas Tanamana Pangan dan Hortikultura dengan BPS.

Pada tahun 2017, realisasi produksi Padi Ladang 31.532 ton, telah berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 28.047 Ton atau dengan capaian kinerja 100,00 %. termasuk kriteria penilaian realisasi kinerja " Sangat Tinggi". Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 34.921 ton, maka produksi mengalami penurunan sebesar 3.387 ton atau 9,70%%. Dan bila dibanding target akhir RPJMD telah mencapai 85,99%

Produksi padi ladang lebih tinggi dibandingkan target produksi tahun 2017 disebabkan adanya kegiatan APBN yaitu pengembangan padi di lahan kering dan sebagian varietas yang digunakan adalah varietas unggul.

c. Indikator Produktivitas komoditas prioritas padi sawah

Yang dimaksud dengan produktivitas padi sawah adalah produksi sawah persatuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha tani padi sawah. Pada tahun 2017, realisasi produktivitas Padi sawah sebesar 38,95 Kw/Ha (data sementara), diperoleh capaian kinerja 90,58 % terhadap Target sebesar 43,00 Kw/Ha, termasuk kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi". Capaian kinerja indikator lebih rendah dari tahun 2016 sebesar 96,00%. Realisasi tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,85 kw/ha atau 2,23%. dan dibanding dengan target akhir RPJMD sebesar 52,33kw/ha telah mencapai 74,43%

d. Indikator Produktivitas komoditas prioritas padi ladang

Yang dimaksud dengan produktivitas padi sawah adalah produksi sawah persatuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha tani padi ladang. Pada tahun 2017, realisasi produktivitas Padi ladang sebesar 28,33 Kw/Ha, Target Produktivitas padi sawah tahun 2017 sebesar 30,00 Kw/Ha, maka capaian indikator kinerja = (realisasi/target) x 100% yaitu sebesar 94,43 %. Capaian indikator kinerja tersebut termasuk kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi". Capaian indikator tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 33,48 kw/ha, maka produktivitas mengalami penurunan sebesar 15,38%.

petani termotivasi untuk menanam padi di lahan kering (padi ladang) dengan membuka lahan baru dengan adanya kegiatan APBD Provinsi yaitu pengembangan padi di lahan kering dan sebagian varietas yang digunakan adalah varietas unggul

Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator peningkatan produksi padi sawah, produksi padi ladang, produktivitas padi sawah dan produktivitas padi ladang adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
 - Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Berupa penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan AUDP (Asuransi Usaha Tani Padi). satu kegiatan tidak terlaksana yaitu sosialisasi perbub harga tertinggal eceran pupuk karena pada tahun 2017 harga



tertinggi eceran pupuk hanya ditetapkan dengan SK kepla Dinas.

- Kegiatan Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Target kinerja pada kegiatan adalah 2 kegiatan dengan realisasi kinerja 2 kegiatan dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa kegiatan budidaya anggrek dan lomba/kontes durian.
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
 - Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan berupa angka sasaran dan realisasi tanam, panen, produksi dan produktivitas, data statistik pertanian disusun dari 20 kecamatan.
 - Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian berupa data base sebaran penerima pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
 - Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija berupa pelaksanaan GP-PTT padi, palawija dan field day.
 - Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman berupa pembinaan dan pengembangan poktan tanaman hortikultura (jeruk, pisang, cabe).
 - Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan berupa operasional perbibitan dan perbenihan UPT balai benih selama setahun untuk penyediaan benih/bibit unggul bersertifikat.
 - Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian berupa pengendalian OPT padi, OPT jeruk dan OPT pisang, sehingga serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura kurang dari 5%.
 - Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air berupa perencanaan pembangunan irigasi air tanah (dangkal/dalam) 11 unit/paket, perencanaan pembangunan embung sebanyak 5 unit/paket, pengawasan pembangunan embung sebanyak 3 unit/paket.

- Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air (DAK Reguler)
Adapun realisasi kegiatan berupa pembangunan Irigasi air tanah (dangkal/dalam) sebanyak 11 paket pekerjaan.
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan, di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
 - Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Masyarakat berupa monitoring dan pendataan harga pasar produk pertanian/ perkebunan selama 12 bulan.
- Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
 - Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan berupa 4 unit alsintan untuk kelompok tani

e. Indikator Produksi Karet

Poduksi karet adalah jumlah output atau hasil panen karet dari luas lahan perkebunan selama satu kali musim

Pada tahun 2017 Realisasi produksi karet 2017 sebesar 17.627 ton belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 19.160,99 ton atau kinerjanya sebesar 92,23% masuk pada kategori sangat tinggi. Hasil kinerja indikator lebih rendah dari tahun sebelumnya yang berhasil mencatat hasil kinerja sebesar 93,67%. Jika diproyeksikan dengan target tahun 2021 sebesar 26.205,16 ton realisasi produksi tahun 2017 sudah mencapai 67,44% dari target akhir RPJMD 2021

f. Indikator produktivitas karet

Produktifitas karet didefinisikan produksi padi ladang per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusahatani karet. Realisasi Indikator produktifitas karet belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1.163 kg/ha, hanya dapat tercapai 892 kg/ha atau sebesar 76,70%. Dengan proyeksi target 2021 sebesar 1.590 kg/ha, masih kekurangan 698 kg/ha untuk memenuhi target akhir 2021 atau hanya dapat menyumbang 56,10%. Jika dibandingkan dengan produktifitas karet tahun 2016 sebesar 896 kg/ha, Realisasi tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,4%.

Penurunnya produktifitas karet karena banyaknya tanaman tua, rusak dan tidak produktif, penggunaan bibit bukan klon unggul serta adanya serangan OPT. Untuk meningkatkan produktifitas telah dilaksanakan peremajaan karet saat ini sedang dalam pelaksanaan (mulai tanam) sehingga belum menghasilkan/belum berproduksi.

Upaya-upaya untuk mencapai target indikator Produksi Karet dan produktivitas karet dilaksanakan melalui Program dan kegiatan sebagai berikut :

➤ Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Outcome yang diharapkan adalah bertambahnya luas tanaman karet melalui kegiatan peremajaan karet 25.030 hektar di tahun 2016 menjadi 25.242 hektar pada tahun 2017, kegiatan pada program tersebut adalah

- Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering Output kegiatan berupa Pembinaan dan pendampingan kegiatan pengembangan dan peremajaan karet (APBN)
- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

Output kegiatan berupa terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis pengendalian OPT perkebunan dan sosialisasi kebakaran lahan dan kebun. sebanyak 3 kali dengan anggaran dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar, berlokasi di:

- Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio diikuti oleh 50 orang yang terdiri dari 3 Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Tunas Harapan, Melati dan Masa Maju (APBD Kabupaten)
- Desa Belimbing Baru Kecamatan Sungai Pinang diikuti 60 orang yang terdiri dari Gapoktan Sumber Makmur (APBD Provinsi).
- Desa Sungai Landas Kecamatan Karang Intan diikuti 50 orang yang terdiri dari 2 Kelompok Tani yaitu Sumber Mufakat dan Barokat (APBD Provinsi).

kegiatan lainnya adalah sosialisasi kebakaran lahan dan kebun berupa koordinasi dan pembinaan karhutla di Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Cintapuri Darussalam.

Dan juga Melalui dana APBN dan APBN-P 2017 Kabupaten Banjar mendapat alokasi kegiatan peremajaan karet seluas 500 hektar (APBN 100 hektar dan APBN-P 400 hektar).



g. Indikator Persentase kelompok tani madya

Yang dimaksud kelompok tani madya adalah kelompok tani kelas madya yang ada di Kabupaten Banjar selama kurun waktu 1 tahun. Sedangkan formulasinya adalah perbandingan jumlah kelas kelompok tani madya dengan jumlah total kelompok tani. Kelompok tani madya adalah kelompok tani yang paling banyak berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian.

Pada tahun 2017, realisasi persentase kelompok tani madya sebesar 3,03% atau dengan capaian 100% terhadap target sebesar 3,03%. Capaian indikator kinerja tersebut termasuk kriteria penilaian realisasi kinerja " Sangat Tinggi". Capaian kinerja tahun ini sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yakni sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 2,86%, maka kelompok tani madya mengalami peningkatan sebesar 0,17%. Dibanding dengan target akhir RPJMD, realisasi tahun ini telah menyumbang capaian 82,34%.

Meningkatnya jumlah kelompok tani madya didukung oleh kemauan kelompok tani untuk berkembang, penyuluh yang bisa memberikan motivasi, dan fasilitasi Dana APBD Kabupaten

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator adalah melakukan Pembinaan dinas pada penyuluh dan pembinaan penyuluh pada kelompok tani

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase kelompok tani madya adalah Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan, Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

- o Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan. berupa terlaksananya diklat teknis bagi 20 orang penyuluh.
- o Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan berupa terfasilitasinya peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS/ Non PNS sebanyak 158 orang
- o Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan berupa terfasilitasinya penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan bagi pelaku utama/ pelaku usaha dan kelompok di 20 kecamatan.

h. Capaian Indikator Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi

Yang dimaksud luasan pertanian yang terlayani air irigasi adalah luasan pertanian yang terlayani air irigasi selama kurun waktu (1) tahun. Realisasi luasan pertanian yang terlayani irigasi pada tahun 2017 adalah sebesar 81,89% atau 25.742 Ha dari total luasan pertanian 31.436 Ha. realisasi indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 80% atau dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja tersebut mampu dipertahankan dari kinerja tahun sebelumnya 100%. Dibanding dengan target akhir RPJMD Realisasi ini telah melampaui dengan capaian 102,36% terhadap target sebesar 80% bahkan melalui target provinsi sebesar 70%

Bertambahnya luasan pertanian yang terlayani air Irigasi disebabkan oleh

- Ketersediaan anggaran yang cukup, terutama dana DAK
- Dukungan yang baik masyarakat yang berada pada daerah irigasi dan daerah irigasi rawa
- Kondisi alam (cuaca) yang mendukung bagi kegiatan pertanian
- Upaya yang telah dilakukan antara lain Melakukan perbaikan/ rehab pada daerah irigasi/ daerah irigasi rawa melalui kegiatan normalisasi sungai, perbaikan bangunan/ pintu air dan pembangunan pelengkap

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap pencapaian indicator tersebut adalah

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan indikator outcome Rasio Jaringan Irigasi (m/Ha) berhasil di capai sebesar 18,51 m/ha dengan kegiatan :
 - Kegiatan Pembangunan Pintu Air, berupa Pembuatan Tabat untuk menahan dan menaikkan tinggi muka air, sehingga diharapkan dapat mengairi persawahan yang ada di sekitar dan di bagian hulunya
 - Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai dengan melaksanakan pengembalian kondisi saluran sungai agar mampu melayani debit normalnya pada beberapa daerah saluran sungai mengalami pendangkalan yang diakibatkan oleh adanya

sedimentasi, hanyutan dan tanaman liar yang tumbuh sepanjang sungai, sumber dana berasal dari APBD dan DAK

- o Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan melaksanakan rehabilitasi daerah irigasi dan daerah rawa
- o Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air berupa pemberdayaan petani guna menjalin Silaturahmi dan Komunikasi antara Masyarakat Pemakai Air dan Pemerintah Kabupaten Banjar serta mampu menambah wawasan bagi kita semua baik dalam teknis pertanian maupun teknis pengairan, selain itu dengan adanya kegiatan P3A ini Pengairan di daerah kita dapat terjaga dan terpelihara fasilitasnya

i. Indikator Populasi sapi

Populasi sapi adalah jumlah sapi yang ada di Kabupaten Banjar indikator sasaran populasi sapi tercapai 103,99% dengan kategori capaian sangat tinggi, diperoleh dari pencapaian dari target 16.950 ekor dapat direalisasikan sebesar 17.627 ekor. Kinerja Realisasi populasi sapi telah memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori sangat tinggi. Perbandingan terhadap proyeksi target akhir RPJMD 2021 sebesar 18.000 ekor, maka realisasi produksi tahun 2017 sudah mencapai 97,93% dan Jika dibandingkan dengan Realisasi tahun lalu sebesar 16.621 ekor, realiasasi 2017 mengalami peningkatan sebesar 6,05%.

Faktor penentu keberhasilan indikator sasaran adalah meningkatnya angka kelahiran ternak dalam 2 (dua) tahun terakhir yang mencapai lebih dari 2.000 ekor.

Program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2017 guna pencapaian indikator sasaran adalah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- o Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak, output yang dihasilkan berupa Akseptor 5.088 ekor, IB sebanyak 4.563 dosis dan Kelahiran IB 2.825 ekor
- o Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat output yah dihasilkan berupa Pembinaan mendukung UPSUS SIWAB (416 ok), UPSUS SIWAB (APBN) (tenak bunting) 2.400 ekor Bimbingan teknis : Pengawasan mutu pakan, Diklat transfer embrio, Diklat pengawasan bibit dan Diklat

pemetaan, Pelayanan IB dan pengobatan(6.000 dosis) dan Bantuan kandang jepit 15 buah

j. Indikator Jumlah Produksi Ikan Budidaya,

Definisi operasional (DO) dari produksi perikanan budidaya adalah Jumlah output atau hasil panen ikan budidaya. Produksi Ikan Budidaya di Kabupaten Banjar terdiri dari lahan kolam, sawah, karamba, dan jaring apung. Komoditas unggulan perikanan budidaya di Kabupaten Banjar yaitu ikan patin, nila, lele dan mas

Produksi perikanan Budidaya pada tahun 2017 ini sebesar 58.105 ton atau mencapai 116 % dari targetnya sebesar 50.000 ton . Capaian indikator ini telah tercapai lebih dari 100% dan dalam penilaian realisasi kinerja sudah termasuk kriteria sangat tinggi. bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 untuk produksi budidaya mengalami peningkatan sebesar 105 ton. Produksi perikanan budidaya mencapai 89,39 % dari target akhir RPJMD tahun dari target akhir RPJMD tahun 2021.

Faktor pendukung pencapaian kinerja Produksi perikanan Budidaya`

- kondisi cuaca yang lebih baik
- tingkat harga ikan yang baik sehingga meningkatkan minat banyak pembudidaya untuk memelihara ikan dengan baik
- ketersediaan benih ikan untuk pembesaran ikan dapat terjaga dengan baik (pasokan benih terpenuhi baik dari BBI maupun dari luar daerah).
- peningkatan pengetahuan pembudidaya dan pembinaan yang dilakukan pihak dinas tentang pemeliharaan dan penanganan ikan yang baik yang dapat meminimalisir resiko kematian ikan dan penanganan yang bisa memelihara ikan dengan baik dan dapat meminimalisir resiko kematian ikan.

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya produksi perikanan tahun 2017 ada 2 program:

- Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- Program Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

k. Indikator Jumlah produksi ikan tangkap produksi perikanan tangkap

Definisi operasional (DO) dari perikanan tangkap adalah jumlah output atau hasil panen ikan tangkap. Perikanan tangkap yang

dimaksud disini terutama adalah hasil perikanan tangkap di laut yang dilakukan oleh para nelayan di Kecamatan Aluh-aluh

Realisasi produksi ikan tangkap tahun 2017 sebesar 9.626 ton dari target sebesar 11,182 ton atau sebesar 86.00 %, dengan kategori tinggi. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 produksi ikan tangkap mengalami peningkatan sebesar 1.398 ton. Produksi ikan tangkap tersebut mencapai 79.47 % dari target akhir RPJMD tahun 2021

Penurunan produksi ikan tangkap disebabkan antara lain :

- jumlah trip melaut berkurang karena adanya beberapa kapal yang tidak beroperasi
- faktor kondisi cuaca yang kurang bagus (gelombang tinggi) dan untuk perairan umum berkurang akibat adanya alih fungsi lahan.

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya produksi perikanan tahun 2017 untuk IKU jumlah produksi Ikan Tangkap ada 4 program:

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan;
- Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut;
- Program Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

I. Pada indikator Konsumsi ikan

Definisi operasional (DO) dari konsumsi perikanan adalah banyaknya konsumsi ikan per orang . Sedangkan formulasinya adalah jumlah konsumsi ikan (kg) / orang. Angka konsumsi ikan menunjukkan jumlah ikan yang di konsumsi oleh masyarakat, yang mana ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang baik untuk tubuh

Angka konsumsi ikan ini menunjukkan jumlah ikan yang di konsumsi oleh masyarakat, yang mana Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang baik untuk tubuh. Angka konsumsi ikan Kabupaten banjar tahun 2017 dari 51 kg/kapita/tahun, telah dapat memenuhi target yang ditetapkan sebesar 50 kg/kapita/tahun dengan capaian 100% dengan kategori sangat tinggi

Angka konsumsi ikan Kabupaten banjar tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu dari 51 kg/kapita/tahun. Dibanding

dengan target akhir periode RPJMD realisasi tahun ini telah melampaui atau 102% terhadap target sebesar 50 kg/kapita/tahun

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran disebabkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan yang lebih dominan mengkonsumsi ikan segar. Meningkatnya minat mengkonsumsi ikan tidak terlepas kaitannya dengan peran dinas dalam mendukung program pemerintah pusat dan daerah tentang penting makan ikan melalui kegiatan gemarikan dan pembinaan.

Program yang telah dilakukan yakni Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Program ini dilaksanakan dengan kegiatannya yaitu kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Permasalahan

permasalahan yang dihadapi pada sasaran Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan

- Penurunan produksi pada sawah ini disebabkan berkurangnya luas area tanam dampak dari alih fungsi lahan potensial dan fungsional usahatani tanaman pangan, luas lahan sawah pada tahun 2017 seluas 59.552 ha, turun seluas 9.093 Ha dari luas lahan sawah tahun sebelumnya yaitu 68.645 Ha
- Dampak perubahan iklim, Musim hujan yang panjang menyebabkan permukaan air di lahan pasang surut dan lahan lebak cukup tinggi dan dalam waktu cukup lama sehingga petani memundurkan jadwal tanamnya. tidak dapat menanam padi 2 kali setahun, dan ada lahan yang tidak dapat ditanami
- Serangan organisme pengganggu tanaman seperti serangan walang sangit yang menyebabkan bulir padi menjadi hampa,
- Kesuburan tanah yang terus menurun akibat pemakaian pupuk kimia terus menerus,
- penggunaan sarana produksi (pupuk) yang belum sesuai anjuran,
- Sumber daya petani yang masih melakukan budidaya secara konvensional dan tidak menerapkan teknologi terkini
- Permasalahan pada produksi padi ladang dan padi sawah adalah varietas yang digunakan petani sebagian besar adalah varietas lokal dengan produktivitas masih dibawah varietas unggul dengan alasan

- Pemilihan varietas ini lebih didasarkan pada preferensi masyarakat Banjar terhadap beras lokal karena sebagian besar petani berusaha tani untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.
 - selain itu pemilihan varietas lokal didasarkan pada harga jual gabah yang tinggi dibandingkan gabah dari varietas unggul.
- Permasalahan pada produksi karet antara lain :
- Banyaknya tanaman karet yang sudah tua, rusak dan tidak produktif
 - Penggunaan bibit bukan klon unggul
 - Lemahnya sumber daya petani dalam kelembagaan kelompok dan teknologi dalam pengolahan karet itu sendiri.
 - Intensitas sadap yang cukup tinggi
 - Rendahnya daya saing dalam perekonomian daerah khusus iklim usaha, rendahnya kemampuan SDM dan kelembagaan serta belum optimalnya kemitraan antara Pemerintah dengan dunia usaha dan kerjasama antar daerah
 - Belum optimalnya pendampingan dan fasilitasi menuju kemandirian dan pengelolaan berkelanjutan.
 - Pemberian bantuan kepada kelompok tani tidak bisa direalisasikan terkendala peraturan tentang Badan Hukum Kelompok. pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 298 Ayat 5 tentang Bantuan/Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Sementara Kelompok tani yang ada hampir tidak ada yang berbadan hukum sehingga bantuan bibit dan pupuk tidak dapat direalisasikan sehingga output kegiatan hanya berupa pembinaan, monitoring dan evaluasi
- Permasalahan pada produksi ternak :
- Pemotongan ternak tidak seimbang dengan pertambahan populasi, dari data yang ada pemotongan tahun 2017 mencapai 3.502 ekor sedangkan populasinya hanya 16.771 ekor yang berarti lebih 20 % sapi dan kerbau dipotong dengan demikian kalau tidak ada penambahan ternak



- baik melalui kelahiran atau dropping dalam kurun waktu 4 - 5 tahun kedepan ternak akan habis.
- Jumlah kepemilikan ternak petani masih rendah dan belum mencapai skala ekonomis, membuat usaha dibidang peternakan masih terkesan berjalan lamban.
 - masih tingginya pematangan sapi yang memiliki kondisi baik, terjadinya perkawinan sedarah (inbreeding) serta penurunan populasi sapi antara lain karena kemampuan reproduksi yang rendah.
 - Sebagian pelaku bisnis sapi potong memilih mendatangkan sapi nya dari luar daerah bahkan dari pulau jawa, karena mereka menganggap dengan mendatangkan lebih memberi untung.
 - Lemahnya sumber daya manusia/petani khususnya peternak dalam mengelola ternaknya, juga ternak bantuan pemerintah.
 - Upaya penambahan populasi berupa pemasukan bibit ternak dari luar terkendala regulasi.
 - Bantuan bibit ternak kepada masyarakat terkendala persyaratan badan hukum kelompok tani
 - Meningkatkan jumlah kelahiran melalui inseminasi buatan, intensifikasi kawin alam, memberikan insentif terhadap peternak sapi yang ternaknya mengalami kebuntingan atau bisa melahirkan pedet baru.
- Permasalahan yang dihadapi oleh pembudidaya adalah :
- Harga pakan yang relative tinggi
 - masih kurangnya kesadaran pembudidaya untuk menggunakan benih dan induk ikan yang berkualitas dan kuantitas sumber air.
 - Adanya hama dan penyakit ikan.
- Permasalahan yang dihadapi produksi ikan tangkap antara lain:
- Adanya perpindahan status dari nelayan ke petani atau alih profesi
 - faktor alam yang terjadi menyebabkan nelayan tidak bisa meanagkpa ikan secara maksimal

- Adanya larangan menangkap ikan dengan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah
- Terbatasnya areal penangkapan bagi nelayan akibat daya/kapasitas motorisasi kapal atau perahu masih kecil (< 5GT)
- Masih adanya masyarakat yang melakukan kegiatan illegal fishing berupa penggunaan alat tangkap berbahaya dan melakukan penangkapan anak-anak ikan dan ikan yang memijah.

Solusi

langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan pada sasaran Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan

- Upaya yang dilakukan untuk menjaga produksi dan produktivitas padi sawah dan ladang disaat laju alih fungsi lahan semakin meningkat yaitu dengan :
 - Intensifikasi pertanian melalui BANJAR SAPA (batanam banih jajar legowo sakali mewiwit dua kali panen). Kegiatan tersebut mengkombinasikan sistem tanam jajar legowo dengan sawit dupa. Penerapan sistem tanam jajar legowo memungkinkan populasi tanaman meningkat, produksi meningkat dan gabah lebih berkualitas. Penerapan sistem sawit dupa dengan IP 180 memungkinkan peningkatan populasi tanaman unggul dan lokal. Kegiatan BANJAR SAPA juga diikuti dengan peningkatan pemanfaatan galangan sawah dengan penanaman tanaman hortikultura baik tanaman semusim (sayuran) dan tanaman tahunan (jeruk dan pisang).
 - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air dan jalan pertanian dengan sumber dana APBN dan DAK. Penyediaan sarana pengelolaan air dilakukan dengan membangun fasilitas sumber air yaitu pembangunan irigasi air tanah (dalam/dangkal), pembangunan embung, tabat/dam parit dalam kerangka konservasi air dan antisipasi perubahan iklim. Pembangunan/ perbaikan jalan pertanian yaitu jalan usaha tani dan jalan produksi ditujukan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin



- pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasa
- Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, penyediaan bibit, penyaluran pupuk bersubsidi, fasilitasi akses pembiayaan/permodalan. Selain itu juga dalam rangka peningkatan produk hasil pertanian telah dilakukan berbagai upaya antara lain peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan.
 - Peningkatan kapasitas penyuluhan dan penguatan kelembagaan penyuluhan juga dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi karena penyuluhan merupakan kunci untuk perubahan, penyebar inovasi pertanian dan motivasi bagi petani yang selama ini bertani karena naluri dan tuntutan keluarga, agar dapat berubah untuk berusahatani dengan berorientasi pasar (agribisnis).
 - Peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani. Dari upaya-upaya tersebut diharapkan mutu produk olahan pertanian yang diperdagangkan meningkat.
- untuk meningkatkan produktivitas komoditas pada sawah dan padi ladang adalah
- Meningkatkan tanaman varietas unggul dengan indeks pertanaman IP180 dengan tanam sawit dupa serta IP 200 (tanam varietas unggul-unggul). Meningkatkan pengelolaan lahan dan air sehingga kesuburan lahan terjaga.
 - Meningkatkan penerapan paket teknologi seperti manajemen tanah sehingga dapat mengembalikan kesuburan tanah yang sudah berkurang karena penggunaan pupuk kimia terus menerus dan tidak adanya pergiliran tanaman, mengidentifikasi varietas yang spesifik lokasi serta pengawalan manajemen budidayanya secara intensif. pemanfaatan kalender tanam secara optimal.
- Untuk peningkatan produksi dan produktifitas karet rakyat. Mengingat terbatasnya anggaran daerah, Pemerintah



daerah melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan berupaya memperoleh bantuan atau dukungan kegiatan melalui dana APBD provinsi dan APBN. pada tahun 2017 ini melalui bantuan dari APBN dan APBN-P telah melakukan kegiatan peremajaan karet seluas 500 hektar untuk mengganti tanaman-tanaman yang sudah tua dan tidak produktif lagi sehingga diharapkan produksi karet di tahun-tahun mendatang akan meningkat serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani/pekebun di Kabupaten Banjar.

- mengupayakan bantuan dan dukungan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi maupun pusat melalui Dana Dekons dan APBN serta diharapkan adanya regulasi atau kebijakan dari Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan kepada kelompok tani yang tidak berbadan hukum.
- Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase kelompok tani madya yaitu dengan :
 - Pembinaan dinas pada penyuluh dan pembinaan penyuluh pada kelompok tani
 - Pembinaan yang lebih intensif agar kelompok tani lebih aktif dan mandiri serta mempunyai wawasan kewirausahaan;
 - Memberikan reward dan punishment terhadap penyuluh dan petani
- Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan luas lahan pertanian yang dilayani air irigasi dimasa yang akan datang akan dilakukan pemeliharaan rutin terhadap jaringan yang telah dilakukan perbaikan dan melanjutkan pekerjaan rehab saluran dan bangunan pelengkap daerah irigasi/ daerah irigasi rawa lainnya.
- Upaya Dalam rangka meningkatkan populasi ternak
 - Penambahan ternak perlu dilakukan terus dan perbaikan mutu genetik ternak baik melalui kawin suntik maupun kawin alam, memilih induk dan pejantan yang baik dan unggul selalu ditingkatkan Sehingga pertumbuhan ternak akan lebih cepat yang pada akhirnya berpengaruh pada bobot akhir.
 - Untuk menekan pematangan ternak besar, perlu di masyarakatkan keaneka ragaman protein hewani dengan memakan selain daging ternak besar seperti unggas, telur dan ikan, hal ini bisa mendorong untuk tumbuh kembangnya ternak ternak yang lain.



- Dibidang permodalan pemerintah telah memberikan pembinaan dan paket baik untuk ternak besar,kecil maupun unggas, Pembinaan penanaman rumput unggul terus ditingkatkan hal ini untuk memperbaiki mutu pakan ternak,selain itu penanaman rumput mampu memperbaiki dan mempertahankan adanya erosi.
 - Perawatan ternak dan menjaga kesehatan tetap dilakukan dan dijaga bila perlu ditingkatkan karena hanya ternak yang sehat yang baik pertumbuhannya.
 - Perbaikan sumber daya manusia melalui pembinaan kelompok, study banding dan pelatihan-pelatihan teknis perlu ditingkatkan
 - Pelaku usaha perlu penambahan modal baik lewat swasta maupun pemerintah untuk memperbesar usahanya.
- Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan budidaya:
- Melaksanakan pelatihan pembuatan pakan ikan untuk mendorong pembuatan pakan ikan yang berkualitas secara mandiri untuk mengurangi biaya produksi budidaya.
 - Menyalurkan bantuan mesin pakan ikan GERPARI untuk menumbuhkan pakan mandiri
 - Melaksanakan Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan, Pelatihan Budidaya Ikan di Kolam dan Pelatihan Peningkatan Kualitas Bibit Ikan Nila/Patin
 - Melakukan monitoring kualitas air dan hama penyakit ikan.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap pakan ikan baik pakan pabrik maupun pakan buatan secara mandiri untuk mengetahui kadar nutrisi yang terkandung dalam pakan.
 - Melakukan sosialisasi dan aplikasi vaksinasi ikan
 - Memberikan bantuan vaksinasi ikan (Hydrovac) untuk mencegah aeromonas hydrophila
 - Pembinaan dan bantuan benih ikan kepada UPR dan pembudidaya guna menghasilkan benih unggul
 - Pemberian pelatihan CPIB, CBIB, dan CPPIB kepada pembudidaya ikan
 - Sosialisasi dan pemberian vaksin terhadap ikan agar tahan penyakit
- Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan tangkap :

- Memberikan arahan/pembinaan untuk membuat proposal guna mendapatkan bantuan untuk mendukung agar bisa meningkatkan hasil produksi tangkap.
- Perlunya restocking
- Perlunya penanaman mangrove guna memperbaiki ekosistem perikanan tangkap
- Memberikan sosialisasi untuk bisa merubah alat tangkap yang ramah lingkungan guna memaksimalkan hasil tangkapan
- Bantuan sarana penangkapan yang ramah lingkungan
- Melakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi hukum perikanan dan pelestarian sumber daya ikan kepada masyarakat (nelayan)
- Melakukan kegiatan Razia pada kawasan perairan umum dan laut serta pasar-pasar tradisional.

3.2.18. Meningkatnya Kualitas Hasil Industri Pengolahan Perkebunan Dan Perikanan

Peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan dan perikanan merupakan salah satu kinerja yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk pengembangan ekonomi daerah sebagai upaya menjawab permasalahan ekonomi yang selama ini bergantung pada sector pertambangan. Pada tahun 2017 pencapaian sasaran peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan dan perikanan menunjukkan hasil positif. Pencapaian sasaran peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan dan perikanan masuk dalam kategori sangat tinggi dengan capaian rata-rata 100 %. Capaian sasaran peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan dan perikanan diukur dengan 2 (dua) buah indikator yaitu; Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan dan Jumlah produksi olahan hasil perikanan, capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. 37. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan Kab. Banjar Tahun 2017.

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase peningkatan produk	48%	30	35	116,67	50	70%

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
	pengolahan hasil perkebunan						
2	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	100	710	715	100,7	740	96,62

a. Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan

Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan adalah Persentase peningkatan jenis produk pengolahan hasil perkebunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan merupakan penggunaan bahan pembeku yang direkomendasi. Capaian pada tahun 2017 sebesar 116,67 %, didapat dari realisasi persentase peningkatan hasil olahan perkebunan sebesar 35 % dibandingkan dengan target pada tahun 2017 sebesar 30 %. Produk pengolahan hasil perkebunan berupa produksi bokar di kawasan sentra produksi yang menggunakan bahan pembeku yang telah direkomendasi oleh Kementerian Pertanian berupa asam semut dan deorub. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, tahun lalu capaian kinerja adalah sebesar 48% dari perbandingan realisasi 12% dengan target yang ditetapkan sebesar 25%. Capaian Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan pada tahun 2017 telah berhasil menyumbang 70 % dari target 50 % pada tahun 2020.

Gambar 3. 17. Pengolahan Hasil Perkebunan



Keberhasilan kinerja pada tahun 2017 merupakan hasil dari dukungan program daerah, provinsi dan pusat berupa peran petugas penyuluh dan dukungan kegiatan dari APBN berupa

bantuan pembeku asam semut. Berikut adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan.

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Output dari kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis adalah terlaksananya Bimbingan Teknis karet Sit Asap dan Temu Usaha dengan target 60 OK di Desa Biih Kecamatan karang Intan

Gambar 3. 18. Bimbingan Teknis karet Sit Asap



Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya sumberdaya petugas dan pelaku agribisnis perkebunan karet dalam mengolah dan meningkatkan mutu olahan.

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Target kinerja pada kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian terlaksananya pemetaan potensi sarpas pengolahan hasil Perkebunan. Output kegiatan berupa SID titik koordinat Sarpas Sentra Produksi Perkebunan. Outcome dari kegiatan berupa peta potensi sarpas pengolahan hasil perkebunan sebagai data dan informasi identifikasi kebutuhan sarpras pengolahan hasil perkebunan di Kabupaten Banjar.
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasional
Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer

Target kinerja Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu komoditas hasil perkebunan, pengembangan perkebunan dan klarifikasi usaha perkebunan. Output kegiatan berupa terlaksananya pembinaan fasilitasi kemitraan agribisnis kelompok dan kerjasama pelaku agribisnis, pertemuan tim Pembina Pengembangan Perkebunan yaitu pertemuan Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K) sebanyak 2 kali pertemuan. Outcome kegiatan berupa terjalannya kerjasama perusahaan perkebunan dan poktan dan meningkatnya usaha perkebunan rakyat.

Pada tahun anggaran 2017 Kab. Banjar melalui sumber dana APBN mendapat bantuan peralatan pasca panen di 2 (dua) kelompok tani yaitu :

- Kel. Tani Padang Bersatu Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, Bantuan Peralatan Pasca Panen yang diberikan melalui dana APBN Ditjend Perkebunan untuk Tahun Anggaran 2017 berupa : pisau sadap 50 buah, mangkok sadap, talang sadap, ring mangkok sadap masing-masing 12.500 buah, bak pembeku lateks 50 buah dan bahan pembeku lateks 150 liter
- Kel. Tani Lebah Madu Desa Pematang Danau Kec. Mataraman, Bantuan Peralatan Pasca Panen yang diberikan melalui dana APBN Ditjend Perkebunan untuk Tahun Anggaran 2017 berupa : pisau sadap 50 buah, mangkok sadap, talang sadap, ring mangkok sadap masing-masing 12.500 buah, bak pembeku lateks 50 buah dan bahan pembeku lateks 150 liter

Dana APBN-P Tahun 2017

Pada tahun anggaran 2017 Kab. Banjar melalui sumber dana APBN-P mendapat bantuan peralatan pasca panen di 2 (dua) kelompok tani yaitu :

- Kel. Tani Sinar Surya Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, Bantuan Peralatan Pasca Panen yang diberikan melalui dana APBN-P Ditjend Perkebunan untuk Tahun Anggaran 2017 berupa; pisau sadap 50 buah, mangkok sadap, talang sadap, ring mangkok sadap masing-masing 12.500 buah, bak pembeku lateks 50 buah dan bahan pembeku lateks 150 liter.
- Kel. Tani Tunas Harapan Desa Tiwingan Lama Kec. Aranio, Bantuan Peralatan Pasca Panen yang diberikan melalui dana

APBN-P Ditjend Perkebunan untuk Tahun Anggaran 2017 berupa; pisau sadap 50 buah, mangkok sadap, talang sadap, ring mangkok sadap masing-masing 12.500 buah, bak pembeku lateks 50 buah dan bahan pembeku lateks 150 liter.

Dana APBD I

Pada tahun anggaran 2017 Kab. Banjar melalui sumber dana APBD Provinsi mendapat bantuan berupa 1 buah bangunan Tempat Penampungan Hasil (TPH) Bokar, yang di berikan kepada kelompok tani RPBSK Langla Desa Mandikapau Barat Kec. Karang Intan.

Gambar 3. 19. Tempat Penampungan Hasil Bokar Bantuan dari APBD Provinsi



b. Jumlah produksi olahan hasil perikanan

Jumlah produksi olahan hasil perikanan merupakan jumlah olahan hasil perikanan selama kurun waktu 1 (satu) tahun Kabupaten Banjar pada tahun 2017. Capaian Jumlah produksi olahan hasil perikanan pada tahun 2017 adalah 100,70 % didapat dari realisasi sebesar 715 kg/tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 710 kg/Tahun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi olahan ikan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 dengan jumlah produksi 945 kg/Tahun, hal ini disebabkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan yang lebih dominan mengkonsumsi ikan segar. Terlepas dari penurunan jumlah produksi olahan hasil perikanan capaian pada tahun 2017 telah berhasil menyumbang 96,62 % dari target 740 pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 Tergolong sangat berhasil bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut



- Program Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut ;
 - Kegiatan kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, pagu anggaran sebesar Rp 105.907.500 dan telah terealisasi sebesar 99.06 % dari pagu anggarannya. Adapun berbagai kegiatan yang ditempuh untuk mewujudkan peningkatan jumlah produksi olahan hasil perikanan adalah sebagai berikut:
 - Gemarikan
 - Pasar Murah,
 - Temu Bisnis,
 - Pameran dalam Negeri/Promosi Perikanan,
 - Lomba Poklaksar dan Kudapan Ikan,
 - Pengolahan Produk Hasil Perikanan,
 - Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan
 - Sosialisasi Teknis Sistem Rantai Dingin
 - Kegiatan UPPN (Unit Penanganan Hasil Perikanan)
 - Identifikasi dan Inventarisasi sarana dan prasarana usaha perikanan

Permasalahan

- Belum optimalnya pemanfaatan peralatan (sarana pengolah hasil)
- Lemahnya penanganan pasca panen produk perkebunan
- Produksi pengolahan hasil perikanan masih rendah
- Keragaman atau diversifikasi produk hasil perikanan masih rendah
- Peralatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan masih sederhana
- Kurangnya daya tarik produk perikanan yang dihasilkan
- Masih kurangnya minat masyarakat akan makan ikan

Solusi

- Perlu dukungan sarana lanjutan berupa tempat pengeringan hasil olah (Rumah Asap) sehingga produk akan lebih baik dan disimpan lebih lama.
- Pembinaan bimbingan penanganan Pengolahan Hasil serta perlu pengujian dan analisis berkelanjutan dan Pembinaan

organisasi kelompok perlu ditingkatkan, serta pengembangan usaha kelompok secara berkelanjutan

- Melaksanakan sosialisasi/ pelatihan/ bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Menggalakan kegiatan GEMARIKAN kepada masyarakat
- Melaksanakan promosi terhadap produk olahan hasil perikanan yang dimiliki daerah melalui pameran, pasar murah, lomba kudapan.
- Melakukan kegiatan promosi produk hasil olahan
- Melakukan pendampingan bagi pelaku usaha perikanan (pengolah dan pemasar) untuk perluasan usaha melalui kegiatan pendampingan pengajuan KUR ke bank

3.2.19. Meningkatnya Ketersediaan Dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

Peningkatan ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat merupakan salah satu kinerja yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Pada tahun 2017 pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat menunjukkan hasil yang sangat positif dengan capaian rata-rata 99,52% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Capaian sasaran diukur dengan 3 (tiga) buah indikator yaitu; ketersediaan energy, ketersediaan protein dan nilai/skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. 38. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan pola Konsumsi Pangan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Ketersediaan Energi	97,21	3.610	3.591	99,47	3.700	96%
2	Ketersediaan Protein	92,93	101	150,46	149%	107	141%
3	Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	99,66	90	89,2	99,11	91,5	97%

a. Ketersediaan Energi

Indikator Ketersediaan energi merupakan ketersediaan pangan per kapita per hari berdasarkan kandungan kalori dan BDD (bagian yang dapat dimakan). Indikator kinerja tercapainya ketersediaan energi dihitung berdasarkan jumlah kandungan energi dari bahan komoditas pangan yang tersedia dari hasil produksi dalam satu tahun

dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun berjalan, dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah ketersediaan Energi (Kkal) dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 325 \text{ hari}$$

Berdasarkan perhitungan ketersediaan energy pada tahun 2017 pada analisis neraca bahan makanan (NBM) jumlah akumulasi ketersediaan kalori bahan makanan sebesar 1.972.708.194 Kkal dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebesar 554.443 jiwa maka realisasi ketersediaan energy pada Tahun 2017 adalah 3.558 Kkal/kap/hr. Capaian kinerja ketesedian energi tergolong sangat tinggi /berhasil dengan capaian sebesar 99,47 %, didapat dari realisasi sebesar 3.558 Kkal/kap/hr dibanding dengan target ketersediaan energy sebesar 3.610 Kkal/kap/hr .

Keberhasilan kinerja disebabkan oleh tercapainya target produksi komoditas pangan penyumbang energi di Kabupaten Banjar pada selama tahun 2017, bila dibandingkan dengan target ketersediaan energi nasional sebesar 2400 Kkal/kap/hr maka Kabupaten Banjar surplus ketersediaan energi sebanyak 1158 Kkal/kap/hr (48,25%), sementara bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 3.667 Kkal/kap/hr, maka mengalami penurunan sebesar 109 Kkal/kap/hr, penyebab penurunan ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk Kab Banjar tidak sebanding dengan laju peningkatan produksi pangan di Kabupaten Banjar, sehingga di prediksi setiap tahun ketersediaan ini akan mengalami penurunan (trend turun). Terlepas dari penurunan jumlah ketersediaan energi, capaian pada tahun 2017 telah berhasil menyumbang 96% dari target 3.700 Kkal/kap/hr pada tahun 2020.

b. Ketersediaan Protein

Indikator Ketersediaan protein merupakan ketersediaan pangan per kapita per hari berdasarkan kandungan protein dan BDD (bagian yang dapat dimakan).

Indikator kinerja tercapainya ketersediaan protein dihitung berdasarkan jumlah kandungan protein dari hasil produksi bahan komoditas pangan yang tersedia untuk dikonsumsi dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun berjalan, dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah ketersediaan protein (gram) dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 325 \text{ hari}$$

Berdasarkan perhitungan ketersediaan protein Tahun 2017 pada analisis bahan makanan (NBM) jumlah ketersediaan protein bahan makanan yang tersedia protein bahan makanan yang tersedia sebesar 83.421.494 Ton dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebesar 554.443 jiwa maka realisasi ketersediaan protein pada Tahun 2017 adalah 150,46 gram/kap/hr. Capaian kinerja ketesedian protein tergolong sangat tinggi /berhasil dengan capaian sebesar 149%, didapat dari realisasi sebesar 150,46 gram/kap/hr dibanding dengan target ketersediaan protein sebesar 101 gram/kap/hr. Keberhasilan kinerja disebabkan oleh tercapainya target produksi komoditas penyumbang protein seperti komoditas perikanan dan peternakan di Kabupaten Banjar pada selama tahun 2017, bila dibandingkan dengan target ketersediaan protein nasional sebesar 63 gram/kap/hr maka Kabupaten Banjar surplus ketersediaan protein sebanyak 87,46 gram/kap/hr (139%), sementara itu tingkat ketercapaian ketersediaan protein tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 94,58 gram/kap/hr, maka mengalami kenaikan sebesar 55,58 gram/kap/hr (59%). Keberhasilan capaian kinerja ketersediaan protein pada tahun 2017 telah berhasil menyumbang 141% dari target 107 gram/kap/hr pada tahun 2020.

c. Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.

Indikator Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. PPH diartikan sebagai susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energinya terhadap total energi yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk, baik dalam jumlah, kualitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan segi-segi social, ekonomi, budaya, agama dan citarasa.

Capaian kinerja skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 99%, didapat dari realisasi kinerja sebesar 89,2% dibandingkan dengan target kinerja sebesar 90%, keberhasilan kinerja masuk kategori sangat tinggi/sangat berhasil yang didapat dari Situasi konsumsi pangan diwilayah Kabupaten Banjar yang datanya diambil dari lokasi survey konsumsi pangan tahun 2017.

Tingkat konsumsi energi penduduk Kab. Banjar baru mencapai 1.762,5 kkal/kap/hari dari idealnya 2.150 kkal/kap/hari atau baru

mencapai 81,97 % dari AKE (Angka Kecukupan Energi). Kontribusi energi menurut kelompok pangan, hasil survey menunjukkan bahwa sumber energi terbesar selain bersumber dari padi-padian adalah dari pangan hewani 16,2 %, disusul lemak 8 % dan kacang-kacangan dan sayuran sebesar 7,3 %. Bila dibandingkan dengan kontribusi ideal ternyata kekurangan energi terbesar berasal dari padi-padian 17 %, dari umbi-umbian 2,9 % dan minyak dan lemak 2 %. Dari buah, biji berminyak masih kekurangan 2,4 % dari kontribusi kelompok pangan ideal anjuran, dilihat skor Pola Pangan Harapan (PPH) Aktual Tahun 2017 sebesar 89,2, maka jelas untuk menyempurnakan PPH menuju nilai 100 , maka pangan sumber energi dari padi-padian perlu dikurangi dan dialihkan pada umbi-umbian dan berasal dari minyak berlemak serta buah/biji berminyak sementara pola konsumsi kelompok pangan lain tetap di pertahankan sebagaimana biasanya

Perbandingan Skor PPH di Kabupaten Banjar, yang ditampilkan berdasarkan kegiatan pemantauan konsumsi pangan di desa pelaksana P2KP dan non P2KP (27 Desa dari 9 Kecamatan se Kabupaten Banjar) dengan jumlah sampel 270 orang pada Tahun 2017 adalah 89,2 dibandingkan skor PPH tahun 2016 sebesar 89,2 . tidak mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa pola pangan masyarakat banjar pada tahun 2017 masih seperti tahun 2016 atau masih terpola pada banyaknya konsumsi beras (padi-padian) dibandingkan konsumsi bahan pangan lainnya sehingga skor PPH tidak mengalami kenaikan

Dibandingkan target skor PPH provinsi Kalimantan Selatan sebesar 84,9, maka capaian kinerja skor PPH Kab. Banjar lebih tinggi sebesar 4,3 poin, atau tingkat capaian 105% (sangat tinggi) dan bila kita bandingkan dengan target nasional sebesar 92,5, maka skor PPH Kab Banjar masih tertinggal sebesar 3,3 poin (3,6%), atau dengan tingkat capaian sebesar 96,4% (sangat tinggi)

Pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2017 Tergolong sangat berhasil, keberhasilan pencapaian sasaran ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat pada tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan). Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut;
 - Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Target kinerja kegiatan pengembangan lumbung pangan desa ini adalah meningkatkan ketersediaan pangan di desa dengan target sebanyak 13 desa dan realisasinya sebanyak 13 desa dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan ini berupa monitoring dan pembinaan pengelolaan lumbung pangan pada desa-desa yang mempunyai lumbung pangan desa

- o Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Target kinerja ada kegiatan laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah adalah tersedianya informasi kondisi ketahanan pangan daerah dengan target 3 laporan, dan terealisasi 3 laporan dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan berupa tersusunnya 3 laporan kondisi ketahanan pangan di Kab. Banjar dengan laporan sebagai berikut :

- Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Banjar (berisikan data produksi komoditas pangan kecamatan dan ketersediaan pangan tingkat Kabupaten)
- Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM), laporan ini menyajikan data ketersediaan pangan berupa energi, protein dan lemak yang siap dikonsumsi oleh penduduk
- Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), laporan ini menyajikan tingkat ketahanan pangan dilihat dari sisi produksi komoditas pangan

- o Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

Target kinerja pada kegiatan pemantauan dan analisis harga pangan pokok ini adalah terlaksananya dan tersusunnya pemantauan harga pangan pokok dengan target 5 laporan dengan realisasi kinerja 5 laporan (100%)

Realisasi capaian berupa laporan kegiatan pemantauan harga pangan pokok (9 bahan pangan pokok) di 3 pasar sampel selama 4 triwulan.

- o Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Target kinerja dari kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian ini adalah terwujudnya pendampingan dan pembinaan terhadap LDPM dengan target 13 LDPM dan terealisasi sebanyak 13 LDPM (100%)

Adapun realisasi kegiatan ini berupa terlaksananya monitoring, pembinaan dan evaluasi penggunaan dana LDPM untuk tunda jual dan cadangan pangan pada 13 LDPM di Kabupaten Banjar.

- Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perberasan
Target kinerja pada kegiatan koordinasi kebijakan perberasan adalah turwujudnya rumusan kebijakan perberasan dan HBKN sebanyak 2 kegiatan dengan realisasi 2 kegiatan (rumusan) dengan capaian 100%
Adapun realisasi kegiatan berupa rapat koordinasi Kebijakan perberasan dan rapat koordinasi menjelang Hari hari Besar Keagamaan Nasional tahun 2017 (Hasil pertemuan Koordinasi Menjelang HBKN tahun 2017, Prognosa kebutuhan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan dengan asumsi penduduk 563,062 Jiwa, untuk kebutuhan beras satu tahun 49,212 ton, kebutuhan bulan normal 4.001 ton, dan kebutuhan minggu normal 800 ton. Sedangkan stock kumulatif sekitar 82,947 ton. Kebutuhan beras menjelang HBKN dapat dikatakan aman dan terkendali. Begitu juga dengan harga beras dipasaran cukup terkendali) serta kegiatan pembinaan dan konsultasi pada pelaku perberasan di Kabupaten Banjar, serta rapat dan konsultasi dengan pihak pihak terkait.
- Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Target kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya analisis pola konsumsi dan suplai makanan (PPH) dengan target 1 dokumen, dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian (100%)
Realisasi kegiatan ini berupa pelaksanaan survey konsumsi makanan masyarakat dengan keluaran diketahuinya skor Pola Pangan Harapan (PPH), konsumsi energy, dan konsumsi protein masyarakat Kabupaten Banjar yang dihimpun dalam dokumen/laporan PPH.
- Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
Target kinerja pada kegiatan penyuluhan sumber pangan alternatif ini adalah terlaksananya penyuluhan sumber pangan alternatif sebanyak 3 kegiatan dengan realisasi sebanyak 3 kegiatan atau dengan capaian 100%
Adapun realisasi kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluh sumber pangan alternatif lewat :



- Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui konsep kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tahun 2017 Kegiatan yang dilaksanakan:
 - ✓ Sosialisasi pemanfaatan perkarangan melalui metode sekolah lapangan (SL) oleh pendamping desa
 - ✓ Pembuatan demplot kelompok sebagai laboratorium lapangan
 - ✓ Pembuatan kebun bibit
 - ✓ Pengembangan perkarangan anggota
 - ✓ Pendampingan dan penyuluhan pangan B2SA
 - ✓ Kegiatan untuk demplot kelompok
 - ✓ Pengembangan kebun bibit
 - ✓ Pengembangan perkarangan anggota
 - ✓ Praktek/demonstrasi penyediaan menu B2SA
 - ✓ Pengolahan hasil KRPL
 - ✓ Mengembangkan demplot dan kebun bibit secara berkelanjutan
 - ✓ Mengembangkan perkarangan anggota secara berkelanjutan
 - ✓ Setiap rumah anggota mengembangkan sarana pembuatan pupuk kompos dari limbah rumah tangga
 - ✓ Mengembangkan potensi ekonomi KRPL (membangun kemitraan, mengolah dan mengelola hasil KRPL, dan lain-lain).
- Lomba Menu Cipta Gizi B2SA Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)". Lomba tersebut dimaksudkan agar setiap individu yang bertanggung jawab dalam menentukan dan menyediakan menu keluarga sehari-hari dapat menyajikan menu beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
- o Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Target Kinerja pada kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan adalah meningkatnya mutu dan keamanan pangan dengan target 80% dan terealisasi sebesar 50% dengan capaian 62,5% Adapun realisasi kegiatan berupa uji lab makanan segar buah dan sayur yang dipasarkan pada pasar pasar tradisional di Kab. Banjar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam



rangka mendeteksi keamanan pangan buah dan sayur sekaligus meningkatkan pembinaan dan pengawasan bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat terutama bahan makanan buah dan sayur segar.

Permasalahan

- kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar;
- belum difahami dan diterapkan cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar;
- belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida bahan kimia dan bahan tambahan pengawet;
- masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan hygiene dalam produksi;
- belum adanya ketentuan teknis tentang kewajiban paritel untuk menerapkan Good Retail Practices (GRP);
- masih rendahnya kesadaran ritel untuk menjual produk segar aman dan bermutu;
- belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena system yang dikembangkan, SDM dan pedoman masih terbatas;
- terbatasnya laboratorium yang terakreditasi;
- merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar;
- standar keamanan pangan untuk sayu dan buah segar impor yang belum terjamin keamanannya;
- belum adanya penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum dibidang pangan segar;
- koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan
- kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.
- Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah tentang kelembagaan yang menangani ketahanan pangan sebagai Unit Kerja Daerah dan belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan daerahnya.
- Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki keseragaman

- nomenklatur, sehingga penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan belum optimal.
- Rotasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sering dilakukan, sehingga pengelolaan ketahanan pangan menjadi lambat.
 - Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan.
 - Pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara berkesinambungan.
 - Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan kurang optimal sehingga masih perlu ditingkatkan, terutama pada pelaksanaan program di provinsi dan kabupaten/kota.
 - Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
 - Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
 - Belum terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

Solusi

- Dinas Ketahanan Pangan perlu terus meningkatkan kinerja sumberdaya yang ada dengan meningkatkan jumlah personel yang profesional di bidang ketahanan pangan
- Pemerintah Daerah perlu menjaga sumberdaya yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dengan tidak memutasi memasukkan pejabat dari luar yang tidak kompeten, dan memaksimalkan sumberdaya yang ada sebagai pejabat sesuai tupoksinya
- Pemerintah Daerah perlu mengambil alih pembiayaan pembiayaan pusat/provinsi yang berkaitan dengan program dan kegiatan fisik yang tidak di alokasikan lagi kedaerah yang masih diperlukan dalam kerangka keberhasilan dan keberlanjutan ketahanan pangan.
- Dalam rangka menyempurnakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan perlu perbaikan/revisi terutama pada sasaran dan target RPJMD serta Renstra sesuai dengan

perubahan status SOPD dari Kantor Ketahanan Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan, dengan perubahan status ini menyebabkan beban tugas juga akan bertambah dan perlu penyesuaian target dan sasaran yang dilaksanakan sesuai dengan amanat undang undang dan peraturan yang menaungi SOPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar.

3.2.20. Meningkatnya Investasi Daerah

Peningkatan investasi daerah dapat diketahui dengan membandingkan realisasi pertumbuhan investasi yang ada dari tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pencapaian sasaran pertumbuhan investasi menunjukkan hasil yang positif dengan capaian sebesar 169% dengan kategori sangat tinggi. Capaian sasaran pertumbuhan investasi diukur dengan indikator Persentase pertumbuhan investasi yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 39. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Insvestasi Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentasi Pertumbuhan Investasi (Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN)	119%	84%	143%	169,64%	88,50%	161,58%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase capaian (indikator sasaran RPJMD/indikator kinerja utama) yaitu persentasi pertumbuhan investasi(kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA) hingga saat ini terealisasi sebesar Rp. 3,752,664,596,570 atau 143 % melebihi target yang ditetapkan yaitu 84%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 nilai Realisasi Investasi mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya dimaan realisasi sebesar Rp. 1.547.450.102.887. Keberhasilan capaian pada tahun 2017 sudah mampu mencapai target invests yang ditetapkan untuk akhir RPJMD yaitu dengan target 88,5%. Adapun perhitungan Realisasi tersebut didapat dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Realisasi Investasi} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2017} - \text{Realisasi Tahun 2016}}{\text{Realisasi Tahun 2016}} \times 100\%$$



Meningkatnya investasi daerah ini disebabkan karena banyak sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP Kab Banjar terhadap para investor sehingga meningkatkan kesadaran investor/masyarakat tentang pentingnya berinvestasi di Kabupaten Banjar, selain itu semakin meningkatnya koordinasi antar SKPD terkait guna memudahkan dan melancarkan dalam pemrosesan perizinan. Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas menjadi salah satu berhasilnya investasi di Kabupaten Banjar sehingga mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Selain itu masih banyak penyebab meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Banjar yaitu tingkat keamanan usaha yang cukup tinggi dan keadaan yang kondusif juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah investasi, banyaknya kemudahan yang diberikan DPMPTSP Kab. Banjar kepada para investor guna mempermudah pelayanan perizinan, kepastian hukum, regulasi yang jelas dan sumber daya alam yang melimpah dan yang masih tersedia terutama dibidang Kelapa Sawit, Properti dan karet bahkan di bidang perdagangan dan perumahan juga menjadi daya tarik bagi investor.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 Tergolong berhasil bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Sosialisasi :

Dalam pelaksanaan untuk meningkatkan investasi daerah DPMPTSP melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi, DPMPTSP juga melakukan rapat atau pertemuan rutin setiap bulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan koordinasi selain itu cek lapangan juga rutin dilakukan bersama SKPD terkait guna memonitoring dan mengontrol semua kelengkapan perizinan sesuai dengan regulasi yang ada. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah. Kelompok sasaran kegiatan ini adalah perusahaan daerah, perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri yang beroperasi di Kabupaten Banjar.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong penanaman modal baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dengan melalui penyederhanaan prosedur investasi dan desentralisasi beberapa kewenangan penanaman modal.

Otonomi daerah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengembangkan dan memajukan daerah, baik melalui pengembangan komoditas dan potensi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banjar berupaya terus menciptakan iklim investasi yang kondusif yang dapat mendukung kegiatan investasi di Kabupaten Banjar, seperti penyederhanaan prosedur investasi, transparansi dan kepastian hukum serta perbaikan sarana dan prasarana fasilitas penunjang investasi.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk dapat mengidentifikasi potensi investasi melalui kegiatan identifikasi potensi investasi ke Kecamatan-kecamatan yang dianggap memiliki potensi investasi untuk dikembangkan.

Permasalahan

- Permasalahan yang kadang muncul dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kurangnya kesadaran dan Antusias pelaku usaha untuk datang menghadiri sosialisasi yang diberikan oleh DPMPTSP, dari 200 undangan yang disebar hanya 50% yang berhadir dan mengikuti sosialisasi karena dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atau investor tentang pentingnya mendaftarkan izin bagi perusahaan mereka yang tentunya akan berimbas pada kenaikan nilai investasi di Kabupaten Banjar.

Solusi

- Solusi untuk permasalahan diatas, Pihak DPMPTSP akan memberikan undangan bukan hanya diberikan secara tertulis, kami juga akan memberikan undangan secara lisan dan langsung mengajak kepada para pelaku usaha tentang manfaat yang akan didapat dari sosialisasi tersebut.

3.2.21. Meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja perusahaan daerah dapat dilihat melalui indikator Opini akuntan publik menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat sangat berhasil.

Sasaran di atas adalah dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan strategis yaitu meningkatkan investasi dan kerjasama swasta.

Indikator meningkatnya kinerja perusahaan daerah di Kabupaten Banjar adalah opini akuntan publik dalam hal ini menjadikan perusahaan daerah yang sehat dan menguntungkan. Pada tahun 2016 ini ditargetkan kinerja perusahaan daerah ada yang di audit konsultan publik dengan hasil Wajar.

Tabel 3. 40. Realisasi Dan Capaian Sasaran Meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Opini Akuntan Publik	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 Tergolong berhasil bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian kinerja perusahaan daerah dengan indikator kinerja Opini Akuntan Publik pada tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah ;
Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mengembangkan UMKM di Kabupaten Banjar adalah melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM melalui penyelenggaraan promosi produk UMKM. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah memandang perlu untuk mengikuti kegiatan pameran pada skala nasional yang dapat menjadi sarana informasi dan promosi potensi sumber daya alam dan produk kreatifitas industri daerah. Kegiatan tersebut dapat menarik minat buyers dan investor untuk membeli produk unggulan ataupun berinvestasi di Kabupaten Banjar.
Terwujudnya peningkatan pasar produk UMKM merupakan capaian yang ingin dicapai dari kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM. Adapun keluaran kegiatan berupa terpromosikannya produk unggulan pada kegiatan pameran investasi dan perdagangan “Bandung Indagkop & UKM Expo” bertempat di BTC Fashion Mall Bandung tanggal 7 – 10

April 2017. Kegiatan ini menjadi sarana bagi Kabupaten Banjar untuk memperkenalkan/ mempromosikan ragam potensi investasi produk unggulan UKM, dan menjaring investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banjar.

Kabupaten Banjar menampilkan potensi dan peluang investasi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri dan jasa. Selain itu juga menampilkan berbagai produk unggulan daerah yaitu sasirangan, batu mulia (permata), perhiasan/aksesoris dari perak, arguci, kayu pukaha, sulam sugul, dan lain-lain.

➤ Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

○ Penyelenggaraan Pameran Investasi

Sebagai salah satu anggota dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Kabupaten Banjar turut berperan aktif dalam kegiatan APKASI seperti mengikuti agenda-agenda kegiatan APKASI.

Salah satunya event tahunan dari APKASI adalah Pameran Apkasi Otonomi Expo 2017, pada tahun 2017 diselenggarakan untuk yang ke-13 kalinya bertemakan "Menumbuhkan kembangkan Jiwa Enterprenuer Daerah Dalam Menghadapi Persaingan Global" yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Juli 2017 yang pesertanya terdiri dari :

- Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota, Kabupaten)
- Kementerian Republik Indonesia
- Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional
- BUMN
- Asosiasi Bisnis Dalam dan Luar Negeri

Melalui kegiatan pameran Pemerintah Daerah dan UKM dapat mempromosikan, mengembangkan produk, memperluas jejaring kerja serta menjalin kerjasama yang menguntungkan di bidang investasi, perdagangan dan industri.

➤ Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

○ Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi ;
Pada pelaksanaan kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi, dalam hal pembinaan terhadap BUMD, dengan membentuk tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Banjar yaitu :

- Tim Penyusun Naskah Akademik/Naskah Keterangan Raperda BUMD.



- Tim Evaluasi Penyertaan Modal dan Investasi Pemerintah Kabupaten Banjar.
- Tim Evaluasi Peraturan Daerah BUMD Kabupaten Banjar.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMD melalui pembinaan terhadap Perusahaan Daerah Kabupaten Banjar. Adapun pelaksanaan dari kegiatan ini adalah :

- berupa draft Rancangan Peraturan Daerah serta Naskah Akademik atau Naskah Keterangan untuk :
 - ✓ Penambahan Penyertaan Modal berupa Aset pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
Maksud Raperda ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang jelas tentang status aset Pemerintah Daerah berupa pekerjaan dan pengadaan jaringan perpipaan di bidang air bersih yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman telah dimanfaatkan PDAM Intan Banjar namun belum memiliki dasar hukum sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar pada BUMD serta dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK RI.
 - ✓ Penambahan Penyertaan Modal berupa aset pada PD.Pasar Bauntung Batuah.
Maksud Raperda ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang jelas tentang status aset Pemerintah Daerah berupa bangunan pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah dimanfaatkan PD. Pasar Bauntung Batuah namun belum memiliki dasar hukum sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar pada BUMD serta dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK RI.
 - ✓ Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.
Maksud perubahan Perda tersebut dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja PD. Pasar Bauntung Batuah melalui



perubahan struktur organisasi perusahaan melalui penyesuaian jumlah direksi atas dasar efisiensi dan efektivitas perusahaan, sehingga perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik di bidang perpasaran dan meningkatkan PAD bagi Kabupaten Banjar.

Ketiga Raperda tersebut telah diusulkan pada Program Legislasi Daerah pada tahun 2018, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Banjar.

Pada program ini juga dilakukan kegiatan kajian atas expose yang dilakukan oleh BUMD Kabupaten Banjar atas permohonan penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD, yaitu :

- Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Intan Banjar dasar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Uang dan Barang pada PDAM Intan Banjar
- Untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah harus dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda). Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan "Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan". Selanjutnya merujuk peraturan yang lebih tinggi (undang-undang/UU), kewajiban tersebut juga diatur. Pada Pasal 41 ayat 5 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan "Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah". Mengacu pada UU ini, memang sudah tepat bila setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah ke BUMD harus melalui Perda (yang berarti harus mendapat persetujuan DPRD).

Permasalahan

- Kegiatan Pemantauan/monitoring diluar kantor seperti ke kecamatan, lokasi pasar, BUMD dan perusahaan lainnya yang memerlukan fasilitas transportasi, sedangkan untuk transportasi (mobil operasional) harus meminjam, dimana sering terjadi benturan jadwal kegiatan sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Solusi

- Diharapkan dapat disediakan mobil operasional untuk kegiatan pemantauan/ monitoring ke lapangan.

3.2.22. Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan dapat diketahui dengan membandingkan realisasi pengelolaan kualitas lingkungan yang ada dari tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pencapaian sasaran peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan menunjukkan hasil yang positif Masuk dalam kategori sangat tinggi dengan rata-rata capaian 100%. Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu ; Persentase sampah yang terolah di TPA, Rasio Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen Dari Luas Kawasan Perkotaan, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. 41. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017.

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentasi Sampah Yang Terolah Di TPA	100	100	100	100%	100	100
2	Rasio Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen Dari Luas Kawasan Perkotaan.	1,58	1,59	1,59	100%	1,63	98%
3	Indeks Kualitas Air	48	33	36	109%	42	80%
4	Indeks Kualitas Udara	98	83	103	125%	90	115%

a. Persentasi Sampah Yang Terolah Di TPA

Capaian kinerja yang diukur dengan indikator sasaran berupa Persentase sampah yang terolah di TPA dapat memenuhi target



yang direncanakan yaitu karena didukung dengan teknologi pengelolaan sampah, alat dan tenaga persampahan serta didukung dengan anggaran yang mencukupi dalam menunjang pengelolaan persampahan di TPA.

Persentase Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir Akhir (TPA) Sampah

SPM sistem pengoperasian TPA sampah	=	(koef.pengoperasian TPAx40% + (Koef. Kualitas Pengolahan lindi x 40%)+(Koef.Penanganan gasx20%)
	=	(1 x 40%)+(0 x 40%)+(1 x 20%)
	=	100%

Meningkatnya persentase sampah yang terolah di TPA, 1 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 sebesar 100% dikategorikan Sangat Baik.

Tabel 3. 42. Perbandingan Capaian Kinerja Sampah Terolah Dengan Target RPJMD

Persentasi Sampah Yang Terolah di TPA (%)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Capaian Kinerja Kabupaten Banjar	40	50	60	60	60	100
Target Kinerja Kabupaten Banjar (RPJMD)	100	100	100	100	100

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja periode 2011-2015 adalah 40% pada tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2015 sebesar 60%. Pada tahun 2016, 2017 secara signifikan capaian kinerja mencapai 100% sebagaimana ditargetkan RPJMD. Pengolahan sampah di TPA 100% meliputi pengoperasian di TPA, pengolahan lindi dan penanganan gas.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 tergolong berhasil bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 didukung dari kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan
Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi, pengetahuan dan keterampilan tentang teknik pengelolaan persampahan yang baik dan tepat sasaran untuk mewujudkan sisa sampah yang dihasilkan disekolah menjadi 20% dibuang ke TPA, sehingga mampu meningkatkan kesehatan dan kualitas

lingkungan hidup dengan mengimplementasikan penerapan program 3R.

➤ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Untuk kegiatan ini adalah sosialisasi terhadap masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah 3R agar menjadi nilai ekonomis di Kabupaten Banjar. Berdasarkan sosialisasi yang telah dilaksanakan di beberapa kecamatan, masyarakat mulai menyediakan pemisahan sampah dengan menyediakan tong sampah bukan hanya sesuai dengan jenis sampah yang ada, selain itu juga terdapat kegiatan recycle terhadap sampah plastic seperti membuat tas anyaman dari bungkus kopi dan hasil kerajinan lainnya untuk kebutuhan rumah tangga, kegiatan perlombaan mengenai pengelolaan sampah di permukiman yang ada di Kabupaten Banjar juga kerap sekali dilakukan dengan disponsori oleh Harian Radar Banjar dan Yayasan Unilever.

➤ Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Untuk kegiatan pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Penyediaan Landasan Kontainer untuk TPS 3R Indrasari dan penyediaan bak sampah di jalan lingkar utara
- Pengadaan Tempat sampah dan tong sampah sebanyak 110 buah untuk bantuan sekolah adiwiyata dan titik pantau penilaian Adipura
- Penyediaan bahan baku untuk pembuatan kompos di 11 TPS 3R milik Kab. Banjar
- Penyediaan pakaian dan kelengkapan petugas sebanyak 216 orang, yang terdiri dari sopir truck, awak truck, sopir roda 3, penyapuan dan petugas cangkulan

➤ Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan
Pelaksanaan kegiatannya yaitu mengelola dan mengolah sampah dari TPS ke TPA menjadi kompos dan gas metan di tempat pembuang sampah akhir.

b. Rasio Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen Dari Luas Kawasan Perkotaan.

Capaian luasan Ruang Terbuka Hijau dari tahun ke tahun belum mengalami peningkatan luasan RTH yang ada seluas 2.529 m² dengan angka persentasi komulatif tahunan 1,60% dan angka



kumulatif tahunan seluas 107.565,06 m². Sedangkan nilai target SPM yang harus dicapai adalah 6.707.000 m².

Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan luasan yang ditetapkan yaitu 20% dari luas perkotaan, dan formulanya :

$$\frac{\text{Luasan RTH Publik yang tersedia}}{\text{Luasan RTH Publik yang seharusnya (20\% luas wilayah perkotaan)}} \times 100\% = \text{Kondisi Awal}$$

Program yang menunjang kinerja tersebut diatas yaitu : Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut ;

- Penataan Ruang Terbuka Hijau
Luas ruang terbuka hijau dalam kondisi baik dengan target sebesar 6.707.000 m² realisasinya sebesar 107.565m² atau sebesar 1,59%. Kinerja pada kegiatan ini adalah melakukan / melaksanakan penataan Ruang Terbuka Hijau dan membuat tambahan Taman Baru untuk pencapaian target SPM 20% dari luas perkotaan dengan menambah taman pada 7 lokasi di Kab. Banjar dengan target kinerja sebanyak 7 lokasi realisasinya 7 lokasi (100%).
- Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
Jumlah taman hijau dan ruang terbuka hijau yang tersedia dengan target sebanyak 26 lokasi dengan realisasi sebanyak 26 lokasi atau 100%.

Permasalahan yang dihadapi/kendala pada sasaran ini adalah minimnya alokasi anggaran untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau pada setiap tahun anggaran sehingga sulit untuk mencapai target seperti yang ditetapkan pada target SPM. Sedangkan sarannya adalah agar pemerintah daerah memperhatikan alokasi anggaran ruang terbuka hijau untuk meningkatkan perluasannya dan menjaga kelestarian lingkungan dari polusi udara. Hal tersebut menggambarkan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai 100% (Sangat Baik).

c. Indeks Kualitas Air

Indikator kinerja diatas dasar bobot hasil uji laboratorium dengan Formula:

Formula Air:

$$\% \text{Sungai} = \frac{\text{Sungai}}{\text{Total Sungai}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Skor} &= \% \text{Sungai} \times \text{Bobot} \\ \text{Indeks Kualitas Air} &= \frac{\sum \text{Skor}}{\text{Bobot}} \end{aligned}$$

Hasilnya terbagi dalam tercemar ringan, berat dan sedang.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu nilainya memang ada penurunan untuk kualitas air dan kenaikan untuk kualitas udara, hal ini disebabkan adanya skor titik penilaian dalam menguji Kualitas Air maupun Udara tersebut, namun hasilnya tetap lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Tabel 3. 43. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Dengan Target RPJMD

Indeks Kualitas Air	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Capaian kinerja Kabupaten Banjar						48				
Target Kinerja Kabupaten Banjar (RPJMD)						Tidak Tercemar	36			
Target Kinerja Kabupaten Banjar (Renstra SKPD)						45	47	50	53	55

Pencapaian kinerja indeks kualitas air pada tahun 2017 adalah 36%, ada penurunan dari tahun 2016 sebesar 48% angka ini masih dibawah target IKA Provinsi. Namun demikian upaya-upaya terhadap pengawasan dan pengendalian kualitas air terus menerus dilakukan.

Dalam menunjang pelaksanaan dalam mencapai sasaran tersebut diatas didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dengan kegiatan:
 - Koordinasi Kota Sehat/Adipura
Target kinerjanya menciptakan kota yang bersih dalam penilaian Adipura sebanyak 3 kali penilaian, yang realisasinya 3 kali penilaian atau 100%. Kegiatan ini terdiri penilaian fisik lapangan sebesar 95% yang meliputi:
 - Evaluasi Pengelolaan Sampah
 - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
 - Hutan Kota
 - Drainase Perkotaan
 - Saluran air terbuka (Sungai)



- Bank Sampah
- Pengelolaan kebersihan lingkungan sekolah, perkantoran dan pasar
- Pengendalian pencemaran air dan fasilitas public di kawasan perkotaan.

Sedangkan untuk daftar isian non fisik penilaiannya sebesar 5% yang berisikan berbagai data dalam bentuk pertanyaan dan data pendukung lainnya.

o Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kinerjanya pada kegiatan ini melakukan pemantauan kualitas air dan udara dengan cara menguji kualitas air maupun udara dengan target sebanyak 64 titik dan realisasinya mencapai 64 titik pengambilan sampel atau 100%. Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai pada Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 5 Tahap dengan 12 Titik Pantau pada daerah hulu, tengah dan hilir yang meliputi;

- Sungai Martapura sebanyak 3 (tiga) titik, yakni titik hulu di Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul, titik tengah di Desa Sungai Rangas Hambuku Kecamatan Martapura Barat dan titik hilir di Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk.
- Sungai Riam Kiwa sebanyak 3 (tiga) titik, yakni titik hulu di Desa Benteng Kecamatan Pengaron, titik tengah di Desa Lawiran Kecamatan Simpang Empat dan titik hilir di Desa Mangkalawat Kecamatan Mataraman.
- Sungai Riam Kanan sebanyak 3 (tiga) titik, yakni titik hulu di Desa Aranio Kecamatan Aranio, titik tengah di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan dan titik hilir di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan.
- Sungai Barito sebanyak 3 (tiga) titik, yakni titik hulu di Desa Tanipah Kecamatan Aluh-Aluh, titik tengah di Desa Bekambat Kecamatan Aluh-Aluh dan titik hilir di Musang Kecamatan Aluh-Aluh.

Masing – masing titik dilaksanakan sebanyak 5 (lima) tahap dalam satu tahun, dan dianggap telah mewakili musim yang berlaku yaitu awal musim penghujan, musim penghujan, peralihan antara musim penghujan dan kemarau (pancaroba), awal musim kemarau dan musim kemarau.



Pengujian dan analisa sampel udara mewakili wilayah permukiman, transportasi, perkantoran dan industri. Masing-masing dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang dianggap mewakili musim yang ada.

- Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Kinerja dalam kegiatan ini adalah melaksanakan survey lapangan dan memberikan rekomendasi terhadap pelaku usaha yang memiliki izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) dengan target 10 Perusahaan sedangkan realisasinya mencapai 23 perusahaan atau 230%. Pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan B3 dan Limbah B3 adalah pelaku usaha untuk dapat memiliki izin TPS Limbah B3 seiring meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang industry dan perdagangan maka dilaksanakan kewajiban kepada pelaku usaha agar mengolah dan memproses pembuatan izin TPS limbah B3.
- Pengkajian Dampak Lingkungan
Kinerja dalam kegiatan ini adalah melaksanakan proses penyelesaian dokumen lingkungan dengan target 65 perusahaan realisasi sebesar 216 perusahaan atau 342%. Kegiatan ini adalah melaksanakan proses penyelesaian dokumen lingkungan, dalam melakukan usaha ataupun kegiatan terdapat peraturan perundangan yang harus dipatuhi. Dalam konteks peraturan lingkungan hidup terdapat beberapa jenis dokumen yang harus dibuat oleh pelaku usaha. Tujuan dokumen lingkungan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang dilakukan.

Adapun jenis dokumen lingkungan tersebut adalah sebagai berikut:

- AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan)
- UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan)
- SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan)
- DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup).



d. Indeks Kualitas Udara

Indikator kinerja diatas dasar bobot hasil uji laboratorium dengan Formula:

$$\text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - (50 / 0.9 \times (Teu - 01))$$

Diatas realisasi capaian kualitas air tahun 2016 sebesar 98%, capaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan dengan indikator kinerja kualitas udara tahun 2017 sebesar 103% melampaui target RPJMD sebesar 90%. Tingginya indeks kualitas udara tersebut menunjukkan kondisi kualitas lingkungan di Kabupaten Banjar masih bagus. Keberhasilan tersebut didukung dengan beberapa kebijakan dan penegakan hukum yang dilakukan :

- ✓ Penegakan Perda tentang lingkungan
- ✓ Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup
- ✓ Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dala proses perijinan
- ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders
- ✓ Pengawasan terpadu dalam penegakkan hukum lingkungan
- ✓ Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam menunjang pelaksanaan dalam mencapai sasaran tersebut diatas didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Pengendalian Polusi
 - Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
Kinerja pada kegiatan ini melaksanakan uji kualitas udara pada perusahaan guna mengetahui potensi dan jenis sumber pencemaran udara di Kab. Banjar dengan memperoleh hasil dari masing – masing perusahaan tidak tercemar dan masih dibawah standar baku mutu. Selain melaksanakan uji kualitas udara juga diadakan Bimtek (Bimbingan Teknis) pada perusahaan di Kabupaten Banjar yang mewakili dari:
 - Perbengkelan
 - Rumah Sakit
 - Perumahan
 - Perkotaan
 - Pergudangan

Pada tahun 2017 ditargetkan 30 perusahaan realisasinya 36 perusahaan dengan materi :

- Penegakan hukum lingkungan di daerah
- Pedoman penyusunan pelaporan PPLH/Wajib Perusahaan
- Kebijakan lingkungan hidup Kab. Banjar
- Sistem manajemen lingkungan
- Memahami PP No 82/Th. 2001
- Kebijakan lingkungan hidup bumi serambi mekah
- Pengelolaan limbah cair dan gambut hanyar babungas

Permasalahan :

- Luasnya cakupan wilayah untuk pelayanan angkutan persampahan sehingga belum dapat semua desa di masing – masing kecamatan terlayani dengan baik
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada jam 6 sore s/d jam 6 pagi, sehingga masih ditemui sampah yang tidak terangkut diluar waktu.
- Minimnya alokasi anggaran untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau pada setiap tahun anggaran sehingga sulit untuk mencapai target seperti yang ditetapkan pada target SPM.
- Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan yang bersifat lintas sektoral dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang, dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak serta ketegasan dalam penataan hukum lingkungan.
- Pengambilan sampel udara hanya dapat dilaksanakan 1 tahap karena kesalahan dari perencanaan awal yaitu Pengajuan permohonan kerja sama kepada pihak ketiga untuk pelaksanaan sampel udara yang dilakukan pada bulan Oktober dan ternyata jadwal dari pihak ketiga sangat padat sehingga kesulitan menjadwalkan untuk pengambilan sampel udara di wilayah Kabupaten Banjar karena sudah tersusun jadwal mereka sampai tanggal 31 Desember 2017, Untuk pengujian sampel udara di Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tidak dapat dilakukan karena di Tahun 2017 ini terjadi pergeseran Struktur Organisasi

Perangkat Daerah sehingga terjadi perpindahan kantor dan berdampak pada pelaksanaan kegiatan di Laboratorium Lingkungan pada khususnya. Selain itu Alat pengambil sampel udara lengkap, namun alat penguji kualitas udara belum ada sehingga pelaksanaan uji kualitas udara harus kerjasama dengan pihak ketiga (BBTKL-PPM dan Baristan).

- Ada beberapa alokasi dana kegiatan yang tersisa, karena pengujian lebih banyak diserahkan ke pihak ketiga dan belum tersedianya bangunan Laboratorium Lingkungan di Kantor baru Dinas Lingkungan Hidup sehingga banyak kegiatan di laboratorium lingkungan yang terhambat sehingga dana tersebut dikembalikan ke Kas Negara.

Solusi :

- Dalam upaya pelayanan persampahan yang maksimal perlu dukungan dan komitmen bersama dalam bentuk sarana dan prasarana pendukung
- Perlu dukungan dan kesadaran masyarakat untuk mentaati dalam pembuangan sampah pada waktu yang ditentukan
- Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran tugas di masing – masing bidang.
- Agar pemerintah daerah memperhatikan alokasi anggaran ruang terbuka hijau untuk meningkatkan perluasannya dan menjaga kelestarian lingkungan dari polusi udara.
- Perlu adanya peningkatan jumlah dan kualitas SDM yang berkompetensi pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Banjar serta dukungan dari semua pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- partisipasi aktif dari berbagai pihak dan pengawasan, pengendalian serta penataan hukum yang benar, wajib terus ditegakkan dan dapat dijadikan acuan bersama untuk mengelola lingkungan hidup yang arif dan bijaksana, sehingga tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.
- Perlu peningkatan koordinasi lintas sektoral agar kegiatan pemantauan, pengambilan dan pengujian sampel kualitas udara dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- Perlunya pengadaan peralatan laboratorium untuk kelancaran pemantauan kualitas lingkungan.

3.2.23. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Masyarakat

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk itu meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai upaya menghadapi MEA sejak diberlakukannya pada tahun 2015 agar dapat bertahan dan bersaing.

Capaian sasaran meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat kurang berhasil dengan rata-rata capaian 64,74% tergolong dalam kategori capaian rendah, capaian sasaran diukur dengan 5 (lima) buah indikator yaitu 1) Persentase Koperasi aktif, 2) Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil, 3) Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi, 4) Jumlah nilai ekspor karet dan 5) Persentase desa berkembang. Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 44. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Masyarakat Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase koperasi aktif	100,59	63,5	63,9	100,63	66,5	96,09
2	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	40	0,75	0,5	66,67	1,5	33,33
3	Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi	0	20	17,14	85,7	20	85,7
4	Jumlah nilai ekspor karet	8,17	504.447.929,32	52.181.067	10,34	518.158.646,23	10,07
5	Persentase desa berkembang	75,9	37,18	22,74	61,16	58,84	38,65

a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.



Formulasi perhitungan Persentase koperasi aktif adalah jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi yang terdaftar dikali 100 %.

Capaian persentase koperasi aktif pada tahun 2017 adalah 100,63 % didapat dari realisasi sebesar 63,90 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 63,5 %. Realisasi Persentase koperasi aktif diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Koperasi Aktif} &= \frac{\sum \text{Koperasi aktif}}{\sum \text{Koperasi terdaftar}} \times 100\% \\ &= \frac{154 \text{ unit}}{241 \text{ unit}} \times 100\% = 63,90\% \end{aligned}$$

Dibandingkan dengan tahun 2016 Persentase koperasi aktif mengalami peningkatan sebesar 1,03 % yaitu pada tahun 2016 sebesar 62,87 % menjadi 63,90 % pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 menyumbang 96,09 % dari target 66,5 % pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100,63 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi .

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi dan UMKM dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
Program dilaksanakan dalam mencapai Outcome Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi .
Kegiatan ini berupa : fasilitasi kegiatan rapat awal pembenahan koperasi, rakor bidang perkoperasian dan UMKM, fasilitasi kegiatan perkoperasian. Rakor bidang perkoperasian dan UMKM dilaksanakan di Martapura dengan mengundang 100 gerakan koperasi di Kabupaten Banjar. Fasilitasi kegiatan perkoperasian berupa penyuluhan dan pembinaan koperasi, pendampingan RAT.



- Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
Kegiatan sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian pada tahun 2017 yang dilaksanakan berupa : 1) Sosialisasi akuntansi koperasi dan administrasi keuangan dan pelaksanaan RAT. 2) Sosialisasi tentang perkoperasian. 3) Sosialisasi perkoperasian kepada masyarakat. 4) Sosialisasi perkoperasian kepada kelompok siswa SLTA. Tujuan dari sosialisasi agar masyarakat lebih memahami makna berkoperasi dan tertarik untuk membentuk koperasi baru sehingga akan menambah kuantitas koperasi baru..
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan penghargaan kepada koperasi berprestasi. Hal ini dimaksudkan agar koperasi berlomba – lomba memperbaiki sistem pengelolaan kelembagaan koperasi.
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini berisi tentang pembuatan data keragaan koperasi yang dibuat tiap triwulan. Data keragaan koperasi ini berisikan data koperasi beserta pengelolaan manajemen dan unit usahanya di seluruh Kabupaten Banjar.
 - Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Usaha Koperasi
Kegiatan ini berupa pendampingan koperasi dengan tujuan pembukuan akuntansi koperasi semakin membaik. Kegiatan ini antara lain : Evaluasi NRB, Penilaian kesehatan koperasi. Nilai Realisasi Bersih (NRB) sebanyak 44 koperasi dan penilaian kesehatan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam, yakni sebanyak 50 buah koperasi terdiri dari 3 KSP dan 47 USP.
 - Fasilitasi Kemitraan dan Promosi Produk Koperasi
Kegiatan ini berupa pameran / expo, yang bertujuan pengenalan produk unggulan Kabupaten Banjar ke Daerah Lain. Dengan adanya pameran / expo ini diharapkan produk unggulan Kabupaten Banjar lebih dikenal di daerah lain dan bisa terjadi transaksi pembelian sehingga bisa meningkatkan pendapatan.
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :

- o Pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
Kegiatan ini berupa pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, guna untuk meningkatkan keterampilan manajerial SDM pengurus dan pengelola koperasi.

Gambar 3. 20. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD



b. Persentase Skala Usaha Mikro menjadi usaha kecil

Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Formulasi perhitungan Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil diperoleh dari hasil perhitungan Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil dibagi jumlah total usaha mikro dikali 100 %.

Capaian Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil pada tahun 2017 adalah 112 % didapat dari realisasi sebesar 0,28 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 0,25%. Realisasi persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

$$= \frac{88 \text{ unit}}{35.105 \text{ unit}} \times 100\% = 0,28\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2016 persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil mengalami peningkatan sebesar 0,08 % yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,20 % menjadi 0,28 % pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD

maka capaian tahun 2017 menyumbang 112 % dari target 0,25 % pada tahun 2020. Target yang ditetapkan dari tahun 2016 sampai dengan akhir RPJMD merupakan target tahunan (bukan akumulasi) yang ingin dicapai sesuai dengan sumber daya dan kemampuan keuangan daerah.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 112 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM dalam merealisasikan target yang ditetapkan sehingga dapat tercapai dengan sangat baik serta peran dari BUMD dan Perbankan berupa dukungan permodalan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :

- Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil dan menengah

Kegiatan ini berisi kegiatan pendataan UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan di 19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka tersedianya data UMKM yang valid di Kabupaten Banjar, yang berguna sebagai data dasar pengambilan kebijakan dalam pembinaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini mendata UMKM secara by name by address.

- Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah

Kegiatan ini berisikan pembentukan tim monitoring, evaluasi dan kredit program. Pada Tahun 2017 ini IUMK yang telah terbit yaitu sebanyak 2.284 IUMK.

Gambar 3. 21. Rapat Tim monitoring, evaluasi dan kredit program





- Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah
Kegiatan ini berisi kegiatan pendampingan usaha bagi UMK guna meningkatkan skala usaha mikro menjadi kecil. Kegiatan ini berupa pembentukan Tim Koordinasi dan Pengembangan Usaha Mikro (lintas sektor).
- Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
Kegiatan ini berupa memfasilitasi para UKM guna mengembangkan usahanya yaitu berupa pemberian hibah berupa 1 (satu) buah kapal motor yang diberikan kepada Koperasi Pertanian (Koptan) Barakat Mawaddah dan 2 (dua) buah sepeda motor roda tiga diberikan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Usaha Tani dan Koperasi Unit Desa (KUD) Fajar Bersama.
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah
Kegiatan ini berupa memfasilitasi kemitraan UMKM, baik dengan BUMN/BUMD maupun pihak swasta. Kegiatan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terjadinya kemitraan UMKM yang potensial dengan Usaha Besar baik BUMN maupun swasta. Dengan adanya kemitraan dengan usaha besar ini akan menambah modal dan pembinaan dari pengusaha besar serta bisa meningkatkan pemasaran produk UMKM itu sendiri. Sehingga UMKM akan lebih maju, berkembang dan meningkatkan pendapatan bagi UMKM. Target kegiatan ini ada 2 (dua) kali pelaksanaan dengan jumlah peserta 60 UMK yang bertempat di Kecamatan Martapura Barat dan Kecamatan Astambul, namun dapat dilaksanakan hanya 1 (satu) kali yaitu di Kecamatan Martapura Barat dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.

Gambar 3. 22. Kegiatan memfasilitasi kemitraan usaha bagi UMKM



- Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan
Kegiatan ini berupa pemberian pelatihan kewirausahaan yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan teknis administrasi, manajemen dan pengelolaan keuangan bagi pengusaha kecil. Target kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dengan jumlah peserta sebanyak 60 UMK. Tetapi yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali bertempat di Kabupaten Banjar dengan melibatkan para pelaku UMK yang sudah memiliki izin usaha dan wirausaha baru (pemula).
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
Kegiatan ini berupa pameran / expo, yang bertujuan pengenalan produk unggulan Kabupaten Banjar ke Daerah Lain. Dengan adanya pameran / expo ini diharapkan produk unggulan Kabupaten Banjar lebih dikenal di daerah lain dan bisa terjadi transaksi pembelian sehingga bisa meningkatkan pendapatan UMK dan memperluas pangsa pasar bagi UMK. Rencana kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali dalam daerah dan 1 (satu) kali luar daerah. Untuk dalam daerah dilaksanakan dalam pameran hari jadi Kab. Banjar "BANJAR EXPO 2017" di Lapangan Alun-alun RTH Ratu

Zalecha Martapura. Kegiatan pameran di Luar Daerah tidak dapat dilaksanakan.

c. Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi

Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi dihitung berdasarkan pendapatan perkapita pada kawasan transmigrasi tahun perhitungan dikurangi pendapatan perkapita di kawasan transmigrasi tahun sebelumnya dibagi pendapatan perkapita tahun sebelumnya dikali 100 %.

Sasaran pengukuran adalah warga transmigrasi unit pemukiman (UPT) Cintapuri sebanyak 209 KK, dari 209 KK tersebut 25 % bekerja pada PT. Borneo Indo Tani yang bergerak pada perkebunan kelapa sawit, sedangkan 75 % nya adalah petani karet.

Realisasi Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di Kawasan transmigrasi diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

- o Untuk pendapatan tahun 2016 dapat dirincikan sebagai berikut:
 - Kepala keluarga yang bekerja di PT. BIT sebanyak 52 orang dengan pendapatan 75.000/hari
 - Kepala keluarga sebagai petani karet sebanyak 156 orang dengan pendapatan 70.000/hari
 - o Untuk pendapatan tahun 2017 dapat dirincikan sebagai berikut:
 - Kepala keluarga yang bekerja di PT. BIT sebanyak 52 orang dengan pendapatan 90.000/hari
 - Kepala keluarga sebagai petani karet sebanyak 156 orang dengan pendapatan 80.000/hari
- Jadi akumulasi perhitungan adalah :
- ✓ Warga Transmigrasi yang bekerja di PT. BIT adalah :
 $90.000-75.000/75.000 \times 100 = 20\%$
 - ✓ Warga yang bekerja sebagai petani karet adalah :
 $80.000-70.000/70.000 \times 100 = 14,28\%$
 - ✓ $20 + 14,28 = 34,28$
 - ✓ $34,28/2 = 17,14\%$

Jadi realisasi untuk tahun 2017 adalah 17,14%

Capaian persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi pada tahun 2017 adalah 85,70 % didapat dari realisasi sebesar 17,14 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 20 %.

Dibandingkan dengan tahun 2016 persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi mengalami peningkatan yaitu dari 0 % menjadi 17,14 %. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 menyumbang 85,70 % dari target 20 % pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 85,70 % berarti masuk dalam capaian kategori tinggi . Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 dikarenakan memang ada kenaikan upah bukan karena adanya intervensi program atau kegiatan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi transmigrasi. Meskipun demikian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk pelaksanaan pengembangan seperti pelatihan pembuatan kue yang di danai oleh dana desa dan Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar berupa penyelesaian sertifikat lahan pekarangan (LP) dan lahan usaha (LU) untuk warga transmigrasi cintapuri sebanyak 209 kepala keluarga dengan realisasi 209 kepala keluarga yang telah mempunyai sertifikat lahan pekarangan.

Pada tahun 2017 tidak ada program atau kegiatan yang dianggarkan di APBD oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendukung capaian indikator tersebut, hal ini disebabkan :

- Efisiensi APBD 2017 dan terkendala Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.22/MEN/X/2007 Tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi pada pasal 3 ayat 2 bahwa UPTdibentuk sekurang kurang 2 bulan dan paling lama 5 tahun (sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar dan Kepala UPTnya di tetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar).
- Kawasan transmigrasi di Kab. Banjar masa pembinaannya sudah berakhir sejak tahun 2013, sehingga dalam pelaksanaan dilapangan hanya mendata warga transmigrasi, baik jumlah kepala keluarga, sarana dan prasarana untuk sebagai bahan kelengkapan penyerahan dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

d. Jumlah nilai ekspor karet

Karet merupakan komoditas yang sangat potensial di Kabupaten Banjar ,diharapkan dengan meningkatnya nilai ekspor karet dari Kabupaten Banjar dapat meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat khususnya para petani karet. Formulasi perhitungan

diperoleh dari nilai ekspor produksi karet secara keseluruhan dalam 1 (satu) tahun dengan mata uang dollar Amerika. Sumber data perhitungan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar.

Capaian jumlah nilai ekspor karet pada tahun 2017 adalah 10,34 % didapat dari realisasi sebesar Rp. 52.181.067 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 504.447.929,32. Angka realisasi diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Selatan dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin. Nilai ekspor diperoleh dengan mengkonversi jumlah volume ekspor karet menjadi nilai dengan mata uang Rp..

Dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah nilai ekspor karet mengalami peningkatan sebesar Rp. 11.356.142,83 yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 40.824.924,17 menjadi Rp. 52.181.067 pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 menyumbang 10,07 dari target Rp. 518.158.646,23 pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 10,34 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat rendah.

Apabila dilihat perkembangan ekspor karet Kabupaten Banjar 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 45. Ekspor Karet Kabupaten Banjar Tahun 2012 - 2016

Tahun	Volume ekspor karet (ton)	%
2012	19.272,00	630,89
2013	26.775,15	38,93
2014	23.821,20	-11,03
2015	24.014,66	0,18
2016	33.193,06	0,075

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan pemasaran karet adalah peningkatan investasi produksi dan produktivitas serta ekspor. Kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas pemasaran.

Perhatian pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencapai kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - Kegiatan pengembangan informasi peluang pasar dan perdagangan luar negeri

Target kinerja terlaksananya penerbitan STP BOKOR SIR, yaitu Pelayanan Pembuatan Tanda Daftar Pengusaha/Pedagang Karet dan Pencatatan Serta Pembuatan Laporan.

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya pelayanan pembuatan tanda daftar pengusaha/ pedagang karet agar tersedianya data pengusaha/pedagang karet di Kabupaten Banjar.
 - Monitoring/pendataan bahan olah komoditi ekspor daerah standar Indonesia rubber

Kegiatan ini mempunyai tujuan agar tersedianya dokumen bank data komoditi ekspor rubber di Kabupaten Banjar selama 1 tahun yang dilaksanakan pada 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Mataraman, Simpang empat, Karang Intan dan Aranio.

Gambar 3. 23. Monitoring Bokor – SIR



- Belanja Bimtek mutu bahan olah karet

Kegiatan ini mempunyai tujuan agar meningkatnya bimbingan teknis bahan olah Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber.

Gambar 3. 24. Bimtek Mutu Bahan Olah Karet



- o Perjadin Bimtek dan Monitoring Bimtek Mutu Bahan Olahan Karet

Kegiatan ini mempunyai tujuan agar meningkatnya pengetahuan aparat teknis tentang peluang pasar dan potensi ekspor daerah.

Gambar 3. 25. Perjadin Bimtek Mutu Olahan Karet



- o Konsultasi Teknis Peningkatan Peluang Pasar dan Potensi Ekspor Daerah

Kegiatan ini bertujuan melaporkan perkembangan penerbitan STPP Bokar SIR dan konsultasi mengenai peluang pasar dan usaha peningkatan mutu bahan olah karet. Realisasi kegiatan : Dilaksanakan 2 kali sebanyak 5 orang ke direktorat standarisasi dan pengendalian mutu Bogor.

Gambar 3. 26. Konsultasi teknis peningkatan peluang pasar karet



e. Persentase Desa Berkembang

Status desa didasarkan pada klasifikasi dalam indeks desa membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

IDM didapat dari data BPS RI yang perhitungannya hanya dilakukan sebanyak 3 tahun sekali dan dirilis oleh Kemendes dan PDT RI setiap 3 tahun sekali, terakhir rilis tahun 2016

Formulasi perhitungan adalah jumlah desa berkembang dibagi dengan jumlah desa di Kabupaten Banjar dikali 100 %.

Capaian persentase desa berkembang pada tahun 2017 adalah 61,16 % didapat dari realisasi sebesar 22,74 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan 37,18 % . Realisasi persentase desa berkembang diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{63 \text{ desa}}{277 \text{ desa}} \times 100\% = 22,74\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2016 persentase desa berkembang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan tetapi pada nilai yang sama yaitu 22,74 % . Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian pada tahun 2017 menyumbang 38,65 % dari target 58,84 % pada tahun 2020.

Untuk capaian kinerja persentase desa berkembang tahun 2017 tetap sama dengan tahun 2016 yaitu 22,74 % karena data yang dipakai adalah data IDM tahun 2016 dan diterbitkan tiap 3 tahun sekali oleh Kemendes. Data terbaru akan dirilis kembali pada tahun 2019, sehingga perkembangan persentase desa berkembang pada tahun 2016 sampai dengan 2018 baru akan diketahui pada tahun 2019.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 61,16 berarti masuk dalam capaian kategori rendah. Ketidakterhasilan ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak melakukan upaya untuk pencapaian target yang ditetapkan. Untuk pemenuhan variabel/indikator penilaian IDM melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan Program dan kegiatan dalam mendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Kegiatan meliputi :
 - Pelatihan manajemen usaha ekonomi dengan peserta sebanyak : pengurus Bumdes (24 orang), Bumdes (74 orang) dan LSP-BM (2 orang). Kegiatan

- terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian 100 %.
- Kegiatan penunjang administrasi PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM MP Integrasi berupa monitoring dan evaluasi pinjaman dana bergulir (simpan pinjam perempuan) di 12 Kecamatan (566 kelompok), penataan asset-aset hasil kegiatan PNPM. Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian 100 %. Tujuan kegiatan memantau tunggakan pinjaman dan penataan asset sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah – pemerintahan desa.
 - o Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat
Kegiatan meliputi pelatihan SIP, lomba posyandu, pembinaan posyandu di 20 kecamatan dan pelatihan kader posyandu di 14 kecamatan dengan peserta 100 orang. Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian 100 %. Manfaat dari kegiatan meningkatkan keterampilan kader posyandu , meningkatkan pelayanan posyandu.
 - o Kegiatan penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
Kegiatan meliputi pembinaan BPSPAM berupa monev Pamsimas di 16 Kecamatan. Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga tercapai 100 %.
- Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
- o Kegiatan Pendidikan keterampilan manajemen badan usaha milik desa
Kegiatan berupa Sosialisasi Permendesa N0.4 tahun 2015 tentang Bumdes yang diikuti 6 kecamatan dengan peserta 172 orang. Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian 100 %. Manfaat dari kegiatan masyarakat memahami cara mendirikan Bumdes guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
 - o Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

Kegiatan mengikuti pameran Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) di Sulsel berupa demo produk unggulan TTG daerah, lokakarya dan promosi potensi daerah. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini terpromosikannya potensi daerah sehingga dapat menarik investor.

➤ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :

○ Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Kegiatan meliputi : pelaksanaan bulan bakti gotong royong, pelatihan evaluasi perkembangan desa dengan peserta 20 orang dari kecamatan dan 40 orang dari desa, Pelaksanaan TMMD di desa Cintapuri serta pelaksanaan lomba desa. Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian 100 %.

Gambar 3. 27. Pelatihan Evaluasi Perkembangan Desa



Gambar 3. 28. Penilaian lomba desa sehat tahun 2017



Gambar 3. 29. Pameran Pembangunan tahun 2017



Permasalahan :

- Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UKM di pasar nasional maupun internasional.
- Terbatasnya akses koperasi dan usaha mikro terhadap sumber daya produktif yaitu bahan baku, permodalan, teknologi, pemasaran dan kemitraan
- Masih terbatasnya sumber daya koperasi dan UKM yang berkualitas , sarana dan prasarana yang memadai, pemasaran serta permodalan.
- Berdasarkan IDM yang dirilis Kemendes dan PDT RI setiap 3 tahun sekali , jumlah desa di Kabupaten Banjar yang terkategori desa berkembang baru 63 desa atau 22,74 %. Capaian ini masih cukup rendah.
- Karet sebagai salah satu produk unggulan daerah dan pendongkrak pendapatan petani karet/petani karet transmigrasi, produktivitas, kualitas dan pemasarannya masih belum optimal.

Solusi :

- Meningkatkan produktifitas dan kualitas produk koperasi dan UKM melalui pendidikan dan pelatihan teknis, pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.
- Memperluas jangkauan akses koperasi dan UKM terhadap sumber daya : meningkatkan bahan baku lokal misal kerjasama dengan petani lokal, lebih pro aktif untuk kemitraan dengan BUMN, Perbankan, swasta (minimarket,supermarket dll) untuk permodalan dan pemasaran.

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banjar baik dengan dana APBD maupun dana desa agar lebih fokus, terintegrasi dan bersinergi antar instansi pemerintah, masyarakat dan swasta.
- Meningkatkan produktivitas, kualitas dan ekspor karet melalui pemberian bibit unggul, pupuk, pelatihan/pembinaan panen dan pasca panen serta fasilitasi pemasaran sampai tingkat ekspor.

3.2.24. Mengembangkan Kepariwisataaan Daerah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Memperhatikan potensi dan peluang masa depan, Pariwisata merupakan salah satu andalan Kabupaten Banjar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain, pariwisata akan mendorong pembangunan daerah yang mengedepankan kaidah-kaidah perencanaan, arsitektural, budaya lokal, estetika dan kualitas lingkungan serta memberikan ruang rekreasi bagi masyarakat. Potensi objek pariwisata di Kabupaten Banjar cukup banyak, baik wisata alam, kuliner, religi, kerajinan dll.

Pengembangan pariwisata akan menyebabkan perekonomian masyarakat menggeliat dan menjadi stimulus berinvestasi dan menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya. Kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi adalah penciptaan peluang kerja, penciptaan usaha terkait pariwisata seperti akomodasi, restoran, taxi, usaha kerajinan seni souvenir dan lain lainnya.

Pada tahun 2017 pencapaian sasaran mengembangkan pariwisata daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah masih belum optimal, dimana rata-rata capaian indikator menunjukkan nilai negatif (-66,09 %). Hal ini disebabkan capaian indikator peningkatan wisatawan mancanegara mengalami penurunan sebesar - 11,89 %.

Capaian sasaran mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu : 1) Peningkatan wisatawan lokal dan 2) Peningkatan wisatawan mancanegara.

Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3. 46. Realisasi dan Capaian Sasaran Mengembangkan Kepariwisata Daerah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Peningkatan wisatawan lokal	127,39	1.919.428	2.027.415	105,63	1.922.415	105,46
2	Peningkatan wisatawan mancanegara	77,4	5	-11,89	-237,8	5	-237,8

a. Peningkatan wisatawan lokal

Peningkatan wisatawan lokal yang berkunjung pada sejumlah lokasi wisata yang ditentukan. Formulasi perhitungan yaitu jumlah seluruh wisatawan lokal yang berkunjung pada tahun bersangkutan dikurang jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya dibagi jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya dikali 100% (apabila target menggunakan satuan persen, apabila satuan target orang maka dihitung : jumlah seluruh wisatawan lokal yang berkunjung pada tahun bersangkutan dikurang jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya.

Lokasi wisata yang menjadi dasar perhitungan adalah :

- ✓ Cahaya Bumi Selamat (CBS)
- ✓ Wisata Religi Makam Datu Kalampayan
- ✓ Pulau Pinus I, Pulau Pinus II dan Riam Kanan
- ✓ Wisata kuliner Bincau
- ✓ Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam
- ✓ Pasar Terapung Lok Baintan
- ✓ Obyek Wisata Alam Sungai Kembang
- ✓ Wisata religi Makam Guru Sekumpul Martapura
- ✓ Objek wisata Water Boom Pesona Modern

Capaian peningkatan wisatawan lokal pada tahun 2017 adalah 105,63 % didapat dari realisasi 2.027.415 orang dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 1.919.428 orang dikali 100 %. Realisasi perhitungan diperoleh dari :

$$6.383.682 \text{ orang} - 4.356.267 \text{ orang} = 2.027.415 \text{ orang}$$

Atau apabila dipersenkan sebagai berikut :

$$= \frac{6.383.682 \text{ orang} - 4.356.267 \text{ orang}}{4.356.267 \text{ Orang}} \times 100\% = 46,54 \%$$

Dibandingkan dengan tahun 2016 peningkatan wisatawan lokal mengalami peningkatan sebesar 2.027.415 orang yaitu pada tahun 2016 sebesar 4.356.267 orang menjadi 6.383.682 orang pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 sudah mencapai 105,46 % dari target 1. 922.415 orang pada tahun 2020. Jumlah wisatawan nusantara (Tingkat nasional) pada tahun 2017 sebanyak 252.569.465 orang (per Oktober 2017).

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 105,63 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi.

b. Peningkatan wisatawan mancanegara

Peningkatan wisatawan mancanegara yang berkunjung pada sejumlah lokasi wisata yang ditentukan. Formulasi perhitungan yaitu jumlah seluruh wisatawan mancanegara yang berkunjung pada tahun bersangkutan dikurang jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya dibagi jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya dikali 100 %.

Lokasi wisata yang menjadi dasar perhitungan adalah :

- ✓ Cahaya Bumi Selamat (CBS)
- ✓ Wisata Religi Makam Datu Kalampayan
- ✓ Pulau Pinus I, Pulau Pinus II dan Riam Kanan
- ✓ Wisata kuliner Bincau
- ✓ Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam
- ✓ Pasar Terapung Lok Baintan
- ✓ Obyek Wisata Alam Sungai Kembang
- ✓ Wisata religi Makam Guru Sekumpul Martapura
- ✓ Objek wisata Water Boom Pesona Modern
- ✓ Capaian peningkatan wisatawan mancanegara pada tahun 2017 adalah - 237,8 % didapat dari realisasi - 11,89 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 5 %.

Realisasi diperoleh dari perhitungan :

$$= \frac{1.460 \text{ orang} - 1.657 \text{ orang}}{1.657 \text{ Orang}} \times 100\% = -11,89 \%$$

Dibandingkan dengan tahun 2016 kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan sebesar -11,89 %. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 sebesar - 237,80 % dari target 5 % pada tahun 2020. Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2017 di tingkat Nasional sebesar 14.039.799 orang.



Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar – 11,89 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat rendah. Ketidakberhasilan ini disebabkan pada tahun 2017 ini tidak ada even-even besar yang dilaksanakan yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara, tetapi bila dilihat dari segi jumlah wisatawan mancanegara yang datang cukup besar yaitu sebanyak 1.460 orang.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mencapai target yang telah ditetapkan terhadap pencapaian 2 Indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Banjar dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

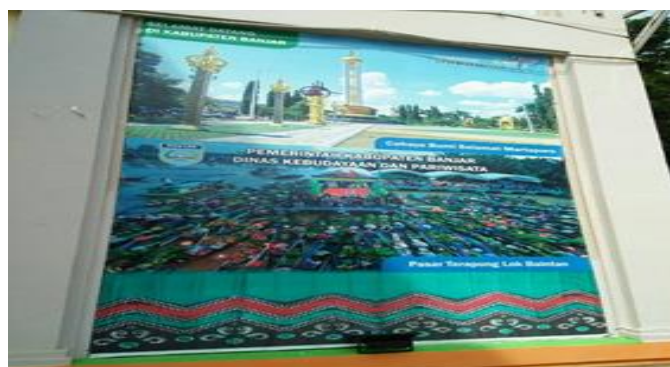
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan. Program tersebut dilaksanakan untuk mencapai outcome : Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata.

Indikator outcome	:	Persentase destinasi wisata yang telah dikembangkan
Target kinerja outcome	:	48,08 %
Realisasi kinerja outcome	:	44,23 %
Capaian	:	92%

Untuk mencapai target outcome tersebut dilaksanakan

- Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan output :
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - Indikator output : jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun/dikembangkan
 - Target Kinerja output : 13 unit
 - Realisasi kinerja output : 29 unit
 - Capaian : 223%

Gambar 3. 30. Pemasangan Baliho Promosi Wisata





- Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi dengan output :
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata
 - Indikator output : Jumlah sosialisasi sadar wisata yang dilaksanakan
 - Target Kinerja output : 2 kali
 - Realisasi kinerja output : 2 kali
 - Capaian : 100%

Gambar 3. 31. Sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat



- Program Pengembangan kemitraan. Program tersebut dilaksanakan untuk mencapai outcome : meningkatnya pengembangan destinasi wisata.
 - ✓ Indikator outcome : Persentase destinasi wisata yang telah dikembangkan
 - ✓ Target kinerja outcome : 48,08%
 - ✓ Realisasi kinerja outcome : 44,23%
 - ✓ Capaian : 92%

Untuk mencapai target outcome tersebut dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- o Kegiatan Pengembangan dan penguatan informasi dan database dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, dengan output :

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata

- Indikator output : Jumlah pendata wisata, pemandu wisata dan duta wisata yang dikoordinir
- Target Kinerja output : 372 orang bulan
- Realisasi kinerja output : 372 orang bulan
- Capaian : 100%

Gambar 3. 32. Pendataan Pariwisata di Kabupaten Banjar



- Program Pengembangan pemasaran pariwisata. Program tersebut dilaksanakan untuk mencapai outcome :

Meningkatnya pemasaran pariwisata,

- ✓ Indikator outcome :Jumlah jenis pemasaran pariwisata yang dikembangkan
- ✓ Target kinerja outcome : 2 jenis
- ✓ Realisasi kinerja outcome : 2 jenis
- ✓ Capaian : 100%

Untuk mencapai target outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :

- o Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata, dengan output :

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

- Indikator output : Jumlah media informasi pariwisata yang dikembangkan

- Target Kinerja output : 3 jenis
- Realisasi kinerja output : 3 jenis
- Capaian : 100%
- o Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri, dengan output :
 - Meningkatnya promosi wisata
 - Indikator output : Jumlah promosi pariwisata yang dikembangkan
 - Target Kinerja output : 4 kali
 - Realisasi kinerja output : 4 kali
 - Capaian : 106,06%

Gambar 3. 33. Pameran Batam Investment, Tourism and Trade Expo 2017



Gambar 3. 34. Pameran Festival Budaya pasar Terapung



- o Kegiatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, dengan output :
 - Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif pendukung pariwisata

Permasalahan

- Belum semua destinasi wisata yang potensial memiliki infrastruktur yang memadai terutama jalan menuju ke lokasi wisata. Selain itu destinasi wisata potensial yang berada di lokasi tahura (terutama di Kecamatan Aranio) terkendala oleh ketentuan peruntukan lahan dan tata ruang.
- Target persentase peningkatan wisatawan mancanegara tidak terpenuhi karena pada tahun 2017 tidak ada even pariwisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara sebagaimana tahun 2016 (Festival pasar terapung)

Solusi

- Mengembangkan destinasi wisata berdasarkan skala prioritas dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui kelompok sadar wisata.
- Menyelenggarakan even wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara sesuai dengan daya tarik dan potensi lokal yang berbeda dengan daerah lain

3.2.25. Meningkatkan Perencanaan, Kesesuaian Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten. Perencanaan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pemanfaatan ruang tanpa adanya pengendalian sesuai perencanaan akan berdampak negatif, antara lain kekacauan, kekumuhan, tidak tertatanya bangunan, tidak ada estetika dan kesemrawutan serta dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Untuk menghindari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan upaya meningkatkan perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD guna mewujudkan kenyamanan bagi masyarakat.

Capaian sasaran meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan



rencana tata ruang. Capaian sasaran meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sangat berhasil dengan capaian sebesar 167,47 % dan masuk dalam klasifikasi capaian sangat tinggi.

Formulasi perhitungan diperoleh dari luas lahan sesuai peruntukannya dibagi dengan luas lahan di Kabupaten Banjar dikali 100 %.

Capaian dari indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 47. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Perencanaan, Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Banjar Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	175,07	55	92,11	167,47	62,5	147,38

a. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

Kesesuaian pemanfaatan ruang maksudnya membandingkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan Perda No. 3 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032.

Formulasi perhitungan diperoleh dari luas lahan sesuai peruntukannya dibagi dengan luas lahan di Kabupaten Banjar dikali 100 %.

Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang pada tahun 2017 adalah 167,5 % didapat dari realisasi sebesar 92,11 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 55 %. Realisasi perhitungan diperoleh dari :

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Luas Lahan Sesuai Peruntukannya}}{\text{Luas Lahan Kabupaten Banjar}} \times 100\% \\
 &= \frac{430.015 \text{ Ha}}{466.850 \text{ Ha}} \times 100\% \\
 &= 92,11\%
 \end{aligned}$$

Dibandingkan dengan tahun 2016 kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang mengalami peningkatan sebesar

0,2 % yaitu pada tahun 2016 sebesar 91,91 % menjadi 92,11 % pada tahun 2017.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 sudah melampaui sebesar 147,38 % dari target 62,50% pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 167,5 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 ini merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian, antara lain sebagai berikut :

- Program Perencanaan Tata Ruang
 - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang
Kegiatan ini meliputi pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang.
 - Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Kegiatan berupa Pelatihan Penataan Ruang, Sosialisasi Tata Ruang, Masterplan RTH Kota Hijau Perkotaan Kab. Banjar, Evaluasi Pemanfaatan Ruang Zona 1, Evaluasi Pemanfaatan Ruang Zona 2, Evaluasi Pemanfaatan Ruang Zona 3, Evaluasi Pemanfaatan Ruang Zona 4, Perencanaan Kawasan untuk Permukiman, Identifikasi Kawasan Perencanaan, Review RDTR Kota Martapura, Operasional Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Banjar, Pembuatan Papan Informasi Penataan Ruang Zona 1, Pembuatan Papan Informasi Penataan Ruang Zona 2.
 - Kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
Kegiatan ini meliputi pelaksanaan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang.
- Program Pemanfaatan Ruang
 - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terkait pemberian Rekomendasi Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan realisasi kegiatan berupa Sosialisasi Kebijakan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Talk Show melalui Media, Pelatihan Pengendalian Pemanfaatan ruang, Pelatihan Teknis Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang I- III, Penyusunan Inventaris Bangunan Komersil Kawasan I, - III, Pengawasan Bangunan Komersil Zona I, - VI.

Permasalahan

- Permasalahan secara khusus tidak ada yang berarti. Hanya saja karena peta digital/peta citra yang ada tidak up to date sehingga data sumber pengambilan kebijakan tata ruang dikhawatirkan tidak terlalu tepat dan harus survey ke lokasi secara lebih intensif.

Solusi

- Melakukan pengadaan peta digital/peta citra yang up to date dengan melakukan kerjasama ke instansi yang terkait.

3.2.26. Meningkatkan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Yang Berkualitas Dan Terintegrasi

Pentingnya infrastruktur jalan dan jembatan sebagai pendukung dalam menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas pengembangan wilayah dan kelancaran/akses transportasi, kelancaran distribusi barang dan jasa dan aktivitas masyarakat lainnya yang pada akhirnya akan menunjang pada peningkatan/pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk itu meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi menjadi salah satu prioritas sasaran yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

Capaian sasaran meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi masuk dalam kategori sangat tinggi dengan rata-rata capaian 100,52 %. Capaian sasaran diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu 1) Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dan 2) Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik.

Capaian dari indikator dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3. 48. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi Kabupaten Banjar Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	100,84	68,69	68,85	100,23	72,83	94,53
2	Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	101,58	88,37	89,08	100,8	94,43	94,33

a. Persentase Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap

Jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang dapat dilewati oleh kendaraan roda empat dengan kecepatan normal dan aman. Formulasi perhitungan adalah Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi Panjang jalan seluruhnya dikali 100 %.

Capaian persentase Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2017 adalah 100,23 % didapat dari realisasi sebesar 68,85 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 68,69 %. Realisasi diperoleh dari perhitungan :

$$\frac{\text{(Panjang Jalan Kabupaten dengan Kondisi Mantap)}}{\text{Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Keseluruhan}} = \frac{537,98 \text{ Km}}{781,39 \text{ Km}} = \text{X } 100\% = 68,85\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2016 persentase Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap mengalami peningkatan sebesar 1 % yaitu pada tahun 2016 sebesar 67,85 % menjadi 68,85 % pada tahun 2017.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 menyumbang 94,53 % dari target 72,83 % pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100,23 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Kegiatan Perencanaan pembangunan jalan



Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memfokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Banjar. Pada tahun 2017 , kegiatan ini terdiri dari 1 Dokumen Perencanaan yakni Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Handil Kayu Bawang Kecamatan Gambut.

- Pembangunan Jalan
 - Kegiatan ini meliputi kegiatan Pembebasan lahan akses menuju bandara, Pembangunan Jalan Handil Kayu Bawang Kecamatan Gambut, Pembangunan Jalan Poros Desa Guntung Ujung Makmur (Lanjutan), Pembangunan Jalan Alternatif Sei Lulut Batas Kota Banjarmasin, Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Paket 1 , Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Paket 2 .
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
 - Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan terdiri dari Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 1 - 8, Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 1 - 2 : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan.
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
 - Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan terdiri dari Operasional Unit Pemeliharaan Jalan, Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan, Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 1 - 3 : Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan.
- Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
 - Kegiatan Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
 - Kegiatan rehabilitasi jalan yang digunakan untuk cadangan dana tanggap darurat meliputi Cadangan Dana Tanggap Darurat : Penanganan Darurat Jalan Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk, Penanganan Darurat Jalan Desa Tambak Sirang Laut Kecamatan Gambut, Penanganan Darurat Jalan Desa Paku Kec. Cintapuri Darussalam, Penanganan Darurat Jalan Desa Tajau landung menuju Desa Simpang Lima Kecamatan Sungai Tabuk, Penanganan Darurat Jalan Desa Handil Asang Kec. Kertak Hanyar.
- Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan.
 - Kegiatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan

Kegiatan ini merupakan Pemutakhiran Sistem Informasi/ Data Base Jalan di Kabupaten Banjar

- Program Peningkatan Jalan dan Rekonstruksi Jembatan
 - Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Penugasan) dengan pekerjaan berupa Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan, Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Paket 1 - 3, Pengendalian Infrastruktur Jalan DAK Penugasan.

Gambar 3. 35. Peningkatan Ruas Jalan : Kampung Melayu - Benua Anyar



Gambar 3. 36. Peningkatan Ruas Jalan : Bumi Rata - Sei. Raya



- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan berupa Perbaikan Jalan Desa sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah Jalan Desa, Operasional Unit Pemeliharaan Jalan Desa, Pengawasan Teknis Jalan Desa, Perbaikan Jalan Poros Desa Cintapuri Kecamatan Cintapuri Darussalam (Pola Karya Bhakti TMMD), Perbaikan Jembatan Desa Kaliukan RT. 3 Kecamatan

Astambul, Perbaikan Jembatan Desa sebanyak 10 (Sepuluh) buah jembatan desa.

b. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik

Jembatan dalam kondisi baik adalah jembatan yang dapat dilewati dengan aman oleh kendaraan maupun orang sesuai dengan kelas dan tipe jembatan. Formulasi perhitungan adalah jumlah jembatan kabupaten dengan kondisi baik dibagi jumlah seluruh jembatan dikali 100 %.

Capaian persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2017 adalah 100,80 % didapat dari realisasi sebesar 89,08 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 88,37 %. Realisasi diperoleh dari perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten Keseluruhan}} = \frac{261 \text{ unit}}{293 \text{ unit}} = \text{X } 100\% = 89,08\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2016 persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 1,07 % yaitu pada tahun 2016 sebesar 88,01 % menjadi 98,08 % pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 menyumbang 94,33 % dari target 94,43 % pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100,80 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Perencanaan Pembangunan Jembatan
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memfokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan di Kabupaten Banjar yakni sebanyak 4 Paket.
 - Pembangunan Jembatan
Kegiatan ini merupakan kegiatan pembangunan dan pengawasan pembangunan jembatan yang terdiri dari Pembangunan Jembatan Muara Halayung Kecamatan Beruntung Baru.

- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Terdiri dari kegiatan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Paket 1 : Penyelidikan Tanah Rekonstruksi Jembatan Penyambaran Kec. Karang Intan dan Jembatan Sungai Jati kec. Mataraman, Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Paket 2 : Rekonstruksi Jembatan Penyambaran Kec. Karang Intan, Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen.
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Terdiri dari pekerjaan Rekonstruksi Jembatan sebanyak 2 (Dua) buah, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen sebanyak 19 (Sembilan belas) buah, Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jembatan, Operasional Unit Pemeliharaan Jembatan.

Gambar 3. 37. Rekonstruksi Jembatan Kampung Melayu Tengah Kecamatan Martapura Timur



- Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
 - Kegiatan Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat Kegiatan rehabilitasi jembatan yang digunakan untuk cadangan dana tanggap darurat meliputi Cadangan Dana Tanggap Darurat : Penanganan Darurat Jalan Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk, Penanganan Darurat Jalan Desa Tambak Sirang Laut Kecamatan Gambut, Penanganan Darurat Jalan Desa Paku Kec. Cintapuri Darussalam, Penanganan Darurat Jalan Desa Tajau landung menuju Desa Simpang Lima Kecamatan Sungai Tabuk, Penanganan Darurat Jalan Desa Handil Asang Kec. Kertak Hanyar.



- Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
 - Kegiatan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
Kegiatan ini merupakan Pemutakhiran Sistem Informasi/ Data Base Jembatan di Kabupaten Banjar.

Permasalahan

- Capaian indikator 'Panjang Jalan yang Dibangun' tidak tercapai karena keterlambatan kontraktor dalam melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa Guntung Ujung Makmur (Lanjutan) dan waktu sudah memasuki musim hujan, sehingga ketika akan berakhir masa kontraknya maka penyedia meminta perpanjangan masa kontrak selama 50 hari kalender sehingga dapat menyelesaikan target pekerjaan sesuai kontrak.
- Capaian indikator 'Panjang Jalan Desa yang Direhabilitasi/ Ditingkatkan dan diaspal' tidak tercapai karena pada paket pekerjaan Perbaikan Jalan Desa Handil Parit Dua Sungai Kupang Kecamatan Gambut terdapat kesulitan dalam mendistribusikan material pekerjaan ke lokasi pekerjaan terkait kendala bentang alam, sehingga ketika akan berakhir masa kontraknya maka penyedia meminta perpanjangan masa kontrak selama 50 hari kalender sehingga dapat menyelesaikan target pekerjaan sesuai kontrak.

Solusi

- Harus lebih selektif dalam memilih penyedia atau kontraktor yang melaksanakan pekerjaan. Apabila terpilih penyedia atau kontraktor yang terkesan memperlambat pelaksanaan, harus dilakukan pendampingan secara lebih intensif.
- Apabila ada paket pekerjaan yang lokasinya berada di daerah yang bentang alamnya sulit ditempuh, maka agar pelaksanaan pekerjaannya dilakukan lebih awal sehingga masa pelaksanaan kontrak bisa lebih lama.

3.2.27. Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi Dan Informatika

Pembangunan infrastruktur non fisik sangat dibutuhkan masyarakat berkaitan dengan komunikasi dan informatika khususnya internet dan telepon seluler.

Memasuki era digitalisasi saat ini, infrastruktur komunikasi dan informatika sangat diperlukan, mengingat juga kondisi geografis Kabupaten Banjar yang cukup luas dan beberapa wilayah yang cukup sulit ditempuh baik lewat darat maupun sungai.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan upaya meningkatkan cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika agar dapat diakses oleh seluruh kelurahan dan desa di wilayah Kabupaten Banjar guna mendukung percepatan pembangunan daerah.

Capaian sasaran meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Cakupan layanan internet dan telepon seluler.

Pada tahun 2017 capaian sasaran meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika menunjukkan hasil yang positif yaitu masuk kategori tinggi dengan nilai sebesar 80,34 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 49. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Cakupan Layanan internet dan telepon seluler	54,16	71	80,34	113,15	81	99,19

a. Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler

Tersedianya akses internet dan telepon di seluruh desa dan kelurahan. Formulasi perhitungan adalah jumlah desa dan kelurahan yang dapat mengakses internet dan telepon seluler dibagi jumlah seluruh desa dan kelurahan dikali 100 %.

Capaian layanan internet pada tahun 2017 adalah 113,15 % didapat dari realisasi sebesar 80,34 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 71 %. Realisasi diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{233 \text{ desa/kelurahan}}{290 \text{ desa/kelurahan}} \times 100\% = 80,34\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2016 cakupan layanan internet dan telepon seluler mengalami peningkatan sebesar 26,18 % yaitu pada tahun 2016 sebesar 54,16 % menjadi 80,34 % pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka

capaian tahun 2017 menyumbang 99,19(%) dari target 81 % pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 80,34 % berarti masuk dalam capaian kategori tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta peran swasta yang bergerak dalam komunikasi dan informatika dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
 - Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam urusan Komunikasi dan Informatika dalam menyajikan data terkini mengenai data dasar jasa layanan Pos dan Telekomunikasi dilaksanakan beberapa kegiatan :

- Pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebanyak 1 kali / bulan jadi ada 12 kali di tahun 2017
- Sosialisasi pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang diikuti oleh KIM ditiap-tiap kecamatan sebanyak 1 kali
- Pendataan jasa Telekomunikasi
- Perencanaan tata ruang menara telekomunikasi bersama / cell plan (zona menara)

Gambar 3. 38. Pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi



Permasalahan

- Bentang geografis Kabupaten Banjar yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya menghambat pemerataan penyebaran informasi.
- Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blankspot teknologi informasi komunikasi (TIK)

Solusi

- Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di up date
- Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa Media Center

3.2.28. Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan

Infrastruktur perhubungan meliputi transportasi darat dan sungai sangat berperan dalam mendukung kelancaran/keberhasilan pembangunan.

Sasaran meningkatnya infrastruktur perhubungan menjadi upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Capaian sasaran meningkatnya infrastruktur perhubungan cukup berhasil dengan capaian sebesar 88,74% dan masuk dalam kategori tinggi. Capaian sasaran diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu 1) Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik 2) Persentase pengujian kendaraan bermotor.

Capaian dari indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 50. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	102,62	100	100	100	100	100
2	Persentase pengujian kendaraan bermotor	82,7	81,25	62,95	77,48	100	62,95

a. Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik

Berfungsinya terminal dan dermaga yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjar. Berfungsi dengan baik dimaksudkan yaitu terminal dan dermaga dapat dimanfaatkan untuk memuat dan menurunkan orang dan barang serta sebagai tempat istirahat. Formulasi perhitungan Jumlah terminal dan dermaga yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh terminal dan dermaga dikali 100 %

Capaian persentase terminal dan dermaga pada tahun 2017 adalah 100 % didapat dari realisasi sebesar 100 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100 %. Realisasi diperoleh dari perhitungan :

$$\frac{2 \text{ terminal} + 11 \text{ dermaga}}{13 \text{ buah}} \times 100\% = 100\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2016 persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik mengalami peningkatan sebesar 33,3 % yaitu pada tahun 2016 sebesar 66,67 % menjadi 100 % pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 sudah mencapai 100 % dari target 100 % pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perhubungan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

➤ Program Pembangunan dan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

○ Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Target kinerja kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat pada tahun 2017 adalah 2 (dua) buah terminal yang berada dalam kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar masih berfungsi baik dengan realisasi kinerja sebanyak 2 (dua) buah terminal dan capaian sebesar 100%.

Realisasi kegiatan pada tahun 2017 berupa kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi terminal yang ada serta dilakukan pemeliharaan jalan terminal di terminal Martapura.

Terminal yang ada di Kabupaten Banjar yang termasuk dalam pengelolaan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ada 2 yaitu :

- Terminal Martapura
- Sub Terminal Kelampayan

Keduanya masih berfungsi dengan baik dan melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan fungsinya.

Gambar 3. 39. Tempat Antrian Mobil Terminal Martapura



Gambar 3. 40. Tempat Antrian Mobil Terminal Martapura



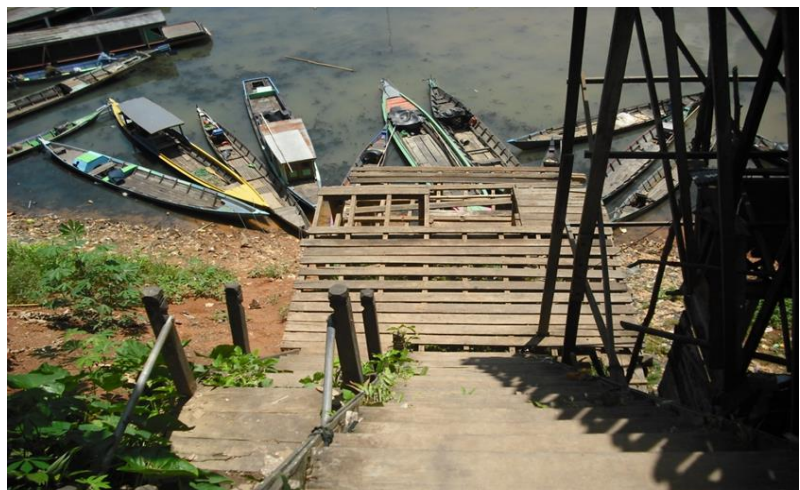
- o Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Target kinerja kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada tahun 2017 adalah 11 (sebelas) buah dermaga/tambat kapal yang berada dalam kewenangan Kabupaten masih berfungsi baik dengan realisasi kinerja sebanyak 11 (sebelas) dermaga dan capaian sebesar 100 %.

Realisasi kegiatan pada tahun 2017 berupa kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi dermaga yang ada. Dermaga yang ada berjumlah 11 (sebelas) buah, yaitu :

- Dermaga Depan Kantor Camat Aluh-Aluh
- Dermaga Martapura
- Dermaga Sei Tabuk Pasar
- Dermaga Sei Tabuk Lama/Keramat
- Dermaga Pasar Aluh-Aluh
- Dermaga Simpang Warga Aluh-Aluh
- Dermaga Astambul
- Dermaga Keliling Benteng
- Dermaga Riam Kanan
- Dermaga Belangian

Gambar 3. 41. Tambat Kapal Kec. Aranio Desa Tiwingan Lama



Gambar 3. 42. Tambat Kapal kecamatan Sungai Tabuk



Gambar 3. 43. Tambat Kapal Depan Kantor Camat Aluh-Aluh



b. Persentase pengujian kendaraan bermotor

Persentase pengujian kendaraan bermotor terlaksananya pengujian terhadap kelayakan angkutan umum sesuai dengan standar. Formulasi perhitungan adalah jumlah angkutan umum yang diuji dibagi jumlah seluruh angkutan umum dikali 100 %.

Capaian persentase pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2017 adalah 77,48 % didapat dari realisasi sebesar 62,95 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 81,25 %. Realisasi perhitungan diperoleh dari :

$$\frac{5.036 \text{ unit}}{8.000 \text{ unit}} \times 100\% = 62,95\%$$

Dibandingkan tahun 2016 persentase pengujian kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar 4,24 % yaitu pada tahun 2016 sebesar 67,19 % menjadi 62,95 % pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 menyumbang 62,95 % dari target 100 % pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 77,48 % berarti masuk dalam capaian kategori tinggi . Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perhubungan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

- Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor dengan Indikator kinerja jumlah kendaraan bermotor yang diuji. Target yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah 6.800 unit kendaraan bermotor yang diuji . Realisasi jumlah kendaraan bermotor yang diuji sebesar 5.036 unit. Jumlah kendaraan bermotor yang wajib diuji di Kabupaten Banjar sesuai dengan RPJMD sebesar 8.000 unit.

- Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Kinerja Jumlah unit alat pengujian kendaraan bermotor
Alat pengujian yang telah tersedia sampai tahun 2017 adalah sebanyak 8 unit, yaitu:
 - Alat Uji kebisingan suara Klakson
 - Alat uji head light tester
 - Alat uji Timbangan mobil
 - Emisi gas buang untuk bahan bakar bensin
 - Emisi gas buang untuk bahan bakar solar
 - Alat uji rem
 - Kedalaman alur ban
 - Alat uji kacaKetersedian alat pengujian ini masih belum memenuhi target yang ingin dicapai yaitu sebanyak 9 jenis. Capaian realisasi kinerja adalah 88,88%.

Gambar 3. 44. Alat Uji Timbangan Mobil



Gambar 3. 45. Alat Uji Rem



Permasalahan

- Fasilitas dermaga belum dilengkapi Toilet/WC umum
- Peralatan pengujian yang belum lengkap
- Belum tersedianya bengkel yang sesuai dengan standar yang berlaku

Solusi

- Melengkapi fasilitas dermaga
- Pemeliharaan rutin fasilitas terminal
- Melengkapi peralatan pengujian kendaraan bermotor
- Melakukan inovasi layanan pengujian kendaraan bermotor sehingga mempermudah, mempercepat pengujian kendaraan bermotor dengan hasil yang lebih akuntabel dan transparan.
- Melakukan pembinaan terhadap bengkel sehingga memenuhi standar yang berlaku.

3.2.29. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Permukiman Dan Perumahan Yang Layak

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan PSU sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni.

Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan permukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman tergambar kemiskinan masyarakat.

Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan layak huni merupakan salah satu sasaran yang ingin ditingkatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjar sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan tempat tinggal, mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Capaian sasaran meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu cakupan rumah layak huni.

Pada tahun 2017 pencapaian sasaran meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak menunjukkan hasil yang positif dengan capaian sebesar 98,60 % dan diklasifikasikan dalam kategori sangat tinggi.

Capaian dari indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 51. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perumahan yang layak Kabupaten Banjar Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Cakupan rumah layak huni	102,07	96,52	98,6	102,16	97,87	100,75

a. Cakupan rumah layak huni

Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi standar Kementerian PUPR yaitu rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Formulasi perhitungan adalah jumlah rumah layak huni dibagi jumlah seluruh rumah dikali 100 %.

Capaian cakupan rumah layak huni pada tahun 2017 adalah 102,15 % didapat dari realisasi sebesar 98,60 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 96,52 %. Realisasi diperoleh dari perhitungan :

Dibandingkan dengan tahun 2016 cakupan rumah layak huni mengalami peningkatan sebesar 0,69 % yaitu pada tahun 2016 sebesar 97,91 % menjadi 98,60 % pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 sebesar 100,75 % sudah melampaui dari target 97,87 % pada tahun 2020.

Pada RPJMN 2015-2019 , Target pembangunan rumah swadaya (rumah layak huni) sampai dengan akhir RPJMN (2019) sebesar 1.750.000 unit, realisasi pada tahun 2017 sebesar 112.732 unit . Total rumah swadaya tingkat nasional dari tahun 2015 s/d 2017 sebesar 292.865 unit.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 102,15 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perumahan dan Permukiman dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Pengembangan Perumahan
 - Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

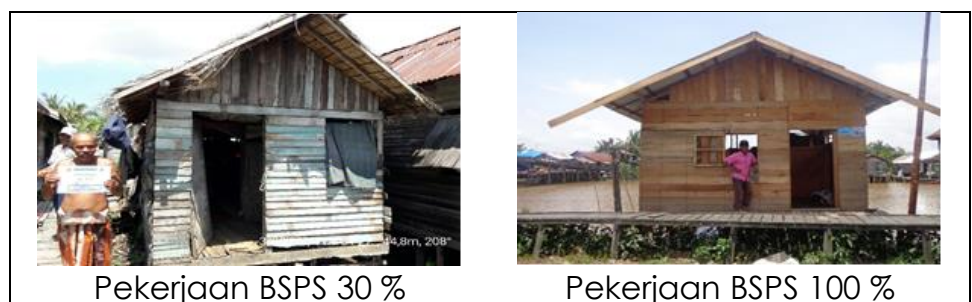
Untuk mendukung kegiatan Bantuan stimulan perumahan swadaya diperlukan anggaran untuk tim Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan tim Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Beberapa program yang mendapatkan bantuan dana APBN dari pemerintah pusat yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Output : Terbayarnya honor tim fasilitasi dan tim verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Jumlah rumah yang mendapatkan fasilitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 334 unit

Outcome : Terlaksananya kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mendapatkan bantuan bedah rumah.

Gambar 3. 46. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya



- Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Perumahan (DAK)

Output : Jumlah rumah layak huni yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 552 unit yang tersebar di Kecamatan Martapura

Outcome : Meningkatnya persentase cakupan rumah layak huni dengan target sebesar 98.37 %

Gambar 3. 47. Pembangunan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK) Perumahan (Progress 0 %)



Gambar 3. 48. Pembangunan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK) Perumahan (Progress 100 %)



Permasalahan

- Data Calon Penerima Bantuan yang belum terverifikasi, hal ini dikarenakan ada perbedaan faktor penentu antara data By Name By Address dari hasil Kajian KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Perumahan.
- Adanya prioritas pelaksanaan teknis DAK dari Pusat untuk belanja hibah ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial berupa uang dimana mekanisme penganggaran berada di Belanja Tidak Langsung, sedangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) khususnya Dinas Perumahan & Permukiman Kab. Banjar telah berjalan. Hal ini membuat proses pencairan dan pelaksanaan bantuan menjadi berupa barang dan berdampak pada proses pelelangan yang memakan waktu sehingga realisasi fisik baru dapat berjalan di triwulan III.
- Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan maka perlu didukung dengan sistem pendataan yang akurat. Dalam hal ini terdapat beberapa data yang belum tervalidasi secara spesifik terutama data jumlah penduduk perkotaan, data jumlah rumah (layak huni dan tidak layak huni) serta data kawasan permukiman kumuh yang ada di Kab. Banjar.



Solusi

- Data calon penerima bantuan yang diusulkan harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum penganggaran ke Pemerintah Pusat. Untuk itu diperlukan pemutakhiran data khususnya data RTLH untuk perumahan dan kawasan permukiman disetiap tahunnya.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan anggaran khususnya untuk bantuan hibah masyarakat agar pada saat perencanaan kegiatan dapat diprioritaskan bantuan sosial berupa uang
- Perlunya pendataan resmi oleh badan/lembaga yang akuntable terhadap data-data, terutama data jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan, data jumlah rumah (layak huni dan tidak layak huni) yang ada di Kab. Banjar diperlukan dalam proses pembangunan

3.2.30. Meningkatnya Pengelolaan Air Minum Secara Optimal

Berdasarkan RPJMN periode 2015 -2019, Pemerintah menargetkan cakupan akses air minum pada tahun 2019 mencapai 100%. Sejalan dengan hal itu Pemerintah daerah turut mendukung pencapaiannya dengan melakukan upaya meningkatkan pengelolaan air minum secara optimal. Keberhasilan pencapaian sasaran perlu dukungan dari badan usaha, masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

Capaian sasaran meningkatnya pengelolaan air minum diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu cakupan air minum.

Pada tahun 2017 pencapaian sasaran meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal menunjukkan hasil yang positif dengan capaian 110,09 dan termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Capaian dari indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 52. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Air Minum Secara Optimal Kabupaten Banjar Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Cakupan air minum	108,05	61,03	67,19	110,09	74,34	90,38

a. Cakupan air minum

Cakupan air minum jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan air minum. Formulasi perhitungan adalah jumlah penduduk yang terlayani air minum dibagi jumlah penduduk dikali 100 %.

Capaian cakupan air minum pada tahun 2017 adalah 110,09 % didapat dari realisasi sebesar 67,19 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 61,03 %. Realisasi diperoleh dari perhitungan

$$\frac{395.108 \text{ jiwa}}{588.066 \text{ jiwa (proyeksi BPS Tahun 2019)}} \times 100\% = 67,19\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2016 cakupan air minum mengalami peningkatan sebesar 5,45 % yaitu pada tahun 2016 sebesar 61,74 % menjadi 67,19 % pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 menyumbang 90,38 % dari target 74,34 % pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 110,09 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian, antara lain sebagai berikut :

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
 - Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Adapun realisasi kegiatan berupa Pembangunan Sarana Air Bersih sebanyak 30 (tiga puluh) Buah, Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi MBR TA. 2017 Wilayah I-III, Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi MBR Wilayah I-III TA. 2017.
 - Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Realisasi kegiatan berupa Survey Investigasi Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum TA. 2018, Pengadaan/Pemasangan Pipa Desa sebanyak 7 (tujuh) buah, Perencanaan Teknis Bangunan Pembawa Air Bersih TA.2017, Pengawasan Teknis Bangunan Pembawa Air Bersih TA.2017.

- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK Reguler)

Realisasi kegiatan berupa Pengembangan Jaringan SPAM Desa sebanyak 17 (tujuh belas) buah dan Pembangunan PMA Kawasan Desa Sungai Langsung Kec. Simpang Empat.

**Gambar 3. 49. Pengembangan Jaringan SPAM Desa Babirik
Kec. Beruntung Baru**



**Gambar 3. 50. Pengembangan jaringan SPAM Desa Jati Negara Kec.
Pengaron (Bangunan Pembawa Air Bersih)**





Permasalahan

- Untuk pemenuhan cakupan air minum dilakukan upaya penambahan jumlah sarana air bersih. Permasalahan yang dihadapi di lapangan Jumlah Sarana Air Bersih yang Dibangun tidak sesuai target yakni Sumur Bor 13 Unit dan Sambungan Rumah 1178 Unit, pada akhir tahun hanya mencapai Sumur Bor 6 Unit dan Sambungan Rumah 272 Unit karena adanya perubahan sebagian target sesuai kebutuhan di lapangan. Dilapangan memerlukan tambahan Menara 7 unit, Sumur Gali 9 Unit, Tandon 19 Buah, Reservoir 3 Buah dan Pipa 25.342,5 Meter.

Solusi

- Perencanaan kegiatan harus lebih peka terhadap kemungkinan perubahan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan supaya kegiatan yang dilaksanakan bisa lebih tepat sasaran.

3.2.31. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Profesional Dan Handal

Sasaran terwujudnya sumber daya aparatur yang professional dan handal merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mewujudkan perbaikan/peningkatan tata kelola pemerintahan, Adapun upaya dari pemerintah untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang professional dan handal dengan meningkatkan manajemen sumber daya aparatur. Pada tahun 2017 pencapaian sasaran terwujudnya sumber daya aparatur yang professional dan handal menunjukkan

hasil cukup berhasil. Pencapaian sasaran masuk dalam kategori sangat tinggi dengan capaian rata-rata 72.58 %. Capaian sasaran diukur dengan 6 (enam) buah indikator yaitu ; Persentase Rata - Rata Nilai Prestasi Kerja SKPD, Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin, Persentase penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi, Persentase kasus hukum PNS yang ditangani, Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan, Persentase Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi, capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada table berikut

Tabel 3. 53. Rencana dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Profesional Dan Handal Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Rata - Rata Nilai Prestasi Kerja SKPD	100,00%	100%	65,57%	65,57%	100%	65,57%
2	Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	100,00%	0,12%	0,13%	91,67%	0,08%	37,50%
3	Persentase penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	100,00%	100%	47,99%	47,99%	100%	47,99%
4	Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%
5	Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan	100,00%	100%	30,28%	30,28%	100%	30,28%
6	Persentase Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	65,81%	42,24%	42,24%	100,00%	100%	42,24%

a. Persentase Rata - Rata Nilai Prestasi Kerja SKPD

Penilaian Prestasi Kerja SKPD adalah dengan melakukan penilaian evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu dengan membagikan kuesioner yang berisi data isian/kuisisioner sebagaimana telah dijabarkan dalam lampiran Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Persentase rata-rata nilai prestasi kerja SKPD adalah hasil dari jumlah Nilai rata-rata prestasi kerja SKPD yaitu sebesar 3541



dibagi dengan jumlah SKPD sebanyak 54 sehingga realisasi persentase rata-rata nilai prestasi kerja SKPD adalah 65,57%. Bila dibandingkan dengan target indicator sebesar 100% maka capaian indikator diperoleh sebesar 65,57%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2016 sebesar 100% maka capaian indikator kinerja rata-rata nilai prestasi kerja SKPD mengalami penurunan sebesar 52,05%. Hal ini disebabkan adanya perubahan cara perhitungan persentase rata-rata prestasi kerja SKPD, jika pada tahun sebelumnya di 2016, perhitungan prestasi kerja SKPD diambil dari penilaian SKP, sedangkan pada tahun ini berdasarkan dengan Evaluasi Kinerja SKPD, cara perhitungan pada Tahun 2017 dianggap lebih terukur untuk rata-rata prestasi kerja SKPD. Terlepas dari hal tersebut, Capaian kinerja rata-rata nilai prestasi kerja SKPD ini telah menyumbang 65,57% di akhir target tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada indikator ini didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara
 - Kegiatan ini dilaksanakan untuk evaluasi kinerja aparatur Sipil Negara selama satu tahun. Target kinerja pada kegiatan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara adalah 1 tahun dengan realisasi kinerja selama 1 tahun dan capaian target 100 %. Tahapan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :
 - Melakukan penilaian kepada 54 SKPD setiap Semester melalui Kuesioner yang dibagikan dan sudah dapat dilaksanakan pada bulan Juli 2017
 - Rapat dengan Tim Pakar untuk menentukan hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
 - Melakukan penilaian / evaluasi Perangkat Daerah Selama 1 (satu) Semester
 - Pembinaan Pegawai
 - Kegiatan ini menargetkan pembinaan pegawai selama 1 tahun dan realisasi kinerja telah terlaksana selama 1 tahun dengan capaian 100%. Realisasi kegiatan Pembinaan Pegawai yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - Pembuatan 3 Buah Peraturan Bupati Banjar tentang:

- ✓ Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
- ✓ Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah Pasca Pelaksanaan Cuti Bersama
- ✓ Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
- Melakukan koordinasi dan pembinaan ke SKPD, Kecamatan, UPT Pendidikan dan UPT Puskesmas
- Melakukan rapat koordinasi melalui rapat dengan pejabat pengelola kepegawaian pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD, Badan/ Dinas/ RSUD Ratu Zalecha MTP, Kecamatan/ Kelurahan, UPT Dinas Pendidikan dan UPT. Puskesmas se Kabupaten Banjar sebanyak 100 orang

Gambar 3. 51. Pembinaan Ke Kecamatan



b. Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Banjar adalah meningkatkan disiplin pegawai dan apabila terdapat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin maka akan diberikan hukuman disiplin secara berjenjang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS berdasarkan kewenangan, apabila kewenangan pada SKPD maka hukuman disiplin diberikan oleh kepala SKPD. Hukuman disiplin sedang atau berat diproses pada Tim

Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang mengadakan rapat setiap tahun 4 (empat) kali dalam setahun. Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin adalah jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin dibandingkan dengan jumlah PNS seluruhnya. Pada tahun 2017, dari 6900 PNS yang ada di Kabupaten Banjar terdapat 9 orang PNS yang mendapatkan hukuman disiplin sehingga persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin pada tahun 2017 ini adalah 0,13% dari target yang ditetapkan sebesar 0,12%, dan capaian yang diperoleh pada indikator ini sebesar 91,67% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya di 2016 sebesar 100% maka capaian indikator kinerja tahun ini mengalami penurunan sebesar 8,33%. Pada akhir target Tahun 2020 Capaian kinerja persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin ini telah menyumbang 37,50% di akhir target tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada indikator ini didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
 - Target kinerja kegiatan ini adalah Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS mengadakan rapat 4 (empat) kali dalam setahun untuk memutuskan hukuman disiplin bagi PNS. Kegiatan ini telah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali dengan capaian 100%. Rapat Tim Majelis Pertimbangan telah menghasilkan SK Hukuman Disiplin Tingkat Ringan sebanyak 1 buah, SK Hukuman Disiplin Tingkat Sedang 2 buah dan SK Hukuman Disiplin Tingkat Berat sebanyak 6 buah.
 - Pertimbangan Rekomendasi Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS
 - Target kinerja pada kegiatan Pertimbangan rekomendasi ijin perkawinan dan perceraian PNS adalah 4 kali Rapat dengan realisasi kinerja 4 kali dan capaian dari kegiatan ini adalah 100 %. Adapun realisasi kegiatan berupa pelaksanaan rapat tim sebanyak 4 kali rapat yang menerbitkan 29 Rekomendasi Ijin Perceraian dimana Rekomendasi Ijin Perceraian tersebut terdiri atas 25 Orang PNS Wanita dan 4 orang oleh PNS Pria.

- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan menargetkan peserta sebanyak 125 orang dan kegiatan tersebut dihadiri oleh 125 peserta, sehingga capaian kegiatan ini adalah 100%. Kegiatan yang dilakukan adalah Sosialisasi dan Bedah Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terkait Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Gambar 3. 52. Sosialisasi dan Bedah Kasus



c. Persentase penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi

Penempatan dalam Jabatan sesuai dengan kompetensi ini yaitu kemampuan sesuai dengan jenjang kepangkatan, pendidikan, pengalaman dan lainnya dalam menjalankan jabatan yang diemban. Persentase penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya adalah jumlah jabatan yang sesuai dengan kompetensi sebanyak 433 orang dibandingkan dengan jumlah jabatan yang ada dalam seluruh SKPD di Kabupaten Banjar yaitu 923 jabatan, sehingga didapat realisasi indikator ini adalah 47,99%. Realisasi indikator ini memperoleh capaian sebesar 47,99% dari target 100% yang diharapkan dan termasuk dalam kategori sangat rendah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2016 sebesar 100% maka capaian indikator kinerja rata-rata nilai prestasi kerja SKPD mengalami penurunan sebesar 52,05%. Hal ini disebabkan oleh jika tahun sebelumnya pengukuran kinerja pada kompetensi PNS hanya menggunakan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), pendidikan dan pengalaman kerja sebagai dasar penempatan PNS dalam jabatan. Sedangkan pada tahun 2017 seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang terbit pada bulan April 2017 sebagai penjabaran pelaksanaan

Undang Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan SOTK sehingga mempengaruhi kompetensi pejabat dimana dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan untuk melaksanakan pengukuran kompetensi pejabat sehingga dilaksanakan kegiatan Talent pool dan Assesment Centre untuk mengukur potensi pejabat yang ada. Namun, diluar dari rendahnya capaian tersebut. Capaian kinerja rata-rata nilai prestasi kerja SKPD ini telah menyumbang 65,57% di akhir target tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada indikator ini didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
 - Target kinerja pada kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS adalah terlaksananya 5 kegiatan yang direncanakan dan 5 kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%. Realisasi kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Baperjakat
 - Pelantikan Pejabat
 - Verifikasi Jabatan Fungsional
 - Verifikasi Guru sebagai Kepala Sekolah
 - Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer
 - Penilaian Komptensi untuk Penempatan Dalam Jabatan
 - Target kinerja pada kegiatan Penilaian Komptensi untuk Penempatan Dalam Jabatan adalah 1 tahun dengan realisasi kinerja 1 tahun sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%. Realisasi kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : Kegiatan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah dapat dilaksanakan. Seleksi terbuka ini dilakukan untuk pengisian 3 jabatan kosong yaitu, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kepala BPBD dan Direktur RSUD Ratu Zalecha

Gambar 3. 53. Kegiatan Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan



- o Penilaian Potensi dan Kompetensi Penyusunan Talent PoTol
Target kinerja pada Penilaian Potensi dan Kompetensi Penyusunan Talent Pool adalah 350 orang dengan realisasi kinerja 736 orang sehingga capaian yang diperoleh sebesar 210,3%. Realisasi dari kegiatan ini adalah pengukuran kompetensi untuk jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

Gambar 3. 54. Kegiatan Talent Pool bagi ASN lingkup Kabupaten Banjar



d. Persentase kasus hukum PNS yang ditangani

Penanganan kasus kasus terhadap anggota Korpri diakomodasi dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI yang mempunyai tugas dan kewenangan memberikan



layanan berupa konsultasi di bidang hukum bagi Pegawai Negeri yang bermasalah dibidang hukum serta memberikan/ menyediakan Advokasi (bantuan hukum) berupa penyediaan pengacara bagi Pegawai Negeri yang terkena kasus yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai aparatur Negara. Persentase kasus hokum PNS yang ditangani adalah jumlah kasus hukum PNS yang ditangani dibandingkan dengan jumlah kasus hukum PNS. Pada tahun 2017, hanya terdapat 1 kasus hukum PNS yang mengajukan permohonan dan telah ditangani oleh LKBH Korpri yaitu kasus Somasi pada Yayasan Marta Berlian Husada dan AKBID Martapura, sehingga realisasinya adalah 100% sesuai dengan target yang diharapkan. Capaian yang diperoleh pada indikator ini 100% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya di 2016 sebesar 100% maka capaian indikator kinerja tahun ini telah berhasil dipertahankan dan telah menyumbang 100% capaian di akhir target tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada indikator ini didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Penyelesaian Kasus Hukum Pidana Kedinasan (KORPRI)
 - Target kinerja pada kegiatan penyelesaian kasus hukum pidana kedinasan (KORPRI) adalah terlaksananya bantuan hukum bagi anggota KORPRI sebanyak 6 orang PNS dengan realisasi kinerja adalah terlaksananya bantuan hukum bagi anggota KORPRI sebanyak 1 orang PNS. Bantuan hukum diberikan tidak sampai memenuhi target 6 orang karena hanya ada 1 orang yang memasukkan permohonan bantuan hukum dan telah ditangani. Namun, disisi lain, hal ini menunjukkan bahwa sedikitnya PNS yang meminta bantuan hukum berarti sedikit pula kasus yang menjerat PNS Kabupaten Banjar selama setahun. Realisasi kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan persiapan untuk mengadakan sosialisasi terhadap PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai informasi apabila ada tersangkut kasus hukum, melakukan evaluasi dan selanjutnya meneruskan kegiatan bantuan hukum yang sudah dilaksanakan

e. Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya aparatur. Diklat yang dilaksanakan adalah Diklat Prajabatan, Diklat Penjenjangan Struktural atau Diklat Kepemimpinan, Peningkatan Pendidikan, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional. Persentase SDM Aparatur yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan adalah jumlah jenis diklat yang diadakan dibandingkan dengan jenis diklat yang dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan diklat sehingga diperoleh realisasi sebesar 30,28%. Realisasi ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 30,28% yang termasuk dalam kategori sangat rendah. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya di 2016 sebesar 100% maka capaian indikator kinerja rata-rata nilai prestasi kerja SKPD mengalami penurunan sebesar 69,72%. Hal ini disebabkan penyesuaian perhitungan dimana jika tahun sebelumnya pengukurannya belum berdasarkan analisis kebutuhan diklat dan analisis kebutuhan pendidikan yang yang baru. Namun, diluar dari capaian tersebut, capaian kinerja rata-rata nilai prestasi kerja SKPD ini telah menyumbang 30,28% di akhir target tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada indikator ini didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program Pendidikan Kedinasan
 - Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Pendidikan Pelatihan Teknis
 - Target kinerja pada kegiatan Pendidikan Pelatihan Teknis adalah terlaksananya 1 kegiatan dengan 30 orang peserta dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan yang dihadiri oleh 30 orang peserta sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%. Realisasi kegiatan tersebut adalah berupa Diklat Bendahara Pengeluaran Pola Kemitraan antara Pemkab Banjar dengan Bandiklat Provinsi Kalsel, dilaksanakan pada tanggal 17 - 21 April 2017
 - Pendidikan Penjenjangan Struktural
 - Target kinerja pada kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural adalah terlaksananya 3 kegiatan dengan 22 orang dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan 23 orang peserta sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%. Realisasi

kegiatan tersebut adalah Diklat PIM II yang diikuti sebanyak 3 orang, Diklat PIM III sebanyak 5 orang dan Diklat PIM IV sebanyak 15 orang

Gambar 3. 55. Diklat PIM II



- o Pengembangan Kompetensi
Target kinerja pada kegiatan Pengembangan Kompetensi adalah 1 kegiatan 4 orang dengan realisasi kinerja Diklat Teknis Camat Pola 300 JP sebanyak 4 orang, sehingga capaian dari kegiatan ini adalah 100%. Realisasi kegiatan ini adalah Diklat camat Pola 300JP sebanyak 4 orang. Diklat ini dikhususkan untuk camat yang tidak berlatar belakang pendidikan serjana ilmu pemerintahan. Camat yang tidak berlatar belakang pendidikan serjana ilmu pemerintahan ada 11 orang sesuai data awal 2017 yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Setelah iadakannya Diklat camat Pola 300JP, sebanyak 4 orang maka jumlah camat yg tidak berlatar belakang pendidikan serjana ilmu pemerintahan masih tersisa 7 orang camat di tahun 2017. Diklat camat pola 300JP ini dilaksanakan/bertempatkan di POSSENIP Bandung

Gambar 3. 56. Diklat Camat Pola 300 JP 2017 di Bandung



- Penyertaan Diklat Teknis dan Fungsional
Target kinerja pada kegiatan penyertaan diklat teknis dan fungsional adalah 5 Kegiatan 9 orang peserta dengan realisasi kinerja 5 Kegiatan 10 orang peserta, sehingga capaian yang dipetoleh dari kegiatan ini adalah 100%.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Target kinerja pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah adalah 2 orang dengan realisasi kinerja 2 orang sehingga capaian yang didapat pada kegiatan ini adalah 100%. Realisasi kegiatan ini adalah Penyertaan diklat prajabatan CPNS umum golongan II sebanyak 2 orang yang diikutsertakan dalam diklat prajabatan di BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan

Gambar 3. 57. Diklat Prajabatan golongan II Tahun 2017



- Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Target kinerja pada kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas adalah 25 orang dengan realisasi kinerja 25 orang dengan capaian 100%. Realisasi kegiatan ini adalah pemberian Bantuan Beasiswa Tugas Belajar S1, S2 dan S3 kepada 25 orang peserta

Gambar 3. 58. Penyerahan Bantuan Tunjangan Belajar



- o Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Target kinerja pada kegiatan Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan diklat, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) adalah 2 Kegiatan dengan 100 orang peserta dan telah dilaksanakan sesuai dengan target 2 Kegiatan 100 orang peserta sehingga capaian dari kegiatan ini adalah 100%. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Bimtek/Workshop Anjab dan ABK tanggal 22 sd 23 Februari 2017 dengan 50 peserta
- Seminar Analisis Kebutuhan Diklat tanggal 7 Maret 2017 dengan 50 orang peserta

Gambar 3. 59. Kegiatan Bimtek/Workshop Analisis Kebutuhan Diklat



Gambar 3. 60. Kegiatan Seminar Analisis Kebutuhan Diklat



- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - Target kinerja pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah 19 orang dengan realisasi kinerja 19 orang sehingga capaian yang didapat adalah 100%. Realisasi kegiatan berupa melakukan monitoring kepada PNS yang tugas belajar dan Monitoring PNS pasca diklat kepemimpinan

f. Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi

Aparatur desa yang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah aparatur desa yang mampu menjalankan dan menerapkan tugas dan fungsinya sehari - hari dalam pelayanan kepada masyarakat. Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah jumlah aparatur desa yakni perangkat desa yang memiliki kemampuan manajerial dan pengetahuan dalam menjalankan tugasnya dibandingkan dengan jumlah aparat desa se Kabupaten Banjar. Sejak tahun 2016, sudah terdapat 77 aparat desa yang memiliki kemampuan manajerial dan pengetahuan dalam menjalankan fungsinya dan pada tahun 2017 telah bertambah menjadi 40 desa, sehingga total aparat desa yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi 117 desa, maka jika dibandingkan dengan jumlah aparat desa seluruhnya sebanyak 277 desa, realisasi dari indikator ini adalah 42,24%. Hal ini sesuai dengan target yang diharapkan sebesar 42,24%, sehingga capaian yang diperoleh untuk indikator tersebut adalah 100%. dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya di 2016 sebesar 100% maka capaian indikator kinerja tahun ini telah berhasil dipertahankan dan telah menyumbang 42,24% capaian di akhir target tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada indikator ini didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :



- Program Pendidikan Kedinasan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Terlaksananya pelatihan manajemen pemerintahan desa (2 kali x 100 orang = 200 orang)dengan realisasi kinerja Terlaksananya pelatihan manajemen pemerintahan desa (2 kali x 100 orang = 200 orang)dengan capaian 100%. Realisasi kegiatan tersebut adalah Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Angkatan I dilaksanakan dari tanggal 11 Desember s.d 13 Desember 2017 bertempat di Aston Banua Hotel Kecamatan Gambut. Peserta sebanyak 100 orang terdiri dari Pambakal yang terpilih Tahun 2016 dan Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Angkatan II dilaksanakan dari tanggal 13 Desember s.d 15 Desember 2017 bertempat di Aston Banua Hotel Kecamatan Gambut Jumlah Peserta sebanyak 100 orang terdiri 1.Pambakal ,2.Sekdes (Non PNS)

Permasalahan :

- Kurangnya kompetensi ASN dan kurangnya koordinasi pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan.
- Masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin karena tidak mentaati ketentuan jam kerja, Penyalahgunaan wewenang, dan juga melakukan pelanggaran pidana lainnya (penggunaan obat-obatan terlarang, penguntan liar)
- Data hasil pengukuran kompetensi belum maksimal dalam penerapannya
- Masih adanya PNS yang menduduki jabatan fungsional yang belum paham akan tupoksinya
- PNS yang belum diangkat dalam jabatan fungsional karena belum memenuhi persyaratan
- Besarnya biaya dalam perjalanan dinas luar daerah baik pengiriman peserta maupun pendampingan peserta seleksi yang mendapatkan rekomendasi BKN
- Tidak adanya sosialisasi terkait informasi bagaimana proses pengusulan dan persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan bantuan hukum kepada anggota KORPRI/ PNS Kabupaten Banjar



- Masih adanya kegiatan diklat yang dilaksanakan SKPD yang belum sesuai dengan analisis kebutuhan diklat
- Masih ada pemenuhan kegiatan diklat yang terkendala karena kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh penyelenggara diklat dengan sebab tidak dianggarkan atau belum terpenuhi kuota jumlah peserta untuk satu kelas

Solusi

1. Sosialisasi kepada seluruh SKPD dan juga peraturan yang wajib dilakukan/dilaksanakan PNS dan SKPD sehingga penilaian meningkat
2. Adanya sosialisasi berbagai peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban PNS, peraturan tentang penyalahgunaan obat2an terlarang, ijin perkawinan dan perceraian dan penyalahgunaan wewenang.
3. Adanya komitmen dari pimpinan terhadap penegakkan disiplin
4. Meningkatnya kesejahteraan walaupun tidak terlalu signifikan
5. Kegiatan talent pool dilaksanakan minimal 2 tahun sekali, sehingga semua PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diharapkan dapat diukur potensi dan kompetensinya, agar arah pengembangan kompetensi ASN dapat lebih terarah dan terciptanya ASN yang professional, sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Untuk kegiatan selanjutnya perlu dilakukan pendataan yang lebih akurat dan SKPD hanya melakukan verifikasi data PNS yang akan diukur kompetensinya
7. Melaksanakan sosialisasi yang fungsinya untuk memberikan informasi kepada seluruh PNS Kabupaten Banjar mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum apabila terjadi permasalahan
8. Melakukan evaluasi untuk peninjauan kembali (review) terhadap analisis kebutuhan diklat sehingga data analisis memuat semua kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur di tingkat SKPD. Kegiatan ini juga menginventarisir kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur selain dalam bentuk diklat.
9. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan lembaga penyelenggara diklat untuk mengkomunikasikan kebutuhan diklat di daerah.

3.2.32. Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas

Sasaran terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mewujudkan perbaikan/peningkatan tata kelola pemerintahan. Adapun upaya dari pemerintah untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas diantaranya melalui beberapa hal, yaitu dengan mengembangkan tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas, meningkatkan pengawasan dan money penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan anggaran berbasis kinerja secara konsisten, mengoptimalkan pencegahan tindakan pelanggaran hukum, mengembangkan transparansi dan akuntabilitas proses politik dan pemerintahan serta menguatkan kerjasama dan kemitraan antar pelaku politik. Pada tahun 2017 pencapaian sasaran terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas menunjukkan hasil positif, Pencapaian sasaran masuk dalam kategori sangat tinggi dengan capaian rata-rata 94.72 %. Capaian sasaran diukur dengan 24 (dua puluh empat) buah indikator, adapun sejumlah indikator dengan capaiannya dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 3. 54. Realisasi Dan Capaian Sasaran Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	100%	75%	91,68%	122,24%	82,50%	111,13%
2	Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
3	Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	100%	40%	30%	75%	55%	54,55%
4	Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	100%	40%	54,55%	136,36%	100%	54,55%
5	Persentase pengguna Website Domain dan Sub Domain SKPD	100%	72,73%	88,23%	121,31%	100%	88,23%
6	Persentase Cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran	69.85%	62%	52,39%	84.5%	65%	80.6%
7	Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	99.35%	95%	95,14%	100,15%	98%	97,08%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2017**

BANJAR



No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
8	Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	100%	42,86%	30,19%	70,43%	85,71%	35,22%
9	Tingkat Maturitas SPIP	100%	1	3	100%	3	100%
10	Tingkat Kapabilitas APIP	100%	3	3	100%	3	100%
11	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	100%	80%	81,40%	101,75%	80%	101,75%
12	Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	90,61%	60,61%	79%	130,34%	100%	79%
13	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi	-	100%	100%	100%	100%	100%
14	Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah	99,11	98	95,51	97,46	100	95,51
16	Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	49,62%	39,70%	45,13%	113,68%	100%	45,13%
17	Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah	89,56%	88,36%	90,73%	103%	100%	90,73%
18	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	81,97%	97,28%	95,81%	98,51%	100%	98,81%
19	Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demontrasi/ jumlah gejolak masyarakat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	68%	100%	70%	70%	100%	70%
21	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Persentase peraturan yang dibuat	95%	70%	63%	90%	80%	79%
23	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	83,45%	85%	92,76%	105,49%	100%	92,76
24	Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	71,97%	33,15%	25,68%	77,46%	64,66%	39,71%

a. Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan

Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan adalah realisasi pelaksanaan kegiatan baik secara keuangan maupun fisik yang dilaporkan setiap SKPD dibandingkan dengan rencana yang akan dicapai. Dari jumlah realisasi anggaran seluruh SKPD sampai dengan triwulan IV senilai Rp 1.642.767.202.851,26 dibandingkan dengan target pagu anggaran sebesar Rp 1.791.906.459.522,- maka diperoleh realisasi sebesar 91,68% dan tersusunnya 5 (lima) laporan yang terealisasi sesuai target 2017. Realisasi indikator ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 75% sehingga diperoleh capaian 122,24%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang juga 100%, maka tingkat capaian ini mengalami kenaikan yang sebesar 22,24% dan telah menyumbang 111,13% pada capaian akhir RPJMD tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 122,24% berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terlepas dari terlaksananya program dan kegiatan yang telah ditetapkan masing-masing satuan satuan kerja perangkat daerah. Pada Bappelitbang ditunjukkan pada program perencanaan pembangunan ekonomi dengan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan monitoring evaluasi dan pelaporan, juga didukung program perencanaan pembangunan sosial dan budaya dengan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian antara lain sebagai berikut :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Target kinerja pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan adalah 5 Laporan dengan realisasi kinerja 5 Laporan dengan capaian 100 %. Adapun realisasi kegiatan berupa tersusunnya 5 Laporan yang terealisasi sesuai target kinerja tahun 2017.
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan



Target kinerja pada Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan adalah 12SKPD dengan realisasi kinerja 9 SKPD dengan capaian 75%. Realisasi kegiatan berupa monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan - kegiatan pada SKPD lingkup bidang perekonomian, juga dilaksanakan rapat-rapat dalam rangka mengevaluasi program kegiatan SKPD lingkup bidang perekonomian, dari target 12 SKPD dengan realisasi 9 SKPD dikarenakan adanya perubahan SOTK sehingga terjadi pengurangan SKPD mitra bidang ekonomi

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Target kinerja pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi adalah 12 SKPD dengan realisasi kinerja 9 SKPD dengan capaian 75%. Adapun realisasi kegiatan berupa rapat - rapat koordinasi dalam rangka mensinergiskan program kegiatan lintas sektor bidang perekonomian, dari target 12 SKPD dengan realisasi 9 SKPD dikarenakan adanya perubahan SOTK sehingga terjadi pengurangan SKPD mitra bidang ekonomi

➤ Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Target kinerja pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah 4 Laporan, 1 Dokumen Capaian SDGs dengan realisasi kinerja 4 Laporan dan 1 Dokumen Capaian SDGsdengan capaian 100 %.

Adapun realisasi kegiatan berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasiberupa rapat teknis monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebanyak 4 kali pelaksanaan sehingga dihasilkan 4 laporan, sedangkan dokumen yang direalisasikan berupa Dokumen Penyusunan Capaian SDGs, dokumen SDGs merupakan persiapan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dunia dengan perencanaan pembangunan menengah daerah, dimana di dalamnya terdapat monev capaian MDGs tahun 2015 Kabupaten Banjar

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Target kinerja pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya adalah 7 Rakor, 10 Sosialisasi dan 1 Dokumen dengan

realisasi kinerja 7 Rakor, 10 Sosialisasi dan 1 Dokumen dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa Rapat Koordinasi PKH sebanyak 3 kali pelaksanaan dan Rapat Koordinasi Perencanaan Sosial Budaya sebanyak 4 kali pelaksanaan. Untuk realisasi sosialisasi berupa Sosialisasi Program Keluarga Harapan pada Masyarakat Kurang Mampu yang menerima bantuan non tunai dari pemerintah dilaksanakan di 10 kecamatan Kabupaten Banjar. Dokumen yang terealisasi adalah Dokumen Penyusunan Dokumentasi Program Keluarga Harapan 2017

b. Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Tingkat Kabupaten dan SKPD

Sebagaimana Permendagri 54 Tahun 2010 indikator diatas memastikan bahwa harus ada sinkronisasi antar dokumen baik tingkat kabupaten maupun SKPD. Perencanaan, program - program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah juga rencana tahunan. Indikator kinerja tersebut di formulasikan persentase jumlah total program-program yang ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan jumlah total program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan RKPD Kab. Banjar tahun 2017 disusun pada tahun 2016 dan ditetapkan pada pertengahan bulan Juni 2016, sementara RPJMD 2016-2021 masih dalam proses review, berdasarkan kaedah masa transisi yang tercantum dalam RPJMD 2010 - 2015 maka penyusunan RKPD mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi yakni dokumen RPJPD dan masih mengacu pada visi dan misi RPJMD Kab. Banjar periode 2010 - 2015. Walaupun penetapan RKPD lebih dahulu dari RPJMD 2016-2021, namun program-program yang disusun oleh SKPD telah tercantum dalam RPJMD sehingga realisasi dari indikator ini adalah 100%.

Capaian persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD pada tahun 2017 adalah 100% didapat dari realisasi sebesar 100% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun 2016 persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD dapat dipertahankan dengan capaian 100%. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 menyumbang 100% dari target 100 % pada tahun 2020. Realisasi kinerja tahun 2017 sasaran ke-2 didukung dengan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJMD dan telah berjalan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yaitu tersusunnya review RPJMD.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Inspektorat dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

➤ Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

○ Penyusunan Rancangan RPJMD

Target kinerja pada Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD adalah 1 Dokumen dengan realisasi kinerja 1 Dokumen dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa tersusunnya review RPJMD..

c. Persentase Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang Diakomodir dalam RKPD

Perencanaan bottom-up merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Bappelitbang sebagai lembaga perencana. Oleh karenanya, dokumen perencanaan dan penganggaran harus mencerminkan aspirasi masyarakat. Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD adalah jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD dibandingkan dengan total usulan masyarakat. Realisasi kinerja persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD adalah sebesar 30 % yang didapat dari jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 282 usulan dibandingkan dengan total usulan masyarakat sebanyak 975. Capaian indikator ini pada tahun 2017 adalah 75% didapat dari realisasi sebesar 30% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 40%. Dibandingkan dengan tahun 2016 persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD mengalami penurunan sebesar 25% dari capaian tahun sebelumnya 100% menjadi 75%, hal ini terjadi karena mekanisme pelaksanaan musrenbang di kecamatan masih perlu penyempurnaan dimana hasil musrenbang kecamatan menyusun usulan kegiatan masuk

masih belum berdasarkan usulan prioritas, sehingga jumlah usulan menjadi sangat besar, dan jika dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 menyumbang 54,55% pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 75% berarti masuk dalam capaian kategori sedang. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Inspektorat dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian, antara lain sebagai berikut :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Penyusunan Rancangan RKPD
 - Target kinerja pada Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD adalah 2 Dokumen dengan realisasi kinerja 2 Dokumen dengan capaian 100 %. Adapun realisasi kegiatan berupa dokumen RKPD tahun 2018 dan dokumen perubahan RKPD tahun 2017.
 - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - Target kinerja pada Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD adalah 1 draft hasil kesepakatan dengan realisasi kinerja 1 draft dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa rangkaian seluruh kegiatan pelaksanaan musrenbang kabupaten
 - Penetapan RKPD
 - Target kinerja pada Kegiatan Penetapan RKPD adalah 2 Dokumen dengan realisasi kinerja 2 Dokumen dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan merupakan proses akhir dari rangkaian proses secara keseluruhan penyusunan RKPD, inti dari kegiatan ini yaitu menyusun sebuah Peraturan Bupati tentang penetapan RKPD dimana dokumen RKPD yang telah disusun sebelumnya menjadi lampiran dari Perbup tersebut
 - Penyusunan KUA dan PPAS
 - Target kinerja pada Penyusunan KUA, PPAS dan Verifikasi RKA - SKPD adalah 2 Dokumen dengan realisasi kinerja 2 Dokumen dengan capaian 100 %. Adapun realisasi kegiatan berupa tersusunnya dokumen KUA dan



PPAS tahun 2018 serta perubahan dokumen KUA dan PPAS tahun 2017.

➤ Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

○ Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Capaian kinerja kegiatan ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 58 orang dari target 54 orang, hal ini disebabkan adanya kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana yaitu berupa bimbingan teknis yang pelaksanaannya di provinsi sehingga anggaran yang terpakai bisa dimanfaatkan untk kegiatan yang lain, dalam kegiatan ini juga dilakukan study referensi ke daerah lain dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, studi ini diikuti oleh aparatur perencana lingkup Bappelitbang

○ Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sosialisasi kebijakan perencanaan yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu berupa keikutsertaan Bappelitbang dalam Banjar Expo (pameran pembangunan Kab. Banjar), dimana dalam kegiatan ini Bappelitbang menampilkan dalam bentuk visual hasil-hasil pembangunan di Kab. Banjar, dalam kegiatan ini Bappelitbang juga mengadakan kuis tentang proses perencanaan pembangunan serta kontes fot dan vlog tentang pembangunan

○ Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Bimbingan teknis tentang perencanaan yang dilaksanakan pada tahun 2017 lebih menekankan pada perbaikan Renstra SKPD, khususnya berkaitan dengan indikator kinerja utama. Target yang telah direncanakan yaitu sebanyak 54 orang yang mengikuti bimbingan teknis dapat tercapai, ini adalah jumlah seluruh SKPD lingkup Pemkab Banjar, termasuk di dalamnya aparat dari kecamatan. Dalam pelaksanaannya peserta bimtek ini diwajibkan 2 (dua) orang dari seluruh SKPD, kecuali kecamatan, hal ini dikarenakan permasalahan perumusan IKU yang ditemui banyak terjadi di SKPD teknis, sedangkan kecamatan relatif tidak ada masalah karena IKU kecamatan relatif sama dan sudah dirumuskan

d. Persentase SKPD yang Memiliki Bank Data yang Terintegrasi

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketersediaan data statistik yang terbaru merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi adalah SKPD yang memiliki bank data terintegrasi dibandingkan dengan jumlah SKPD. Capaian indikator ini ditunjukkan dari data yang ada pada SIPD. SIPD merupakan aplikasi yang mengumpulkan dan mengintegrasikan data secara terpadu dalam skala nasional, data bersumber dari kabupaten/ kota dan provinsi se Indonesia. Data dan informasi yang disajikan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 yang lebih menekankan pemanfaatan SIPD. SKPD yang menyampaikan data sesuai dengan format data yang terintegrasi pada SIPD adalah 18 SKPD dari 33 SKPD sehingga diperoleh realisasi sebesar 54,55%. Realisasi indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 40% dengan capaian 136,36%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2016 yang juga memperoleh capaian 100%, maka pencapaian tahun ini mengalami kenaikan sebesar 36,36% dan telah menyumbang 54,55% pada capaian akhir RPJMD tahun 2020

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 136,36% berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bappelitbang dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Output dari kegiatan ini adalah 7 dokumen data/informasi kebutuhan perencanaan yaitu :
 - Buku Daftar Lokasi Kegiatan (DLK) Kabupaten Banjar
 - Standar Harga Barang dan Jasa Tahun 2017 untuk Kepentingan Tahun Anggaran 2018
 - Profil dan analisis gender 2016



- Statistik Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2017
 - Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2016
 - Penyusunan Publikasi Analisis Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016
 - Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Banjar 2014-2016 dan perkiraan 2017.
- o Pengembangan Database dan Sistem Informasi Daerah
- Output dari kegiatan ini adalah dokumen himpunan kegiatan Bappelitbang dan aplikasi SIPD yang menjadi database informasi daerah. Himpunan kegiatan Bappelitbang disusun oleh tim Bappelitbang, menyajikan informasi aktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi bappelitbang sebagai institusi perencana dan litbang pada tahun 2016 dan 2017 telah dapat direalisasikan 100%.
- Aplikasi SIPD merupakan aplikasi untuk penyajian data secara online yang dikembangkan oleh Bangda-Kemendagri, penyedia datanya dari kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia, Bappelitbang atas nama Kabupaten Banjar menjadi salah satu penyedia data. Data yang diinput berasal dari dokumen data/informasi hasil kerjasama antara Bappelitbang dan BPS serta data lainnya yang tersebar di SKPD.

e. Persentase pengguna Website Domain dan Sub Domain SKPD

Indikator persentase pengguna website domain dan sub domain SKPD ni merupakan hasil penjumlahan pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD dibandingkan dengan keseluruhan SKPD. Saat ini, sudah ada 30 dari 34 SKPD yang menggunakan website domain banjarkab.go.id sebagai laman resmi SKPD di Kabupaten Banjar, sehingga realisasi dari persentase pengguna website domain dan sub domain SKPD adalah sebesar 88,23%. Realisasi ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 72,73%, sehingga diperoleh pencapaian untuk indikator ini adalah 121,31%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2016 capaian hanya sebesar 100% maka capaian pada tahun 2017 ini mengalami kenaikan sebesar 21,31%. Indikator persentase pengguna website

domain dan sub domain SKPD ini telah berhasil menyumbang pencapaian sebesar 88,23% di akhir target tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 tergolong dalam capaian kategori sangat tinggi dengan didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

➤ Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

○ Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Kegiatan ini di fokuskan pada pengelolaan dan pengembangan website www.Banjarkab.go.id, meliputi Hosting dan maintenance domain dan pengembangan sub domain, dewa jaringan IP Publik dari provider dan memaksimalkan fungsi main frame berupa server sebagai data center

○ Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Kegiatan ini menitik beratkan pada layanan informasi dan komunikasi pembangunan daerah dengan segala aspek kepada masyarakat kabupaten banjar melalui liputan dan pemberitaan Intan TV dan SB radio sehingga hasil pembangunan serta program kerja pemerintah daerah diketahui khalayak ramai serta masyarakat dalam wilayah kabupaten Banjar. Dalam kurun waktu satu tahun ada sebanyak 1.027 berita pembangunan daerah kabupaten Banjar yang diupload di chanel youtube.com dan ada sebanyak 1.050 berita yang disiarkan melalui Saluran Radio Swara Banjar (RSB)

f. Persentase cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran

Indikator Kinerja untuk Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran 0-18 Tahun dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil yang prima, dalam hal ini pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan akta kelahiran bayi berakta kelahiran yaitu bayi berakta kelahiran yang merupakan pelayanan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir atau usia 0 tahun sampai dengan usia 18 tahun pada tahun berjalan. Persentase cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran merupakan jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun yang memiliki dokumen akta kelahiran



yaitu sebesar 90.114 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun keseluruhan sebesar 172.005 orang sehingga diperoleh realisasi sebesar 52,39%. Data ini merupakan Data Hasil Konsolidasi dan Koordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri pada Semester I, tanggal 30 Juni 2017. Namun, realisasi tahun 2017 belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 62%, sehingga didapatkan capaian sebesar 84,5%. Walaupun belum memenuhi target yang ditetapkan tetapi capaian tahun ini termasuk dalam kategori tinggi dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2016 capaian hanya sebesar 69,85% maka capaian pada tahun 2017 ini mengalami kenaikan. Namun, cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran ini masih berada di bawah target nasional yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan masih adanya peraturan mengenai denda retribusi atas keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Terlepas dari belum tercapainya target nasional, indikator cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran ini telah berhasil menyumbang pencapaian sebesar 80.6% di akhir target tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 tergolong berhasil dengan didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil
 - Indikator kegiatan pada sasaran ini adalah berupa jumlah akta kelahiran yang diterbitkan pada pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Target pada tahun 2017 berjumlah 7.500 akta dengan realisasi sebesar 14.630 akta, jadi persentase realisasi kinerja sebesar 195.06%.
 - Kegiatan Pelayanan Akta Kelahiran
 - Indikator kegiatan pada sasaran ini adalah berupa jumlah akta kelahiran yang diterbitkan pada pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Target pada tahun 2017 berjumlah 7.500 akta dengan realisasi sebesar 14.630 akta, jadi persentase realisasi kinerja sebesar 195.06%.

Gambar 3. 61. Pelayanan Keliling Akta Kelahiran



- Kegiatan Sosialisasi Pencatatan Sipil
Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah sosialisasi pencatatan sipil. Target pada tahun 2017 berjumlah 2 kegiatan dengan realisasi sebesar 2 kegiatan jadi persentase kinerja sebesar 100%. Sosialisasi pencatatan sipil tersebut difokuskan pada pencatatan kelahiran.

Gambar 3. 62. Sosialisasi Pencatatan Sipil



- Kegiatan Pengelolaan Arsip Dokumen Pencatatan Sipil
Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah pengelolaan arsip dokumen pencatatan sipil. Target pada tahun 2017 berjumlah 10.000 dokumen dengan realisasi sebesar 14.631 dokumen jadi persentase kinerja sebesar 146.31%. Kegiatan yang dilakukan berupa melakukan jilid berkas dan jilid buku register
- Kegiatan Pelayanan Akta Kematian
Indikator kegiatan dari sasaran ini berupa jumlah Akta kematian yang diterbitkan sampai dengan akhir

tahun 2017. Target pada tahun 2017 berjumlah 700 akta kematian dengan realisasi sebesar 1.224 akta kematian, dengan persentase kinerja sebesar 174.86%. Keberhasilan ini dikarenakan semakin tingginya peran ketua RT dalam melaporkan kematian warganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Kegiatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)

Indikator sasaran kegiatan ini berupa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan target 1 tahun dan sudah terealisasi selama 1 tahun, sehingga persentase cakupan kinerja sebesar 100%.

g. Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA

Capaian kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) makin hari kian/meningkat, karena kesadaran penduduk akan kepemilikan KTP semakin baik. Namun, saat ini Kabupaten Banjar belum dapat melaksanakan penerbitan kepemilikan KIA sebab cakupan kepemilikan akta kelahiran masih dibawah target nasional. Indikator kinerja untuk persentase kepemilikan KTP dan atau KIA merupakan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dan KIA yaitu sebesar 375.159 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Banjar keseluruhan sebesar 394.338 orang sehingga diperoleh realisasi sebesar 95.14%. Data ini merupakan Data Hasil Konsolidasi dan Koordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri pada Semester I, tanggal 30 Juni 2017 Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2016 capaian sebesar 99.35% maka capaian pada tahun 2017 ini mengalami kenaikan dimana cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran adalah 100.15 % yang didapat dari realisasi sebesar 95.14% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 95% dan capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. Namun, cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran ini masih berada di bawah target nasional yaitu sebesar 100% kepemilikan KTP elektronik. Meskipun belum mencapai target nasional, indikator persentase kepemilikan KTP dan atau KIA telah berhasil menyumbang pencapaian sebesar 98% di akhir target tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 tergolong berhasil dengan didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- o Kegiatan Penerapan KTP Berbasis NIK
Indikator sasaran dari kegiatan ini berupa jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) yang diterbitkan. Target pada tahun 2017 yaitu 95% dengan realisasi sebesar 95.14% sehingga persentasi kinerja sebesar 100.15%. keberhasilan cakupan melebihi target tahun 2017 ini tidak lepas dari beberapa faktor pendukung, salah satunya perekaman langsung ke beberapa kecamatan di kabupaten banjar, rumah sakit dan sekolah-sekolah setingkat SMA/ sederajat di wilayah kabupaten Banjar serta penduduk yang daerah tingkat kepemilikan KTP-el masih rendah.

Gambar 3. 63. Proses Perekaman Langsung ke Beberapa Kecamatan dan Rumah Sakit di Kab. Banjar



- o Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
Indikator kegiatan dari sasaran ini berupa jumlah aparat/petugas registrasi desa/kelurahan, yaitu pemberian honorarium bagi petugas registrasi desa/kelurahan setiap triwulan dilaksanakan sebanyak 4 triwulan dengan target di tahun 2017 sebanyak 290 desa/kelurahan dan terealisasi sebanyak 290 desa/kelurahan sehingga persentase realisasi kinerja

mencapai 100%. Petugas registrasi adalah petugas yang membantu Pembakal/Lurah untuk mencatat dan mengadministrasikan setiap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang disampaikan oleh masyarakat, kemudian mengolahnya menjadi database kependudukan Desa/ Kelurahan dan menyampaikannya ke Dinas Dukcapil secara berjenjang, disamping itu juga sebagai mediator kepengurusan dokumen kependudukan

- o Kegiatan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

Indikator kegiatan pada sasaran ini adalah Bintek peningkatan keahlian petugas/operator SIAK dengan jumlah target di tahun 2017 sebanyak 76 orang. Kegiatan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK tidak dapat terserap dikarenakan adanya pengurangan anggaran yang berdampak pada kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

- o Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Indikator kegiatan dari sasaran ini berupa jumlah buku yang disusun selama tahun 2017. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas setiap tahunnya. Target jumlah buku yang disusun selama tahun 2017 adalah sebanyak 85 buku dengan realisasi 85 buku. Persentase kinerja sebesar 100%. Manfaat data kependudukan dapat di gunakan untuk :

- o Kegiatan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Indikator kegiatan dari sasaran ini berupa informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas setiap tahunnya. Adapun Target tahun 2017 adalah selama 12 bulan dengan realisasi kegiatan sebanyak 12 bulan sehingga Persentase kinerja sebesar 100%.

- o Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Indikator kegiatan pada sasaran ini adalah jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Banjar, target ditahun 2017 adalah 225 buku dengan realisasi 225 buku, jadi persentase realisasi kinerja mencapai 100%.

- o Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Indikator sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi kependudukan di

tahun 2017 selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 1 (satu) tahun jadi persentase realisasi kinerja sebesar 100%,

- o Kegiatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)

Indikator sasaran kegiatan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan pada beberapa bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, adapun target untuk tahun 2017 yaitu berupa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan target 1 tahun dan sudah terealisasi selama 1 tahun, sehingga persentase cakupan kinerja sebesar 100%.

h. Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata

Pendataan dan penataan dokumen/arsip dapat memudahkan temu balik arsip dan arsip-arsip penting tersebut menjadi data dukung dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Arsip daerah adalah sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, dengan demikian pada gilirannya dapat meningkatkan tata laksana pemerintahan yang berkualitas. Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata adalah jumlah SKPD yang arsipnya sudah ditata dibandingkan dengan jumlah seluruh SPKD Kabupaten Banjar. Saat ini, di tahun 2017 sudah ada 16 dari 53 SKPD yang arsipnya sudah ditata sehingga realisasi dari indikator ini adalah 30,19%. Secara umum, terjadi peningkatan 6 SKPD dari target 12 SKPD yang arsipnya ditata pada tahun 2017. Capaian persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata pada tahun 2017 adalah 70,43% didapat dari realisasi sebesar 30,19% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 42,86%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka capaian tahun 2017 ini mengalami penurunan sebesar 29,57% dari tahun sebelumnya yang mencapai 100%. Pencapaian indikator persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata ini telah berkontribusi sebesar 35,22% terhadap target akhir tahun 2020.

Pencapaian kinerja ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam merealisasikan target yang ditetapkan sehingga dapat tercapai meskipun masih dalam kategori sedang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah
 - Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Pada tahun 2016 upaya penyelamatan dokumen/arsip daerah yang telah dilaksanakan melalui kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah oleh tim pembinaan dan penataan kearsipan adalah sebanyak 10 SKPD dari 12 obyek unit kearsipan, sedangkan pada tahun 2017 telah ditargetkan sebanyak 12 SKPD karena perhitungan jumlah indikator RPJMD adalah SKPD maka pada tahun 2017 ini hanya terealisasi sebanyak 6 SKPD saja, hal ini dikarenakan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, disamping juga itu adanya 4(empat) Unit Kearsipan/ SKPD yang melaksanakan pendataan dan penataan berulang, karena pada Unit/SKPD tersebut terdapat banyak arsip-arsip penting/vital yang harus didata dan ditata kembali untuk penyelamatan dan pengamanan arsip tersebut, kemudian ada 3 (tiga) Bagian Sekretariat Daerah yang juga sudah dilaksanakan pada tahun 2016 terulang di tahun 2017 ini dan bagian tersebut hanya dihitung sebagai 1 (satu) SKPD yaitu Sekretariat Daerah.

Tabel 3. 55. Daftar SKPD yang arsipnya sudah didata dan ditata tahun 2016 - 2017

No	Instansi	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Jumlah Arsip	Jumlah Berkas	Jumlah Boks	Jumlah Arsip	Jumlah Berkas	Jumlah Boks
1	Sekretariat Daerah - Bagian Ekonomi - Bagian Kesra - Bagian Humas - Bagian Infrastruktur dan ULP - Bagian Organisasi	282 232 95	358 456 110	18 84 30	991 834 621	1619 950 925	96 39 59
2	Dinas Perumahan dan Pemukiman	1621	1661	76			
3	Dinas Pertambangan dan Energi	191	207	31			
4	Dinas Perikanan dan Kelautan	495	674	59			
5	Dinas Pendidikan	1066	1317	145	1126	1221	39
6	Dinas Pendapatan Daerah/Badan Pendapatan Daerah	244	258	71	268	352	46
7	Inspektorat	2486	7175	134	626 671	746 800	31 55

No	Instansi	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Jumlah Arsip	Jumlah Berkas	Jumlah Boks	Jumlah Arsip	Jumlah Berkas	Jumlah Boks
8	Dinas Bina Marga SDA	459	664	30			
9	Sekretariat Korpri	59	59	12			
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	453	461	21			
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				336	533	29
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				287	534	26
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan				225	271	42
14	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu				277	278	8
15	Kecamatan Martapura				219	227	9
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				85	89	18
	Total	7,683	13,400	711	6,566	8,545	497

- o Capaian kinerja indikator output dengan indikator kinerja jumlah SKPD yang arsipnya sudah ditata pada tahun 2017 dari target yang perjanjikan 12 SKPD dan capaiannya adalah 6 SKPD yang menunjukkan capaian kinerja sebesar 50% sehingga dapat dikategorikan target belum tercapai.

Gambar 3. 64. Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Pendataan Dan Penataan Arsip Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Tim arsip melaksanakan pendataan dokumen/arsip, kemudian Arsip diklasifikasi dan dikelompokkan sesuai masalah



Arsip yang sudah di data di beri nomor urut definitif dan di masukkan dalam boks arsip, Sebagai sarana temu balik , tim arsip membuat daftar arsip berupa print out



- o Penduplikasian dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk Informatika

Penduplikasian dokumen/arsip serta dokumen foto-foto kegiatan secara elektronik ini adalah salah satu bentuk upaya untuk penyimpanan dan pengamanan agar dokumen/arsip tersimpan dengan baik untuk meningkatkan penyelamatan, pengamanan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, khususnya untuk dokumen-dokumen penting dan vital yang tidak boleh dimusnahkan yang nantinya akan menjadi arsip statis. Target kinerja pada kegiatan Penduplikasian dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk Informatika adalah tersampainya 150 berkas/dokumen. Tahun ini telah terealisasi penyimpanan arsip secara elektronik sebanyak 150 dokumen, yang terdiri dari berkas/dokumen Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, Laporan Penelitian, Piagam Penghargaan dan Copy Sertifikat Tanah yang seluruhnya berjumlah 53 dokumen.

Gambar 3. 65. Penduplikasian Dokumen/Arsip berkaitan dengan Penelitian Arkeologi di Kabupaten Banjar Balai Arkeologi Banjarmasin wilayah kerja Kalimantan, di Banjarbaru



Gambar 3. 66. Penduplikasian Dokumen/Arsip Kabupaten Banjar yang ada di Kecamatan Beruntung Baru



- o Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/swasta

Realisasi kegiatan ini adalah melaksanakan sosialisasi kearsipan sehingga diharapkan setelah mengikuti sosialisasi ini aparatur mampu dan mengetahui tentang tata cara pengelolaan arsip yang baik dan benar. Target yang ditetapkan adalah 50 orang dan dihadiri oleh 43 orang, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 86%.

Gambar 3. 67. Sosialisasi Tentang Kearsipan.



i. Tingkat Maturitas SPIP

Maturitas SPIP merupakan ukuran kualitas dari Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Banjar. Tingkat Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang diukur dan dinilai oleh BPKP. Penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan meliputi penilaian terhadap unsur-unsur SPIP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim BPKP Perwakilan



Provinsi Kalimantan Selatan dan Quality Assurance dari Tim BPKP Pusat, Pemerintah Kabupaten Banjar memperoleh nilai maturitas SPIP 3,01 (terdefinisi). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar telah melaksanakan praktek pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Tingkat Maturitas SPIP ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu level 3 dengan capaian 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang juga 100%, maka tingkat capaian ini dapat dipertahankan dan telah menyumbang 100% pada capaian akhir RPJMD tahun 2020. Faktor pendorong yang memungkinkan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar mencapai Maturitas SPIP dengan level 3 (terdefinisi) diantaranya karena Inspektorat Kabupaten Banjar dalam kegiatan pengawasannya menjadikan implementasi SPIP sebagai salah satu aspek yang menjadi salah satu fokus dalam kegiatan pengawasan, sehingga dapat memberikan rekomendasi dan saran yang diperlukan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Inspektorat dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian antara lain sebagai berikut :

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Pengawas Internal Secara Berkala

Target kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengawas Internal Secara Berkala adalah dilaksanakannya kegiatan pengawasan sebanyak 188 kali dan terealisasi sebanyak 267 kali) dengan capaian 142,04%. Realisasi kegiatan adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terhadap seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kelurahan, Puskesmas dan Pemerintah Desa. Pengawasan juga dilakukan terhadap permintaan pemeriksaan dari SKPD, Audit Kinerja

Puskesmas dan Telaahan Sejawat Kapabilitas APIP ke
Inspektorat Kota Banjarmasin

j. Tingkat Kapabilitas APIP

Sesuai dengan target Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada Level-3 dari skor Level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional. Peningkatan Kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional menggunakan metode IA-CM yang sudah disahkan oleh The Institute of Internal Auditor. Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IA-CM dikelompokkan ke dalam 5 Level, yaitu: Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Setiap Level terdiri dari 6 Elemen, yaitu: Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk berada dalam level-level tersebut, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau Key Process Area (KPA).

Tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Banjar telah mencapai level 3 dengan catatan. Hal tersebut didapat berdasarkan hasil penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Quality Assurance (QA) oleh Tim BPKP Pusat. Kapabilitas APIP dengan Level 3 (integrated) menggambarkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam oleh APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu level 3 dengan capaian 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang juga 100%, maka tingkat capaian ini dapat dipertahankan dan telah menyumbang 100% pada capaian akhir RPJMD tahun 2020. Faktor pendorong yang memungkinkan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar mencapai Kapabilitas APIP dengan level 3 (integrated) diantaranya karena Inspektorat Kabupaten Banjar telah menerapkan sistem dan prosedur pengawasan yang terstandar, memiliki kompetensi aparat pengawasan yang memadai, memiliki pola pembinaan dan pengembangan profesionalisme aparat pengawasan yang berkesinambungan serta mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 merupakan upaya yang



dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Inspektorat dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian, antara lain sebagai berikut :

➤ Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

○ Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Target kinerja pada kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan adalah 30 orang (75%) dari total tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti diklat dan telah terealisasi sebanyak 35 (87,5%) orang tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga capaiannya adalah sebesar 116,67%. Realisasi kegiatan adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan untuk peningkatan karier dan diklat/bimbingan teknis (bimtek) sesuai kebutuhan yang diselenggarakan di daerah maupun diluar daerah.

➤ Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

○ Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan

Target kinerja pada kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan adalah Tersedianya Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan sebanyak 1 dokumen berupa Sistem dan Prosedur Pengawasan.

k. Persentase Temuan yang ditindaklanjuti

Inspektorat Kabupaten Banjar selaku APIP dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan diwajibkan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa. Segala rekomendasi yang termuat dalam LHP tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Instansi Pemerintah yang diperiksa. Selain itu juga, Inspektorat Kabupaten Banjar menjadi koordinator untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Banjar. TLHP Inspektorat Kabupaten Banjar berbobot 40% dalam pencapaian indikator tersebut,

sedangkan TLHP BPK RI berbobot 60%. Persentase temuan yang ditindaklanjuti merupakan jumlah temuan yang dilakukan baik kegiatan rutin maupun insidentil dan sudah ditindaklanjuti dibandingkan dengan keseluruhan temuan. Pada tahun 2017, jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat sebanyak 396 buah dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 302 buah dan 94 buah rekomendasi belum ditindaklanjuti, sehingga realisasi dari temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti sebesar 76,26%. Sedangkan jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK sebanyak 850 temuan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 721 buah sehingga realisasi dari temuan BPK yang ditindaklanjuti sebesar 84,82%. Untuk tahun 2017, temuan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Banjar yang ditindaklanjuti sebanyak 76,26% dan Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti sebanyak 84,82%, sehingga Persentase Temuan yang ditindaklanjuti adalah $(76,26\% \times 40\%) + (84,82\% \times 60\%) = 81,40\%$. Realisasi indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 80% dengan capaian 101,75%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang juga 100%, maka tingkat capaian ini dapat dipertahankan dan telah menyumbang 101,75% pada capaian akhir RPJMD tahun 2020. Faktor pendorong yang memungkinkan tercapainya target prosentase temuan yang ditindaklanjuti diantaranya karena Inspektorat Kabupaten Banjar selalu mendorong dan memfasilitasi SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan pemeriksaan serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap proses penyelesaian rekomendasi temuan pemeriksaan.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 101,75 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Inspektorat dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- Inventarisasi Temuan Pengawasan

Target kinerja kegiatan Inventarisasi temuan pengawasan adalah terlaksanakannya kegiatan inventarisasi temuan pengawasan selama 1 tahun dan telah dilaksanakan sehingga diperoleh capaian 100%.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan inventarisasi hasil-hasil temuan pemeriksaan baik dari eksternal (BPK/BPKP/Itjen) maupun internal APIP

- o Inventarisasi Temuan Pengawasan

Target kinerja kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan adalah terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 80% dari seluruh total temuan pemeriksaan dengan realisasi sebesar 81,4% sehingga capaian kinerjanya adalah 101,75%. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut atas inventarisasi temuan hasil pemeriksaan baik dari aparat pengawas eksternal maupun temuan aparat pengawas internal yang selanjutnya dilakukan tindak lanjut kepada SKPD terperiksa. Sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa paling lama 60 (enam puluh) hari kalender hasil temuan harus terselesaikan

I. Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan

Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap Peraturan Perundang-undangan merupakan rata-rata antara indikator persentase SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP B (Baik) dan persentase SKPD yang menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Evaluasi SAKIP dilakukan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP SKPD, dari total 50 SKPD yang dievaluasi, sebanyak 29 SKPD atau 58% telah mendapatkan nilai B (baik) dan 31 SKPD atau 42% masih belum mendapatkan nilai B (Nilai C dan D). Capaian tersebut belum mencapai 70% sebagaimana target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya implementasi SAKIP pada seluruh Pemerintah Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar. Sedangkan terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP, seluruh SKPD (100%) telah menyusun Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan SAP. Hal tersebut didapatkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dimana Pemerintah Kabupaten Banjar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya bahwa Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Berdasarkan data-data di atas, didapatkan prosentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap Peraturan

Perundang-undangan adalah $(58\%+100\%)/2 = 79\%$. Realisasi indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 60,61% dengan capaian 130,34%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2016 hanya memperoleh capaian 90,61%, maka tingkat capaian ini mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 43,85% dan telah menyumbang 79% pada capaian akhir RPJMD tahun 2020

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 130,34 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Inspektorat dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian tersebut adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan Kegiatan Pelaksanaan Pengawas Internal Secara Berkala. Kegiatan dan Program ini juga mendukung indikator Tingkat Maturitas SPIP.

m. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi

Pengaduan masyarakat yang terintegrasi merupakan unit pengaduan masyarakat yang dilaporkan melalui aplikasi LAPOR!. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi adalah jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi dan sudah ditindaklanjuti dibandingkan dengan keseluruhan pengaduan masyarakat. Pada tahun 2017 terdapat 39 laporan pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR! dan semuanya telah ditindaklanjuti ke instansi terkait sehingga realisasi dari indikator ini adalah 100%. Hal ini sesuai dengan target yang diharapkan semua laporan dapat ditindaklanjuti 100%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100% dan termasuk dalam kategori pencapaian sangat tinggi. Pencapaian ini dapat berhasil karena sudah ada unit pengaduan yang terintegrasi yang berada di bawah Diskominfo. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 indikator ini belum memiliki target yang ditetapkan karena pada tahun 2016 dalam proses pembentukan unit pengaduan terintegrasi yang akan dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Banjar. Pada tahun 2017 ini, indikator Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang

terintegrasi telah berkontribusi sebesar 100% terhadap capaian akhir RPJMD di tahun 2020.

Pencapaian kinerja indikator ini pada tahun 2017 tergolong berhasil dengan didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
 - Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
 - Kegiatan ini berupa Penyebar luasan informasi / berita kegiatan pemerintah daerah di 13 media cetak ada sebanyak 3.240 berita selama tahun 2017 dan Penyebaran berita melalui Stasiun Televisi Lokal Swasta sebanyak 192 tayangan berita
 - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Daerah
 - Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyebarluasan informasi melalui Media Center Kabupaten Banjar sebanyak 966 Info Publik.
 - Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
 - Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :
 - Kerjasama Liputan Jurnal Khusus Hari Kab.Banjar dengan TVRI sebanyak 1 kali
 - Kerjasama Liputan Jurnal Khusus Pada saat acara Banjar bershalawat dengan Duta TV sebanyak 1 kali
 - Kerjasama Liputan Hari santri dengan Duta TV sebanyak 1 kali
 - Kerjasama Liputan Softnews potensi kerbau rawa yang ada di kecamatan Citapuri Darussalam dengan TVRI sebanyak 1 kali
 - Sosialisasi Aplikasi LAPOR!SP4N sebanyak 1 kali

n. Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan

Capaian kinerja pengelola keuangan diukur dan dinilai oleh BPK berdasarkan tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil dicapai setelah memenuhi indikator keberhasilan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual, Kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset serta kelengkapan bukti dan nilai aset. Hal tersebut dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas Pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017. Hal tersebut menggambarkan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai 100% (Sangat Tinggi). Opini WTP merupakan hasil kerja keras pemerintah dalam mempertahankan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik dimana juga sudah didapat sejak Tahun 2012.

Keberhasilan pencapaian opini WTP dari BPK RI tidak lepas dari adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD. Program kegiatan tersebut diantaranya :

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini didukung oleh kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD. Pagu anggaran Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD sebesar Rp. 106.350.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 80.481.500 (75,68%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target kinerja pada Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD adalah 9 dokumen dengan realisasi kinerja 9 dokumen, dengan capaian 75,68%.
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
 - Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah



- Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
- Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah (87%)
- Peningkatan Administrasi, Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
- Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah (107%)
- Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji Daerah (141%)
- Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung PPKD (107%)

o. Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah

Persentase Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah merupakan jumlah penerimaan asli daerah Kabupaten Banjar pada tahun berjalan dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penerimaan daerah Kabupaten Banjar. Tahun 2017 penerimaan pendapatan daerah mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.581.200.135.277,- atau bila di persentasekan adalah sebesar 95.51%, sementara target yang ditetapkan juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, bila tahun 2016 target yang ditetapkan adalah Rp. 1.780.244.865.372,- maka pada tahun 2017 target yang ditetapkan adalah Rp. 1.655.514.444.288,- atau sebesar 98%. Capaian persentase capaian penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2017 adalah sebesar 97.46%, ini didapat dari realisasi sebesar 95.51% dibandingkan dengan target sebesar 98%. Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 sebesar 99,11% maka terjadi penurunan sebesar 1.65% ini disebabkan akibat pemotongan dana transfer pusat karena lebih salur pada tahun sebelumnya, hal berimbas pada persentase capaian penerimaan pendapatan daerah. Dan hal ini pula yang menyebabkan terjadinya pemangkasan anggaran seluruh SKPD pada tahun 2017.



Sementara capaian sampai dengan tahun 2017 telah menyumbang capaian terhadap target akhir RPJMD adalah sebesar 95,51% yang berarti pada akhir periode RPJMD harus mampu menaikkan capaian sebesar 4,49% dari realisasi 2017. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 untuk persentase capaian Bapenda tahun 2017 sebesar 97,46% maka kinerja Bapenda dapat diklasifikasikan sangat tinggi.

Pendapatan daerah secara aturan sudah ditegaskan bagian mana saja yang boleh dikenakan pungutan dan bagian mana yang tidak boleh, sehingga daerah ada keterbatasan terhadap jumlah pungutan yang bisa dilakukannya. Batasan tersebut tentunya membatasi gerak daerah untuk mengembangkan potensinya terhadap pungutan lain yang lebih potensial, akan tetapi selama aturannya belum berubah maka pungutan yang tidak ada aturan dianggap ilegal dan melanggar hukum sehingga dapat dikenakan sanksi.

Daerah hanya mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada dalam artian memaksimalkan penerimaan dari sektor yang sesuai ketentuan tanpa bisa meningkatkan potensi lainnya yang diluar ketentuan pemerintah pusat. Begitu pula terhadap objek dan wajib pajak dikarenakan pajak merupakan kewajiban seseorang untuk melaporkan harta dan usaha yang dimilikinya, Bapenda hanya mampu melakukan pengawasan dan penyisiran jikalau ada objek pajak dan wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya.

Adapun keberhasilan capaian pada Tahun 2017 diatas didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut;

- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan :
 - Penyusunan sistem informasi keuangan daerah, kegiatan ini bertumpu pada pencapaian indikator dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak, dimana dana

bagi hasil merupakan dana transfer yang tercantum dalam struktur dana perimbangan dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Pada tahun 2017 ditetapkan target DBH pajak sebesar 82% dan terealisasi 68,11% dengan persentase capaian sebesar 83,06% atau belum terealisasi dengan baik. Sedangkan DBH bukan pajak ditargetkan 86% dan terealisasi 109,17% dengan persentase capaian 100% atau terealisasi dengan baik.

- o Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, kegiatan ini bertumpu pada pencapaian indikator PAD, dimana kegiatan lebih bertumpu pada penerimaan sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 100% dan terealisasi 105,60% dengan persentase capaian sebesar 100% atau terealisasi dengan baik.
- o Optimalisasi penerimaan PBB dan BPHTB, kegiatan ini bertumpu pada pencapaian indikator PAD, dimana kegiatan lebih bertumpu pada penerimaan sektor PBB P2 dan BPHTB. Pada tahun 2017 untuk PBB P2 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 115,09% dengan persentase capaian 100% atau terealisasi dengan baik. Sedangkan target untuk BPHTB ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 142,46% dengan persentase capaian sebesar 100% atau terealisasi dengan baik.

p. Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa

Desa yang tertib pengelolaan keuangan dan aset desa adalah desa yang mampu mengelola keuangan dan aset desanya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa adalah jumlah capaian pengelolaan keuangan desa dibandingkan dengan jumlah seharusnya capaian kinerja pengelolaan keuangan desa. Saat ini, di tahun 2017 sudah ada 125 desa dari 277 desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan aset desa sehingga realisasinya adalah 45,13%. Hal ini telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 39,70% sehingga diperoleh capaian sebesar 113,68% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian tahun 2017 ini mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 129,10% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 49,62%. Pencapaian indikator

desa tertib pengelolaan keuangan desa ini telah berkontribusi sebesar 45,13% terhadap target akhir tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Target kinerja pada kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa adalah Terlaksananya pembinaan penyusunan Perdes tentang APBDesa (277 Desa)dengan realisasi kinerja Terlaksananya pembinaan penyusunan Perdes tentang APBDesa (277 Desa)dengan capaian 100 %. Realisasi kegiatan ini adalah kegiatan berupa pembinaan penyusunan Perdes tentang APBDesa yaitu dengan monev penyusunan APBDes di 20 Kecamatan di Kabupaten Banjar

- Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Target kinerja pada kegiatan Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa adalah terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan desa (277 desa) dengan realisasi kinerja terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan desa (277 desa) dengan capaian 100%. Realisasi dari kegiatan ini berupa kegiatan Pelatihan Aplikasi Siskuedes, membentuk Tim Satgas (satuan tugas) Kecamatan dan Kabupaten, agar dapat memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi undang-undang desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintah desa, pembinaan penyaluran dana desa, pembinaan tertib pengelolaan keuangan desa

q. Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati

Satuan Pada sasaran ini dimaksudkan adalah perwujudan dari pencapaian standar minimal nasional dimana ditahun 2014 tingkat penyelesaian kasus pelanggaran perda harus pada tingkat capaian penyelesaian 100%, adapun tujuan yang ingin



dicapai pada sasaran kedua ini adalah untuk menciptakan pemahaman serta kepatuhan pada masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum daerah dimana pada sasaran ini merupakan pelaksanaan misi lima dari misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah yaitu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah, adapun indikator kinerjanya untuk sasaran pertama ini adalah cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah. Sebagai perbandingan capaian pada tahun 2016 cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah adalah sebesar 104 % yang di dapat dari realisasi sebesar 89.56% dibandingkan target 85.67% dengan formula yang digunakan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan ditahun bersangkutan}}{\text{Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau ditahun bersangkutan}}$$

Sementara Capaian pada Tahun 2017 adalah 103% didapat dari realisasi sebesar 90.37% disbanding dengan target 88.36%. Keberhasilan capaian pada Tahun 2017 telah mampu menyumbang capaian sebesar 90.73% pada target akhir RPJMD Tahun 2021.

Keberhasilan kinerja indicator diwujudkan dengan adanya pembedaan dalam sistem kerja didalam dan dari hasil perbandingan hasil kinerja Satpol PP daerah lain terutama dari daerah yang Satpol PP dalam hal penanganan kasus pelanggaran Perda lebih baik, serta meningkatkan pemberdayaan PPNS yang dimiliki Satpol PP dan Kabupaten Banjar. Pada table berikut dapat dilihat jumlah kasus yang terjadi dan terselesaikan pada Tahun 2017.

Tabel 3. 56. Daftar Kasus yang terjadi dan terselesaikan pada Tahun 2017

No	Peraturan	Jenis Kasus Pelanggaran	Jumlah Kasus	Kasus Yang Terselesaikan	% Kasus Yang Terselesaikan
1	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL	ASUSILA	7	7	100%
2	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELADANGAN PENGEMIS (PMKS)	GEPENG	4	4	100%
3	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELADANGAN PENGEMIS (PMKS)	ANJAL	2	2	100%
4	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL, PENYALAHGUNAAN, OBAT-OBATAN DAN ADIKTIF LAINYA	PENYALAH GUNAAN OBAT ATAU ZAT ADIKTIF	5	5	100%
5	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL, PENYALAHGUNAAN, OBAT-OBATAN DAN ADIKTIF LAINYA	MINUMAN OPLOSAN	1	1	100%
6	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL	JAM SEKOLAH	0	0	0%
7	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	IMB	6	3	50%
8	PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TERTENTU	REKLAME	15	10	67%
9	PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TERTENTU	HO	5	1	20%
10	PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TERTENTU	PERIZINAN USAHA	12	4	33%
11	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KTP	87	87	100%
12	PERDA NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN	STRUM IKAN	5	5	100%

No	Peraturan	Jenis Kasus Pelanggaran	Jumlah Kasus	Kasus Yang Terselesaikan	% Kasus Yang Terselesaikan
	SUMBER DAYA IKAN				
13	PERDA NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG BULAN RAMADAN	RAMADHAN	42	42	100%
14	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN	HIBURAN MALAM	7	4	57%
15	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL	JALUR HIJAU	14	14	100%
16	PERDA NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA	PKL	36	36	100%
		JUMLAH	248	225	90.73%

Keberhasilan capaian indicator pada Tahun 2017 diatas didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

➤ Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

dengan 2 (dua) indikator kinerjanya yaitu :

- Persentase tingkat penyelesaian kasus pelanggaran perda dengan target 100% dengan capaian kinerja 90.73%
- Persentase penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati dengan target capain 87% terealisasi sebesar 80%

Dalam mewujudkan indikator-indikator kinerja pada sasaran program didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

- Kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan dimana dalamnya derencanakan pelaksanaan kegiatan berupa operasi gabungan penegakanPerda sebanyak 10 kali dengan realisasi 8 kali pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengidentifikasian Pelanggaran Perda atau Peraturan Kepala Daerah sebanyak 120 kali pelaksanaan dengan realisasi pelaksanaan 100%, Operasi Yustisi 3 kali pelaksanaan dengan realisasi kegiatan 100%, Operasi non Yustisi 24 kali pelaksanaan dengan realisasi kegiatan 100%, Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah sebanyak 62 kali pelaksanaan dengan realisasi 100%, dan pemberian dan

penyebaran informasi keberadaan Perda kemasyarakat 16 kali pelaksanaan dengan realisasi 100%.

r. **Persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani**

Persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban diketahui dengan cara membandingkan jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani dibandingkan dengan jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban, dikali 100%. Capaian persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban yang berhasil ditangani di tahun 2017 meningkat dibanding capaian tahun 2016, yang mempunyai makna Sangat Baik.

Capaian tahun 2017 adalah sebesar 98,51%, diperoleh dari membandingkan realisasi sebesar 95,81% dengan target tahun 2017 sebesar 97,28%. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 81,31%

Dalam pencapaian sasaran ketiga ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu :

➤ Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Indikator programnya persentase penanganan trantibum yang diselesaikan dengan target 100%.

Untuk mencapai penanganan trantibum yang diselesaikan persentasenya 100% program ini didukung kegiatan yaitu :

○ Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Dimana didalam kegiatan ini berisi pelaksanaan untuk mencapai terwujudnya penanganan trantibum berupa pelaksanaan patroli siaga ketertiban umum dan daerah potensi rawan dengan target kegiatan ada 570 kali realisasi 562 kali, pelaksanaan patroli siaga ketertiban umum dan daerah potensi rawan, Penjagaan dan pengamanan lokasi Gedung dan Aset Pemerintah Kabupaten Banjar selama 24 jam dengan jumlah lokasi atau asset sebanyak 6 buah dengan terealisasi 100%, pelaksanaan pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat Negara 20 kali pengamanan terealisasi 18 kali kegiatan pengamanan, penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Hari Besar Agama dan Nasional dengan rencana

pelaksanaan 5 kali dan terealisasi sebanyak 5 kali dengan dibantu oleh TNI/Polri, pengaman unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gejolak masyarakat direncanakan 3 kali kegiatan dan dilaksanakan 1 kali hal ini dikarenakan jumlah aksi unjuk rasa atau demonstrasi di kabupaten banjar hanya 1 kali terjadi, pelaksanaan operasi penertiban dengan target 20 kali pelaksanaan dan dapat terealisasi sebanyak 17 kali yang tidak bersifat gabungan dan 2 kali yang bersifat gabungan atau kegiatan penertiban melibatkan beberapa instansi pemerintah dan TNI/Polri, mengakomodir pengaduan masyarakat tentang gangguan trantibum untuk target yang terakomodir sebanyak 15 pengaduan dari semua pengaduan yang masuk dan yang terakomodir sebanyak 22 pengaduan dari 27 pengaduan yang masuk, dan untuk mengetahui perkembangan kondisi trantibum di daerah dan mencari pemecahan serta untuk menjalin koordinasi antar instansi di kabupaten banjar tentang penyelenggaraan trantibum didaerah dibentuk tim sekretariat bersama yang mana pertemuan dilaksanakan sebanyak 8 kali dalam 1 tahun dan terealisasi 100%.

- Dari serangkaian kegiatan diatas didapat jumlah gangguan trantibum yang terjadi atau dilaporkan pada tahun 2017 ada 334 kejadian gangguan trantibum dan yang tertangani, 334 kasus, dari 334 kasus yang ditangani ada 27 kasus yang datang berasal dari aduan atau yang dilaporkan langsung oleh masyarakat, dari kasus yang ditangani kasus yang dapat terselesaikan pada tahun 2017 ada 320 kasus atau dapat direalisasikan 95.81%, dari 320 kasus yang dapat diselesaikan diantaranya ada 23 kasus yang berasal dari aduan atau yang dilaporkan langsung oleh masyarakat.

s. Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gejolak masyarakat paian penerimaan Pendapatan Daerah

Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat merupakan jumlah kejadian mediasi atau fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat dibandingkan dengan jumlah penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat berupa unjuk rasa, demosntrasi atau julah gejolak masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar selaku SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi Ketahanan Idiologi dan Kewaspadaan Daerah, Ketahanan Seni Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri.

Tahun 2017 capaian tercatat 100%, dimana merupakan hasil dari realisasi 100% dibanding dengan target 100%, dimana pada tahun 2017 tercatat ada 2 Kasus mediasi/fasilitasi gejolak di masyarakat, yaitu kasus lingkungan di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, dan kasus hubungan industrial di PT.Merge Mining Industri dikarenakan belum terbayarnya upah pekerja. Kedua kasus tersebut terfasilitasi dengan baik. Untuk data capaian tahun 2016 tidak tersedia. Program yang digunakan oleh Kesbangpol adalah :

- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.

Tolak ukur dari sasaran ini adalah jumlah kegiatan dengan instansi terkait, target ditahun 2017 sebanyak 20 koordinasi/pertemuan, realisasi 20 kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terpeliharanya stabilitas. Realisasi kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi/pertemuan kantrantibmas di wilayah Kab. Banjar melibatkan tim kominda dan tim terpadu (TIMDU) penganganan konflik sosial.

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Tolak ukur/indikator kegiatan dari sasaran ini adalah 1 dokumen laporan. Kegiatan ini merupakan Pelaksanaan Pemantauan dan Pendataan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing di Wilayah Kabupaten Banjar.

t. Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan

Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan merupakan jumlah produk hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan DPRD Kab. Banjar dibandingkan dengan jumlah produk hukum yang diusulkan. Untuk menghitung persentase produk hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan adalah jumlah produk hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan DPRD Kab. Banjar dibandingkan dengan jumlah produk hukum yang diusulkan dikalikan 100 %.

Realisasi persentase produk hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan sebesar 70 % di dapat dari Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan sebanyak 16 dibagi jumlah produk hukum yang diusulkan sebanyak 23 dikalikan 100 %. Maka didapat Capaian sebesar 70 % didapat dari realisasi sebesar 70 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100 %.

Dibandingkan dengan tahun 2016 Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan sebesar 68 % maka pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2%. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 menyumbang 70 % dari target 100 % pada tahun 2020. Adapun produk hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan adalah sebagai berikut ;

NO	PERDA	USULAN
1	PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. BANJAR NO. 7 TAHUN 2009 TENTANG RIPPDA	BUPATI
2	PERUBAHAN ATAS PERDA NO.1 TAHUN 2011 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.	DPRD
3	PERUBAHAN ATAS PERDA NO.15 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL, OBAT-OBATAN DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.	DPRD
4	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.	DPRD
5	PENGELOLAAN ZAKAT	BUPATI
6	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KAB. BANJAR NO.3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH	BUPATI
7	PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. BANJAR NO.4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	BUPATI
8	PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. BANJAR NO. 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN PEMBAKAL SECARA SERENTAK	BUPATI
9	PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2016	BUPATI
10	PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017	BUPATI
11	PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. BANJAR	DPRD
12	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA DI DAERAH KAB. BANJAR	DPRD
13	KAWASAN TANPA ASAP ROKOK	DPRD
14	PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH/PRODUK HUKUM DAERAH	DPRD
15	APBD TAHUN 2018	BUPATI
16	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KAB. BANJAR NO.2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	BUPATI

RAPERDA yang ditarik sebagai berikut :

NO	RAPERDA	USULAN
1	PENGENDALIAN KUALITAS AIR SUNGAI	DPRD
2	PERUBAHAN ATAS PERDA NO.4 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	DPRD
3	PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN	DPRD



RAPERDA yang akan dibahas selanjutnya pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

NO	RAPERDA	USULAN
1	BANTARAN SUNGAI	DPRD
2	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KAB. BANJAR NO.19 TAHUN 1998 TENTANG PENDIRIAN PD. BARAMARTA KAB. BANJAR DATI II BANJAR	BUPATI
3	PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. BANJAR NO.03 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BUMD PT. BANJAR INTAN MANDIRI	BUPATI
4	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	DPRD

Faktor penyebab capaian 70% adalah padatnya jadwal kegiatan Dewan, adanya perbedaan penafsiran atau pendapat dan perlunya penyesuaian-penyesuaian Raperda terhadap ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, adapun Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program ini adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Kegiatan ini berupa fasilitasi penyusunan raperda inisiatif dan pembahasan peraturan daerah oleh DPRD Kab.Banjar. Adapun realisasi kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah Perda dalam rangka pelaksanaan aktifitas dan TUPOKSI SKPD sehingga tercipta kelancaran dan efektifitas secara optimal.
- Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama. Merupakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam rangka pelaksanaan aktifitas dan TUPOKSI SKPD sehingga tercipta kelancaran dan efektifitas secara optimal.

u. Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu

Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu merupakan jumlah rapat-rapat dewan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah rapat-rapat dewan yang diusulkan. Formulasi perhitungan Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu adalah jumlah rapat-rapat dewan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah rapat-rapat dewan yang diusulkan dikalikan 100 %. Realisasi persentase rapat-rapat dewan tepat waktu sebesar 100 % di dapat dari rapat-rapat



dewan tepat waktu sebanyak 226 dibagi jumlah rapat-rapat dewan yang diusulkan sebanyak 226 dikalikan 100 %. Maka didapat Capaian sebesar 100 % didapat dari realisasi sebesar 100 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100 %.

Dibandingkan dengan tahun 2016 Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu sebesar 100 % yaitu pada tahun 2016 sebesar 100 % menjadi 100 % pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 menyumbang 100 % dari target 100 % pada tahun 2020.

Adapun rapat-rapat dewan yang dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut ;

RAPAT PARIPURNA	:	26 KALI
RAPAT PIMPINAN DPRD	:	1 KALI
RAPAT BADAN MUSYAWARAH	:	15 KALI
RAPAT BADAN ANGGARAN	:	27 KALI
RAPAT BADAN KEHORMATAN DPRD	:	12 KALI
RAPAT BADAN LEGISLASI	:	17 KALI
RAPAT KERJA KOMISI- KOMISI	:	
KOMISI I	:	36 KALI
KOMISI II	:	32 KALI
KOMISI III	:	17 KALI
KOMISI IV	:	36 KALI
RAPAT PANSUS (PANSUS)	:	4 KALI
RAPAT GABUNGAN KOMISI	:	3 KALI

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi/berhasil

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Sekretariat DPRD dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan sangat tinggi/berhasil, adapun Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian, antara lain sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
Kegiatan ini berupa rapat-rapat dewan dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Kab.Banjar. Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam Rencana strategis dengan sasaran terlaksananya rapat-rapat dewan dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Kab.Banjar mencapai 100%.
- Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna
Kegiatan ini berupa rapat-rapat paripurna dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Kab.Banjar.

v. Persentase peraturan yang dibuat

Persentase peraturan yang dibuat diperoleh dari membandingkan jumlah Perda yang telah ditetapkan dengan jumlah Prolegda yang telah dibuat. Capaian pada Tahun 2017 adalah sebesar 90% didapat dari realisasi sebesar 63% dibandingkan dibandingkan dengan target sebesar 70%. Realisasi didapatkan dari Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebanyak 15 dibandingkan dengan jumlah prolegda sebanyak 24 maka di dapat angka realisasi sebesar 63%. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 yaitu 95% capaian tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5%. Capaian pada Tahun 2017 telah menyumbang sebesar 79% terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021. Capaian kinerja ini didukung dari Program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
Program penataan peraturan perundang-undangan dilaksanakan kegiatan kegiatan sebagai berikut :
- Memfasilitasi pembentukan Peraturan Daerah yang diusulkan Pemerintah Daerah dan terselesaikan 12 Rancangan Perda inisiatif Pemerintah Daerah
- Memfasilitasi pembentukan Peraturan Bupati dan terselesaikan 139 Rancangan Peraturan Bupati
- Memfasilitasi pembentukan Keputusan Bupati dan terselesaikan 891 Rancangan Keputusan Bupati
- Memfasilitasi pembuatan Naskah Pidato Bupati yang berkaitan dengan proses pembahasan terhadap



Rancangan Perda di DPRD, dan terselesaikan 43 Naskah Pidato Bupati berupa :

- Pemandangan Umum terhadap Raperda Inisiatif DPRD;
- Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD;
- Pendapat Akhir Bupati terhadap Raperda Inisiatif milik DPRD.
- Memfasilitasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 dan terbentuknya Propemperda Tahun 2018
- Mengevaluasi Pelaksanaan Propemperda Tahun 2017 dan Terbentuknya 15 Perda yang diusulkan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Propemperda Tahun 2017
- Menginventarisasi Rancangan Produk Hukum Daerah dengan hasil terbentuknya 803 Keputusan Bupati ditambah 118 Peraturan Bupati yang diusulkan Perangkat Daerah Tahun 2017
- Memfasilitasi pembuatan NA/Keterangan/Penjelasan Rancangan Perda dengan hasil Tersusunnya 7 Buah Naskah Akademik/Keterangan/Penjelasan Perda.

w. Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan

Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan social kemasyarakatan. Linmas berada di setiap desa/kelurahan. Capaian jumlah Linmas Desa/Kelurahan per jumlah desa/kelurahan tahun 2017 adalah 105,49%, yang diperoleh dari membandingkan realisasi sebesar 92,76% dari target 87,93%. Bila dibandingkan dengan tahun 2016 persentase capaian sebesar 94.45%, merupakan realisasi 83,45% dari target. Sampai saat ini tercatat 3945 Linmas yang tersebar di 290 desa/kelurahan di Kabupaten Banjar. Adanya peran aktif dari aparat desa terutama kepala desa dan lurah berperan besar dalam mendukung pengadaan dan pengerahan anggota linmas di setiap desa/kelurahan.

Dalam pencapaian indicator sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu :

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

indikator kinerjanya persentase pemenuhan rasio jumlah satuan linmas per RT sesuai SPM dengan capaian 100% atau yang mempunyai makna Sangat Tinggi. Pada program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

- o Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang mana sasaran kegiatan adalah tercapainya pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan linmas dalam pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan dan dari hasil capaian kegiatan didapat capaian 100% atau yang mempunyai makna Sangat Tinggi.

Peningkatan kapasitas dan peran tidak hanya melalui bintek atau pelatihan - pelatihan tapi juga bidang linmas melakukan kegiatan berupa kegiatan sambang desa dimana dalam sambang desa diharapkan Satpol PP dalam hal ini bidang linmas dapat mengetahui seberapa aktif peran satlinmas desa yang dibentuk oleh desa/kelurahan serta dalam kegiatan ini pula berisikan pemberian informasi secara langsung tentang produk hukum daerah yang ada atau diterapkan di wilayah Kabupaten Banjar atau informasi – informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satlinmas. Selain peningkatan Bidang linmas juga merangkul satlinmas desa dalam membantu kelancaran kegiatan keagamaan maupun lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam hal trantibum dan kenyamanan lingkungan

x. Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan

Persentase FKDM dan FKUB desa sampai dengan tahun 2017 adalah 62 desa terbentuk / jumlah desa atau kelurahan (290) x 100%, maka hasilnya 21,37%. Persentase FPK Kecamatan sampai tahun 2017 adalah 6 kecamatan yang terbentuk / jumlah Kecamatan (20) x 100%, hasilnya 30%. Hasil rata-rata (FKDM,FKUB) Desa dan FPK Kecamatan yaitu mempunyai persentase 21,37%, target 33,15% dan capaian kinerja 77,46%.

Program yang dilakukan oleh Bakesbangpol adalah

- Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - o Sosialisasi dan pembentukan FKDM, target pembentukan FKDM 6, berhasil terealisasi 3 FKDM, sehingga capainnya 50%. Adapun nama-nama Desa Pembentukan FKDM

adalah Desa Tunggul Irang, Desa Pakutik dan Desa Murung Kenanga

- Sosialisasi dan Pembentukan FKUB, target pembentukan FKUB 6, berhasil terealisasi 12 FKUB, sehingga capaiannya mencapai 200%. Adapun Desa/Kelurahan pembentukan FKUB untuk tahun 2017 ini yang telah dilaksanakan yaitu :
 - Pembentukan FKUB Desa Bincau dan Bincau Muara
 - Pembentukan FKUB Desa Indrasari dan Desa Labuan Tabu
 - Pembentukan FKUB Desa Melayu Ulu dan Desa Melayu Tengah
 - Pembentukan FKUB Desa Tambak Baru dan Tambak Baru Ilir
 - Pembentukan FKUB Desa Telokselong dan Telokselong Ulu
 - Pembentukan FKUB Desa tungkaran dan Desa Keramat Baru
- Sosialisasi dan Pembentukan FPK, dengan target pembentukan FPK 4, berhasil terealisasi 2 FPK, sehingga capainnya 50%. Tempat dan lokasi yaitu Kecamatan Cintapuri Darussalam dan Kecamatan Beruntung Baru.

Permasalahan :

- Temuan-temuan hasil Pemeriksaan BPK dari tahun 2006-2015 terkait dengan kerugian negara/daerah yang belum dapat diselesaikan;
- Implementasi SAKIP oleh SKPD masih kurang diantaranya karena tujuan atau sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan pun tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, serta rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.
- Banyaknya desa yang belum tertib dalam administrasi pengelolaan keuangan desa dan banyaknya desa yang belum melaporkan aset desa (dari 277 desa baru 52 desa yang melaporkan asset desa) serta belum maksimalnya pelayanan pencairan dana desa
- Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya Jarak dengan ibukota kabupaten di beberapa kecamatan masih tergolong jauh,
- Program kegiatan yang dilaksanakan SKPD tidak menjawab sasaran kinerja Kabupaten Banjar;



- Masih terbatasnya SDM/petugas kearsipan/Arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banjar sehingga disetiap kegiatan pendampingan Pendataan dan Penataan Arsip terkendala dalam penyelesaian tugas pendataan dan penataan arsip di setiap SKPD yang didampingi.
- Terlambatnya penerbitan Peraturan Bupati/Surat Keputusan Bupati sebagai dasar pembayaran pada beberapa kegiatan
- Terdapatnya data yang masih belum sesuai dalam pencatatan aset dengan kondisi dilapangan, terdapat data aset daerah yang belum sesuai dengan pemanfaatan/peruntukannya.
- Belum optimalnya pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi
- Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur yang dilapangan dan aparatur yang sifatnya teknis untuk proses penyelesaian perkara kasus pelanggaran seperti PPNS dan perangkat pendukung yang dinilai masih sangat minim atau sedikit dibandingkan jumlah perkara yang harus diselesaikan yang mengakibatkan tidak semua perda yang menjadi target penindakan bisa dijalankan.
- Belum optimalnya koordinasi antar Satpol PP dan aparatur desa instansi terkait tugas dan fungsi serta peran anggota linmas desa.
- Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur yang dilapangan dan aparatur yang sifatnya teknis untuk proses penyelesaian perkara kasus pelanggaran seperti PPNS dan perangkat pendukung yang dinilai masih sangat minim atau sedikit dibandingkan jumlah perkara yang harus diselesaikan yang mengakibatkan tidak semua perda yang menjadi target penindakan bisa dijalankan.
- Dalam pembahasan Raperda, baik Raperda yang berasal dari eksekutif maupun Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD, memang selalu ada kendala atau permasalahan yang ditemui seperti padatnya jadwal kegiatan Dewan, adanya perbedaan penafsiran atau pendapat dan perlunya penyesuaian-penyesuaian Raperda terhadap ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Sebagian agenda DPRD tidak direalisasikan karena dampak dari dinamika yang terjadi pada awal pembentukan alat kelengkapan DPRD periode 2016-2020.

Solusi

- Melaksanakan dan memelihara kegiatan pengawasan melalui quality assurance dan perbaikannya (Quality Assurance and Improvement Program)
- Melakukan evaluasi terhadap pengendalian intern dalam setiap kegiatan pengawasan
- Mendorong SKPD untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Memfasilitasi SKPD dengan BPK RI dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Mendorong SKPD untuk menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan baik berupa pendampingan terkait dengan perbaikan SAKIP SKPD sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP
- Melakukan pembinaan dengan jemput bola ke desa agar desa dapat segera melaporkan asset desa.
- Melakukan pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD dalam acara musrenbang;
- Mempersiapkan usulan program dan kegiatan SKPD dengan lebih cermat
- Mengusulkan formasi CPNS sebagai tenaga Pengelola Perpustakaan/Pustakawan, Arsiparis dan tenaga Arsip untuk dijadikan pengelola arsip/Arsiparis.
- Pemerintah Daerah dapat meningkatkan dukungan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui diklat atau bimtek baik bagi pengelola perpustakaan maupun pengelola kearsipan
- Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum untuk membuat dasar hukum pembayaran pada awal tahun anggaran, agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai pada bulan januari tahun anggaran berjalan.
- Peningkatan pengelolaan potensi pajak dan retribusi.
- Mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang peningkatan penyelesaian dan penegakkan Perda.
- Berkoordinasi kepda SKPD lain yang mendukung atau berkaitan terhadap penyelesaian kasus perkara pelanggaran perda atau kasus tipiring.
- Berkoordinasi kepda SKPD lain yang mendukung atau berkaitan terhadap penyelesaian kasus perkara pelanggaran perda atau kasus tipiring.
-



- Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada kawasan atau daerah daerah yang berpotensi tinggi terjadinya pelanggaran.
- Komitmen DPRD Kabupaten Banjar untuk menuntaskan pembahasan Raperda yang belum terselesaikan di tahun 2017 akan diselesaikan di tahun 2018.
- Menyusun agenda kerja yang lebih cermat dan menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan.

3.2.33. Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efisien dan Efektif

Sasaran terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efisien merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mewujudkan perbaikan/peningkatan tata kelola pemerintahan. Adapun upaya dari pemerintah untuk mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang efisien melalui pengoptimalan kelembagaan pemerintah. Pada tahun 2017 pencapaian sasaran terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efisien menunjukkan hasil positif, Pencapaian sasaran masuk dalam kategori sangat tinggi dengan capaian rata-rata 95.5 %. Capaian sasaran diukur dengan 3 (tiga) buah indicator, adapun sejumlah indicator dengan capaiannya dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 3. 57. Capaian dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efisien dan Efektif

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase SPM yang terpenuhi	75	85	73.53%	86.50%	95	91.05%
2	Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	0	50	50	100	100	50%
3	Persentase Kelengkapan Administrasi Desa	100%	42,24%	42,24%	100%	100%	42,24%

a. Persentase SPM yang terpenuhi

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Persentase SPM yang terpenuhi diukur dengan membandingkan antara jumlah SPM yang terpenuhi dibandingkan

dengan keseluruhan jumlah SPM. Capaian pada Tahun 2017 adalah 86.50% didapat dari realisasi sebesar 73.53% dibandingkan dengan target sebesar 85%. Realisasi pada Tahun 2017 di dapat dari jumlah SPM yang terpenuhi 50 buah dibandingkan dengan keseluruhan jumlah SPM 68 buah. Pada table berikut dapat dilihat capain SPM yang terpenuhi berdasarkan jenis bidang SPM;

Tabel 3. 58. Laporan SPM Kab.Banjar Tahun 2017

No	Jenis Bidang SPM	Jumlah Indikator SPM		Jumlah Indikator SPM	(%)
		yang memenuhi target	yang belum memenuhi		
1	Bidang Kesehatan	16	2	18	88,9
2	Bidang Sosial	6	1	7	85,7
3	Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	3	0	3	100,0
4	Bidang Perumahan Rakyat	3	0	3	100,0
5	Bidang Pendidikan	14	12	26	53,8
6	Bidang Pekerjaan Umum dan PR	8	3	11	72,7
	JUMLAH	50	18	68	73.53

Data diolah, sumber data : LKj IP Setda Bagian Hukum

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun lalu adalah 75 %, capaian pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 11%. Capaian pada Tahun 2017 telah menyumbang capaian sebesar 77.4% pada target akhir RPJMD Tahun 2021. Keberhasilan capaian sasaran terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif pada Tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Kelembagaan Pendayagunaan Aparatur Negara

Dalam pencapaian kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan kelembagaan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara

Penerapan Standar Operasional Prosedur pada tahun 2017 ini telah dilakukan dengan melaksanakan pendampingan dalam penyusunan SOP perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar secara bertahap sehingga terbentuknya SOP untuk perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2017 sebanyak 13 (tiga Belas) perangkat daerah. Bagi perangkat daerah yang masih belum



memiliki Peraturan Bupati mengenai SOP akan segera dilakukan pendampingan kembali dalam hal penyusunan SOP pada tahun 2018, penerapan indikator SPM telah dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah pelaksana SPM.

Dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Organisasi setda Banjar berkoordinasi dengan Inspektorat, Bappelitbang dan Perangkat Daerah terkait untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi.

o Kegiatan Pembinaan Kelembagaan

Kegiatan yang dilakukan berupa penyusunan uraian tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas yang tercantum didalamnya, serta melaksanakan evaluasi dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Adapun hasil evaluasi dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perangkat Daerah yang telah disetujui dibentuk sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 dan berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061/01920/ORG-SETDA tanggal 19 Desember 2017 yaitu sebagai berikut :

- UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dengan klasifikasi A
- UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan dengan klasifikasi A
- Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan Jenis Jabatan dipimpin oleh Kepala SKB yang merupakan pejabat fungsional Pamong Belajar dan Urusan Tata Usaha dikelola oleh pelaksana serta seorang Koordinator (bukan jabatan struktural).



- UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unggas Martapura Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar dengan klasifikasi A
- UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas tanaman Pangan dan Hortikultura dengan klasifikasi A
- UPTD Balai Benih dan Induk Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Banjar dengan klasifikasi A
- UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dengan klasifikasi A
- UPTD Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dengan klasifikasi A
- UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dengan klasifikasi A
- UPTD Pengolahan dan Sertifikasi Batumulia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar dengan klasifikasi A
- UPTD Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar dengan klasifikasi A.

b. Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja

Persentase SKPD yang sesuai beban kerja diperoleh dengan cara membandingkan jumlah SKPD yang sesuai dengan beban kerja dengan keseluruhan jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Banjar.

Kebijakan Peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah dengan indikator Persentase SKPD yang sesuai beban kerja tahun 2017 dengan target 50 % dan telah terealisasi 50 % yang mana telah mengalami kenaikan perbandingan dari tahun 2016 sehingga capaian realisasi tahun 2017 sebesar 100 % dan dapat dikatakan berhasil dari Analisis Beban Kerja yang telah disusun pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Tabel 3. 59. Perangkat Daerah berdasarkan Analisa Beban Kerja

No.	Nama Perangkat Daerah	Analisis Beban Kerja
1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	68.353
2	Dinas Pendidikan	101
3	Dinas Kesehatan	111
4	Badan Pendapatan Daerah	87.32
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	66
6	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	188.6
7	Dinas Penanaman modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	43.33
8	Kecamatan Martapura	17.542
9	Kecamatan Martapura Barat	16.5
10	Kecamatan Martapura Timur	16.632
11	Kecamatan Karang Intan	18.194
12	Kecamatan Aranio	16.998
13	Kecamatan Gambut	18.382
14	Kecamatan Kertak Hanyar	16.7
15	Kecamatan Sei Tabuk	18.593
16	Kecamatan Aluh-Aluh	17.432
17	Kecamatan Beruntung Baru	18.538
18	Kecamatan Astambul	19.258
19	Kecamatan Mataraman	20.970
20	Kecamatan Simpang Empat	18.414
21	Kecamatan Pengaron	18.822
22	Kecamatan Sambung Makmur	16.635
23	Kecamatan Sei Pinang	20.360
24	Kecamatan Tatah Makmur	17.433
25	Kecamatan Telaga Bauntung	17.298
26	Kecamatan Paramasan	14.457
27	Kecamatan Cintapuri Darussalam	14.457
28	Kelurahan Keraton	9.175
29	Kelurahan Murung Keraton	9.479
30	Kelurahan Pesayangan	9.263
31	Kelurahan Jawa	9.538
32	Kelurahan Sei Paring	9.587
33	Kelurahan Sekumpul	7.369
34	Kelurahan Tanjung Rema	7.369
35	Kelurahan Gambut	10.743
36	Kelurahan Gambut Barat	9.738
37	Kelurahan Kertak Hanyar	9.738
38	Kelurahan Manarap Lama	9.425
39	Kelurahan Mandar Sari	6.239
40	Kelurahan Sei Lulut	14.725

c. Persentase Kelengkapan Administrasi Desa

Desa yang lengkap administrasinya adalah desa yang sudah mampu menjalankan tugasnya dalam pemenuhan administrasi desa sesuai dengan buku 25 pedoman administrasi desa. Persentase



kelengkapan administrasi desa adalah jumlah desa yang telah memenuhi 60% kelengkapan administrasi sesuai dengan perundang-undangan dibandingkan dengan jumlah seluruh desa. Dari total 277 desa yang ada di Kabupaten Banjar saat ini 117 desa dapat dinyatakan lengkap administrasinya sehingga realisasi dari indikator ini adalah 42,24%. Hal ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan di tahun 2017 sebesar 42,24% sehingga capaian yang diperoleh adalah 100% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian tahun 2017 ini dapat dipertahankan, hal ini disebabkan karena adanya kegiatan pembinaan kelengkapan administrasi desa yang dilaksanakan terus menerus ke desa – desa. Pencapaian indikator desa tertib pengelolaan keuangan desa ini telah berkontribusi sebesar 42,24% terhadap target akhir tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan / Desa

Target kinerja pada kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan / desa adalah Terlaksananya Rapat Kerja Pembakal, Lurah dan BPD (2 kali), Pembinaan desa kelurahan, Tata Batas Desa, pembinaan administrasi keuangan desa (20 kecamatan) (5 kegiatan) dengan realisasi kinerja Terlaksananya Rapat Kerja Pembakal, Lurah dan BPD (2 kali), Pembinaan desa kelurahan, Tata Batas Desa, pembinaan administrasi keuangan desa (20 kecamatan) (5 kegiatan) dengan capaian 100%. Realisasi kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Rapat kerja Pambakal, dan Camat se Kabupaten Banjar.
- Kegiatan Tata batas Desa, pelaksanaan Mutasi Desa dan Penyelesaian Permasalahan Gunung Hatalau Meratus Raya berkenaan Tata Batas sebelum dilaksanakan penyerahan Desa Gunung Hatalau Meratus raya Ke Kabupaten Banjar dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
- Kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan Desa

Pembinaan Administrasi Keuangan Desa Tahun 2017

- Kegiatan Pembinaan Desa, dalam rangka mendapatkan informasi tentang kegiatan Aparatur Desa dalam melaksanakan Pelayanan terhadap masyarakat dimana pada saat Pembinaan Desa baik itu Pambakal maupun Perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengetahui sejauh mana tentang pelayanan dengan tujuan agar aparat Pemerintah Desa memahami prosedur dengan baik
- Kegiatan Pembinaan LPPDes
Pembinaan Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa Tahun 2017, dengan tujuan agar setiap Desa di dalam penyelenggaraan pemerintah desa tertib administrasi
- Kegiatan Monitoring Penyaluran Dana Desa di 20 Kecamatan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Baik Dana yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Banjar Tahun 2017.

Permasalahan :

- Masih banyaknya desa yang tidak memiliki Peta Desa dimana Peta Desa sangat Menentukan Batas Desa.
- Aparat Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kurang tertibnya Dalam masalah Administrasi
- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki aparat desa mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan penata usahaan keuangan desa terutama dalam Pelaporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPDes), dan penata usahaan keuangan desa terutama dalam mempergunakan teknologi akuntansi (aplikasi akuntansi /SIKDES) masih rendah
- Dalam proses Evaluasi Pembentukan UPTD di Lingkup Kabupaten Banjar yang menjadi permasalahan adalah adanya fungsi UPTD yang sudah didefinisikan dari dalam peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah tetapi sudah sinkron dan tidak mengakomodir sesuai Uraian Tugas UPTD.



Solusi

- Agar di setiap Desa membuat peta Desa guna mengetahui Batas Desa
- Dengan diadakan Pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) khususnya Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan diharapkan agar Aparat tertib Administrasi
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki aparat desa mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan penata usahaan keuangan desa terutama dalam Pelaporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPDes), dan penata usahaan keuangan desa terutama dalam mempergunakan teknologi akutansi (aplikasi akutansi /SIKDES) melalui pelatihan dan pembinaan
- Bagian Organisasi mengumpulkan kembali Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasi dari Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk merumuskan uraian tugas masing-masing instansi sehingga dicapai kesepakatan tentang uraian tugas oleh Tim penyusunan uraian tugas yang dimaksud.

3.2.34. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mewujudkan perbaikan/peningkatan tata kelola pemerintahan. Adapun upaya dari pemerintah untuk mewujudkan meningkatnya kualitas pelayanan melalui pengembangan system pelayanan dibidang administrasi yang prima dan terpadu. Pada tahun 2017 pencapaian sasaran terwujudnya meningkatnya kualitas pelayanan menunjukkan hasil positif, Pencapaian sasaran masuk dalam kategori sangat tinggi dengan capaian rata-rata 100 %. Capaian sasaran diukur dengan 3 (tiga) buah indicator, yaitu yaitu persentase pengaduan masyarakat tentang layanan public, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Tugas Umum Pemerintahan. Adapun sejumlah indicator dengan capaiannya dapat dilihat pada table berikut;



Tabel 3. 60. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kab. Banjar Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan public yang telah ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,34	81.7	83.09	101.70	82.2	101.08
3	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	100	20	20	100	50	40

a. Persentase Pengaduan Masyarakat tentang Layanan Publik yang telah Ditindaklanjuti.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Banjar mampu mempertahankan realisasi persentase pengaduan masyarakat tentang layanan public yang telah ditindaklanjuti seperti Tahun 2016 dengan realisasi 100%. Pada tahun 2017, tercatat 2 (dua) aduan masyarakat, dan bisa di selesaikan oleh DPMPSTP dengan baik. Keberhasilan capaian ini merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan dengan membentuk tim pengaduan masyarakat melalui Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat serta peningkatan kualitas SDM dalam penanganan Pengaduan dan Pelayanan Perizinan menjadi salah satu penyebab tertanganinya pengaduan yang masuk untuk tahun 2017 ini.

Keberhasilan pencapaian persentase pengaduan masyarakat tentang layanan public yang telah ditindaklanjuti didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut;

- Program Mengintensifkasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Di dalam kegiatan ini dibentuk tim pelaksana penanganan pengaduan yang bertugas menyelesaikan



semua bentuk pengaduan yang masuk di DPMPTSP Kab. Banjar beserta dengan semua peralatan pendukungnya. Pengaduan yang masuk Ke DPMPTSP berupa laporan melalui Pos Pengaduanyang telah tersedia. Berikut mekanisme penanganan pengaduan masyarakat :

- Pengguna jasa menyampaikan pengaduan
- Petugas mengentry data pengaduan, memberikan resi ke pengguna jasa
- Menerima penyebab
- Menetapkan tindakan
- Memberikan informasi kepada pengguna jasa
- Melakukan tindakan dan verifikasi
- Pengguna jasa menyampaikan pernyataan puas/tidak puas

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai IKM adalah Nilai dari IKM (Indeks Pelayanan Perizinan) Pelayanan Perizinan atau nilai dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP terhadap pemohon. IKM di bidang perijinan di ukur melalui survey yang dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan pengurusan perijinan. Semakin tinggi nilai yang didapatkan maka semakin bagus pelayanan yang diberikan DPMPTSP, sebaliknya semakin rendah nilai yang didapat semakin buruk pula pelayanan yang diberikan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan Tahun 2017 sebesar 101.70% didapat Nilai IKM yang di diperoleh DPMPTSP Banjar Tahun 2017 ini adalah 83,09 atau dalam kategori sangat baik dengan nilai katagori mutu pelayanan A yang dibanding dengan target IKM yang ditetapkan 81.7%. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 sebesar 80.34, capaian pada Tahun 2017 telah mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 101.70%. Kenaikan sebesar 21.36% merupakan hasil dari kerja keras pemerintah Kabupaten Banjar melalui peningkatan mutu pelayanan yang terus menerus diperbaiki.

Keberhasilan capaian pada Tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan
 - Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan



DPMPTSP Kab. Banjar mengadakan pameran tingkat kabupaten dan nasional yang bertujuan untuk mengenalkan segala bentuk perizinan kepada masyarakat, selain itu pembuatan dokumen dan laporan optimalisasi pemanfaatan informasi dan teknologi dalam bidang perizinan dalam bentuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa kuesioner yang diberikan dengan mengacu dari beberapa unsur pelayanan yang langsung diisi oleh para masyarakat. Berikut unsur pelayanan secara global :

- Kemudahan persyaratan pelayanan
- Kemudahan prosedur pelayanan
- Kecepatan waktu pelayanan
- Kejelasan, kewajaran dan kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan yang ditetapkan
- Kesesuaian produk spesifikasi jenis pelayanan dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- Kompetensi petugas pelayanan
- Perilaku petugas pelayanan
- Kesesuaian maklumat pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Kesesuaian dan kemampuan dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan

- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Salah satu upaya peningkatan pelayanan DPMPTSP Kab. Banjar dengan memberikan berbagai inovasi terbaru dalam pelayanan salah satunya SMS Gateway yang memudahkan Pemohon untuk mengetahui keadaan berkas izin yang didaftarkan secara auto reply disetiap tahapan proses izin. Selain itu penyediaan sistem informasi pendukung pelayanan yang berbasis Teknik Informasi baik berupa aplikasi maupun website, dengan adanya website dan aplikasi perizinan ini dapat mempermudah dalam pemrosesan perizinan.

c. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan

Kepuasan masyarakat terhadap pelayan di kecamatan secara khusus dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan secara umum menggambarkan terwujudnya kualitas pelayanan public. Dengan mentargetkan nilai survey sebesar 20% pada tahun 2017, dapat terealisasi 100%, sehingga capaian sebesar 100%, sebagaimana halnya di tahun 2016. Angka tersebut didapatkan melalui kegiatan evaluasi terhadap pencapaian survey kepuasan masyarakat yang hasilnya merupakan kenaikan nilai rata-rata prosentase kenaikan IKM Kecamatan dan Kelurahan tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016 dikalikan 100% sehingga didapatkan realisasi sebesar 99.40%. Capaian kinerja pada Tahun 2017 telah menyumbang capaian sebesar 40% terhadap target akhir RPJMD sebesar 50%.

Tabel 3. 61. Rekapitulasi Presentase Kenaikan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2016 dan 2017

No	Kecamatan/Kelurahan	Nilai IKM 2016	Nilai IKM 2017	Keterangan
1	Kecamatan Aluh-Aluh	88,86	87,17	Turun
2	Kecamatan Aranio	79,92	75,97	Turun
3	Kecamatan Astambul	70,33	80,74	Naik
4	Kecamatan Beruntung Baru	67,98	87,82	Naik
5	Kecamatan Gambut	67,78	80,24	Naik
6	Kecamatan Karang Intan	76,25	75,25	Turun
7	Kecamatan Kertak Hanyar	79,81	81,68	Naik
8	Kecamatan Martapura	78,03	78,03	Tetap
9	Kecamatan Martapura Barat	77,00	75,00	Turun
10	Kecamatan Martapura Timur	76,44	71,04	Turun
11	Kecamatan Mataraman	71,96	77,28	Naik
12	Kecamatan Paramasan	67,68	78,98	Naik
13	Kecamatan Pengaron	67,88	79,80	Naik
14	Kecamatan Sambung Makmur	77,42	77,03	Turun
15	Kecamatan Simpang Empat	80,04	78,64	Turun
16	Kecamatan Sungai Pinang	77,35	75,02	Turun
17	Kecamatan Sungai Tabuk	79,64	78,92	Turun
18	Kecamatan Tatah Makmur	77,85	77,85	Tetap
19	Kecamatan Telaga Bauntung	78,23	80,25	Naik
20	Kecamatan Cintapuri Darussalam	67,58	82,50	Naik
21	Kelurahan Gambut	86,17	80,28	Turun
22	Kelurahan Gambut Barat	97,14	79,68	Turun
23	Kelurahan Jawa	67,48	80,38	Naik
24	Kelurahan Keraton	80,37	80,57	Naik
25	Kelurahan Kertak Hanyar	77,03	77,03	Tetap

No	Kecamatan/Kelurahan	Nilai IKM 2016	Nilai IKM 2017	Keterangan
26	Kelurahan Manarap Lama	84,00	81,81	Turun
27	Kelurahan Mandar Sari	77,51	75,51	Turun
28	Kelurahan Murung Keraton	77,90	75,90	Naik
29	Kelurahan Pasayangan	79,33	83,98	Naik
30	Kelurahan Sekumpul	78,46	87,63	Naik
31	Kelurahan Sungai Lulut	72,81	81,19	Naik
32	Kelurahan Sungai Pering	87,31	83,03	Turun
33	Kelurahan Tanjung Rema Darat	77,06	77,06	Tetap
Rata-rata		77,29	76,83	Turun

Dari 33 unit pelayanan yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat, Sebanyak 15 Unit pelayanan (45.45%) Terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2016 dan 4 unit pelayanan (12.12%) Nilai IKM tetap serta Sebanyak 14 unit pelayanan (42.42%) mengalami penurunan.

Keberhasilan pencapaian sasaran adalah komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan manajemen pelayanan publik yang lebih baik dengan memfasilitasi pengembangan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi serta dukungan dari program dan kegiatan sebagai berikut ;

- Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
 - Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan terdiri dari ;
 - Fasilitasi koordinasi camat dan lurah Se-kabupaten Banjar serta menghadirkan beberapa narasumber yang berasal dari SKPD terkait sesuai dengan materi pertemuan.
 - Fasilitasi peningkatan kapasitas aparat kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Banjar.
 - Telah dilaksanakan pembinaan dan inventarisasi permasalahan di kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Banjar
 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) se-Kabupaten Banjar.
 - Pembuatan dokumen Profil Penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
 - Pembuatan dokumen monitoring dan evaluasi Paten Kabupaten Banjar.



- Terfasilitasi Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Cintapuri Darussalam.
- Terfasilitasinya kerjasama daerah melalui rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD).
- Terfasilitasinya keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam Asosiasi pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Sekda Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (FORSESDASI).
- Terfasilitasinya izin Kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Terfasilitasinya Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Banjar.
- Terfasilitasinya peningkatan kapasitas aparatur pada Bagian Pemerintahan melalui bimtek dan kunjungan kerja.

Permasalahan

- Kurangnya kesadaran dan minat masyarakat tentang pengaduan masalah tentang layanan Perizinan dan Non Perizinan. Kebanyakan pola pikir masyarakat menganggap pengaduan yang ditangani adalah mencakup tentang semua aspek, dimana pengaduan yang ditangani adalah DPMPTSP adalah tentang Perizinan dan Non Perizinan
- Kurangnya peran aktif dari masyarakat terkait pengisian survey kepuasan masyarakat sendiri, hal ini dimungkinkan karena kurangnya minat dari pemohon untuk mengisi survey tersebut.
- Belum maksimalnya pelayanan dan pelaporan PATEN bulanan.
- Belum maksimalnya penegasan batas antar kabupaten (Banjar-Tanah Laut dan Banjar-Banjarbaru), antar kecamatan dan antar desa/kelurahan.
- Kurangnya variasi Program dan Kegiatan dalam DPA Bagian Pemerintahan untuk memenuhi sasaran kinerja masing-masing subbagian sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Solusi

- Sosialisasi terkait pelayanan pengaduan masyarakat tersebut.
- Mengoptimalkan sosialisasi setiap kerjasama yang dilaksanakan Pemkab Banjar sehingga pelaksanaan kerjasama dapat dilaksanakan secara optimal.
- Perlunya melakukan sosialisasi pentingnya penegasan batas melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh pemangku kepentingan.



- Melakukan penegasan batas maupun menegaskan titik koordinat masing-masing pilar batas dan memperbaiki pilar yang rusak, sehingga kedepannya walaupun pilar bergeser secara koordinat dapat dipertanggungjawabkan.
- Diusulkan untuk menambah nomenklatur nama program dan kegiatan untuk memenuhi sasaran kinerja masing-masing sub bagian yang saat ini belum terakomodir.

3.3. Realisasi Anggaran

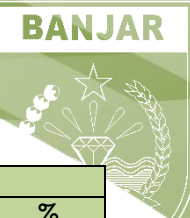
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 91.75% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (99.99%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik (78.9%). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal, yang realisasi anggarannya mencapai 100% namun belum ada realisasi kinerjanya. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji kembali indikator sasaran dan target sasaran berdasarkan kemampuan input daerah serta seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder telah terbangun. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 62. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

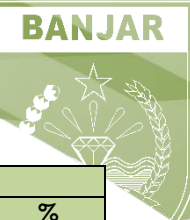
No	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	Persentase Kawasan santri yang diberdayakan	20%	33,33%	166,50 %			
		Penurunan Jumlah kasus kriminal	580	638	90%	715.798.603		
		Jumlah dana BAZ yang tersalurkan	24.000.000	374.280.000	156%	240.000.000	374.281.000	156,0%
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik	Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al-Qur'an	93,32%	99,54%	106,67 %	7.450.812.300	5.878.510.606	78,9%
3	Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda yang bernuansa kearifan lokal	12	42	0	91.200.000,00	91.200.000,00	100,0%
4	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)						
		APM SD / MI / SDLB	96,09%	97,36%	101,32 %	90.423.603.250	79.222.198.650	87,61%
		APM SMP / MTs / SMPLB	63,46%	62,58%	98,61%			
		Angka Partisipasi Kasar (APK)						
		APK SD / MI / SDLB	120,25 %	113,72 %	94,57%			
		APK SMP / MTs / SMPLB	89,63%	86,40%	96,40%			
		Angka Putus Sekolah (APtS)						
		APtS SD / MI / SDLB	0,27%	0,27%	100%			
		APtS SMP / MTs / SMPLB	0,90%	0,34%	162,22 %			
		Angka rata-rata lama sekolah	7,03 Tahun	7,6 Tahun	108,11 %			
Angka Partisipasi Kasar PAUD	65,66%	67,80%	103,26 %	4.233.249.076	3.936.785.967			
5	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah	3,40%	6,73%	198%	370.130.000	353.482.500	95,50%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2017**



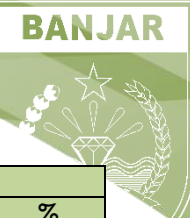
No	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
6	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	80%	80%	100	887.215.328	753.405.290	84,92%
		Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bernuansa religi	7 Keg	8 Keg	114,28	869.108.000	735.993.500	84,68%
7	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	187,9	90,85	151,65	4.844.514.000	3.124.480.203	64,50%
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	13	6,9	146,92	59.710.000	59.150.000	99,06%
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	42%	37,66%	110,33	150.726.100	149.365.100	99,10%
		Angka laju pertumbuhan penduduk	2,06%	1,81%	112,13 %	268.633.900	264.471.000	98,45%
8	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	27,76%	28,49%	97,37	1.659.695.850	1.514.188.245	91,23%
9	Terkendalnya faktor risiko penyakit tidak menular	Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	>15%	82,80%	552%	776.100.000	770.754.767	99,31%
10	Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	Persentase Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	595 Dok	624 Dok	104,87 %	82.603.674.726	81.554.169.825	98,73%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75%	80,20%	106,93 %			
11	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka	2,55%	3,11%	78%	785.823.000,00	731.430.270,00	93,08%
12	Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	4965425895	458895240	92,67%	4.965.425.895	4.588.895.240	92,42%
13	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	70%	100%	142,85 %	81.775.000,00	81.769.500,00	99,99%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2017



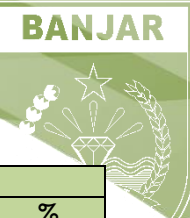
No	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
		Persentase Kelurahan Layak anak	8%	7,70%	96,25%	30.385.000,00	30.385.000,00	100,00%
14	Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	55%	55%	100%	879.760.000,00	791.622.000,00	89,98%
		Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	100%	100%	100%	524.900.000,00	481.568.000,00	91,74%
15	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	0.6%	0.7%	117%	1.731.552.945	1.653.187.498	95,47%
16	Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga.	56.86%	50%	88%	2.006.981.180	1.965.581.996	97,94%
17	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	Produksi karet	19.160,99	17.673,00	92,23%	254.705.760,00	228.464.103,00	89,70%
		Produksi komoditas prioritas padi sawah	242,752	219,625	90,47%	4.069.344.360	3.619.821.557	88,95%
		Produksi komoditas prioritas padi ladang	34,92%	28,05%	80,32%			
		Produktifitas komoditas prioritas padi sawah	242,75%	219,63%	90,47%			
		Produktifitas komoditas prioritas padi ladang	33,89%	28,32%	83,56%			
		Produktifitas karet	1163%	892%	76,70%	254.705.760,00	228.464.103,00	89,70%
		Persentase Kelompok tani madya	61%	63%	103,27%	3.649.081.130	3.299.557.407	90,42%
		Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi	80%	81,89%	100%	22.218.667.000	17.606.895.258	79,24%
		Populasi sapi	16950	17627	103,99%	1.107.732.120	1.003.950.790	90,63%
		Jumlah produksi ikan budidaya	50000	58105	116,00%	521.623.341,00	486.893.340,00	93,34%
		Jumlah produksi ikan tangkap	11182	9626	86,08%	154.381.000,00	149.049.000,00	96,55%
Jumlah konsumsi ikan	51%	51%	100%	105.907.500,00	104.908.200,00	99,06%		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2017



No	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
18	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	30%	35%	116,67 %	243.896.880,00	216.582.251,00	88,80%
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	710	715	100,70 %	105.907.500,00	104.908.200,00	99,06%
19	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Ketersediaan Energi	3610	3558	99%	664.145.000,00	542.922.120,00	81,75%
		Ketersediaan Protein	101	150,46	149%	664.145.000,00	542.922.120,00	81,75%
		Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	90	89,2	99%	664.145.000	542.922.120	81,75%
20	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi (Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN)	84%	143%	169,64 %	1.172.845.000	1.168.914.518	99,66%
21	Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	Opini akuntan publik	WTP	WTP	100%			
22	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentasi sampah yang terolah di TPA	100%	100	100%			
		Rasio luasan RTH Publik sebesar 20persen dari luas kawasan perkotaan	1,59	1,59	100%			
		Kualitas air	33	36	109%	3.853.318.800	3.435.168.387	89,15%
		Kualitas udara	83%	103%	124%			
23	Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	Persentasi koperasi aktif.	63,50%	63,90%	101%	282.089.000	265.710.900	94,19%
		Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	0,25%	0,28%	112%	436.640.000	424.162.132	97,14%
		Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat dikawasan transmigrasi	20%	17,14%	86%	63.030.500	62.788.500	99,62%
		Jumlah nilai ekspor karet.	504447929,3	52181067	103%	203.000.000	191.842.529	94,50%
		Persentase Desa Berkembang	37,18%	22,74%	61%	1.714.529.451	1.662.075.313	96,94%
24	Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung	Persentase peningkatan wisatawan lokal	1.919.428	2.027.415	106%	2.141.506.100,00	2.021.202.542,00	94,38%
		Persentase peningkatan wisatawan	5%	-11,89%	-238%			

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2017**



No	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
	pertumbuhan ekonomi daerah	mancanegara						
25	Meningkatnya perencanaan , kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	55%	92,11%	167%	4.526.392.260	4.368.578.983	96,51%
26	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	68,69%	68,85%	100%	58.742.407.700	55.747.543.153	94,90%
		Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	88,37%	89,08%	101%	28.454.921.300	26.952.864.960	94,72%
27	Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;	Persentase pengujian kendaraan bermotor	81,25%	62,95%	77%	769.510.263	752.252.676	97,76%
28	Meningkatnya infrastuktur perhubungan	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	100%	100%	100%	297.161.000	252.226.500	84,88%
		Cakupan layanan internet dan telepon seluler	71%	80,34%	113%	245.650.000	240.329.555	97,83%
29	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;	Cakupan rumah layak huni	96,52%	98,60%	102%	9.358.897.700	8.795.285.656	93,98%
30	Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;	Cakupan air minum	61,03%	67,19%	110%	12.433.595.060	11.993.800.533	96,46%
31	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Rata-rata nilai prestasi kerja SKPD	100%	65,57%	66%	328.759.800	324.738.144	98,78%
		Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	0,12%	0,13%	92%	172.397.600	164.653.528	95,51%
		Persentase Penempatan dalam jabatan sesuai dengan	100%	47,99%	48%	1.747.367.300	1.681.065.480	96,21%

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
		kompetensi						
		Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	100%	100,00 %	100%	175.260.370	75.951.700	43,34%
		Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	100%	30,28%	30%	2692216920	2618238261	97,25%
		Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	42,24%	42,24%	100%	408.360.000	407.103.730	99,69%
32	Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	75%	91,68%	122%	852.903.080	771.973.006	90,51%
		Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	100%	100%	100%	389.848.300	283.261.318	72,66%
		Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	40%	30%	75%	1.742.536.300	1.599.445.616	91,79%
		Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	40%	54,55%	136%	965.938.100	952.187.234	98,58%
		Persentase pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD	72,73%	88,23%	121,31 %	1.279.328.400	1.217.898.921	95,20%
		Persentase cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran	64%	52,39%	81,86%	1.638.785.620	1.257.127.045	76,71%
		Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	95%	95,14%	100,15 %	2.395.676.640	2.105.541.393	87,89%
		Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	42,86%	30,19%	70%	261.891.000	246.609.583	94,16%

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
		Tingkat Maturitas SPIP	1	3	100%	2.359.700.000,00	2.233.341.533,00	94,65%
		Tingkat Kapabilitas APIP	3	3	100%	430.050.000,00	413.374.324,00	96,12%
		Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	80%	81,40%	102%	36.000.000,00	25.296.000,00	70,27%
		Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	60,61%	79%	130%			
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi	100%	100%	100%	3.624.851.600	3.586.142.312	98,93%
		Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	WTP	WTP	100%	9.447.457.680	8.337.034.890	88,25%
		Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah	98%	95,51%	97%	3.665.041.100	3.461.940.113	94,46%
		Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	39,70%	45,13%	114%	622.325.000	589.408.284	94,71%
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	88,36%	90,73%	103%	828.570.000	821.186.000	99,11%
		Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	97,28%	95,81%	98,51%	1.470.480.000	1.397.705.000	95,05%
		Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gejalok masyarakat	100%	100%	100%	890.606.000	812.127.137	91,19%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2017



No	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
		Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	100%	70%	70%	1.541.000.000	879.737.690	57,09%
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	100%	100%	100%	556.000.000	427.484.000	76,89%
		Persentase peraturan yang dibuat	70%	99,34%	142%	1.253.618.000	1.173.903.680	93,64%
		Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	85%	92,76%	105,49%	443.377.500	443.317.500	99,99%
		Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	58,20%	51,37%	88%	224.164.943	188.169.344	83,94%
33	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Persentase SPM yang terpenuhi	85%	73,53%	86,50%	315.372.000	304.786.650	96,64%
		Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	50%	50%	10000%	767.496.000	691.305.900	90,07%
		Persentase kelengkapan administrasi desa	42,24%	42,24%	100%	589.396.222	576.526.035	97,82%
34	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	10000%	100.060.000	96.260.000	96,20%
		Indeks Kepuasan masyarakat	81,7%	83,09%	101,70%	477.915.120	469.374.540	98,21%
		Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	20%	20%	10000%	786.387.000	761.325.721	96,81%
TOTAL BELANJA LANGSUNG						411.505.793.233,00	377.515.425.175,00	91,74

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 34 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 15 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik, telah mencapai kinerja sebanyak 106.67% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 78.9% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatkan budaya baca pelajar dan masyarakat, dengan pencapaian kinerja sebanyak 198%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 95.50%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3. 63. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik	Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al-Qur'an	106,67%	78,9%	21,10%
2	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah	198%	95,50%	4,50%
3	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	100	84,92%	15,08%
		Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bernuansa religi	114,28	84,68%	15,32%
4	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	151,65	64,50%	35,50%
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	146,92	99,06%	0,94%
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	110,33	99,10%	0,90%
		Angka laju pertumbuhan penduduk	112,13%	98,45%	1,55%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
5	Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular	Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	552%	99,31%	0,69%
6	Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	Persentase Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	104,87%	98,73%	1,27%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	106,93%		
7	Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	100%	89,98%	10,02%
		Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	100%	91,74%	8,26%
8	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	117%	95,47%	4,53%
9	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	116,67%	88,80%	11,20%
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	100,70%	99,06%	0,94%
10	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase sampah yang terolah di TPA	100%		
		Rasio luasan RTH Publik sebesar 20persen dari luas kawasan perkotaan	100%		
		Kualitas air	109%	89,15%	10,85%
		Kualitas udara	124%		
11	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	100%	94,90%	5,10%
		Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	101%	94,72%	5,28%
12	Meningkatnya infrastuktur perhubungan	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	100%	84,88%	15,12%
		Cakupan layanan internet dan telepon seluler	113%	97,83%	2,17%
13	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;	Cakupan rumah layak huni	102%	93,98%	6,02%
14	Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;	Cakupan air minum	110%	96,46%	3,54%
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah	100%	96,20%	3,80%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2017**



No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
		ditindaklanjuti			
		Indeks Kepuasan masyarakat	101.70	98,21%	1,79%
		Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	100%	96,81%	3,19%

BAB 4 PENUTUP

LKjIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Pemkab Banjar juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi pemkab Banjar dan bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2017), namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD.

Berikut hasil pengukuran sasaran indicator kinerja dari setiap sasaran yang telah tercapai target kinerjanya :

- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya angka partisipasi sekolah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.



- Hasil pencapaian kinerja sasaran Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan mutu pelayanan di RSUD menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan mitigasi bencana menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan investasi daerah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan kinerja perusahaan daerah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas lingkungan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.



- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika; menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya infrastuktur perhubungan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak; menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal; menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Berdasarkan trend pencapaiannya dari tahun 2016 ke tahun 2017 dapat dikatakan sangat berhasil, namun juga melihat ada beberapa sasaran indikator kinerja yang trend pencapaiannya belum memenuhi target kinerjanya, yaitu :

- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kompetensi tenaga kerja menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Rendah**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Rendah**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Rendah**.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab 3 dan, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan



oleh Pemkab Banjar untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2017, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya serta pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link webmonev untuk pelaporan kinerja triwulanan yang bisa diakses publik adalah bagian dari menjadikan penilaian kinerja dan transparansi serta akuntabilitas publik sebagai satu paket kebijakan daerah.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemkab Banjar ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan penurunan ketimpangan (baik antar wilayah maupun pendapatan), kualitas lingkungan dan penegakan tata ruang. Peran Pemkab Banjar diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemkab Banjar dengan berbagai unsur baik instansi/organisasi pemerintah lainnya di wilayah Kabupaten Banjar, daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif, adaptif dan iklim investasi yang kondusif, perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan dan terciptanya ketahanan masyarakat terhadap bencana. Tanpa adanya koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemkab Banjar sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKJIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini



juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemkab Banjar untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
INSPEKTORAT

Alamat : Jl. Jend A.Yani No. 21 A Km. 37,900 Telp. 0511 4772500 Martapura
Kode Pos 70613 Kalimantan Selatan
www.inspektorat.banjarkab.go.id; E-mail : inspektoratbanjar@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Banjar

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Martapura, 23 Maret 2018
Inspektur Kabupaten Banjar,

H. Muhammad Rusdi, ST, MT
NIP. 19680723 199503 1 002



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 359/KUM/2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANJAR NOMOR 603 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU), mempertajam pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu adanya Perubahan Keputusan Bupati Banjar Nomor 603 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
11. Keputusan Bupati Banjar Nomor 603 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

MEMUTUSKAN :

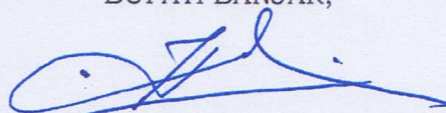
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BANJAR NOMOR 603 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor 603 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Februari 2017

BUPATI BANJAR,



H. KHALILURRAHMAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama diberdayakan	Persentase kawasan suntri yang diberdayakan	Persen	Jumlah kawasan yang diberdayakan agar lebih berkembang dan menjadi contoh dalam pengamalan nilai-nilai luhur dari sejumlah kampung/desa yang akan dinyatakan sebagai kawasan suntri (9 kawasan)	$\frac{JK}{TJK} \times 100\%$ JK = Jumlah Kawasan Rencana, TJK = Total Jumlah Kawasan (9)	Program Kawasan Suntri Cerdas
	Penurunan jumlah kasus kriminal	Kasus	Jumlah penurunan kasus kriminal yang terjadi di masyarakat dari angka yang tinggi pada tahun awal ke angka yang lebih rendah pada tahun berikut dan setelah tahun berikutnya.	600 kasus kriminal pada tahun awal menjadi 580 kasus pada tahun berikutnya dan berkurang setiap 20 kasus setelah tahun tahun berikutnya	Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
	Jumlah dana BAZ yang tersalurkan	Rp	Jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun dari Muzakki/ masyarakat dan disalurkan kepada 8 (delapan) golongan yang berhak menerimanya zakat menurut syarat.	Rp.200.000.000 pada tahun awal dan meningkat dengan tambahan Rp. 100.000.000 di tahun berikutnya	Program penunjang peryelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Persujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik	Persentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al-Quran	Persen	Jumlah peserta didik lulus/amat belajar pada jenjang SD/SMP yang dapat membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid terhadap Jumlah Seluruh Peserta didik SD/SMP yang lulus /amat belajar pada tahun bersangkutan	$\frac{JSQ}{TJS} \times 100\%$ JSQ = Jumlah Siswa Bisa Baca Tulis Al-Quran, TJSL = Total Jumlah Siswa Lulus pada tahun bersangkutan	Program pendidikan Dasar
Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda yang bernuansa kearifan lokal	Kasus	Jumlah penurunan kasus pelanggaran perda bernuansa agama yang terjadi di masyarakat dari angka yang tinggi pada tahun awal ke angka yang lebih rendah pada tahun setelahnya	Angka Jumlah Pelanggaran diturunkan dibawah 20 pelanggaran setiap tahun	Program Pemeliharaan Keantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD / MI / SDLB APM SMP / MTs / SMPLE	Persen	Proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.	$\frac{\text{Jumlah murid SD sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah murid SMP sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100$	Program wajib belajar 9 tahun Program pendidikan non formal
	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Persen	Proporsi anak sekolah aktif pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu.	$\frac{\text{Jumlah murid SD sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah murid SMP sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100$	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
	Angka Pulus Sekolah (APS) APS SD / MI / SDLB APS SMP / MTs / SMPLE	Persen	Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang pernah/ sedang bersekolah}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun yang pernah/ sedang bersekolah}} \times 100$	Program manajemen pelayanan pendidikan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL		PENJELASAN		PROGRAM
			FORMULASI	SUMBER DATA /UNIT TERKAIT			
	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	Rata-rata jumlah tahun yang dibabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang sudah dijalani			Dinas Pendidikan	
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	Proporsi anak mengikuti pendidikan usia dini aktif pada jenjang pendidikan usia dini terhadap penduduk pada kelompok usia, pendidikan usia dini.			Dinas Pendidikan	Program pendidikan anak usia dini
Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah	Persen	Kunjungan ke Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Keliling			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	Persen	Perbandingan antara kelompok seni budaya lokal yang dibina dengan jumlah seluruh kelompok seni dan budaya lokal			Disbudpar	Program pengelolaan keragaman budaya
	Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bernuansa religi	Keg	Jumlah kegiatan kebudayaan yang mengandung unsur penghayatan dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama. Religi adalah internalisasi dan penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang diyakini dalam bentuk keastanan dan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut untuk kemudian dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari			Disbudpar	Program pengelolaan kekayaan budaya
Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 kh	Jumlah kematian ibu melahirkan dalam kurun waktu 1 tahun, dihitung dengan menggunakan konstanta per 100.000 kelahiran hidup (sumber data dari fasilitas kesehatan yang dikonsversi).			Dinas Kesehatan	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program obst dan perbekalan kesehatan
	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	1.000 kh	Jumlah kematian bayi dalam kurun waktu 1 tahun, dihitung dengan menggunakan konstanta per 1.000 kelahiran hidup (sumber data dari fasilitas kesehatan yang dikonsversi).			Dinas Kesehatan	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program pengabdian, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program upaya pelayanan kesehatan di puskesmas Program pelayanan konsultasi
	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Persen	Penduduk wanita usia antara 15 - 19 tahun yang pernah melahirkan atau sedang mengalami hamil anak pertama.			Dinas P2KBP3A	Program perbaikan gizi masyarakat Program pengendalian penyakit tidak menular

Keterangan:
 BI = Jumlah kelahiran dari wanita kelompok usia ke-1
 PI = Jumlah wanita kelompok usia ke-1
 I = kelompok usia 15-19 tahun

$$ASFR = \frac{BI}{PI} \times 1.000$$

$$\frac{\text{Jumlah kematian ibu melahirkan ibu meninggal karena 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dikonsversi}} \times 100.000$$

dalam kurun waktu yang sama

$$\frac{\text{Jumlah kematian bayi dalam waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dikonsversi}} \times 1.000$$

waktu yang sama

$$\frac{\text{Jumlah partisipasi penduduk usia 3 - 6 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 3 - 6 tahun}} \times 100$$

yang pernah/ sedang bersekolah

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 3 - 6 tahun yang dibabiskan}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang sudah sekolah atau telah berijazah}} \times 100$$

$$\frac{\text{Jumlah kunjungan penduduk ke perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk usia n - 1}} \times 100$$

PENJELASAN					PROGRAM	
SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
				$P_t = P_0 e^{rt}$ <p>Keterangan: P_t = Jumlah penduduk pada tahun t P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar r = laju pertumbuhan penduduk</p>	Dinas P2KBPSA	Program kesehatan reproduktual remaja
Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Persen	Perbandingan berat badan dan umur. Gizi buruk dan kurang jika mempunyai nilai Z score kurang dari 2 SD.	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk dan kurang dalam waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita dalam wilayah} \times 100}$ <p>atau</p> $\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk dan kurang}}{\text{Jumlah seluruh balita}} \times 100$	Dinas Kesehatan	
Terdendalinya faktor risiko penyakit tidak menular	Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	Persen	Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu) adalah pusat bimbingan pelayanan kesehatan yang tersedia dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan dalam rangka mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera (Depkes RI 2002).	$\frac{\text{Jumlah Posbindu PTM Purnama dan Mandiri}}{\text{Jumlah Posbindu PTM Aktif}} \times 100$	Dinas Kesehatan	
Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	Persentase pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan pelayanan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan	$\frac{\text{Jumlah dokumen SOP yang sesuai/dibuat}}{\text{Jumlah seluruh SOP yang harus dibuat}} \times 100$	Dinas Kesehatan	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLOOD
		Persen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	$\frac{\text{Jumlah persentase pelayanan yang masyarakat anggap baik}}{\text{Jumlah seluruh persentase pelayanan pada saat pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif}} \times 100$	Dinas Kesehatan	Program Pengabdian, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Program pembinaan upaya kesehatan dasar dan rujukan Program bina upaya kesehatan
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka	Persen	Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan.	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan}}{\text{Jumlah seluruh angkatan kerja}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program pelayanan pelatihan kerja
Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesehatan sosial	Persentase penyandang masalah kesehatan sosial yang dilayani	Persen	Penyandang masalah kesehatan sosial (Pakar Miskin, Penyandang Disabilitas, Orang Terlantar) yang mendapatkan pelayanan.	$\frac{\text{Jumlah PMKS (Pakar Miskin, Penyandang Disabilitas, Orang Terlantar) yang mendapat pelayanan}}{\text{Jumlah seluruh PMKS (Pakar Miskin, Penyandang Disabilitas, Orang Terlantar) yang terdaftar}} \times 100$	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Program pembinaan anak terlantar Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Penyandang Disabilitas/Cacat dan Eks Trauma

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	Penyelesaian kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah perlindungan dari perkosaan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penculikan; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.	$\frac{\text{Jumlah keberhasilan yang memenuhi kriteria untuk anak dan perempuan}}{\text{Jumlah seluruh korban}} \times 100$	Dinas PKKBP3A	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase Kelurahan Layak anak	Persen	Kelurahan layak anak adalah kelurahan yang memenuhi 31 indikator	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria layak anak}}{\text{Jumlah seluruh Kelurahan}} \times 100$	Dinas PKKBP3A	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	Persentase Pengurangan Risiko Bencana	Persen	Pengurangan Risiko Bencana meliputi manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiap-siagaan bencana	Wilayah terdampak bencana / Luas Wilayah X 100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas PUPR Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Pasca Bencana Program Tanggap Darurat Program Pengendalian Banjir Program Pasca Bencana
Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	Persen	Kemampuan Daerah untuk menanggulangi dampak bencana yang terjadi	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang ditanggulangi}}{\text{Seluruh Kejadian Bencana}} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program pembinaan dan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program peningkatan peran serta ke pemuda
Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga.	Persen	Pemuda adalah penduduk dengan usia 16-30 tahun. Pembinaan kepemudaan adalah pelatihan dan kegiatan sejenis nya yang berorientasi pada pembentukan karakter pemuda.	$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga}}{\text{Jumlah seluruh desa dan kelurahan}} \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program pembinaan dan penguatan olahraga Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
	Produksi komoditas prioritas padi sawah	Ton	Jumlah output atau hasil panen padi sawah dari luas lahan petani selama satu kali musim tanam.	$\text{Produksi Padi Sawah (Ton)} = \sum_{i=1}^n Q_i + Q_j + \dots + Q_n$	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Produksi komoditas prioritas padi ladang	Ton	Jumlah output atau hasil panen padi ladang dari luas lahan petani selama satu kali musim tanam.	$\text{Produksi Padi Ladang (Ton)} = \sum_{i=1}^n Q_i + Q_j + \dots + Q_n$	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Program Peningkatan Produktif Petanian/Perkebunan
	Produksi karet	ton	Jumlah output atau hasil panen karet dari luas lahan pekebun selama satu kali musim tanam.	$\text{Produksi Karet (Ton)} = \sum_{i=1}^n Q_i + Q_j + \dots + Q_n$	Dinas Perikanan dan Perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
	Produktivitas komoditas prioritas padi sawah	Kw/Ha	Produksi padi sawah per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusahatani padi sawah.	$\text{Produktivitas Padi Sawah (Kw/Ha)} = \frac{\text{Produksi Padi Sawah (Kw/Ha)}}{\text{Luas Lahan (Ha)}}$	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL		PENJELASAN		PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT		
	Produktivitas komoditas prioritas padi budang	Kw/ha	Produksi padi ladang per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusahatani padi ladang.	$\text{Produktivitas Padi Ladang} = \frac{\text{Produksi Padi Ladang (Kw/ha)}}{\text{Luas Lahan (Ha)}}$	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura		
	Produktivitas karet	Ton/Ha	Produksi karet per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusahatani karet.	$\text{Produktivitas Karet} = \frac{\text{Produksi Karet (Kw/ha)}}{\text{Luas Lahan (Ha)}}$	Dinas Perernakan dan Perkebunan		
	Persentase Kelompok tani madya	persen	Persentase Kelompok Tani Kelas Madya yang ada di Kabupaten Banjar selama kurun waktu 1 tahun	$\text{Kelompok Tani Kelas Madya} = \frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Madya (Kelompok Tani)}}{\text{Total Kelas Kelompok Tani (Kelompok)}}$	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
	Persentase luasan pertanian yang terlayani air irigasi	persen	Persentase luasan pertanian yang terlayani air irigasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun.	$\text{Persentase luasan pertanian yang terlayani air irigasi} = \frac{\text{Luas lahan pertanian terlayani air irigasi (Ha)}}{\text{Luas lahan pertanian Total (Ha)}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	
	Populasi sapi	(ekor)	Jumlah populasi sapi (ekor) yang ada di Kabupaten Banjar.	$\text{Produksi Sapi (Ekor)} = \sum_{i=1}^n Q_i + Q_j + \dots + Q_k$	Dinas Perernakan dan Perkebunan	Program Peningkatan Produktes Hasil Perernakan	
	Jumlah produksi ikan budidaya	ton	Jumlah output atau hasil panen ikan budidaya.	$\text{Produksi Ikan Budidaya (Ton)} = \sum_{i=1}^n Q_i + Q_j + \dots + Q_k$	Dinas Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
	Jumlah produksi ikan tangkap	ton	Jumlah output atau hasil panen ikan tangkap	$\text{Produksi Ikan Tangkap (Ton)} = \sum_{i=1}^n Q_i + Q_j + \dots + Q_k$	Dinas Perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	
	Jumlah konsumsi ikan	kg/kapita	Banyaknya konsumsi ikan per orang	$\text{Jumlah konsumsi ikan per orang} = \frac{\text{Jumlah konsumsi ikan (kg) / orang}}{\text{Jumlah konsumsi ikan (kg) / orang}}$	Dinas Perikanan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produktes Perikanan	
Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	persen	Persentase peningkatan jenis produk pengolahan hasil perkebunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun	$\text{Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun} = \frac{\text{Jumlah produksi olahan hasil perikanan selama kurun waktu 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah produksi olahan hasil perikanan selama kurun waktu 1 (satu) tahun}}$	Dinas Perernakan dan Perkebunan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produktes Pertanian/Perkebunan	
	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	Jumlah produksi olahan hasil perikanan selama kurun waktu 1 (satu) tahun	$\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/ Hari} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD} / 100$	Dinas Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Ketersediaan Energi	K.kal/ta p/hr	Ketersediaan pangan per kapita per hari berdasarkan kandungan kalori dan BDD (bagian yang Dapat Dimakan).	$\text{Ketersediaan pangan/Kapita/ Hari} \times \text{Kandungan Protein} \times \text{BDD} / 100$	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Peranian/Perkebunan)	
	Ketersediaan Protein	Gr/haap/hr	Ketersediaan pangan per kapita per hari berdasarkan kandungan protein x BDD (bagian yang Dapat Dimakan).	$\text{Ketersediaan pangan/Kapita/ Hari} \times \text{Kandungan Protein} \times \text{BDD}$	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Peranian/Perkebunan)	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	
	Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	Skor	Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah.	a) Energi Pangan = total energi yang dikonsumsi dari masing-masing bahan pangan. b) % energi = nilai energi setiap golongan / energi total untuk semua golongan. c) %Angka Kecukupan Energi = % energi / angka kecukupan energi (2000 kkal) x 100. d) angka kecukupan energi (AKE) jumlah bobot untuk setiap golongan pangan (padi-padi, umbi-umbian, pangan hewani). e) Skor aktual energi setiap golongan bahan pangan = %AKE setiap golongan bahan pangan X Bobot setiap golongan bahan pangan.	
Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi (kenalkan/ penurunan nilai realisasi PMDN)	persen	Pertumbuhan tahunan dari investasi atau bisnis dalam suatu periode dengan menggunakan metode perhitungan CAGR (compound annual growth rate) atau Laju Pertumbuhan Investasi Majemuk Tahunan.	$CAGR = \left(\frac{\text{Nilai Akhir (tahun ini)}}{\text{Nilai Awal}} \right)^{\frac{1}{\text{Waktu}}} - 1$	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	Opini akuntan publik	Opini	Opini Audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan.	Hasil Opini Audit: a) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). b) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion). c) Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). d) Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion). e) Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of opinion).	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Meningkatnya kualitas lingkungan	Tersedianya sistem pengangkutan sampah	persen	Persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah}}{\text{Jumlah total Penduduk}} \times 100\%$ <input type="checkbox"/>	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	Persentase Penyediaan RTH Publik	persen	Penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum	$\frac{\text{Jumlah produksi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$ Rata-rata 2% dari luas kabupaten	Program Pengelolaan RTH
	Kualitas air	Tercemar /tidak tercemar	Persyaratan yang menggambarkan kualitas dari air baku (air bersih), meliputi syarat fisika, kimia, biologis dan radiologis.	Dianalisis berdasarkan syarat fisika, kimia, biologis dan radiologis.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	PEMILIHAN		PROGRAM
				FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
	Kualitas udara	Tercemar /tidak tercemar	Kualitas udara yang dihitung berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi. Rentang ISPU: a. 0 - 50 = Baik; dimana tingkat kualitas udara tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan atau nilai estetik. b. 51 - 100 = Sedang; dimana tingkat kualitas udara tidak berpengaruh pada tumbuhan atau hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetik. c. 101 - 109 = Tidak Sehat; dimana tingkat kualitas udara kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan atau nilai estetik. d. 200 - 209 = Sangat Tidak Sehat; dimana tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi terpapar. e. 300 - Lebih = Berbahaya; dimana tingkat kualitas udara berbahaya dapat merugikan bagi kesehatan serbit.	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi. Rentang ISPU: a. 0 - 50 = Baik; b. 51 - 100 = Sedang; c. 101 - 109 = Tidak Sehat; d. 200 - 209 = Sangat Tidak Sehat; e. 300 - Lebih = Berbahaya.	Badan Lingkungan Hidup	
Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	Persentase koperasi aktif.	persen	Koperasi aktif yaitu koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan RAT atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah Koperasi yang terdaftar}} \times 100\%$	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	persen	batasannya antara usaha mikro dan usaha kecil adalah ; usaha mikro yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan usaha kecil yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil}}{\text{Jumlah total usaha mikro}} \times 100\%$		Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah
	Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat dikawasan transmigrasi	Persen	Pendapatan Perkapita pada kawasan transmigrasi tahun perhitungan dikurangi pendapatan perkapita dikawasan transmigrasi tahun sebelumnya	$\frac{\text{Pendapatan Perkapita Tahun Perhitungan} - \text{Pendapatan Perkapita Tahun Sebelumnya}}{\text{Pendapatan Perkapita Tahun Sebelumnya}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
	Jumlah nilai ekspor karet.	USD	Karet merupakan komoditas yang sangat potensial di Kab. Banjar, diharapkan dengan meningkatnya nilai ekspor karet dari Kab. Banjar dapat meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat khususnya para petani karet	Nilai ekspor produk karet secara keseluruhan dalam 1 (satu) tahun dengan mata uang dolar Amerika	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	Persentase Desa Berkembang	Persen	Status desa didasarkan pada klasifikasi dalam Indeks Desa Membangun yang dikibarkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	$\frac{\text{Jumlah Desa Berkembang}}{\text{Jumlah Desa di Kab. Banjar}} \times 100\%$	Dinas PMD	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Mengembangkan kewirausahaan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan wisatawan lokal	orang	peningkatan wisatawan lokal yang berkunjung pada sejumlah lokasi wisata yang ditentukan	$\frac{\text{Jumlah seluruh wisatawan lokal yang berkunjung pada tahun bersangkutan (t) dikurangi jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$	Dinas Budpar	Program Pengembangan Pariwisata

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN		PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	
	Peningkatan wisatawan mancanegara	orang	peningkatan wisatawan mancanegara yang berkunjung pada sejumlah lokasi wisata yang ditentukan	$\frac{\text{Jumlah seluruh wisatawan mancanegara yang berkunjung pada tahun bersangkutan (O)} - \text{Jumlah seluruh wisatawan pada tahun sebelumnya (O-1)}}{\text{Jumlah seluruh wisatawan sebelumnya (O-1)}} \times 100\%$	
Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Keselesaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	persen	Membandingkan pelaksanaan perjanjian pemanfaatan ruang yang diberikan pada tahun berjalan dengan rencana Tata Ruang Daerah yang sudah ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah/luas yang diberikan yang sesuai dengan rencana pemanfaatan}}{\text{Jumlah seluruh luas pemanfaatan}} \times 100\%$	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	persen	Jalan dengan kondisi mantap adalah jalan yang dapat dilewati oleh kendaraan roda 4 dengan kecepatan normal dan aman	$\frac{\text{Panjang jalan dengan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informasi;	Persentase -Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	persen	Jembatan dengan kondisi baik adalah jembatan yang dapat dilewati dengan aman oleh kendaraan maupun orang-orang sesuai dengan kelas dan tipe jembatan	$\frac{\text{Jumlah jembatan dengan kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh jembatan}} \times 100\%$	
Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informasi;	Persentase pengujian kendaraan bermotor	persen	terlaksananya pengujian terhadap kelayakan angkutan umum sesuai dengan standar	$\frac{\text{Jumlah angkatan umum yang diuji}}{\text{Jumlah seluruh angkutan umum}} \times 100\%$	Program Peningkatan Kelengkapan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Meningkatnya infrastruktur perhubungan	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	persen	Berfungsinya terminal dan dermaga yang menjadi kewenangan kabupaten.	$\frac{\text{Jumlah terminal dan dermaga yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah seluruh terminal dan dermaga}} \times 100\%$	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;	Cakupan layanan internet dan telepon seluler	persen	Berfungsi dengan baik dimaksudkan yaitu terminal dan dermaga dapat dimanfaatkan untuk memuat dan menurunkan orang dan barang serta sebagai tempat istirahat	$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang dapat mengakses layanan internet dan telepon seluler}}{\text{Jumlah seluruh desa dan kelurahan}} \times 100\%$	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;	Cakupan rumah layak huni	persen	Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi standar Kementerian PUPR	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$	Program Kerjasama Informasi Dengan Massa Media
Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Rate-rata nilai prestasi kerja SKPD	persen	Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan air minum	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Program Pengembangan Kuerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
	Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	persen	Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin yaitu SKPD dibandingkan dengan jumlah seluruh SKPD yang ada di Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100\%$	Program pembinaan dan pengembangan aparatur
	Persentase Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	persen	Jumlah Pejabat yang memiliki kompetensi yaitu kemampuan sesuai dengan jenjang, kepangkatan, pendidikan, pengalaman dan lainnya dalam menjalankan jabatan yang diberikan dibandingkan jumlah jabatan yang ada dalam seluruh SOTK perangkat daerah di Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah kompetensi pejabat yang sesuai dengan jabatannya}}{\text{Jumlah/jabatan yang ada}} \times 100\%$	

SASARAN	PEJELASAN					PROGRAM
	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
	Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	persen	Jumlah kasus hukum PNS yaitu bantuan dari LKBB terhadap PNS yang sedang menghadapi masalah hukum dibandingkan dengan keseluruhan jumlah PNS yang bermasalah hukum	$\frac{\text{Jumlah kasus hukum PNS yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus hukum PNS}} \times 100\%$		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pembinaan Kelembagaan
	Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	persen	Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan dibandingkan dengan jenis diklat yang dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan diklat	$\frac{\text{Jenis diklat yang ada}}{\text{Jenis diklat yang dibutuhkan}} \times 100\%$		Program pendidikan kecimasan
	Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	persen	Jumlah aparatur desa yakni perangkat desa yang terdiri dari Pambakal, selades, keur, ka RT yang memiliki kemampuan manajerial dan pengetahuan dalam menjalankan tugasnya dibandingkan dengan jumlah aparatur desa se Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dengan hasil baik}}{\text{Jumlah aparatur desa se Kab. Banjar}} \times 100\%$	Dinas PMD	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	persen	realisasi pelaksanaan kegiatan baik secara keuangan maupun fisik yang dilaporkan setiap SKPD dibandingkan dengan rencana yang akan dicapai	$\frac{\text{Realisasi pelaksanaan kegiatan (Juli dan keunggab)}}{\text{Perencanaan}} \times 100\%$	BAPPELITBANG	Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
	Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	persen	Sebagaimana Permendagri 54 Tahun 2010 : Harus ada sinkronisasi antar dokumen baik tingkat kabupaten maupun SKPD perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah juga rencana tahunan	$\frac{\text{Jumlah total program-program yang ditetapkan dalam RRPD}}{\text{Jumlah total program-program yang telah ditetapkan dalam RRPD}} \times 100\%$	BAPPELITBANG	Program perencanaan pembangunan daerah
	Persentase hasil musrenbang desa/keurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RRPD	persen	Perencanaan topdown merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Bappeda sebagai lembaga perencanaan. Oleh karenanya, dokumen perencanaan dan penganggaran harus mencerminkan aspirasi masyarakat	$\frac{\text{Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam RRPD}}{\text{Total Usulan Masyarakat}} \times 100\%$	BAPPELITBANG	Program perencanaan pembangunan daerah
	Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	persen	Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketersediaan data statistik yang terupdate merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan	$\frac{\text{SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	BAPPELITBANG	Program perencanaan pembangunan daerah
	Persentase pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD	persen	Jumlah pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD dibandingkan dengan Jumlah seluruh SKPD Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah pengguna website domain dan sub domain SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	DISKOMINFOTISAN	Program pengembangan data/informasi Program perencanaan pembangunan ekonomi
	Persentase cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran	persen	Jumlah bayi lahir yang berakte kelahiran di Kab. Banjar dibandingkan jumlah seluruh kelahiran yang ada di Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah kelahiran}} \times 100\%$	DISDUKCAPIL	Program keserasian kependudukan
	Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	persen	Jumlah penduduk yang memiliki KTP dan KIA dibandingkan keseluruhan jumlah penduduk di Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah Penduduk BerKTP + KIA}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$		Program penataan administrasi kependudukan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL		PENJELASAN		PROGRAM
			UMAIM / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA / UNIT TERKAIT		
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gelobak masyarakat)	persen	Jumlah mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat	Jumlah mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat	$\frac{\text{Jumlah mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat}}{\text{Jumlah penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat}} \times 100\%$	BAKESBANGPOL	
	Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	persen	Jumlah Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan DPRD Kab. Banjar dibandingkan dengan Jumlah Produk hukum yang ditandatangani.	Jumlah Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan DPRD Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan DPRD Kab. Banjar}}{\text{Jumlah Produk Hukum}} \times 100\%$	SET DPRD	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah
	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	persen	Jumlah rapat DPRD Kab. Banjar yang dilaksanakan tepat waktu dibandingkan dengan keseluruhan rapat DPRD Kab. Banjar yang dilaksanakan	Jumlah rapat DPRD Kab. Banjar yang dilaksanakan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah rapat DPRD Kab. Banjar yang dilaksanakan tepat waktu}}{\text{Jumlah rapat DPRD Kab. Banjar}} \times 100\%$		
	Persentase peraturan yang dibuat	persen	Persentase peraturan yang dibuat	Jumlah Perda yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Perda yang ditetapkan}}{\text{Jumlah prototipe}} \times 100\%$	SETDA (BAG. HUKUM)	Program penataan peraturan perundang-undangan
	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	persen	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan	$\frac{\text{Jumlah Linmas Desa/Kelurahan}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100\%$	SATPOL-PP	Program peningkatan kesamun dan kenyamanan lingkungan
	Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan keturahan	persen	Jumlah FKDM /FKUB tingkat kab/kec/desa dan keturahan yang aktif dibandingkan dengan Jumlah kab/kec/desa dan keturahan di Kab. Banjar	Jumlah FKDM /FKUB tingkat kab/kec/desa dan keturahan yang aktif	$\frac{\text{Jumlah FKDM /FKUB tingkat kab/kec/desa dan keturahan yang aktif}}{\text{Jumlah kab/kec/desa dan keturahan}} \times 100\%$	BAKESBANGPOL	Program kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat
	Persentase SPM yang terpenuhi	persen	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib yang terpenuhi dibandingkan dengan Jumlah SPM	Jumlah SPM yang terpenuhi	$\frac{\text{Jumlah SPM yang terpenuhi}}{\text{Jumlah SPM}} \times 100\%$	SETDA (BAG. ORGANISASI)	Program peningkatan kapasitas dan penataan kelembagaan daerah
	Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	persen	Jumlah SKPD yang sesuai dengan beban kerja	Jumlah SKPD yang sesuai dengan beban kerja	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang sesuai dengan beban kerja}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$		
	Persentase kelengkapan administrasi desa	persen	Administrasi Desa dilibatkan lengkap apabila telah memenuhi 60% kelengkapan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah desa dengan Administrasi Desa Lengkap / Jumlah Seluruh Desa x 100		Dinas PMD	Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti	persen	Merupakan perbandingan antara pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan yang masuk yang ditindaklanjuti dengan seluruh pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan yang masuk	Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan yang telah ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan}} \times 100\%$	DPMPTSP	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	angka	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perijinan)	angka IKM pelayanan perijinan			Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	
						Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	persen	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan yakni PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan)	Nilai SKM PATEN	SETDA (BAG. PEMERINTAHAN)	Program penunjang penyeleng-garaan pemerintahan dan pembangunan

BUPATI BANJAR,

H. KHALILURRAHMAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. KHALILURRAHMAN
Jabatan : BUPATI BANJAR

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target yang menjadi bagian kinerja rencana jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Marabau, Oktober 2017
Bupati Banjar,

H. KHALILURRAHMAN



INDIKATOR RPJMD KABUPATEN BANJAR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2017		
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	Persentase Kawasan Santri Yang Diberdayakan	Persen	20		
		Penurunan Jumlah Kasus Kriminal	Kasus	580		
		Jumlah Dana Badan Amil Zakat yang tersalurkan	Rp	24.000.000		
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik	Persentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Qur'an	Persen	92,00		
3	Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal	Penurunan Jumlah Pelanggaran PERDA yang bernuansa kearifan lokal	Kasus	12		
4	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI /SDLB	Persen	96,09		
		APM SMP/ MTs/SMPLB	Persen	63,46		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD/MI /SDLB	Persen	120,25		
		APK SMP/ MTs/SMPLB	Persen	89,63		
		Angka Putus Sekolah (Apts) APtS SD/MI /SDLB	Persen	0,27		
		APtS SMP/ MTs/SMPLB	Persen	0,90		
5	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	Angka rata- rata lama sekolah	Tahun	7,03		
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	65,66		
		Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah	Persen	3,40		
		6	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	Persen	80
				Jumlah kegiatan kebudayaan yang bemuansa religi	Keg	7
7	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kh	187,9		
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	1.000 Kh	13		
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Persen	42		
		Angka laju pertumbuhan penduduk	Persen	2,06		
8	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	Persen	27,76		
9	Terkendalnya faktor risiko penyakit tidak menular	Persentase pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu PTM) Pumama dan Mandiri	Persen	>15		
10	Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	595		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	75		

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2017
		(IKM)		
11	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka	Persen	2,55
12	Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	Persen	70
13	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	70
		persentasi kelurahan layak anak	Persen	7.7
14	Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	Persen	0,05
		Persentase Kejadian Bencana yg tertanggulangi	Persen	100
15	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	Persentasi Pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	Persen	0,60
16	Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas olahraga	Persen	56,86
17	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	Produksi komoditas prioritas padi sawah (ton)	Ton	242.752
		Produksi komoditas prioritas padi ladang (ton)	Ton	28.047
		Produksi karet (ton)	Ton	19160,99
		Produktifitas komoditas prioritas padi sawah kw/ha	Kw/Ha	43
		Produktifitas komoditas prioritas padi ladang kw/ha	Kw/Ha	30
		Produktifitas karet (kg/ha)	Kg/Ha	1163
		Persentase Kelompok tani madya (%)	Persen	3,03
		Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi (%)	Persen	80
		Populasi sapi (ekor)	(Ekor)	16.950
		Jumlah produksi ikan budidaya (ton)	Ton	50.000
		Jumlah produksi ikan tangkap (ton)	Ton	8.228
		Jumlah konsumsi ikan kg/kapita	Kg/Kapita	51
18	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	Persen	30
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Ton	710
19	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Ketersediaan Energi	K.Kal/Kap/Hr	3.610
		Ketersediaan Protein	Gr/Kap/Hr	101
		Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	Skor	90
20	Meningkatnya investasi daerah	Persentasi Pertumbuhan Investasi (Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN)	Persen	84

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2017
21	Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	Opini Akuntan Publik	Opini	WTP
22	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Sampah Yang Terolah Di TPA	Persen	100
		Rasio Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen Dari Luas Kawasan Perkotaan.	Persen	1,59
		Indeks Kualitas Air	Indeks	33
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	83
23	Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	Persentase koperasi aktif	Persen	63,5
		Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Persen	0,75
		Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi	Persen	20
		Jumlah nilai ekspor karet	Rupiah	504.447.929,32
		Persentase desa berkembang	Persen	37,18
24	Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan wisatawan lokal	Orang	1.919.428
		Peningkatan wisatawan mancanegara	Orang	5
25	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persen	55
26	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	68,69
		Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	88,37
27	Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;	Cakupan Layanan internet dan telepon seluler	Persen	71
28	Meningkatnya infrastuktur perhubungan	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	Persen	100
		Persentase pengujian kendaraan bermotor	Persen	81,25
29	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;	Cakupan rumah layak huni	Persen	96,52
30	Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;	Cakupan air minum	Persen	61,03
31	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Rata - Rata Nilai Prestasi Kerja SKPD	Persen	100
		Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	Persen	0,12
		Persentase penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	Persen	100
		Persentase kasus hukum PNS	Persen	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2017
		yang ditangani		
		Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan	Persen	100
		Persentase Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	Persen	42,24
32	Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	Persen	75
		Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	Persen	100
		Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	Persen	40
		Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	Persen	40
		Persentase pengguna Website Domain dan Sub Domain SKPD	Persen	72,73
		Persentase Cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran	Persen	62
		Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	Persen	95
		Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	Persen	42,86
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	1
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3
		Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	Persen	80
		Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	60,61
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi	Persen	100
		Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	Opini BPK	WTP
		Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah	Persen	98
		Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	Persen	39,70
		Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah	Persen	88.36

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2017
		Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	Persen	97,28
		Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gejala masyarakat	Persen	100
		Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	Persen	100
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	Persen	100
		Persentase peraturan yang dibuat	Persen	70
		Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	Persen	85
		Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	Persen	33,15
33	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Persentase SPM yang terpenuhi	Persen	85
		Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	Persen	50
		Persentase Kelengkapan Administrasi Desa	Persen	42,24
34	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan public yang telah ditindaklanjuti	Persen	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,7
		Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Persen	20

No.	Sasaran	Anggaran Per Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Anggaran
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	955.798.603,00	Persentase Kawasan santri yang diberdayakan	715.798.603
			Penurunan Jumlah kasus kriminal	
			Jumlah dana BAZ yang tersalurkan	240.000.000
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik	7.450.812.300,00	Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al-Qur'an	7.450.812.300
3	Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal	91.200.000,00	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda yang bermuansa kearifan lokal	91.200.000,00
4	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	94.656.852.326,00	Angka Partisipasi Murni (APM)	90.423.603.250
			APM SD / MI / SDLB	
			APM SMP / MTs / SMPLB	
			Angka Partisipasi Kasar (APK)	
			APK SD / MI / SDLB	
			APK SMP / MTs / SMPLB	
			Angka Putus Sekolah (APtS)	
			APtS SD / MI / SDLB	
			APtS SMP / MTs / SMPLB	
			Angka rata-rata lama sekolah	
			Angka Partisipasi Kasar PAUD	4.233.249.076
5	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	370.130.000,00	Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah	370.130.000
6	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	1.756.323.328,00	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	887.215.328
			Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bermuansa religi	869.108.000
7	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	5.323.584.000,00	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	4.844.514.000
			Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	59.710.000
			Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	150.726.100
			Angka laju pertumbuhan penduduk	268.633.900
8	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	1.659.695.850,00	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	1.659.695.850
9	Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular	776.100.000,00	Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	776.100.000
10	Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	82.603.674.726,00	Persentase Pemenuhan Standar Operasional Prosedur	82.603.674.726

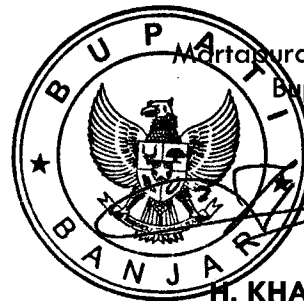
No.	Sasaran	Anggaran Per Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Anggaran
			(SOP)	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
11	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	785.823.000,00	Angka Pengangguran Terbuka	785.823.000,00
12	Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial	4.965.425.895,00	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	4.965.425.895
13	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	112.160.000,00	Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	81.775.000,00
			Persentase Kelurahan Layak anak	30.385.000,00
14	Meningkatnya mitigasi bencana	1.404.660.000,00	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	879.760.000,00
			Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	524.900.000,00
15	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	1.731.552.945,00	Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	1.731.552.945
16	Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	2.006.981.180,00	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga.	2.006.981.180
17	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	32.336.147.971,00	Produksi karet	254.705.760,00
			Produksi komoditas prioritas padi sawah	4.069.344.360
			Produksi komoditas prioritas padi ladang	
			Produktifitas komoditas prioritas padi sawah	
			Produktifitas komoditas prioritas padi ladang	
			Produktifitas karet	254.705.760,00
			Persentase Kelompok tani madya	3.649.081.130
			Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi	22.218.667.000
			Populasi sapi	1.107.732.120
			Jumlah produksi ikan budidaya	521.623.341,00
			Jumlah produksi ikan tangkap	154.381.000,00
			Jumlah konsumsi ikan	105.907.500,00
18	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	349.804.380,00	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	243.896.880,00
			Jumlah produksi olahan hasil perikanan	105.907.500,00
19	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan	1.992.435.000,00	Ketersediaan Energi	664.145.000,00
			Ketersediaan Protein	664.145.000,00

No.	Sasaran	Anggaran Per Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Anggaran	
	masyarakat		Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	664.145.000	
20	Meningkatnya investasi daerah	1.172.845.000,00	Pertumbuhan investasi (Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN)	1.172.845.000	
21	Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	685.260.000	Opini akuntan publik	685.260.000	
22	Meningkatnya kualitas lingkungan	3.853.318.800,00	Persentasi sampah yang terolah di TPA	4.572.513.480	
			Rasio luasan RTH Publik sebesar 20persen dari luas kawasan perkotaan		
			Kualitas air		3.853.318.800
			Kualitas udara		
23	Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	2.699.288.951,00	Persentasi koperasi aktif.	282.089.000	
			Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	436.640.000	
			Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat dikawasan transmigrasi	63.030.500	
			Jumlah nilai ekspor karet.	203.000.000	
			Persentase Desa Berkembang	1.714.529.451	
24	Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	2.141.506.100,00	Persentase peningkatan wisatawan lokal	2.141.506.100,00	
			Persentase peningkatan wisatawan mancanegara		
25	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	4.526.392.260,00	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	4.526.392.260	
26	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	87.197.329.000,00	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	58.742.407.700	
			Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	28.454.921.300	
27	Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;	769.510.263,00	Persentase pengujian kendaraan bermotor	769.510.263	
28	Meningkatnya infrastuktur perhubungan	542.811.000,00	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	297.161.000	
			Cakupan layanan internet dan telepon seluler	245.650.000	
29	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;	9.358.897.700,00	Cakupan rumah layak huni	9.358.897.700	
30	Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;	12.433.595.060,00	Cakupan air minum	12.433.595.060	
31	Terwujudnya Sumber Daya	5.524.361.990,00	Persentase Rata-rata nilai	328.759.800	

No.	Sasaran	Anggaran Per Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Anggaran
	Aparatur yang profesional dan handal		prestasi kerja SKPD	
			Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	172.397.600
			Persentase Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	1.747.367.300
			Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	175.260.370
			Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	2692216920
			Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	408.360.000
32	Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	36.920.149.263,00	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	852.903.080
			Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	389.848.300
			Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	1.742.536.300
			Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	965.938.100
			Persentase pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD	1.279.328.400
			Persentase cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran	1.638.785.620
			Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	2.395.676.640
			Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	261.891.000
			Tingkat Maturitas SPIP	2.359.700.000,00
			Tingkat Kapabilitas APIP	430.050.000,00
			Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	36.000.000,00
			Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit	3.624.851.600

No.	Sasaran	Anggaran Per Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Anggaran
			pengaduan masyarakat yang terintegrasi	
			Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	9.447.457.680
			Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah	3.665.041.100
			Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	622.325.000
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	828.570.000
			Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	1.470.480.000
			Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gejala masyarakat	890.606.000
			Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	1.541.000.000
			Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	556.000.000
			Persentase peraturan yang dibuat	1.253.618.000
			Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	443.377.500
			Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	224.164.943
33	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	1.672.264.222,00	Persentase SPM yang terpenuhi	315.372.000
			Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	767.496.000
			Persentase kelengkapan administrasi desa	589.396.222
34	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.364.362.120,00	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti	100.060.000
			Indeks Kepuasan masyarakat	477.915.120
			Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan	786.387.000

No.	Sasaran	Anggaran Per Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Anggaran
			Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	
TOTAL BELANJA LANGSUNG		416.763.566.713		416.763.566.713



Martapura, Oktober 2017
Bupati Banjar,

H. KHALILURRAHMAN